



ISSN: 2089-3515

Profil
Perempuan
INDONESIA

2019



KERJASAMA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN
BADAN PUSAT STATISTIK





Profil
Perempuan
INDONESIA

2019

PROFIL PEREMPUAN INDONESIA 2019

ISSN: 2089-3515

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Halaman: xviii+216 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik

Diterbitkan oleh:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dicetak oleh:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

Sambutan

Keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang memiliki peranan yang sangat berarti dalam upaya pemerataan pembangunan. Kesetaraan akses bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang merupakan suatu capaian yang menjadi salah satu tujuan dalam pembangunan. Kesetaraan akses yang dimaksud antara lain dalam bidang pendidikan, kesehatan, dunia kerja, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam bidang pendidikan, Susenas Tahun 2018 menunjukkan bahwa angka melek huruf laki-laki masih lebih tinggi daripada perempuan, yaitu sebesar 97,33% untuk laki-laki dan 93,99% untuk perempuan. Dalam bidang kesehatan, jumlah perempuan yang memiliki akses jaminan kesehatan adalah sebesar 64,47%. Selain itu, angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdasarkan Sakernas 2018 menunjukkan selisih yang cukup tinggi yaitu laki-laki sebesar 82,69% dan perempuan sebesar 51,88%. Data dan informasi yang tersedia dalam buku ini akan lebih banyak lagi menggambarkan kondisi perempuan dalam angka yang dapat dijadikan referensi dalam menentukan arah kebijakan bagi kesetaraan dalam pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Pada tahun 2019-2024 ini, fokus pembangunan terhadap perempuan dan perlindungan anak yang akan dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah: 1) Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan; 2) Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/ pengasuhan anak; 3) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4) Penurunan pekerja anak; dan 5) Pencegahan perkawinan anak.

Untuk itu, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Kepala Badan Pusat Statistik dan jajaran, serta seluruh tim yang telah bekerja sama dalam penyusunan buku profil perempuan Indonesia ini.



Jakarta, Desember 2019
Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

I Gusti Ayu Bintang Darmawati

Kata Pengantar


Dalam pembangunan, perempuan dan laki-laki harus selalu mendapat akses yang sama, dapat berpartisipasi dan bersama-sama mempunyai kesempatan dalam penetapan keputusan dan menikmati manfaat pembangunan secara bersama-sama. Gambaran tentang perempuan di berbagai bidang dalam bentuk data dan informasi sangat diperlukan untuk menunjang kebijakan dan program pembangunan.

Data profil perempuan dalam publikasi ini bertujuan untuk melihat keadaan perempuan Indonesia dengan menyajikan *series* data terpilah hasil Susenas tahun 2018 yang dapat menginformasikan tentang kondisi perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Publikasi ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Sumber data lain hasil survei yang dilaksanakan oleh BPS antara lain Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2018 dan kompilasi data dari kementerian dan lembaga negara lain juga digunakan dalam publikasi ini.

Besar harapan publikasi ini memberi manfaat untuk pengambil kebijakan. Kepada tim yang telah menyusun publikasi ini disampaikan penghargaan setinggi-tingginya. Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi yang akan datang.



Jakarta, Desember 2019
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia



Dr. Suhariyanto

Organisasi

Penulisan

Pengarah :

**I Gusti Ayu Bintang Darmawati
Pribudiarta Nur Sitepu
Margo Yuwono**

Penanggung Jawab :

**Gantjang Amannullah
Fakih Usman**

Editor :

**Nur Sahrizal
Piping Setyo Handayani
Idha Sahara
Amiek Chamami
Sylvianti Angraini
Siska Ayu Tiara Dewi
Anugrah Pambudi Raharjo**

Penulis :

**Gaib Hakiki
Sugeng Supriyanto
Asnita Ulfah
Dwi Prastiwi
Widya Larasati
Maarif Ibnu Khoer**

Pengolah Data :

**Dhani Arief Hartanto
Hasti Amanda Ilmi Putri**

Sekretariat :

**Lucia Yulianti
Nadhira Aulia Rachman**

Daftar Isi

SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ORGANISASI PENULISAN	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii

01. CAPAIAN PEREMPUAN INDONESIA DALAM PENDIDIKAN

1. Latar Belakang	03
2. Tinjauan Pustaka	05
2.1. Angka Melek Huruf	05
2.2. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	05
2.3. Angka Partisipasi Kasar	05
2.4. Angka Partisipasi Murni	06
2.5. Rata-rata Lama Sekolah	06
3. Pembahasan	06
3.1. Kemampuan Membaca dan Menulis	06
3.2. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	09
3.3. Angka Partisipasi Kasar	12
3.4. Angka Partisipasi Murni	14
3.5. Rata-rata Lama Sekolah	16

02. KUALITAS KESEHATAN PEREMPUAN INDONESIA

1. Latar Belakang	21
2. Tinjauan Pustaka	22
2.1. Keluhan Kesehatan	22
2.2. Angka Kesakitan	22
2.3. Jaminan Kesehatan	22
2.4. PBI dan Non PBI	22
2.5. Fasilitas Kesehatan	23
2.6. Tenaga Kesehatan	23
2.7. Penggunaan KB	23
2.8. Air Minum Layak	23
3. Pembahasan	23
3.1. Kepemilikan Jaminan Kesehatan	23
3.2. Tempat Melahirkan	28
3.3. Penolong Persalinan	30
3.4. Penggunaan KB	32
3.5. Akses Air Minum Layak	34

03. PERAN PEREMPUAN DALAM DUNIA KERJA

1. Latar Belakang	39
2. Tinjauan Pustaka	41
3. Pembahasan	43
3.1. Kegiatan Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas	43
3.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	44
3.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	45
3.4. Penduduk yang Bekerja	47
3.4.1. Tingkat Pendidikan	47
3.4.2. Status Perkawinan Pekerja	48
3.4.3. Jam Kerja	49
3.4.4. Lapangan Pekerjaan Utama	51
3.4.5. Status Pekerjaan Utama	52
3.4.6. Rata-rata Upah	53
3.4.7. Pekerja Sektor Informal dan Sektor Formal	57
3.4.8. Pengalaman Bekerja Pengurus Rumah Tangga	60
3.5. Pekerja Migran Indonesia (PMI)	60

04. AKSES TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEREMPUAN INDONESIA

1. Latar Belakang	65
2. Tinjauan Pustaka	66
3. Pembahasan	68
3.1. Penggunaan Telepon Seluler (HP)	68
3.2. Kepemilikan Telepon Seluler (HP)	70
3.3. Pengeluaran Pulsa HP	72
3.4. Penggunaan Komputer	74
3.5. Penduduk Mengakses Internet	76
3.6. Pengeluaran Biaya Internet	78

DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN TABEL	85
TABEL A - KEPENDUDUKAN	87
TABEL B - KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA	95
TABEL C - PENDIDIKAN	115
TABEL D - KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA (KB)	131
TABEL E - KETENAGAKERJAANI	145
TABEL F - PERUMAHAN	175
TABEL G - AKSES INTERNET	191
TABEL H - SEKTOR PUBLIK	197
TABEL I - SOSIAL EKONOMI LAINNYA	205

Daftar Tabel

01. CAPAIAN PEREMPUAN INDONESIA DALAM PENDIDIKAN

Tabel 1.1.	APK menurut Daerah Tempat Tinggal, Kuintil Pengeluaran, dan Jenis Kelamin, 2018	13
Tabel 1.2.	APM menurut Daerah Tempat Tinggal, Kuintil Pengeluaran, dan Jenis Kelamin, 2018	15

02. KUALITAS KESEHATAN PEREMPUAN INDONESIA

Tabel 2.1.	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal dan Kelompok Pengeluaran, 2018	26
Tabel 2.2.	Persentase Perempuan yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir menurut Karakteristik dan Tempat Melahirkan, 2018	28
Tabel 2.3.	Persentase Perempuan yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir menurut Karakteristik dan Penolong Persalinan, 2018	30
Tabel 2.4.	Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Status Pemakaian Alat/Cara KB, Daerah Tempat Tinggal, dan Kelompok Pengeluaran, 2018	32
Tabel 2.5.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak menurut Jenis Kelamin KRT, Daerah Tempat Tinggal dan Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga, 2018	34

03. PERAN PEREMPUAN DALAM DUNIA KERJA

Tabel 3.1.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama Seminggu yang Lalu, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2018	44
Tabel 3.2.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018	47

Tabel 3.3.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, 2018	49
Tabel 3.4.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Jumlah Jam Kerja, 2018	50
Tabel 3.5.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur, dan Jumlah Jam Kerja, 2018	50
Tabel 3.6.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan 17 Golongan Lapangan Pekerjaan Utama Seminggu yang Lalu, 2018	51
Tabel 3.7.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Status Pekerjaan Utama, 2018	53
Tabel 3.8.	Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai selama Sebulan menurut Tingkat Pendidikandan Jenis Kelamin, 2018	55
Tabel 3.9.	Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/ Pegawai selama Sebulan menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2018	56
Tabel 3.10.	Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai selama Sebulan menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin, 2018	57
Tabel 3.11.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Sektor Pekerjaan, 2018	58
Tabel 3.12.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu yang Lalu menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Sektor Pekerjaan, 2018	59
Tabel 3.13.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Sektor Pekerjaan, 2018	60
Tabel 3.14.	Banyaknya Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh BNP2TKI menurut Jenis Kelamin, 2014-2018	61

04. AKSES TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEREMPUAN INDONESIA

Tabel 4.1.	Rata-rata Pengeluaran untuk Pulsa HP per Kapita Sebulan menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin KRT, 2018	73
Tabel 4.2.	Rata-rata Pengeluaran untuk Biaya Internet per Kapita Sebulan menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin KRT, 2018	78

Daftar Gambar

01. CAPAIAN PEREMPUAN INDONESIA DALAM PENDIDIKAN

Gambar 1.1.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2018	7
Gambar 1.2.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Pengeluaran, 2018	8
Gambar 1.3.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan yang Ditamatkan Kepala Rumah Tangga, 2018	8
Gambar 1.4.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018	10
Gambar 1.5.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018	10
Gambar 1.6.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin, Kelompok Pengeluaran dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018	11
Gambar 1.7.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2018	16
Gambar 1.8.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Kuintil Pengeluaran, 2018	17
Gambar 1.9.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Kepala Rumah Tangga, 2018	18

02. KUALITAS KESEHATAN PEREMPUAN INDONESIA

Gambar 2.1.	Persentase Perempuan yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan yang Sakit Selama Sebulan Terakhir, 2014-2018	24
Gambar 2.2.	Persentase Penduduk menurut Kepemilikan Jaminan Kesehatan, 2016-2018	25
Gambar 2.3.	Persentase Perempuan yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Jenis Jaminan Kesehatan, 2018	27
Gambar 2.4.	Persentase Perempuan yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Provinsi, 2018	27

Gambar 2.5.	Persentase Perempuan yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup di Fasilitas Kesehatan dalam Dua Tahun Terakhir menurut Provinsi, 2018	29
Gambar 2.6.	Persentase Perempuan yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup oleh Tenaga Kesehatan dalam Dua Tahun Terakhir menurut Provinsi, 2018	31
Gambar 2.7.	Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Provinsi dan Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan, 2018	33
Gambar 2.8.	Persentase Perempuan Usia 15 - 49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Provinsi dan Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan, 2018	33
Gambar 2.9.	Persentase Rumah Tangga yang Dikepalai Perempuan yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak menurut Provinsi, 2018	35

03. PERAN PEREMPUAN DALAM DUNIA KERJA

Gambar 3.1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2018	45
Gambar 3.2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin, 2018	46
Gambar 3.3.	Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai selama Sebulan menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2018	54

04. AKSES TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEREMPUAN INDONESIA

Gambar 4.1.	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel menurut Jenis Kelamin, 2018	69
Gambar 4.2.	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel menurut Kuintil Pengeluaran, 2018	69
Gambar 4.3.	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Memiliki Telepon Seluler (HP)/Nirkabel menurut Jenis Kelamin, 2018	71
Gambar 4.4.	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Memiliki Telepon Seluler (HP)/Nirkabel menurut Kuintil Pengeluaran, 2018	71

Gambar 4.5.	Rata-rata Pengeluaran untuk Pulsa HP per Kapita Sebulan menurut Kuintil Pengeluaran dan Jenis Kelamin KRT, 2018	73
Gambar 4.6.	Rata-rata Pengeluaran untuk Pulsa HP per Kapita Sebulan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin KRT, 2018	74
Gambar 4.7.	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer menurut Jenis Kelamin, 2018	75
Gambar 4.8.	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer menurut Kuintil Pengeluaran, 2018	76
Gambar 4.9.	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet menurut Jenis Kelamin, 2018	77
Gambar 4.10.	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet menurut Kuintil Pengeluaran, 2018	77
Gambar 4.11.	Rata-rata Pengeluaran untuk Biaya Internet per Kapita Sebulan menurut Kuintil Pengeluaran dan Jenis Kelamin KRT, 2018	79
Gambar 4.12.	Rata-rata Pengeluaran untuk Biaya Internet per Kapita Sebulan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin KRT, 2018	80

RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUSIA 15 TAHUN KE ATAS



PEREMPUAN

PERKOTAAN
9,31 TAHUN

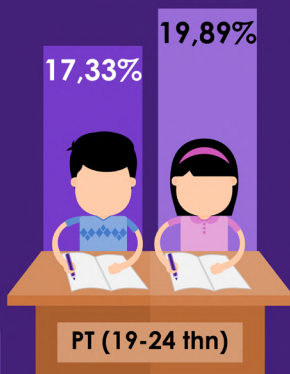
PERDESAAN
6,95 TAHUN

PEREMPUAN berumur 15 tahun ke atas, rata-rata bersekolah hingga kelas **2 SMP**.

Di **PERKOTAAN**, perempuan berumur 15 tahun ke atas, rata-rata bersekolah hingga kelas **1 SMA**.

Sementara itu, di **PERDESAAN** rata-rata bersekolah hingga kelas **6 SD atau 1 SMP**.

ANGKA PARTISIPASI MURNI PERGURUAN TINGGI



Sekitar **2** dari **10** penduduk **PEREMPUAN** berusia **19-24 Tahun**, **MASIH BERSEKOLAH** pada jenjang **PERGURUAN TINGGI**.

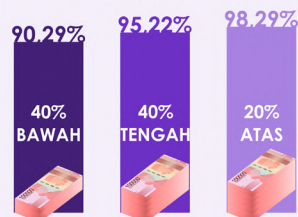
Angka Partisipasi Murni **PEREMPUAN** pada jenjang Perguruan Tinggi, **LEBIH TINGGI** daripada **LAKI-LAKI**.

ANGKA MELEK HURUF PENDUDUK BERUSIA 15 TAHUN KE ATAS

Angka Melek Huruf Laki-laki, **LEBIH TINGGI** daripada Perempuan



Perempuan pada golongan pengeluaran yang lebih tinggi memiliki **Angka Melek Huruf** yang lebih tinggi daripada golongan pengeluaran lain di bawahnya.



Sumber: Susenas, 2018



Capaian Perempuan Indonesia dalam Pendidikan



1. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 300 kelompok etnis yang tersebar di seluruh wilayah, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam perekonomian dunia. Indonesia telah menunjukkan kemajuan perekonomian yang baik sejak krisis yang terjadi pada akhir 1990-an. Hal ini ditunjukkan dengan terus meningkatnya PDB dan prospek ekonomi Indonesia yang tetap positif ditengah ketidakpastian perekonomian global. Selain itu, sebagai negara yang memiliki kepadatan penduduk terbesar ke empat di dunia, Indonesia juga menjadi negara terbesar ke-10 dalam hal paritas daya beli sekaligus merupakan anggota G-20 (World Bank, 2019).

Dalam rangka mencapai potensi ekonomi yang dimiliki secara penuh tersebut, Indonesia

masih harus menyelesaikan berbagai masalah sosial ekonomi yang dihadapi. Diantara masalah-masalah tersebut adalah pembangunan infrastruktur yang belum merata serta standar hidup penduduk yang masih perlu ditingkatkan. Pemerataan pembangunan infrastruktur dilakukan guna mengurangi kesenjangan pembangunan regional sedangkan peningkatan standar hidup dapat dilakukan dengan berinvestasi dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan pengembangan SDM. Human Development Index PBB menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 116 dari 189. Selain itu, PDB per kapita kurang dari setengah dari tetangga Malaysia dan umur harapan hidup tujuh tahun lebih rendah daripada Vietnam (WENR, 2019).

Investasi di bidang pendidikan menjadi hal yang fundamental sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya memberikan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia merupakan cita-cita kemerdekaan NKRI. Pendidikan menjadi salah satu alat untuk pengembangan intelektual dan profesional serta memiliki peran penting dalam mendukung Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing global.

Akan tetapi, pendidikan di Indonesia masih memiliki beberapa masalah terkait kualitas dan akses pendidikan serta belum meratanya penyebaran guru yang terlatih (USAID, 2013). Selain itu, terdapat pula permasalahan khusus dalam dunia pendidikan, yaitu (1) rendahnya sarana fisik, (2) rendahnya kualitas guru (3)

rendahnya kesejahteraan guru, (4) rendahnya prestasi siswa, (5) rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, (6) rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, (7) mahalnya biaya pendidikan (Mulyana, 2018).

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan. Pembangunan pendidikan pada RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk memenuhi hak warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan merata, yang ditempuh antara lain melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun untuk mendukung Program Indonesia Pintar (Bappenas, 2017). Kebijakan ini kemudian dijabarkan dalam Renstra Kemendikbud 2015-2019 yang menetapkan beberapa tujuan strategis terkait pendidikan di Indonesia, yaitu: (1) penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan, (2) pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan kebudayaan, (3) peningkatan akses paud, dikdas, dikmen, dikmas, dan pendidikan anak berkebutuhan khusus, (4) peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter, (5) peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi kebudayaan serta pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan, dan (6) peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik (Kemendikbud, 2015).

Tujuan-tujuan yang hendak dicapai pemerintah Indonesia ini, telah sejalan dengan tujuan global yang diagendakan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs. Tujuan keempat TPB/SDGs berkaitan dengan pendidikan yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Tujuan ini berisi sembilan target yang harus dicapai pada tahun 2030.

Kondisi lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dari aspek pendidikan adalah bias gender. Pendidikan merupakan hak dasar dari setiap orang. UUD 1945 pun mengamanatkan,

bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan, termasuk pembangunan di bidang pendidikan (Fitrianti dkk, 2012). Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa wanita berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa sistem pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Perempuan memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam keluarga dan masyarakat. Sayangnya, banyak yang tidak bisa memainkan peran dan fungsinya dengan baik karena faktor kemiskinan dan salah satu penyebab utama terjadinya kemiskinan ini adalah rendahnya tingkat pendidikan perempuan (Khayati, 2008). Pendidikan sangat penting untuk perempuan karena pendidikan pertama yang diberikan kepada anak ialah dari seorang ibu (Nadya, 2018). Oleh karena itu, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya harus didapatkan oleh seluruh penduduk termasuk perempuan agar diperoleh SDM yang berkualitas. SDM yang unggul tersebut kelak akan mendukung pembangunan hingga mendapat hasil yang optimal.

Ulasan dalam bab ini, menyajikan kondisi dari aspek pendidikan seperti angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan rata-rata lama sekolah dari hasil Susenas Maret 2018. Analisis dilakukan secara deskriptif melalui tabel dan grafik. Selain itu, data juga didisagregasi menurut jenis kelamin untuk memperoleh gambaran perbedaan capaian pendidikan antara perempuan dan laki-laki.



2. Tinjauan Pustaka

2.1. Angka Melek Huruf

Melek huruf diartikan sebagai dapat membaca dan menulis. Yang dimaksud dapat membaca dan menulis adalah apabila seseorang dapat membaca sekaligus menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll). Angka melek huruf merupakan ukuran persentase penduduk pada kelompok usia tertentu yang dapat membaca sekaligus menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap seluruh penduduk pada kelompok usia tersebut. Angka melek huruf menjadi indikator dari kemampuan membaca dan menulis (literasi). Kemampuan membaca dan menulis merupakan hal yang paling mendasar dari suatu pendidikan.

2.2. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan dapat menjadi salah satu indikator kualitas SDM. Seorang penduduk dikatakan tamat sekolah/satuan pendidikan apabila menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan formal dan nonformal, baik di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat, dan PT. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pra-sekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

2.3. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar (APK) adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM). Nilai APK dapat bernilai lebih dari 100 persen karena penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas umur sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya siswa yang umurnya belum mencapai

umur sekolah dengan jenjang pendidikan yang bersesuaian, siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas (BPS, 2017).

2.4. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) ialah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian.

2.5. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas merupakan cerminan tingkat pendidikan penduduk secara keseluruhan. Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun, dan seterusnya (KPPPA, 2018). Penghitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah, maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Melalui indikator ini, dapat terlihat sampai sejauh mana kemampuan penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas mengenyam pendidikan di bangku sekolah.



3. Pembahasan

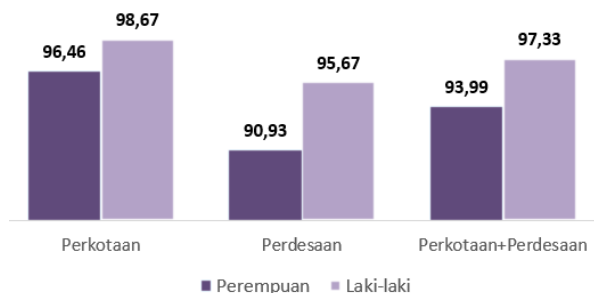
3.1. Kemampuan membaca dan menulis

Kemampuan membaca dan menulis yang digambarkan dengan angka melek huruf tercakup dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs Indonesia indikator 4.6.1.(a) dan 4.6.1.(b). Sebagai salah satu negara yang telah berkomitmen untuk turut serta melaksanakan TPB/SDGs hingga tahun 2030, pemerintah Indonesia kemudian menetapkan target capaian angka melek huruf pada RPJMN 2015-2019. Pada periode tersebut, diharapkan rata-rata angka melek huruf akan meningkat sebesar dua persen poin menjadi 96,1 persen pada tahun 2019 (Bappenas, 2014).

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2018, kemampuan membaca dan menulis telah dikuasai oleh hampir seluruh penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas. Hal ini dapat diamati dari angka melek huruf baik perempuan maupun laki-laki yang mencapai lebih dari 90 persen. Meskipun demikian, kemampuan membaca dan menulis perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2018, sebanyak 93,99 persen perempuan usia 15 tahun ke atas mampu membaca dan menulis huruf latin, arab, atau lainnya, sedangkan persentase laki-laki lebih tinggi yaitu 97,33 persen (Gambar 1.1).

Gap antara perempuan dan laki-laki dalam hal angka melek huruf ternyata hanya terjadi di Indonesia. Seperti yang dijelaskan Gallaway & Bernasek (2004) bahwa

Gambar 1.1. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2018



Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

disparitas kemampuan membaca dan menulis serta peluang pendidikan antara perempuan dan laki-laki telah menjadi masalah kebijakan publik di negara-negara berkembang padahal memiliki kemampuan membaca dan menulis dikatakan sebagai pendidikan pada level yang paling minimum. Oleh karena itu, meningkatkan kemampuan membaca dan menulis perempuan menjadi hal yang krusial. Hal itu juga menjadi kunci untuk mencapai TPB/SDGs tujuan keempat yaitu memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.

Pola capaian kemampuan membaca dan menulis perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki juga terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan. Akan tetapi, kemampuan membaca dan menulis di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Angka melek huruf perempuan dan laki-laki 15 tahun ke atas di perkotaan masing-masing sebesar 96,46 persen dan 98,67 persen, sedangkan di perdesaan masing-masing sebesar 90,93 persen dan 95,67 persen.

Menurut Wahyuni, dkk (2017), perempuan harus memiliki kemampuan literasi agar mereka dapat berperan lebih jauh dalam melaksanakan kewajiban dan mengklaim

hak-hak mereka sebagai perempuan dan warga negara Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut masih terkendala dengan kemampuan ekonomi (kemiskinan). Disagregasi menurut kuintil pengeluaran penduduk menunjukkan bahwa kemampuan membaca dan menulis perempuan 15 tahun ke atas lebih rendah dibandingkan laki-laki pada semua kuintil pengeluaran.

93,99%

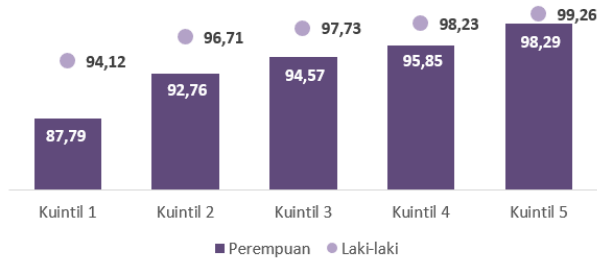
Perempuan usia 15 tahun ke atas yang melek huruf

“

Angka melek huruf perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

”

Gambar 1.2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Pengeluaran, 2018



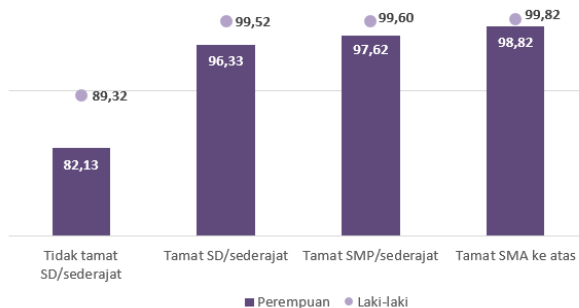
Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Angka melek huruf baik perempuan maupun laki-laki semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesejahteraan. Pada kuintil pengeluaran terendah (kuintil 1), angka melek huruf perempuan dan laki-laki masing-masing sebesar 87,79 persen dan 94,12 persen, sedangkan pada kuintil pengeluaran teratas (kuintil 5) angka melek huruf untuk perempuan sebesar 98,29 persen bahkan untuk laki-laki hampir mencapai seratus persen (99,26 persen). Terlihat pula bahwa seiring dengan meningkatnya kesejahteraan, perbedaan kemampuan membaca dan menulis antara perempuan dan laki-laki semakin kecil (Gambar 1.2).

Persepsi orang tua tentang pendidikan khususnya bagi anak perempuan sangat penting karena akan menentukan dukungan capaian pendidikan anak perempuan tersebut. Beberapa faktor yang memengaruhi persepsi

orang tua adalah umur, kemampuan ekonomi, dan tingkat pendidikan (Widyaningsih, 2010). Saat kemampuan membaca dan menulis ditinjau menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh kepala rumah tangga maka Gambar 1.3 menunjukkan bahwa angka melek huruf perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki usia 15 tahun ke atas. Ketika kepala rumah tangga tidak bersekolah maupun tidak menyelesaikan pendidikan SD/ sederajat, angka melek huruf baik perempuan maupun laki-laki kurang dari 90 persen (82,13 persen dan 89,32 persen). Di sisi lain, saat kepala rumah tangga menamatkan pendidikan minimal SD/ sederajat, angka melek huruf laki-laki mencapai lebih dari 99 persen. Meskipun angka melek huruf perempuan tidak setinggi laki-laki, persentasenya semakin meningkat seiring meningkatkan tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh kepala rumah tangga (Gambar 1.3).

Gambar 1.3. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan yang Ditamatkan Kepala Rumah Tangga, 2018



Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Disagregasi menurut provinsi menunjukkan bahwa persentase perempuan 15 tahun ke atas yang melek huruf berada pada rentang 71,26 persen hingga 99,92 persen (Lampiran Tabel C.1). Hal ini berarti ada beberapa provinsi yang hampir seluruh penduduk perempuan 15 tahun ke atas telah memiliki kemampuan membaca dan menulis. Provinsi-provinsi tersebut adalah Sulawesi Utara (99,92 persen), DKI Jakarta (99,55 persen), dan Maluku (99,03 persen). Provinsi Papua menjadi provinsi dengan angka melek huruf perempuan 15 tahun ke atas yang terendah (71,26 persen).

Di sisi lain, persentase laki-laki 15 tahun ke atas yang melek huruf memiliki rentang yang lebih pendek dibandingkan perempuan, yaitu 81,69 hingga 99,89 persen. Selain itu, terdapat lebih banyak provinsi dengan angka melek huruf yang hampir mencapai seratus persen yaitu sebanyak 14 provinsi. Tiga provinsi dengan angka melek huruf laki-laki tertinggi adalah DKI Jakarta (99,89 persen), Sulawesi Utara (99,83 persen), dan Riau (99,55 persen). Sama seperti pada kasus angka melek huruf untuk perempuan, Papua juga memiliki angka melek huruf laki-laki yang terendah, yaitu, 81,69 persen.

Perbedaan capaian kemampuan membaca dan menulis antar wilayah ini dapat dipengaruhi salah satunya oleh akses pendidikan. Seperti yang dijelaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa ada sejumlah faktor yang membuat tingkat buta huruf perempuan lebih tinggi. Salah satunya adalah masih adanya keterbatasan akses perempuan dalam mendapat pendidikan di sejumlah daerah (Bappenas, 2014). Secara umum, karakteristik wilayah Papua sangat membatasi kesempatan anak-anak asli untuk mendapatkan pendidikan (Sintayati, 2013). Selain itu, budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat Papua, masih tetap dijunjung dan dihormati sampai saat ini dimana posisi perempuan berada satu tingkat di bawah bayang-bayang laki-laki.

3.2. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan

Kualitas SDM menurut jenis kelamin dapat dilihat dari beberapa indikator salah satunya tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan (Mustar, 2007). Tingkat pendidikan yang dapat ditamatkan oleh seseorang bisa mencerminkan tingkat intelektualitas orang tersebut dan juga dapat meningkatkan status sosial di masyarakat. Oleh karenanya makin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh seseorang maka kemampuan, wawasan, cara berfikir akan lebih luas dan maju.

Secara nasional, persentase penduduk 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan SMA lebih banyak dibanding yang belum menamatkan pendidikan SMA baik perempuan maupun laki-laki. Persentase laki-laki 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan SMA ke atas lebih tinggi dibandingkan perempuan dengan besar persentase masing-masing 37,70 persen dan 32,53 persen. Di sisi lain, persentase perempuan 15 tahun ke atas

99,92%

Perempuan usia 15 tahun ke atas di Provinsi Sulawesi Utara yang melek huruf

“

Angka melek huruf perempuan di Provinsi Sulawesi Utara merupakan yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya.

”

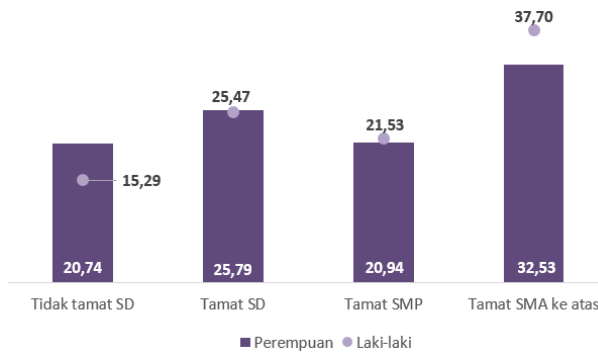
yang tidak menamatkan pendidikan sekolah dasar dan tidak/belum pernah bersekolah lebih tinggi dibandingkan laki-laki dengan persentase masing-masing 20,74 persen dan 15,29 persen (Gambar 1.4). Kondisi tersebut dapat menjadi indikasi bahwa kualitas SDM perempuan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan laki-laki (Widyaningsih, 2010).

Kesenjangan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan tidak hanya terjadi antar jenis kelamin, tetapi juga antar daerah tempat tinggal. Gambar 1.5 menunjukkan bahwa dari total penduduk 15 tahun ke atas di perkotaan, persentase yang terbanyak adalah mereka yang telah menamatkan pendidikan SMA ke atas dimana persentase untuk laki-laki (48,83 persen) lebih banyak dibandingkan perempuan (42,92 persen). Lain halnya dengan di daerah perdesaan. Dari total

penduduk 15 tahun ke atas yang memiliki persentase terbanyak adalah mereka yang telah menamatkan pendidikan SD/ sederajat dengan persentase untuk laki-laki (33,06 persen) sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan (31,91 persen). Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya fasilitas sekolah dan kualitas tenaga pengajar. Sekolah-sekolah di perkotaan mempunyai fasilitas baik dan tenaga pengajar yang kompeten sedangkan dipedesaan sebaliknya (Vito dkk, 2015). Selain itu, baik di daerah perdesaan maupun perkotaan persentase perempuan yang tidak tamat SD lebih banyak dibandingkan laki-laki. Di perkotaan persentase perempuan dan laki-laki yang tidak tamat SD/ sederajat masing-masing sebesar 15,31 persen dan 10,86 persen sedangkan di pedesaan persentasenya 27,46 dan 20,78 persen.

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018

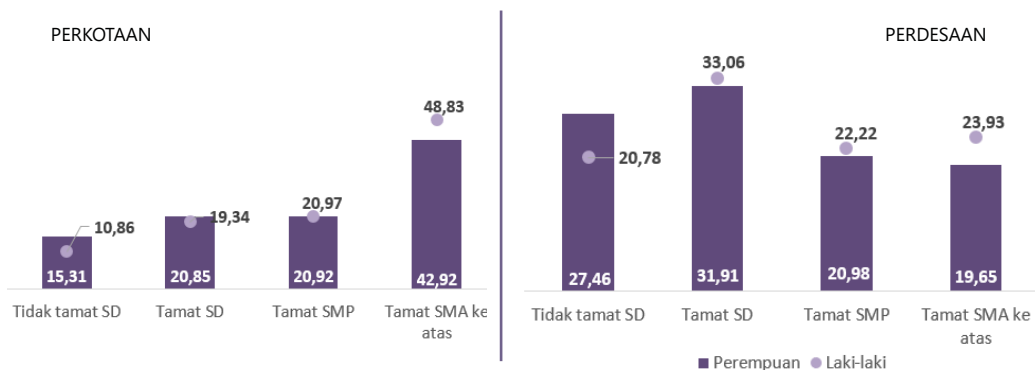
Gambar 1.4.



Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018

Gambar 1.5.



Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Pendidikan sejatinya bukan hanya milik perempuan yang memiliki akses ekonomi atau strata sosial menengah ke atas, melainkan dapat dinikmati oleh seluruh perempuan secara merata. Namun ada kalanya kesadaran perempuan itu sendiri terhadap pentingnya pendidikan masih tergolong rendah salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi. Disagregasi menurut kuintil pengeluaran penduduk menunjukkan, persentase penduduk 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan minimal SMA semakin meningkat seiring dengan semakin tingginya kuintil pengeluaran penduduk. Persentase perempuan yang menamatkan pendidikan SMA ke atas masih lebih rendah dibandingkan laki-laki dan hal ini terjadi pada semua kuintil pengeluaran. Pada kuintil pengeluaran tertinggi (kuintil 5), terdapat lebih dari 50 persen penduduk yang telah menamatkan pendidikan minimal SMA baik perempuan (57,71 persen) maupun laki-laki (63,99 persen).

Lain halnya dengan persentase penduduk yang tidak tamat SD. Pada kuintil pengeluaran terbawah (kuintil 1), persentase perempuan 15 tahun ke atas

yang tidak menamatkan pendidikan SD (31,55 persen) lebih banyak dibandingkan laki-laki (24,56 persen). Demikian pula dengan kelompok pengeluaran yang lain. Selain itu, persentase perempuan 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD semakin menurun seiring dengan meningkatnya pengeluaran penduduk (Gambar 1.6).

32,53%

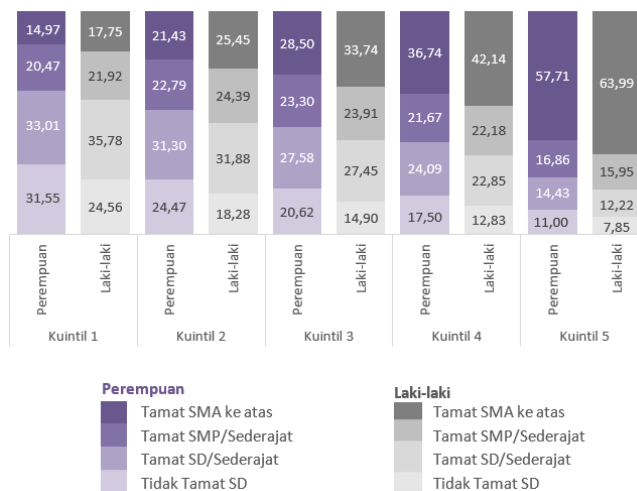
Perempuan usia 15 tahun ke atas berpendidikan tertinggi minimal SMA

“

Pada tingkat pendidikan SMA ke atas, perempuan masih tertinggal dibandingkan laki-laki.

”

Gambar 1.6. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin, Kelompok Pengeluaran dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018



Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

3.3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Partisipasi sekolah antar jenjang pendidikan untuk penduduk perempuan secara nasional terlihat pada Angka Partisipasi Kasar (APK). Nilai APK SD/ sederajat sampai dengan perguruan tinggi (PT) baik untuk perempuan maupun laki-laki semakin menurun sejalan dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. APK perempuan untuk jenjang pendidikan SD/sederajat sebesar 108,29 persen, APK SMP/sederajat sebesar 92,25 persen, APK SMA/sederajat sebesar 81,04 persen, dan APK untuk jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) sebesar 26,70 persen (Tabel 1.1). Pada APK jenjang pendidikan SD/sederajat nilainya lebih dari 100 persen yang menunjukkan bahwa terdapat anak yang mengenyam pendidikan dasar di luar range 7-12 tahun atau tidak sesuai dengan umur yang disyaratkan dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, tingginya partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SMP merupakan dampak positif dari kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang tertuang pada RPJMN 2015-2019.

Berdasarkan jenis kelamin, partisipasi perempuan untuk memperoleh kesetaraan pendidikan terlihat pada Tabel 1.1. Pada jenjang pendidikan SD/ sederajat, nilai APK perempuan sedikit lebih rendah dibanding APK SD/sederajat laki-laki (108,29 persen berbanding 108,91 persen). Kemudian, seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan, nilai APK perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Perbedaan lebih nyata terlihat pada jenjang perguruan tinggi, dimana APK PT perempuan lebih tinggi persentasenya dibanding laki-laki, yaitu sebesar 3,12 persen poin (26,70 persen berbanding 23,59 persen). Fakta ini merupakan bukti kemajuan dalam pengurangan kesenjangan gender di bidang pendidikan. Meskipun masih menghadapi banyak tantangan, pengarusutamaan gender dalam pendidikan tinggi terlihat mengalami peningkatan .

Menurut daerah tempat tinggal, nilai APK SD/ sederajat perempuan di perkotaan lebih rendah dibandingkan di perdesaan, yaitu sebesar 106,91 persen berbanding 109,82 persen (Tabel 1.1). Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat, SMA/sederajat, dan PT, APK perempuan

di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Bahkan pada jenjang perguruan tinggi (PT), APK PT perempuan di perkotaan hampir 2,5 kali lipat lebih besar dibandingkan APK perdesaan. Jika dilihat lebih dalam, ketersediaan perguruan tinggi di perdesaan memang masih minim. Selain itu biaya pendidikan yang relatif tinggi kerap kali menjadi hambatan untuk melanjutkan sekolah ke tingkat perguruan tinggi. Di tambah lagi, faktor ekonomi juga mendorong seseorang, khususnya di perdesaan untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan lebih memilih bekerja (BPS, 2018).

Tingkat kesejahteraan juga berperan terhadap partisipasi sekolah seseorang karena apabila ekonomi suatu keluarga kurang bagus maka proses pendidikan juga menjadi terhambat. Glewwe dan Kremer (2005) meneliti tentang partisipasi sekolah di negara-negara berkembang dan menemukan bahwa partisipasi sekolah dipengaruhi oleh sisi permintaan, di antaranya kesejahteraan keluarga.

26,70%

Angka partisipasi kasar perguruan tinggi perempuan

“

Pada tingkat perguruan tinggi, angka partisipasi kasar perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

”

Anak dari keluarga miskin tidak dapat bersekolah karena orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah. Pada tingkat kesejahteraan terendah (kuintil 1), APK SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan PT perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan laki-laki, masing-masing sebesar 89,64 persen berbanding 86,98 persen; 64,37 persen berbanding 61,39 persen; dan 9,52 persen berbanding 7,54 persen. Sementara itu, pada tingkat kesejahteraan tertinggi (kuintil 5), APK SMP/ sederajat dan PT perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 92,76 persen berbanding 92,58 persen dan 53,95 persen berbanding 51,33 persen. Sedangkan pada jenjang pendidikan SD/ sederajat dan PT, APK perempuan lebih kecil dibandingkan laki-laki masing-masing sebesar 106,93 persen berbanding 107,43 persen dan 91,18 persen berbanding 97,28 persen (Tabel 1.1).

Disparitas dalam pendidikan antarpenduduk yang tinggal di rumah tangga dengan status ekonomi yang

berbeda terlihat pada Tabel 1.1 dimana semakin tinggi status ekonomi rumah tangga, maka semakin tinggi APK yang dihasilkan dan pola tersebut semakin terlihat jelas seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Perbedaan APK perempuan pada tingkat sekolah dasar antara kuintil 1 dan kuintil 5 tidak begitu jauh, yaitu sebesar 2,88 persen untuk perempuan. Kesenjangan semakin melebar seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan, dimana APK PT perempuan memiliki kesenjangan paling tinggi antara kuintil 1 dan kuintil 5, yaitu sebesar 44,43 persen. Lebih dari separuh penduduk perempuan pada kelompok kuintil pengeluaran (kuintil 5) teratas mampu mengenyam pendidikan hingga PT (53,95 persen), lain halnya dengan perempuan di kelompok kuintil pengeluaran terendah (kuintil 1) dimana hanya sekitar 10 persen perempuan yang mampu mengenyam pendidikan hingga jenjang PT (9,52 persen). Pola ini juga terjadi pada laki-laki dimana semakin tinggi status ekonomi, semakin lebar pula disparitasnya.

Tabel 1.1. APK menurut Daerah Tempat Tinggal, Kuintil Pengeluaran, dan Jenis Kelamin, 2018

Karakteristik	Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Kasar (APK)			
		SD	SMP	SMA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Daerah Tempat Tinggal					
Perkotaan	Perempuan	106,91	93,13	86,15	35,48
	Laki-laki	107,51	92,09	87,14	32,19
Perdesaan	Perempuan	109,82	91,27	74,74	14,47
	Laki-laki	110,47	89,41	72,50	11,94
Perkotaan+Perdesaan	Perempuan	108,29	92,25	81,04	26,70
	Laki-laki	108,91	90,82	80,33	23,59
Kuintil Pengeluaran					
Kuintil 1	Perempuan	109,81	89,64	64,37	9,52
	Laki-laki	110,71	86,98	61,39	7,54
Kuintil 2	Perempuan	108,91	92,68	77,47	13,68
	Laki-laki	108,76	90,74	74,63	11,14
Kuintil 3	Perempuan	107,70	92,79	86,29	19,11
	Laki-laki	109,06	91,60	82,74	15,59
Kuintil 4	Perempuan	107,32	93,83	86,16	29,29
	Laki-laki	107,81	93,19	86,29	23,25
Kuintil 5	Perempuan	106,93	92,76	91,18	53,95
	Laki-laki	107,43	92,58	97,28	51,33

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Pada masing-masing jenjang pendidikan, sebagian besar provinsi di Indonesia mempunyai nilai APK perempuan melebihi APK nasional. Hampir seluruh provinsi di Indonesia sudah mencapai APK SD/ sederajat melebihi angka 100 persen, kecuali Papua sebesar 93,44 persen (Tabel Lampiran C.8.2). Hal ini menunjukkan pembangunan pendidikan pada jenjang SD/ sederajat sudah cukup merata. Selain itu, APK di atas 100 persen juga menunjukkan banyaknya anak-anak yang bersekolah di SD/ sederajat yang umurnya belum mencapai 7 tahun atau umurnya sudah lebih dari 12 tahun.

Pada tingkat SMP/ sederajat, terdapat 21 provinsi dengan nilai APK perempuan lebih dari

90 persen, sedangkan di tingkat SMA hanya ada 6 provinsi dengan nilai APK perempuan lebih dari 90 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka APK semakin turun.

Pada tingkat Perguruan Tinggi, Di Yogyakarta merupakan provinsi dengan APK perempuan tertinggi, hanya 62,97 persen, sedangkan yang terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebesar 13,05 persen. Intervensi pemerintah perlu dilakukan terutama untuk daerah yang memiliki partisipasi sekolah yang masih rendah. Pembangunan infrastruktur berupa fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dirasa penting untuk menunjang pendidikan.

3.4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Pada tahun 2018, pola APM untuk masing-masing jenjang pendidikan memiliki pola yang hampir sama dengan APK dimana nilainya semakin menurun sejalan dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Nilai APM pada setiap jenjang pendidikan masih belum mencapai angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berumur sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya. Jenjang pendidikan SD/ sederajat memiliki nilai APM paling tinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Berdasarkan jenis kelamin, nilai APM SD/ sederajat perempuan sedikit lebih rendah dibanding APM SD/ sederajat laki-laki (97,37 persen berbanding 97,79 persen). Kemudian, seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan, persentase perempuan yang bersekolah tepat waktu lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. APM SMP/ sederajat perempuan sebesar 79,55 persen berbanding 78,18 persen; APM SMA/ sederajat sebesar 61,64 persen berbanding 59,74 persen; dan APM PT sebesar 19,89 persen berbanding 17,33 persen (Tabel 1.2).

Seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan, perbedaan APM antara daerah perkotaan dan perdesaan juga semakin terlihat. Perbedaan paling tinggi terjadi pada

jenjang pendidikan PT untuk penduduk perempuan dimana persentase APM di perkotaan lebih besar 2 kali lipat dibanding APM di perdesaan (26,23 persen berbanding 11,05 persen)(Tabel 1.2). Pola yang sama juga terjadi untuk kelompok laki-laki, dimana persentase APM di perkotaan lebih tinggi di perdesaan. Hal ini semakin memperkuat bahwa penduduk di perkotaan memiliki kesempatan yang lebih besar dalam memperoleh pendidikan dibandingkan mereka yang tinggal di perdesaan. Hal ini terkait dengan lebih banyaknya jumlah sekolah di daerah perkotaan dan mudahnya akses ke sekolah dibandingkan dengan di perdesaan (Khaerunnisa et al, 2014).

19,89%

Angka partisipasi murni perguruan tinggi perempuan

—
Angka partisipasi murni perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.

Dilihat berdasarkan status ekonomi rumah tangga, APM untuk setiap jenjang pendidikan meningkat seiring dengan semakin meningkatnya status ekonomi rumah tangga yang ditandai dengan kuintil yang lebih tinggi. Dari tabel 1.2 terlihat bahwa baik untuk perempuan maupun laki-laki terlihat pola searah yang cenderung meningkat pada APM SD/ sederajat hingga PT. Pada jenjang pendidikan PT, selisih antara tingkat

kesejahteraan terendah (kuintil 1) dan kesejahteraan tertinggi (kuintil 5) pada perempuan menunjukkan perbedaan yang paling tinggi, yaitu sebesar 31,09 persen poin (7,34 persen berbanding 38,43 persen). Hal yang sama juga terjadi pada laki-laki, dimana perbedaan APM tertinggi terjadi pada jenjang perguruan tinggi, yaitu 29,86 persen poin (6,17 persen berbanding 36,03 persen).

Tabel 1.2. APM menurut Daerah Tempat Tinggal, Kuintil Pengeluaran, dan Jenis Kelamin, 2018

Karakteristik	Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Kasar (APK)			
		SD	SMP	SMA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Daerah Tempat Tinggal					
Perkotaan	Perempuan	97,43	80,78	64,99	26,23
	Laki-laki	98,03	80,45	64,31	23,30
Perdesaan	Perempuan	97,29	78,17	57,50	11,05
	Laki-laki	97,51	75,65	54,47	9,24
Perkotaan+Perdesaan	Perempuan	97,37	79,55	61,64	19,89
	Laki-laki	97,79	78,18	59,74	17,33
Kuintil Pengeluaran					
Kuintil 1	Perempuan	97,17	76,17	48,51	7,34
	Laki-laki	97,45	73,70	46,57	6,17
Kuintil 2	Perempuan	97,65	80,71	60,72	10,82
	Laki-laki	98,14	77,77	56,95	8,98
Kuintil 3	Perempuan	97,49	80,64	66,12	14,82
	Laki-laki	97,90	78,87	61,46	11,78
Kuintil 4	Perempuan	97,24	80,73	65,05	22,46
	Laki-laki	97,70	81,04	64,03	17,48
Kuintil 5	Perempuan	97,25	79,81	67,82	38,43
	Laki-laki	97,75	80,82	69,93	36,03

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Sebaran APM perempuan menurut provinsi menunjukkan bahwa APM perempuan pada tingkat SD/ sederajat tidak ada yang mencapai 100 persen. Pada jenjang pendidikan dasar, rata-rata APM perempuan di Indonesia sebesar 97,37 persen. Nilai ini menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan.

Pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat, hanya terdapat 12 provinsi yang nilai APM perempuan di atas 80 persen,

sementara untuk jenjang pendidikan SMA/ sederajat, hanya terdapat 7 provinsi yang APM perempuan di atas 70 persen.

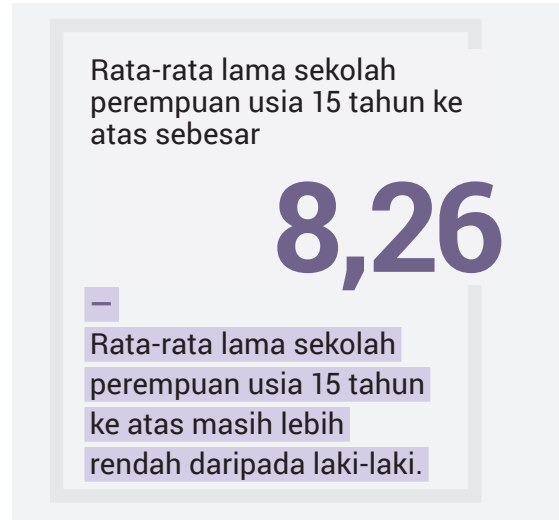
Sama halnya dengan APK, pada tingkat Perguruan Tinggi, Di Yogyakarta merupakan provinsi dengan APM perempuan tertinggi, yaitu sebesar 49,60 persen, sedangkan yang terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebesar 11,82 persen (Lampiran tabel C.8.4)

3.5. Rata-rata Lama Sekolah

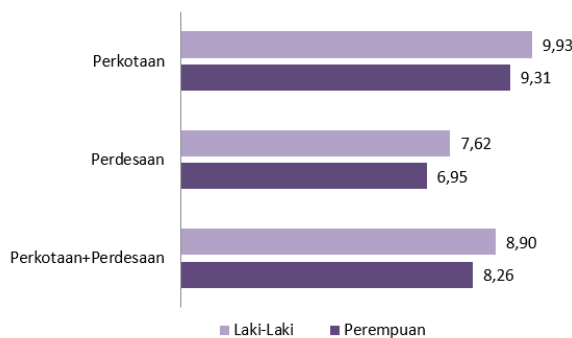
Capaian rata-rata lama sekolah perempuan secara umum sedikit lebih rendah dibanding laki-laki. Pada tahun 2018, rata-rata sekolah perempuan 15 tahun ke atas sebesar 8,26 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP/ sederajat. Sementara itu, rata-rata sekolah laki-laki 15 tahun sebesar 8,90 tahun atau hampir mencapai kelas 3 SMP/ sederajat. Meskipun angka ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan program wajib belajar 12 tahun yang telah dicanangkan pemerintah, namun demikian, rata-rata lama sekolah terus mengalami kenaikan. Bahkan, untuk rata-rata lama sekolah laki-laki telah mencapai target RPJMN 2015-2019 sebesar 8,8 tahun.

Pada wilayah perkotaan, rata-rata lama sekolah perempuan 15 tahun ke atas lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Perempuan di perkotaan telah menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun atau setara dengan kelas 3 SMP/ sederajat, sedangkan perempuan di perdesaan hanya mampu menamatkan sekolah sampai dengan kelas 6 SD/ sederajat. Kecenderungan yang sama juga terlihat untuk laki-laki 15 tahun ke atas di perkotaan yang mampu menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun atau tamat SMP. Sementara itu, laki-laki di perdesaan mempunyai rata-rata lama sekolah sebesar 7,62 tahun atau setara dengan kelas 7 SMP/ sederajat (Gambar 1.7).

Tingkat kesejahteraan juga berperan pada capaian rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah, baik laki-laki maupun perempuan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan. Pada tingkat kesejahteraan terendah (kuintil 1), rata-rata perempuan hanya mampu bersekolah sampai dengan kelas 6 SD/ sederajat, sementara pada tingkat kesejahteraan tertinggi (kuintil 5), rata-rata perempuan bersekolah hampir mencapai kelas 11 SMA/ sederajat. Angka ini masih sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata lama sekolah laki-laki dimana pada kuintil 1, laki-laki mampu bersekolah sampai dengan kelas 6 SD/ sederajat, sedangkan pada kuintil 5, rata-rata lama sekolah laki-laki sudah lebih dari kelas 11 SMA/ sederajat (Gambar 1.8).

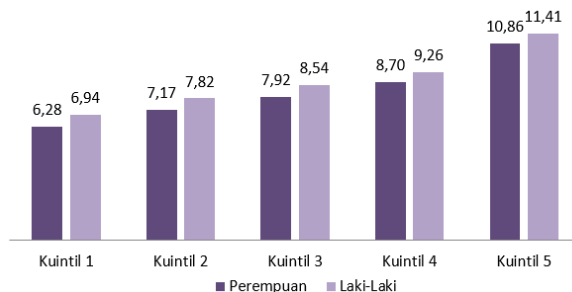


Gambar 1.7. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2018



Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Gambar 1.8. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Kuintil Pengeluaran, 2018



Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Pendidikan kepala rumah tangga (KRT) juga menjadi salah satu aspek penting dalam pencapaian rata-rata lama sekolah anggota rumah tangganya. Semakin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga, semakin besar kemauan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kepala rumah tangga yang berpendidikan akan dapat membantu keluarganya untuk memikirkan kehidupan kedepannya, salah satu caranya dengan mengalokasikan dana untuk pendidikan yang lebih baik dengan harapan anak-anaknya ataupun keluarganya akan lebih baik kedepannya (Berlian, 2011).

Pada Gambar 1.9 terlihat bahwa pada saat KRT tidak menamatkan sekolah atau belum pernah bersekolah, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 2,79 tahun untuk perempuan dan 3,81 tahun untuk laki-laki. Sementara jika pendidikan KRT setara perguruan tinggi, maka rata-rata usia sekolah usia 15 tahun ke atas meningkat menjadi 13,26 tahun untuk perempuan dan 15,36 untuk laki-laki. Hal ini juga sesuai dengan hasil studi kasus yang dilakukan Berlian (2011) di Kabupaten Lebak dimana salah satu faktor penyebab putus sekolah karena orangtua kurang memahami arti pendidikan karena tingkat pendidikan mereka juga rendah, sehingga dorongan

orang tua untuk menyekolahkan anaknya sangat kurang.

Secara geografis, jumlah provinsi dengan rata-rata sekolah perempuan 15 tahun ke atas yang sudah mencapai pendidikan dasar 9 tahun lebih sedikit dibandingkan laki-laki (10 provinsi berbanding 17 provinsi). Provinsi dengan rata-rata lama sekolah penduduk perempuan 15 tahun ke atas tertinggi, yaitu DKI Jakarta dengan capaian rata-rata lama sekolahnya sebesar 10,75 tahun atau setara dengan kelas 1 SMA. Sedangkan, Provinsi Papua mempunyai rata-rata lama sekolah penduduk perempuan 15 tahun ke atas paling rendah, yaitu sebesar 5,97 tahun atau hanya bersekolah sampai dengan kelas 5 SD/ sederajat (Lampiran Tabel C.7).

Rata-rata lama sekolah perempuan usia 15 tahun ke atas Provinsi DKI Jakarta sebesar

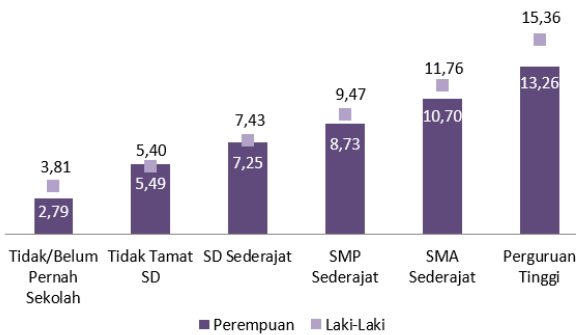
10,75

— Rata-rata lama sekolah perempuan usia 15 tahun ke atas tertinggi di Provinsi DKI Jakarta.

Perbedaan daerah tempat tinggal juga berpengaruh terhadap rata-rata lama sekolah di suatu provinsi. Di perkotaan, hampir semua provinsi telah mencapai pendidikan dasar 9 tahun baik penduduk perempuan maupun laki-laki. Lain halnya di daerah perdesaan dimana tidak ada satupun provinsi yang telah mencapai pendidikan dasar 9 tahun untuk penduduk perempuan. Sementara pada laki-laki, hanya ada 2 (dua) provinsi yang telah mencapai pendidikan dasar 9 tahun, yaitu Provinsi Aceh dan Papua Barat

(Lampiran Tabel C.7). Diperlukan kerja keras dari pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan seperti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan tenaga pendidik, akses ke sarana pendidikan untuk mencapai peningkatan sumber daya manusia yang lebih baik, terutama di bidang pendidikan.

Gambar 1.9. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Kepala Rumah Tangga, 2018



Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

KUALITAS KESEHATAN PEREMPUAN

AKSES JAMINAN KESEHATAN



Keluhan Kesehatan



Perempuan
32,58%



Laki-laki
29,36%



Angka Kesakitan



Perempuan
14,36%



Laki-laki
13,46%

64,47%

Perempuan
Indonesia memiliki
Jaminan Kesehatan



Kota

68,61%



Desa

59,46%



AKSES LAYANAN PERSALINAN



82,67%

Perempuan
Melahirkan di
Fasilitas Kesehatan



93,58%

Perempuan
Melahirkan ditolong
Tenaga Kesehatan

AKSES AIR MINUM LAYAK

73,39%

Rumah Tangga yang dikepala
Perempuan memiliki akses minum layak



Kota

80,97%



Desa

63,42%

Tertinggi



Bali

89,17%

Terendah



Bengkulu

50,82%



Sumber: Susenas Maret 2018



Kualitas Kesehatan Perempuan Indonesia



1. Latar Belakang

Seluruh warga negara di Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kesehatan merupakan hak azasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pembangunan di bidang kesehatan pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sehingga akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu SDM yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, dan cerdas.

Teori derajat kesehatan yang pernah dikembangkan Henrik L. Blum (1974), memberi gambaran bahwa derajat kesehatan dipengaruhi empat determinan yang saling terkait yaitu lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Lingkungan merupakan determinan yang paling dominan memengaruhi derajat kesehatan sebesar 45 persen. Perilaku kesehatan memiliki pengaruh 30 persen, pelayanan kesehatan 20 persen, dan keturunan 5 persen. Lingkungan memberikan pengaruh paling tinggi karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Pelayanan kesehatan adalah faktor ketiga yang memengaruhi situasi derajat kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan sangat menentukan pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Pelayanan kesehatan harus diimbangi dengan fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau dan ketersediaan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan dan informasi kesehatan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, salah satu agenda pembangunan nasional yang tercantum yakni meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Upaya peningkatan tersebut menekankan pembangunan kesehatan dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan tujuan 3 SDGs yaitu Kehidupan Sehat dan

Sejahtera. Perkembangan pencapaian SDGs tingkat nasional dilaporkan melalui *Voluntary National Review* (VNR). VNR tujuan 3 diarahkan untuk membahas indikator penting SDGs yaitu kematian ibu dan bayi, penyakit menular dan tidak menular, kesehatan reproduksi, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tenaga kesehatan, obat dan vaksin.

Hal ini sesuai dengan Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita) ke 5 “**Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia**” dengan sub agenda ketiganya yaitu Pelaksanaan Program Indonesia Sehat, yang menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk pembangunan manusia, agar peringkat pembangunan manusia Indonesia meningkat. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan menegakkan tiga pilar utama, yaitu: (1) penerapan paradigma sehat, (2) penguatan pelayanan kesehatan, dan (3) pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN). Salah satu upaya untuk mengintegrasikan ke 3 pilar tersebut dilakukan melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan pendekatan

keluarga untuk mencapai Keluarga Sehat. Beberapa indikator keluarga sehat diantaranya kepemilikan jaminan kesehatan, persalinan di fasilitas kesehatan, penggunaan KB, dan keluarga mempunyai akses air minum layak. Peran perempuan dalam keluarga sehat diharapkan lebih aktif melalui capaian indikator-indikator tersebut.

Kesehatan perempuan perlu mendapat perhatian karena perempuan mempunyai peranan penting dalam melahirkan generasi yang berkualitas. Perempuan berperan mendidik anak dalam suatu keluarga, namun masih banyak perempuan yang kurang mendapat perhatian terutama di bidang kesehatan. Informasi kesehatan yang akurat merupakan faktor penunjang dalam memonitor dan mengevaluasi pencapaian target kebijakan pembangunan kesehatan, terutama untuk kesehatan perempuan. Ketika memasuki era SDGs dan Nawacita, data kesehatan yang akurat merupakan faktor penunjang dalam memonitor dan mengevaluasi pencapaian target kebijakan pembangunan tersebut.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Keluhan Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mempunyai gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami, seperti: panas, batuk, pilek, diare, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), karena kecelakaan, kriminalitas atau keluhan kesehatan lainnya. Keluhan yang dimaksud adalah keluhan fisik maupun psikis.

2.2. Angka Kesakitan

Angka kesakitan adalah jumlah penduduk yang mempunyai keluhan

kesehatan dalam satu bulan terakhir dan merasa terganggu kegiatannya sehari-hari dikarenakan keluhan kesehatan dibandingkan jumlah seluruh penduduk.

2.3. Jaminan Kesehatan

Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk.

2.4. PBI dan Non PBI

Peserta BPJS Kesehatan terbagi dua kelompok, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non PBI. Termasuk PBI adalah peserta Jamkesmas dan BPJS kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh

pemerintah. Sedangkan non PBI adalah peserta jaminan kesehatan yang iurannya tidak dibayarkan oleh pemerintah seperti PNS/TNI/Polri, pegawai swasta, pekerja mandiri, dan pensiunan. PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta jaminan kesehatan.

2.5. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan atau faskes adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang disenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta bagi masyarakat dengan tujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan melalui tindakan preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Faskes terdiri dari rumah sakit pemerintah/swasta/RSIA, rumah/klinik bersalin, puskesmas/pustu, praktik nakes, dan polindes/poskesdes.

2.6. Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan dan atau keterampilan bidang kesehatan dan melakukan upaya kesehatan untuk masyarakat umum mencakup dokter kandungan, dokter umum, bidan, dan perawat.

2.7. Penggunaan KB

Keluarga Berencana (KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Penggunaan KB adalah menggunakan alat KB/cara tradisional yang digunakan untuk menunda atau mencegah kehamilan. Alat/cara tersebut antara lain sterilisasi wanita/tubektomi/MOW, sterilisasi pria/vasektomi/MOP, IUD/AKDR/spiral, suntikan, susuk KB/implan, pil, kondom pria/karet KB, intravag/kondom wanita/diafragma, metode menyusui alami, dan pantang berkala/kalender.

2.8. Akses Air Minum Layak

Akses air minum layak didefinisikan sebagai sumber air minumnya terdiri dari leding, air hujan, dan (sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat ≥ 10 m dan sumber air minum kemasan bermerk/air isi ulang dimana sumber air cuci/masak/mandi/dll menggunakan (sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat ≥ 10 m.



3. Pembahasan

3.1. Kepemilikan Jaminan Kesehatan

Keluhan kesehatan yang terjadi pada penduduk dapat memberikan satu informasi yang penting untuk melihat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Data mengenai persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dapat digunakan oleh pemerintah dalam upaya mengintervensi program-program kesehatan.

Persentase perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir secara nasional pada tahun 2018 sebesar 32,58 persen atau sekitar

tiga dari sepuluh perempuan mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Pada Gambar 3.1 terlihat bahwa dalam lima terakhir, keluhan kesehatan yang dialami perempuan cenderung meningkat walaupun hanya sedikit yaitu dari 29,90 persen tahun 2014 naik 2,68 persen poin pada tahun 2018. Perempuan dikatakan sakit jika keluhan kesehatan yang dialami menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Berbeda dengan keluhan kesehatan, dalam lima tahun terakhir perempuan yang sakit cenderung menurun. Secara nasional, persentase perempuan yang sakit (angka kesakitan) pada tahun 2018 sebesar 14,36 persen (Gambar 2.1).

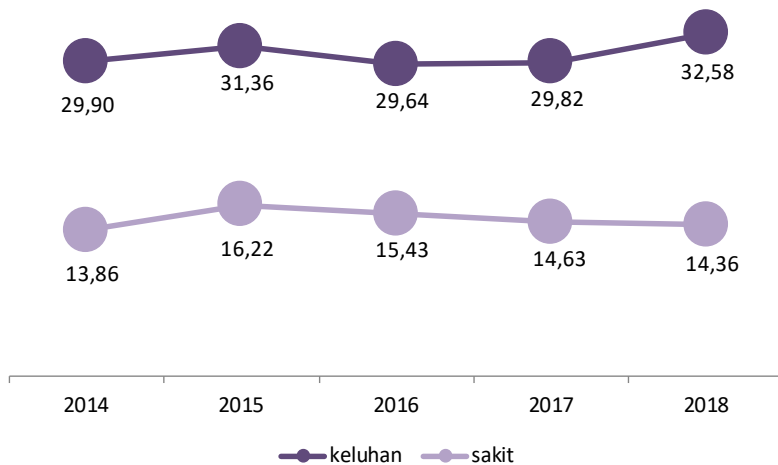
Kepemilikan jaminan kesehatan berhubungan dengan kesiapan seseorang dalam menghadapi

32,58%

Perempuan mengalami keluhan kesehatan

Perempuan yang mengalami keluhan kesehatan cenderung meningkat selama tiga tahun terakhir.

Gambar 2.1. Persentase Perempuan yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan yang Sakit Selama Sebulan Terakhir, 2014-2018



Sumber: BPS RI - Susenas, 2014-2018

risiko kesehatan yang akan ditanggung di masa datang. Dengan memiliki jaminan kesehatan, akan memperoleh bantuan pembiayaan kesehatan ketika melakukan perawatan di fasilitas kesehatan. Kepemilikan jaminan kesehatan secara nasional semakin meningkat dalam tiga tahun terakhir (Gambar 2.2). Pada tahun 2016, persentase kepemilikan jaminan kesehatan sebesar 55,04 persen meningkat menjadi 59,41 persen di tahun 2017 dan meningkat lagi menjadi 64,10 persen di tahun 2018. Angka ini menunjukkan hal yang positif

karena sekitar tiga dari lima penduduk Indonesia telah memiliki jaminan kesehatan. Namun demikian, masih terus dilakukan upaya agar target cakupan jaminan kesehatan nasional menjadi 100 persen di tahun 2019 tercapai.

Persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan sakit relatif banyak, namun masih sebesar 35,90 persen penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan, perempuan masih ada 35,53 persen yang tidak memiliki jaminan kesehatan, sedangkan laki-laki 36,27

persen. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak penduduk Indonesia yang harus mengeluarkan biaya ketika mereka ingin mengakses pelayanan kesehatan. Padahal pemerintah telah menyediakan program pelayanan kesehatan yang berwujud dalam jaminan kesehatan nasional dengan sistem asuransi seperti BPJS. Dengan membayar iuran yang rendah, dapat memperoleh perlindungan kesehatan yang lebih baik.

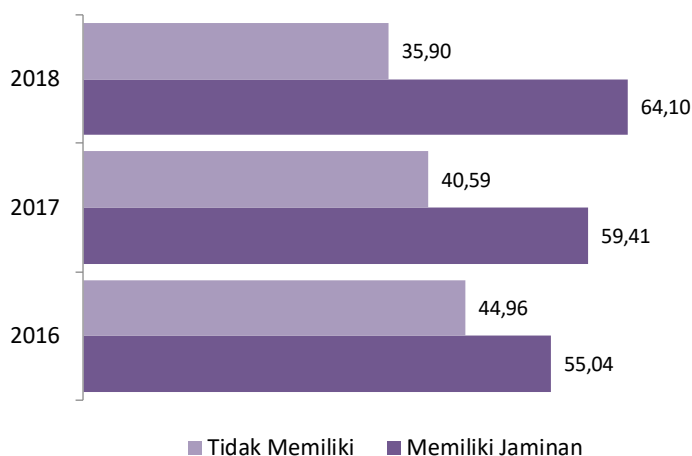
Tabel 2.1 menunjukkan bahwa kepedulian penduduk perkotaan terhadap kesehatannya di masa depan lebih tinggi dibanding dengan penduduk di pedesaan. Hal ini ditandai dengan tingginya persentase kepemilikan jaminan kesehatan di perkotaan dibanding

35,90%

Penduduk Indonesia yang tidak memiliki jaminan kesehatan

Jaminan kesehatan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Gambar 2.2. Persentase Penduduk menurut Kepemilikan Jaminan Kesehatan, 2016-2018



Sumber: BPS RI - Susenas, 2016-2018

pedesaan. Di perkotaan, perempuan yang memiliki jaminan kesehatan sebesar 68,61 persen sedangkan di pedesaan sebesar 59,46 persen. Di perkotaan, laki-laki yang memiliki jaminan kesehatan sebesar 67,74 persen sedangkan di pedesaan sebesar 58,89 persen. Kelompok pengeluaran 20 persen atas lebih banyak yang memiliki jaminan kesehatan, baik perempuan (75,73

persen) maupun laki-laki (74,76 persen) dibandingkan kelompok pengeluaran 40 persen terendah, baik perempuan (59,44 persen) maupun laki-laki (58,77 persen). Dari kelompok pengeluaran 40 persen terendah, terlihat masih lebih dari 40 persen perempuan maupun laki-laki yang tidak memiliki jaminan kesehatan.

Tabel 2.1. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal dan Kelompok Pengeluaran, 2018

Karakteristik (1)	Jenis Kelamin (2)	Jaminan Kesehatan	
		Memiliki (3)	Tidak Memiliki (4)
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	Perempuan	68,61	31,39
	Laki-laki	67,74	32,26
Perdesaan	Perempuan	59,46	40,54
	Laki-laki	58,89	41,11
Perkotaan+Perdesaan	Perempuan	64,47	35,53
	Laki-laki	63,73	36,27
Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga			
40 % Terendah	Perempuan	59,44	40,56
	Laki-laki	58,77	41,23
40 % Menengah	Perempuan	63,97	36,03
	Laki-laki	63,08	36,92
20 % Atas	Perempuan	75,73	24,27
	Laki-laki	74,76	25,24

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Saat ini terdapat beragam jaminan kesehatan yang tersedia, mulai dari BPJS Kesehatan, jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), jaminan kesehatan yang disediakan oleh perusahaan/kantortempat bekerja, ataupun asuransi swasta. Gambar 2.3 memperlihatkan persentase perempuan menurut jenis kepemilikan jaminan kesehatan. Pada gambar tersebut, BPJS Kesehatan dibedakan menjadi BPJS kesehatan PBI dan BPJS kesehatan Non-PBI. Perempuan di perkotaan memiliki persentase kepemilikan tertinggi untuk BPJS kesehatan Non-PBI (28,08 persen), sementara perempuan di perdesaan memiliki persentase kepemilikan tertinggi untuk BPJS kesehatan PBI (35,52 persen). Kondisi ini sejalan dengan tingkat kemiskinan di perdesaan yang lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, dimana penerima BPJS Kesehatan PBI adalah untuk yang miskin atau tidak mampu, sehingga wajar jika penerima PBI di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan.

Jenis jaminan kesehatan yang lain yang disajikan pada Gambar 2.3 adalah Jamkesda. Jamkesda merupakan jaminan kesehatan yang pembiayaannya berasal dari APBD daerah dan biasanya diperuntukkan bagi penduduk setempat yang belum memiliki jaminan kesehatan. Persentase kepemilikan jaminan kesehatan Jamkesda tercatat sebesar

13,25 persen dengan komposisi kepemilikan Jamkesda lebih tinggi di perdesaan dibanding perkotaan. Selain Jamkesda terdapat jaminan kesehatan lain yaitu jaminan kesehatan yang disediakan oleh perusahaan/kantor (3,47 persen) dan asuransi swasta (1,05 persen). Kepemilikan kedua jaminan kesehatan tersebut lebih tinggi di perkotaan dibandingkan dengan di perdesaan.

64,47%

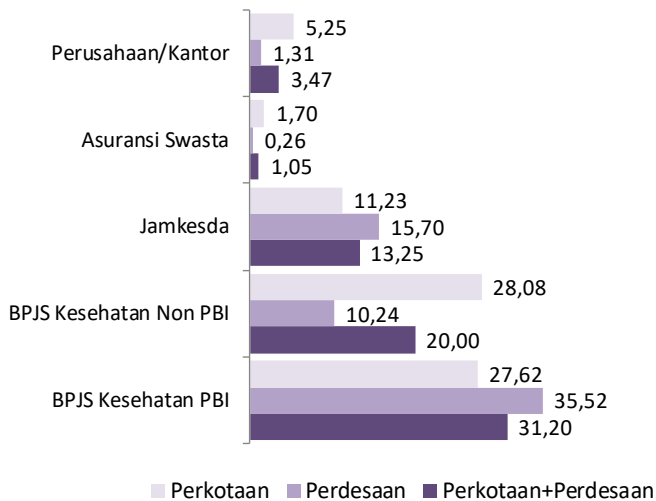
Perempuan yang memiliki jaminan kesehatan

“

Kepemilikan jaminan kesehatan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

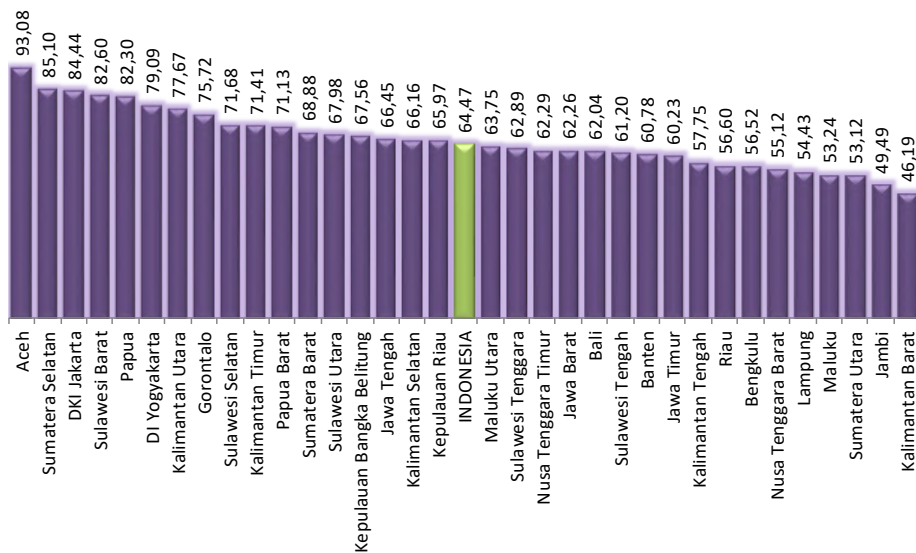
”

Gambar 2.3. Persentase Perempuan yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Jenis Jaminan Kesehatan, 2018



Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Gambar 2.4. Persentase Perempuan yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Provinsi, 2018



Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

yang memiliki jaminan kesehatan paling banyak di Provinsi Aceh sebesar 93,08 persen, dan yang paling sedikit di Provinsi Kalimantan Barat hanya sebesar 46,19 persen. Perempuan yang memiliki jaminan kesehatan lebih dari 70 persen ada 11 provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Papua. (Gambar 2.4).

3.2. Tempat Melahirkan

Akses ke pelayanan kesehatan meliputi ketersediaan dan keterjangkauan ke sarana kesehatan, dan fasilitas atau tempat pelayanan kesehatan, jika akses ke pelayanan kesehatan sulit, maka pelayanan kesehatan pada masyarakat akan menjadi kurang baik. Upaya pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan

puskesmas, rumah sakit, polindes, dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Sejalan dengan upaya pencapaian target SDGs, pemerintah berusaha meningkatkan status kesehatan dan gizi anak Indonesia. Salah satu program yang menjadi fokus pemerintahan terkait hal ini adalah menurunkan prevalensi *stunting*. *Stunting* tidak hanya dipengaruhi kondisi ibu dan janin pada masa kehamilan, kondisi kesehatan selama masa bayi dan balita, namun juga berbagai kondisi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan. Program pemerintah menitikberatkan penurunan prevalensi *stunting* dengan memberikan pelayanan kepada ibu hamil secara maksimal dan kepastian persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Tempat yang paling ideal untuk melakukan persalinan adalah fasilitas kesehatan, karena ketersediaan perlengkapan dan tenaga yang siap menolong jika sewaktu-waktu terjadi komplikasi persalinan.

Tabel 2.2. Persentase Perempuan yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir menurut Karakteristik dan Tempat Melahirkan, 2018

Karakteristik	Fasilitas Kesehatan	Bukan Fasilitas Kesehatan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kelompok Umur			
≤19 tahun	75,04	24,96	100,00
20-29 tahun	83,06	16,94	100,00
≥30 tahun	82,91	17,09	100,00
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	91,77	8,23	100,00
Perdesaan	72,11	27,89	100,00
Perkotaan+Perdesaan	82,67	17,33	100,00
Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga			
40% Terendah	76,80	23,20	100,00
40% Menengah	84,98	15,02	100,00
20% Atas	94,66	5,34	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Perempuan yang terikat perkawinan tentu berpeluang untuk hamil dan melahirkan. Perempuan berusia dibawah 20 tahun masih terlalu muda, secara fisik belum siap dan apabila terjadi kehamilan dan persalinan akan lebih mudah mengalami komplikasi, dimana komplikasi kehamilan dan persalinan yang bisa menyebabkan kematian pada perempuan. Menurut *American Society for Reproductive Medicine (ASRM)*, usia paling aman bagi perempuan untuk hamil/ melahirkan adalah 20-29 tahun, dan kesuburan perempuan mulai menurun ketika memasuki umur 30 tahun. Pada Tabel 3.2 terlihat bahwa persentase perempuan yang melahirkan bukan di fasilitas kesehatan lebih besar pada kelompok umur ≤ 19 tahun dibandingkan pada kelompok umur 20-29 tahun. Hal ini mungkin disebabkan perempuan ≤ 19 tahun kurang memahami risiko komplikasi persalinan dan bahayanya melahirkan di usia terlalu muda

82,67%

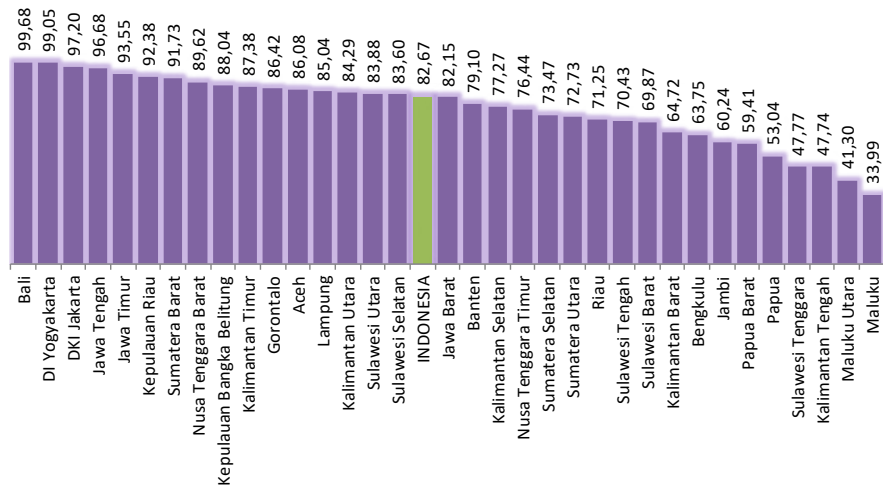
Perempuan melahirkan anak lahir hidup di fasilitas kesehatan

“

Kesadaran perempuan di daerah perdesaan untuk melahirkan di fasilitas kesehatan masih perlu ditingkatkan.

”

Gambar 2.5. Persentase Perempuan yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup di Fasilitas Kesehatan dalam Dua Tahun Terakhir menurut Provinsi, 2018



Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Berdasarkan tempat tinggal, persentase perempuan di perdesaan yang melahirkan bukan di fasilitas kesehatan jauh lebih tinggi dibandingkan di perkotaan (27,89 persen berbanding 8,23 persen). Hal ini kemungkinan disebabkan oleh banyaknya fasilitas kesehatan di perdesaan tidak sebanyak di perkotaan. Namun demikian secara nasional, perempuan yang pernah melahirkan anak lahir hidup di fasilitas kesehatan sudah mencapai 82,67 persen. Sementara itu, sebanyak 23 dari 100 perempuan pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah juga melahirkan bukan di fasilitas kesehatan. Penyebabnya bisa jadi karena biaya persalinan di fasilitas kesehatan yang belum bisa dijangkau oleh semua kalangan, khususnya bagi perempuan dengan status ekonomi terendah (miskin).

Perempuan yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir di fasilitas kesehatan, paling banyak di Provinsi Bali (99,68 persen) dan DI Yogyakarta (99,05 persen). Selain kedua provinsi tersebut, provinsi dengan perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan lebih dari 90 persen juga terdapat di Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Perempuan yang pernah melahirkan di fasilitas kesehatan, hanya sedikit di Provinsi Kalimantan Tengah (47,74 persen), Sulawesi Tenggara (47,77 persen), Maluku Utara (41,30

persen), dan Maluku (33,99 persen) (Gambar 2.5).

3.3. Penolong Persalinan

Salah satu target dalam SDGs adalah menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). Banyak kematian ibu disebabkan komplikasi selama masa kehamilan atau persalinan yang tidak aman. Salah satu upaya dalam menurunkan risiko kematian jika terjadi komplikasi persalinan adalah dengan melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu oleh tenaga kesehatan profesional. Pada Tabel 2.3 menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan melahirkan dengan dibantu tenaga kesehatan (93,58 persen). Namun jika dilihat menurut kelompok umur, persentase yang melahirkan dibantu bukan tenaga kesehatan justru lebih tinggi pada kelompok perempuan yang melahirkan di usia terlalu muda (11,66 persen). Padahal, perempuan tersebut memiliki risiko lebih besar mengalami komplikasi kehamilan atau persalinan dibandingkan perempuan yang melahirkan di usia ideal (20-29 tahun).

Berdasarkan daerah tempat tinggal dan kelompok pengeluaran rumah tangga, persentase perempuan di perdesaan yang melahirkan dibantu oleh bukan tenaga kesehatan di perdesaan mencapai 4 kali

Tabel 2.3. Persentase Perempuan yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir menurut Karakteristik dan Penolong Persalinan, 2018

Karakteristik (1)	Tenaga Kesehatan (2)	Bukan Tenaga Kesehatan (3)	Total (4)
Kelompok Umur			
≤19 tahun	88,34	11,66	100,00
20-29 tahun	94,02	5,98	100,00
≥30 tahun	93,55	6,45	100,00
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	97,35	2,65	100,00
Perdesaan	89,21	10,79	100,00
Perkotaan+Perdesaan	93,58	6,42	100,00
Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga			
40% Terendah	90,20	9,80	100,00
40% Menengah	95,63	4,37	100,00
20% Atas	98,79	1,21	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

lebih besar dibandingkan perkotaan (10,79 persen berbanding 2,65 persen). Pada kelompok pengeluaran 40 persen terendah, persentase perempuan yang melahirkan dibantu oleh bukan tenaga kesehatan mencapai 6 kali lebih besar dibandingkan kelompok pengeluaran 20 persen teratas (9,80 persen berbanding 1,21 persen).

Semua perempuan di Provinsi Yogyakarta (100 persen) yang pernah melahirkan dibantu oleh Tenaga Kesehatan dalam Dua Tahun Terakhir, selanjutnya paling banyak di Provinsi DKI Jakarta (99,72 persen), Bali (99,68 persen), dan Jawa Tengah (99,42 persen). Perempuan yang pernah melahirkan dibantu oleh Tenaga Kesehatan paling sedikit di Provinsi Papua hanya sebesar 61,72 persen dan Maluku sebesar 63,63 persen. Secara umum, Perempuan yang pernah melahirkan dibantu oleh Tenaga Kesehatan lebih dari 90 persen mencakup 23 provinsi (Gambar 2.6).

93,58%

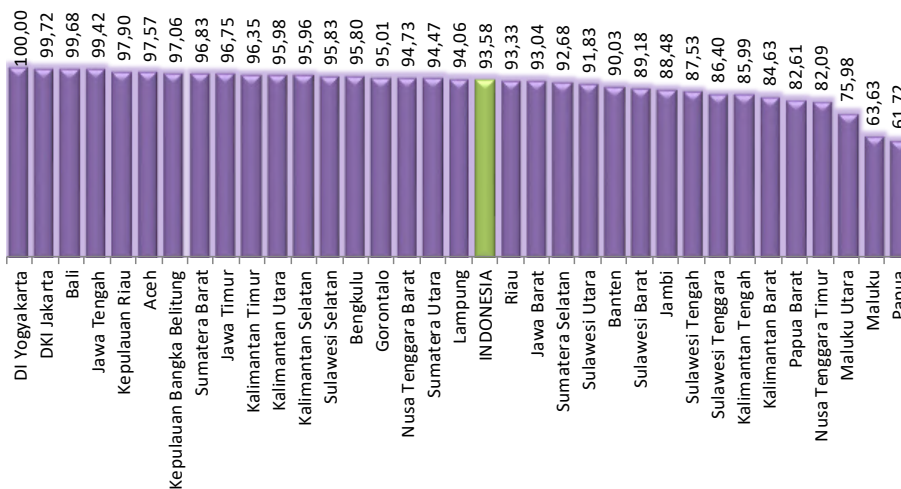
Perempuan di Indonesia persalinannya dibantu oleh tenaga kesehatan

“

Kesadaran perempuan di Provinsi Papua akan pentingnya proses persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan perlu ditingkatkan.

”

Gambar 2.6. Persentase Perempuan yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup oleh Tenaga Kesehatan dalam Dua Tahun Terakhir menurut Provinsi, 2018



Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

3.4. Penggunaan KB

Peningkatan dan perluasan pelayanan KB selain bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk, juga merupakan upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang tinggi akibat kehamilan. Arti penting ini menjadikan KB sebagai indikator yang digunakan dalam mengukur pencapaian SDGs Target 3.7 pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

Tabel 2.4 menunjukkan banyaknya perempuan berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin yang menggunakan alat/cara KB menurut daerah tempat tinggal dan kelompok pengeluaran. Menurut daerah tempat tinggal, secara umum partisipasi perempuan di perdesaan dalam program KB lebih besar dibanding di perkotaan. Persentase perempuan berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin yang pernah dan sedang menggunakan alat/cara KB di perkotaan sebesar 66,84 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 73,51 persen.

Perempuan pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas yang tidak pernah berpartisipasi

dalam program KB memiliki persentase terbesar (41,25 persen) dibandingkan yang berasal dari kelompok pengeluaran 40 persen menengah (29,84 persen) dan 40 persen terendah (24,49 persen). Fenomena ini kemungkinan adanya pengaruh dari semakin membaiknya ekonomi maka orang akan cenderung menambah jumlah anak, dengan alasan kemampuan untuk membiayai anak tersebut.

58,73%

Perempuan kawin usia 15-49 tahun di Indonesia yang sedang menggunakan alat kontrasepsi

“

Sepertiga perempuan kawin usia 15-49 tahun tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi .

”

Tabel 2.4. Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Status Pemakaian Alat/Cara KB, Daerah Tempat Tinggal, dan Kelompok Pengeluaran, 2018

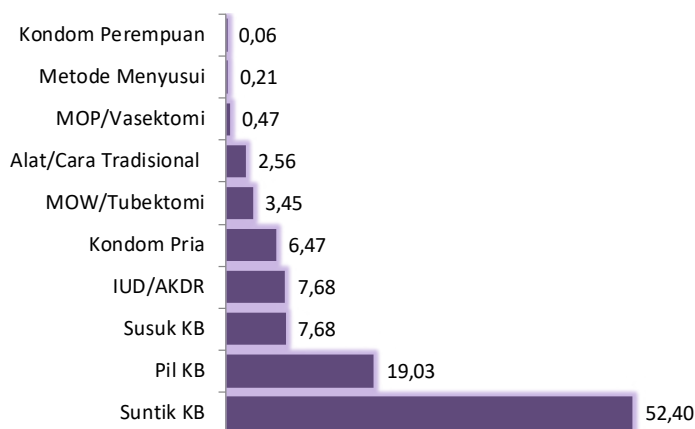
Karakteristik	Ya, Pernah	Ya, Sedang	Tidak Pernah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Daerah Tempat Tinggal				
Perkotaan	10,39	56,45	33,16	100,00
Perdesaan	12,19	61,32	26,49	100,00
Perkotaan+Perdesaan	11,23	58,73	30,04	100,00
Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga				
40% Terendah	11,00	64,51	24,49	100,00
40% Menengah	11,42	58,75	29,84	100,00
20% Atas	11,29	47,47	41,25	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Ada berbagai macam jenis alat/cara yang dapat digunakan perempuan dalam KB. Jenis alat/cara KB yang banyak digunakan perempuan pernah kawin adalah suntikan (52,40 persen) dan pil (19,03 persen). Jenis alat/cara KB lainnya yang juga banyak digunakan selain suntik dan pil adalah susuk KB/implan (7,68 persen) dan IUD/AKDR/spiral (7,68 persen). Alat/cara KB dibedakan menjadi dua, yakni modern dan tradisional. Alat/cara KB modern terdiri dari sterilisasi wanita/tubektomi/MOW, sterilisasi pria/vasektomi/MOP, pil, IUD/AKDR/spiral,

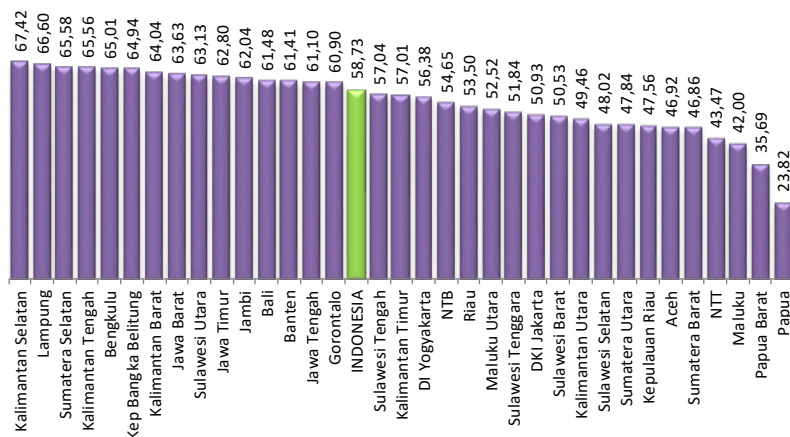
suntik KB, susuk KB/implan, kondom pria/karet KB, intravag/kondom wanita/diafragma, dan metode menyusui alami. Sedangkan alat/cara KB tradisional terdiri dari pantang berkala, sanggama terputus, dan alat/cara KB tradisional lainnya. Persentase perempuan berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB modern mencapai sebesar 97,44 persen, sedangkan yang menggunakan alat/cara KB tradisional hanya sebesar 2,56 persen (Gambar 2.7).

Gambar 2.7. Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan, 2018



Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Gambar 2.8. Persentase Perempuan Usia 15 - 49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Provinsi dan Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan, 2018



Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

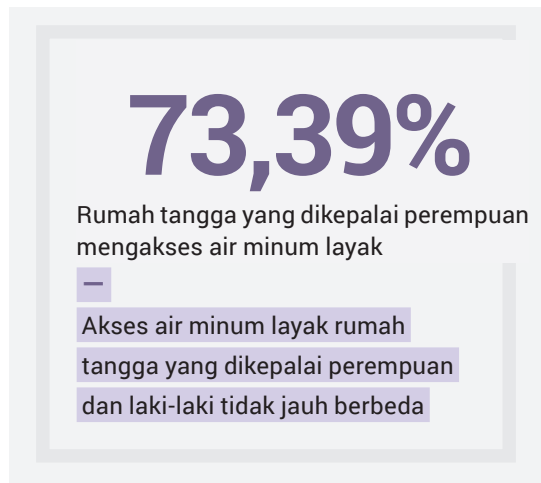
Gambar 2.8 menunjukkan banyaknya perempuan yang sedang menggunakan alat/cara KB menurut provinsi. Pada tahun 2018, persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang sedang menggunakan alat/cara KB tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan (67,42 persen) melebihi angka nasional yang hanya sebesar 58,73 persen. Persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang sedang menggunakan alat/cara KB terdapat di 15 provinsi dengan persentase diatas 60 persen. Provinsi yang rendah persentasenya di Provinsi Papua Barat (35,69 persen) dan Papua (23,82 persen).

and sustainable drinking water) secara bertahap sampai dengan akhir tahun 2030. Air minum yang aman membutuhkan pemeriksaan biologis, fisika, dan kimia (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018).

Menurut Cheng, dkk (2012) menunjukkan bahwa secara *independent* air dan sanitasi layak memengaruhi angka kematian perempuan/ibu dan anak, sehingga perlu peningkatan aksesibilitas air dan sanitasi layak dalam rangka mengurangi angka kematian tersebut. Ketersediaan sumber air minum, terutama

3.5. Akses Air Minum Layak

Kesehatan Lingkungan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 didefinisikan sebagai upaya pencegahan penyakit atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Selain itu, isu kesehatan lingkungan ini juga menjadi salah satu pilar Tujuan SDGs Indonesia, diantaranya Tujuan 6 menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Indonesia akan mengarah ke penghitungan indikator akses air minum yang aman dan berkelanjutan (*safe*



Tabel 2.5. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak menurut Jenis Kelamin KRT, Daerah Tempat Tinggal dan Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga, 2018

Karakteristik (1)	Jenis Kelamin KRT (2)	Akses Air Minum Layak	
		Memiliki (3)	Tidak memiliki (4)
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	Perempuan	80,97	19,03
	Laki-laki	81,66	18,34
Perdesaan	Perempuan	63,42	36,58
	Laki-laki	64,31	35,69
Perkotaan+Perdesaan	Perempuan	73,39	26,61
	Laki-laki	73,74	26,26
Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga			
40 % Terendah	Perempuan	64,90	35,10
	Laki-laki	65,34	34,66
40 % Menengah	Perempuan	71,98	28,02
	Laki-laki	73,99	26,01
20 % Atas	Perempuan	85,99	14,01
	Laki-laki	86,11	13,89

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

yang layak merupakan hal yang sangat mendasar bagi setiap manusia. Sumber air minum yang layak sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat terutama anak-anak, bila sumber air minum yang layak tidak tersedia maka anak-anakan rentan terhadap penyakit yang akan memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Secara nasional, persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak sudah mencapai 70 persen pada tahun 2018, berarti masih ada sekitar 30 persen rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum layak.

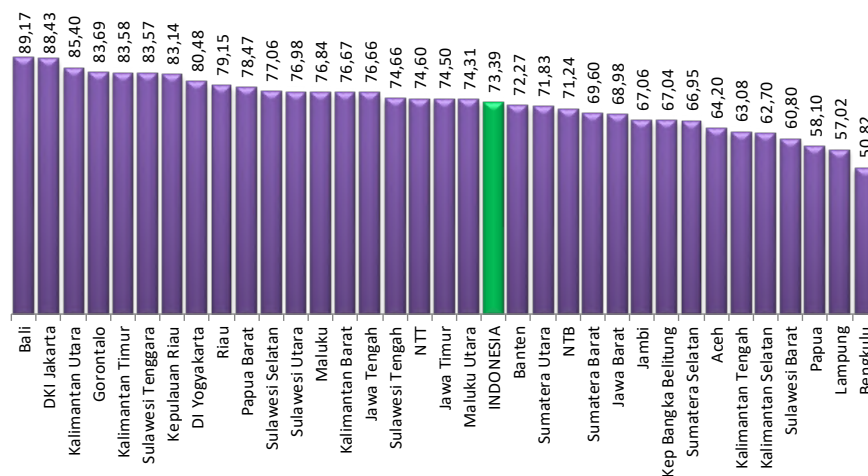
Tabel 2.5 menyajikan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak menurut tempat tinggal dan kelompok pengeluaran. Rumah tangga yang dikepalai perempuan yang memiliki akses air minum layak di perkotaan sebesar 80,97 persen, lebih tinggi dibandingkan di perdesaan sebesar 63,42 persen. Pola yang sama terjadi pula pada rumah tangga yang dikepalai laki-laki, dimana akses air minum layak lebih banyak di perkotaan dibandingkan perdesaan, yaitu 81,66 persen berbanding 64,31 persen. Menurut jenis kelamin,

rumah tangga yang dikepalai laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan yang akses air minum layak, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Pada kelompok pengeluaran, rumah tangga yang dikepalai perempuan yang memiliki akses air minum layak lebih banyak pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas (kaya) sebesar 85,99 persen, kemudian kelompok pengeluaran 40 persen menengah sebesar 71,98 persen, dan paling sedikit 40 persen terendah (miskin) hanya sebesar 64,90 persen.

Gambar 2.9 menyajikan persentase rumah tangga yang dikepalai perempuan yang memiliki akses air minum layak antarprovinsi. Pada tahun 2018, provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak adalah Bali (89,17 persen) dan DKI Jakarta (88,43 persen). Sebanyak 8 provinsi dengan persentase lebih dari 80 persen, dan sebanyak 14 provinsi antara 70-80 persen. Provinsi yang rendah persentasenya adalah Bengkulu (50,82 persen), Lampung (57,02 persen), dan Papua (58,10 persen).

Gambar 2.9. Persentase Rumah Tangga yang Dikepalai Perempuan yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak menurut Provinsi, 2018



Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

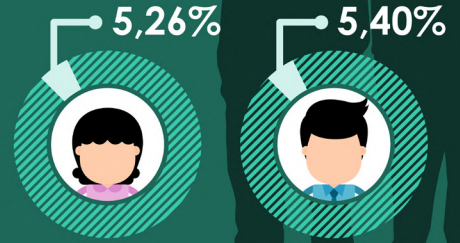
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-laki **LEBIH TINGGI** daripada Perempuan.

51,88 %
82,69 %



TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA



Tingkat Pengangguran Terbuka Perempuan **LEBIH RENDAH** daripada Laki-laki

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA

Dari 17 lapangan pekerjaan utama, mayoritas **PEREMPUAN** bekerja pada 3 lapangan pekerjaan utama.

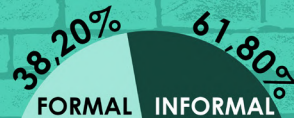
26,62%
Pertanian, kehutanan, & perikanan

23,71%
Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor

16,45%
Industri pengolahan



FORMAL & INFORMAL



Sekitar 6 dari 10 pekerja **PEREMPUAN** berusia 15 Tahun ke atas, bekerja di sektor **INFORMAL**

RATA-RATA UPAH

Rata-rata upah gaji bersih sebulan, pekerja **laki-laki** lebih **tinggi** daripada perempuan.

3,06 juta
Rupiah

2,39 juta
Rupiah



Sumber: Sakernas, 2018



Peran Perempuan dalam Dunia Kerja



1. Latar Belakang

Peran perempuan Indonesia untuk kemajuan bangsa sudah dimulai sejak perjuangan masa penjajahan. Beberapa wanita Indonesia telah tampil dipanggung sejarah secara perorangan dalam membela tanah air dan bangsanya, misalnya Nyi Ageng Serang XIX, Christina Martha Tiahahu (1817-1819), Cut Nyak Dien (1873-1904), R.A. Kartini (1879-1904), Dewi Sartika (1884-1947), Maria Walanda Maramis (1872-1924), Nyai Ahmad Dahlan (1872-1936). Namun masa yang amat penting dan itu menjadi titik balik dari perjuangan gerakan perempuan adalah pada tahun 1928, saat dimana diadakan Kongres Perempuan yang pertama di Yogyakarta, dan Soekarno yang kemudian yang menjadi presiden RI memberikan kata sambutan. (Mukmin, 1980: 78). Pada

masa revolusi fisik banyak pejuang perempuan yang bahu membahu dengan laki-laki dalam melawan penjajah. Keterlibatan perempuan baik dalam perjuangan fisik maupun aktif dalam pengurusan logistik maupun menolong para pejuang yang terluka.

Saat ini, walaupun ketimpangan gender masih ada dan terjadi di Indonesia, namun ketimpangannya semakin lama semakin kecil. Artinya kesempatan perempuan dan laki-laki makin hari makin sama. Demikian pula halnya dalam bidang ketenagakerjaan, kiprah perempuan dalam ketenagakerjaan semakin luas. Peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan potensinya dewasa ini semakin terbuka. Didukung oleh motivasi kaum perempuan untuk bekerja, belajar dan berwirausaha seperti laki-laki tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan semakin kuat. Kesempatan yang sudah tersedia perlu didukung oleh peningkatan sumber daya manusia itu sendiri. Untuk dapat bersaing pada dunia kerja diperlukan pendidikan dan ketrampilan yang mumpuni. Semakin tinggi pendidikan seseorang, nilai waktu menjadi lebih berharga sehingga cenderung menggantikan waktu senggangnya untuk bekerja (Simanjuntak, 1985). Dengan kata lain pendidikan merupakan salah satu faktor seseorang untuk masuk dunia kerja.

Salah satu tujuan pembangunan nasional saat ini adalah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setara dengan negara maju. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah dalam rangka pembangunan nasional. Pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, terdapat beberapa sasaran pokok pembangunan nasional yang terkait dengan ketenagakerjaan. Sasaran tersebut antara lain menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2019 menjadi 4,8 persen sampai 5,2 persen, serta meningkatkan persentase tenaga kerja formal menjadi 51,0 persen pada tahun 2019.

Dalam Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDG's) yang disahkan pada 25 September 2015, sebagai kesepakatan pembangunan global. Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Prinsip utama SDGs adalah tidak meninggalkan satu orangpun atau dalam istilah bahasa Inggrisnya No One Left Behind.

Dalam SDG's diperkirakan lebih dari 600 juta pekerjaan baru perlu diciptakan hingga tahun 2030, hanya untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk usia kerja di seluruh dunia yang mencapai sekitar 40 juta per tahunnya. Kita juga perlu meningkatkan kondisi bagi sekitar 780 juta pekerja perempuan dan laki-laki dengan penghasilan kurang dari dua dolar per hari dan tidak memadai untuk mengangkat diri dan keluarga mereka keluar dari kemiskinan. Pentingnya kerja layak dalam mencapai pembangunan berkelanjutan disoroti oleh Tujuan 8 dari SDG's yang bertujuan untuk "mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja produktif serta kerja layak untuk semua".

Bahkan dalam visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan Nawa Cita yang digaungkan sejak 2014-2019 juga menyasar masalah ketenagakerjaan yaitu dalam Nawa Cita ke 5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan

program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" serta Nawa Cita ke 6 yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Penyajian data statistik berdasarkan jenis kelamin sangat diperlukan untuk mengukur tingkat ketimpangan gender. Perempuan dan laki-laki memiliki peran yang berbeda dalam masyarakat, perbedaan kebutuhan, ketertarikan, dan perbedaan akses terhadap sumber daya. Penyajian data secara nasional tidak cukup untuk mencerminkan perbedaan-perbedaan tersebut (UNFPA, 2014). Pembahasan mengenai ketenagakerjaan menjadi lebih menarik apabila dilihat dari partisipasi laki-laki maupun perempuan di dalam dunia kerja. Keterlibatan perempuan dalam pasar kerja dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Semakin banyak perempuan yang bekerja, menunjukkan semakin banyak perempuan yang mampu mengaktualisasikan dirinya dan semakin kecil ketimpangan partisipasi bekerja antara perempuan dan laki-laki pada pasar kerja.

Saat ini, secara global, terdapat sekitar 51 persen perempuan yang terlibat dalam angkatan kerja, dibandingkan dengan laki-laki yakni sekitar 82 persen. Pada dasarnya angka tersebut tidak mengalami banyak perubahan dalam 20 tahun terakhir. Besarnya perbedaan gaji karena gender juga belum mengalami penurunan. Secara rata-rata gaji yang diterima perempuan 23 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki (ILO, 2015a). Perbandingan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia antara perempuan dan laki-laki akan disajikan pada Bab ini. Adapun beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia antara lain: komposisi penduduk usia kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), tingkat pendidikan, gaji, sektor, serta persentase penduduk yang bekerja menurut karakteristiknya.



2. Tinjauan Pustaka

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik adalah *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization* (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau pengangguran. Sementara itu, penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Adapun yang dimaksud dengan bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) atau *Labour Force*

Participation Rate (LFPR) adalah indikator dari tingkat aktivitas pasar tenaga kerja. TPAK mencerminkan tingkatan penduduk usia kerja pada suatu negara yang aktif secara ekonomi (ADB, 2012). TPAK didefinisikan sebagai proporsi penduduk angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Tinggi atau rendahnya TPAK juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk bukan angkatan kerja. Perempuan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja, karena mereka biasanya menghasilkan produk yang dikonsumsi oleh rumah tangganya sendiri seperti menyiapkan dan menyajikan makanan atau merawat anak, orang sakit, atau orang tua yang terdapat di dalam rumah tangga (UNFPA, 2014). Pekerjaan rumah tangga yang seringkali menjadi tugas perempuan, memengaruhi ketersediaan seseorang untuk bekerja (ILO, 2012).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau *Unemployment Rate* merupakan indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja. TPT didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT adalah sebuah pengukuran terhadap ketimpangan dalam pasar tenaga kerja yang menunjukkan sejumlah pasokan tenaga kerja yang tidak digunakan di sebuah negara. Selain itu, terkadang TPT juga digunakan sebagai indikator untuk melihat kondisi ekonomi (ADB, 2012).

Berdasarkan konsep ILO yang diterapkan dalam Sakernas,

seseorang yang dikategorikan sebagai pengangguran terbuka adalah:

1. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
2. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
3. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Indikator status pekerjaan utama membedakan antara dua kategori dari seluruh pekerja, yaitu (a) pekerja penerima upah/gaji dan (b) orang yang mempekerjakan dirinya sendiri dan atau orang lain (ILO, 2015). Status pekerjaan dalam Sakernas dibedakan ke dalam tujuh kategori antara lain:

1. Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusahadenganmenanggungrisikosecara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
4. Buruh/Karyawan/Pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.
5. Pekerja bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah

tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian.

6. Pekerja bebas di nonpertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha nonpertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.
7. Pekerja keluarga/tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

Status pekerjaan utama dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kerja dan menentukan kelompok sosial ekonomi seseorang. Tingginya pekerja penerima upah/gaji pada sebuah negara dapat mengindikasikan majunya pembangunan ekonomi. Di sisi lain, tingginya orang yang berusaha sendiri, dapat mengindikasikan besarnya sektor pertanian dan rendahnya pertumbuhan pada ekonomi formal (ILO, 2015).

Jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari. Jam kerja bagi para pekerja di sektor swasta di atur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, khususnya dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 85. Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Kepmenakertrans No. KEP 102/MEN/VI/2004, waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam)

hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada waktu istirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah (Asri Wijayanti, 2009).

Pada sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja, yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur sehingga pekerja/buruh berhak atas upah lembur.

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. Keselamatan kerja; b. Moral dan kesusilaan; dan c. Perlakuan yang sesuai dengan kodrat harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (Hardijan Rusli, 2004). Sebagaimana telah diterangkan bahwa para pekerja/buruh

berhak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kodratnya dengan tidak membedakan antara pria dan wanita dalam batas kewajaran tetapi tidak pula adanya diskriminasi yang dilakukan oleh sejumlah oknum terhadap para pekerja/buruh.

Pembagian waktu antara perempuan dan laki-laki sangatlah penting juga di maksudkan agar terdapat perbedaan antara jam kerja perempuan dan laki-laki yang nantinya akan berdampak pada upah, jaminan, keselamatan dan keamanan bagi pekerja/buruh pria dan wanita. Adanya jaminan dan keamanan pekerja/buruh khususnya perempuan selama di tempat kerja, serta penyediaan angkutan antar jemput juga sangat perlu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Bentuk perlindungan lainnya adalah pemberian hak-hak khusus terkait waktu istirahat (Aloysius Uwiyono, 2014).



3. Pembahasan

3.1. Kegiatan Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas

Pada tahun 2018, kegiatan utama selama seminggu yang lalu yang paling banyak dilakukan penduduk berumur 15 tahun ke atas adalah bekerja. Bila ditinjau menurut jenis kelamin, persentase penduduk perempuan berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, lebih rendah daripada laki-laki. Persentase penduduk perempuan berumur 15 tahun ke atas yang bekerja adalah 49,15 persen. Sementara itu, persentase penduduk laki-laki berumur 15 tahun ke atas yang bekerja angkanya jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 78,23 persen.

Pada kelompok perempuan, bekerja merupakan kegiatan utama dengan persentase tertinggi. Meskipun demikian, kegiatan mengurus rumah tangga juga memiliki persentase yang cukup tinggi. Bila diamati, persentase perempuan berumur 15 tahun yang kegiatan utamanya pada seminggu yang lalu adalah mengurus rumah tangga, adalah 36,67 persen. Sementara itu, jika dibandingkan dengan kelompok laki-laki, persentase perempuan berumur 15 tahun yang mengurus rumah tangga, jauh lebih tinggi. Persentase laki-laki berumur 15 tahun yang mengurus rumah tangga hanya berada hanya 3,99 persen.

Jika ditinjau antarprovinsi memperlihatkan bahwa perempuan yang bekerja yang paling tinggi persentasenya ada di Bali yaitu sebesar 69,84 persen, sedangkan yang terendah di Jawa Barat yaitu sebesar 38,68 persen. (Lampiran Tabel E.1.1). Dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal persentase penduduk perempuan pedesaan berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan, yakni 51,83 persen berbanding 47,02 persen. Selanjutnya, persentase perempuan perkotaan berumur 15 tahun ke atas yang mengurus rumah tangga lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan, yakni 37,45 persen berbanding 35,67 persen (Tabel 3.1).

Tabel 3.1. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama Seminggu yang Lalu, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2018

Jenis Kegiatan Utama Seminggu yang Lalu	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bekerja	47.02	75.03	51.83	82.25	49,15	78,23
Pengangguran Terbuka	3.07	5.35	2.29	3.35	2,73	4,46
Sekolah	9.64	9.47	7.25	7.03	8,58	8,39
Mengurus Rumah Tangga	37.45	4.81	35.67	2.95	36,67	3,99
Lainnya	2.81	5.33	2.96	4.42	2,88	4,92
Indonesia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

3.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah proporsi penduduk angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Besar kecilnya TPAK dipengaruhi oleh beberapa sebab seperti jumlah penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, umur, tingkat upah, dan tingkat pendidikan serta banyaknya kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

Dilihat dari perbedaan jenis kelamin, TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan (82,69 persen berbanding 51,88 persen). Hal ini diduga disebabkan penduduk laki-laki umumnya merupakan pencari nafkah utama di keluarga (Gambar 3.2). Dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPAK perempuan di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan di daerah perkotaan, yakni sebesar 54,13 persen dibandingkan 50,09 persen. Baik di pedesaan maupun di perkotaan, TPAK perempuan selalu lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki. Dilihat berdasarkan provinsi, TPAK perempuan tertinggi ada di Papua yaitu sebesar 70,80 persen sedangkan terendah di Jawa Barat yaitu 42,37 persen (Lampiran Tabel E.2).

51,88%
TPAK Perempuan

“

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

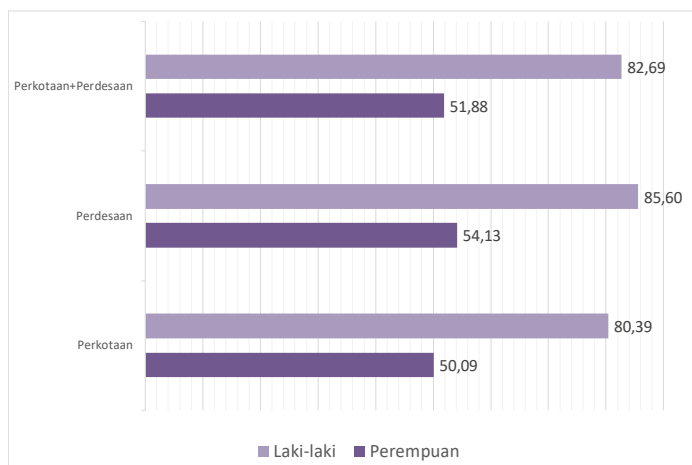
”

Selama 20 tahun terakhir, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) cenderung stagnan, rata-rata TPAK laki-laki berada di sekitar 84 persen, sementara perempuan sekitar 50 persen. Pada 2018, tercatat 83 dari 100 laki-laki adalah AK (Angkatan Kerja), sementara perempuan hanya 52 dari 100. Rendahnya TPAK perempuan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kurangnya informasi, anggapan bahwa perempuan bertanggung jawab penuh dalam rumah tangga, adanya diskriminasi gender, dan juga biaya yang tinggi. Di samping itu, perempuan lebih banyak berpartisipasi pada jenis pekerjaan informal, seperti pekerja rumah tangga atau pekerja rumahan. Terkait hal ini dibutuhkan adanya suatu peraturan karena pekerjaan di sektor informal umumnya berupah minim, bahkan banyak sekali perempuan

yang tidak diberikan upah (*unpaid worker*) dan bentuk perlindungannya tidak ada.

Menurut Studi Bappenas, perempuan berpotensi untuk berkontribusi lebih besar kepada perekonomian Indonesia. Jika TPAK perempuan dinaikkan menjadi 64 persen, maka akan terdapat 20 juta angkatan kerja *semi-skilled* dan *skilled* baru. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dapat terus ditingkatkan karena perempuan memiliki banyak potensi yang harus diberi akses sehingga dapat memberikan kontribusi pada pembangunan. Ini adalah pekerjaan rumah bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan TPAK perempuan yaitu dengan membuka kesempatan kerja seluas-luasnya kepada perempuan di semua sektor dengan tidak membeda-bedakan gender.

Gambar 3.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2018



Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

3.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap kemiskinan adalah tingginya angka pengangguran dan salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pengangguran mengurangi

pendapatan masyarakat, dan hal itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai.

Upaya menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat

kemiskinan adalah sama pentingnya. Secara teori jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan miskin. Sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi) maka tingkat kemiskinan juga rendah.

Partisipasi perempuan yang bekerja meningkatkan peran mereka terhadap pendapatan rumah tangga dan kontrol mereka terhadap alokasi sumber daya. Hal tersebut dapat mengarahkan kepada kemandirian ekonomi dan kemampuan menentukan pilihan sendiri, yang mana kedua hal tersebut penting dalam pemberdayaan perempuan. Tetapi di sebagian negara, tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki (UNFPA, 2014).

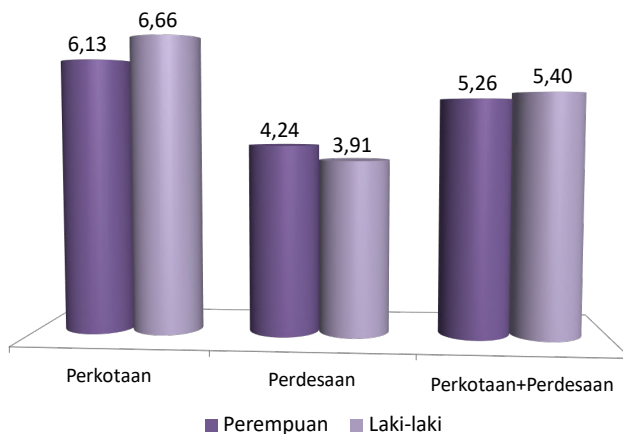
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan pada tahun 2018 ini sedikit lebih rendah dari pada TPT laki-laki yaitu 5,26 persen

berbanding 5,40 persen. Namun bila dilihat menurut daerah tempat tinggal, khususnya di daerah perdesaan kondisinya justru terbalik, yaitu lebih besar TPT perempuan (4,24 persen) dibandingkan TPT laki-laki (3,91 persen). Sementara itu di daerah perkotaan TPT perempuan lebih kecil dibandingkan TPT laki-laki yaitu 6,13 persen TPT perempuan dan 6,66 persen TPT laki-laki.

TPT baik perempuan maupun laki-laki antar provinsi angkanya sangat variatif, selisih angka TPT antara perempuan dan laki-laki tidak terlalu signifikan, namun selisih TPT perempuan di daerah perkotaan dan perdesaan cukup besar bisa mencapai 8 persen.

TPT perempuan di Maluku merupakan yang tertinggi di antara semua provinsi, yaitu sebesar 9,08 persen sedangkan yang terendah adalah di Bali, yaitu sebesar 0,82 persen. Sementara itu, TPT laki-laki yang tertinggi terdapat di Banten, yakni 8,84 persen, sedangkan TPT laki-laki terendah terdapat di Bali, yakni 1,83 persen (Lampiran Tabel E.3).

Gambar 3.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin, 2018



Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

3.4. Penduduk yang Bekerja

Pada Sub-Bab ini akan digambarkan karakteristik penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan, status perkawinan, lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, dan bekerja di sektor formal dan informal, menurut daerah tempat tinggal dan jenis kelamin.

3.4.1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan seringkali dipandang sebagai instrumen kebijakan yang krusial dalam mengurangi kemiskinan. Hal tersebut karena pendidikan dapat membantu seseorang untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan, dan akhirnya dapat meningkatkan derajat kehidupan mereka (Ionescu, 2012).

Tingkat pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang menentukan baik buruknya kualitas sumber daya manusia. Berkaitan dengan ketenagakerjaan, pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu digunakan untuk melihat seberapa jauh kualitas penduduk yang bekerja.

Biladilihat menurut daerah tempat tinggal, tingkat pendidikan penduduk berumur 15 tahun yang bekerja di daerah perkotaan dan perdesaan memiliki perbedaan karakteristik yang sangat besar. Di daerah perkotaan, mayoritas penduduk berumur 15 tahun yang bekerja berpendidikan tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) ke atas yaitu sebesar 53,63 persen untuk perempuan dan 55,55 persen untuk laki-laki. Sedangkan di daerah perdesaan, mayoritas penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja berpendidikan maksimum Sekolah Dasar (SD) yaitu sebesar 59,06 persen untuk perempuan dan 52,75 untuk laki-laki (Tabel 3.2).

Persentase pekerja perempuan dan laki-laki berumur 15 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas jauh lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan di daerah perdesaan, yakni sebesar 53,63 persen berbanding 23,84 persen untuk perempuan dan 55,55 persen berbanding 26,77 persen untuk laki-laki. Berbeda dengan di perkotaan, di perdesaan mayoritas penduduk berumur 15 tahun yang bekerja justru berpendidikan SD ke bawah. Bila dibandingkan berdasarkan jenis kelamin, persentase pekerja

Tabel 3.2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018

Daerah Tempat Tinggal/ Jenis Kelamin	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			Total
	Tamat SD ke Bawah	Tamat SMP	Tamat SMA Ke atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Perempuan	29,76	16,60	53,63	100,00
Laki-laki	26,98	17,47	55,55	100,00
Perdesaan				
Perempuan	59,06	17,10	23,84	100,00
Laki-laki	52,75	20,48	26,77	100,00
Perkotaan+Perdesaan				
Perempuan	43,43	16,83	39,74	100,00
Laki-laki	38,96	18,87	42,16	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

perempuan berumur 15 tahun ke atas yang berpendidikan maksimum SD, lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yakni sebesar 43,43 persen berbanding 38,96 persen.

Bila dilihat antar provinsi, perempuan berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan berpendidikan maksimal tamat SD, tamat SMP atau SMA ke atas angkanya sangat bervariasi. Persentase tertinggi dari perempuan yang bekerja dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan SD ke bawah ada di Papua yaitu sebesar 68,92 persen dan terendah di DKI Jakarta, yaitu sebesar 21,11 persen. Persentase tertinggi dari perempuan yang bekerja dengan tingkat pendidikan SMA ke atas ada di Kepulauan Riau sebesar 69,15 persen, sedangkan yang terendah di Papua, yaitu sebesar 21,27 persen. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa pekerja perempuan berumur 15 tahun ke atas di Kepulauan Riau memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan pekerja perempuan di provinsi lainnya (Lampiran Tabel E.4.1).

3.4.2. Status Perkawinan Pekerja

Dalam ulasan berikut, status perkawinan yang dimaksud disini terdiri atas empat (4) kriteria, yaitu belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Pada tahun 2018, mayoritas penduduk berumur 15 tahun yang bekerja berstatus kawin, baik di perkotaan maupun perdesaan.

Persentase laki-laki berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan berstatus kawin serta belum kawin selalu lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Sebaliknya, persentase perempuan berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan berstatus cerai hidup atau cerai mati, selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Persentase perempuan berumur 15 tahun ke atas yang bekerja seminggu yang lalu sebagian besar berstatus kawin. Secara total, persentase pekerja perempuan yang berstatus kawin sebesar 70,96 persen, sedangkan yang

43,43%

Perempuan usia 15 tahun ke atas yang bekerja hanya lulusan SD ke bawah

“

Mayoritas perempuan usia 15 tahun ke atas yang bekerja maksimal hanya lulusan SD ke bawah.

”

berstatus belum kawin sebesar 15,39 persen, cerai hidup sebesar 3,89 persen, dan cerai mati sebesar 9,76 persen (Tabel 3.3).

Perbandingan antarprovinsi menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki persentase pekerja perempuan yang berstatus belum kawin tertinggi, yaitu sebesar 29,45 persen. Sementara itu, persentase pekerja perempuan yang berstatus kawin tertinggi terdapat di Bengkulu, yaitu sebesar 78,84 persen. Persentase pekerja perempuan yang berstatus cerai hidup tertinggi terdapat di Nusa Tenggara Barat, yaitu sebesar 6,22 persen, sedangkan persentase pekerja perempuan yang berstatus cerai mati tertinggi terdapat di Jawa Timur dengan persentase sebesar 12,46 persen (Lampiran Tabel E.5.1 dan E.5.2).

Tabel 3.3. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, 2018

Daerah Tempat Tinggal/ Jenis Kelamin	Status Perkawinan				Total
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
Perempuan	19,96	66,51	4,39	9,14	100,00
Laki-laki	23,04	73,33	1,78	1,85	100,00
Perdesaan					
Perempuan	10,17	76,04	3,31	10,48	100,00
Laki-laki	19,77	76,35	1,65	2,23	100,00
Perkotaan+Perdesaan					
Perempuan	15,39	70,96	3,89	9,76	100,00
Laki-laki	21,52	74,73	1,72	2,03	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

3.4.3. Jam Kerja

Pasal 1 angka 1 Kepmenakertrans No. KEP 102/MEN/VI/2004 tentang sistem jam kerja diberikan batasan jam kerja yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Namun didapati sebanyak 39,81 persen perempuan usia 15 tahun ke atas yang bekerja, bekerja lebih dari 40 jam selama seminggu bahkan untuk laki-laki angkanya lebih besar lagi yaitu mencapai 53,84 persen (Tabel 3.4).

Perempuan usia 15 tahun ke atas yang bekerja lebih dari 40 jam selama seminggu lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan yaitu 49,44 persen berbanding 28,79 persen. Demikian halnya dengan laki-laki usia 15 tahun ke atas yang bekerja lebih dari 40 jam selama seminggu juga lebih banyak di daerah perkotaan dibanding di perdesaan yaitu 62,39 persen berbanding 44,01 persen.

Bila dilihat antarprovinsi, perempuan yang bekerja lebih dari 40 jam selama seminggu tertinggi ada di DKI Jakarta sebanyak 53,31 persen sedangkan paling rendah di Nusa Tenggara Timur sebanyak 19,57 persen. Laki-laki yang bekerja lebih dari 40 jam selama seminggu paling banyak juga di DKI Jakarta yaitu sebesar 66,15 persen sedangkan yang terendah di Sulawesi Barat yaitu sebesar

31,89 persen (Lampiran Tabel E.6.1. s.d. E.6.3). Di daerah perkotaan, perempuan yang bekerja lebih dari 40 jam selama seminggu terbanyak berada di provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 56,43 persen sedangkan terendah ada di Aceh yaitu sebesar 31,90 persen. Sementara itu di daerah perdesaan perempuan yang bekerja lebih dari 40 jam selama seminggu terbanyak ada di provinsi Bali yaitu sebesar 38,57 persen sedangkan terendah ada di Nusa Tenggara Timur dan Papua yaitu sama-sama sebesar 14,90 persen.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa waktu kerja yang normal adalah 40 jam seminggu. Namun tidak tertutup kemungkinan waktu kerja melebihi dari waktu normal, dimana kelebihan jam kerja dihitung sebagai lembur. Lebih dari separuh perempuan usia 20 hingga 24 tahun bekerja lebih dari 40 jam selama seminggu. Sementara itu lebih dari separuh laki-laki usia 20 hingga 54 tahun bekerja lebih dari 40 jam selama seminggu (Tabel 3.5). Tahun 2018 masih ada perempuan usia di atas 60 tahun yang waktu bekerja di atas 40 jam yaitu sebesar 28,21 persen sedangkan pada laki-laki angkanya lebih besar yaitu 34,55 persen.

Tabel 3.4. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Jumlah Jam Kerja, 2018

Daerah Tempat Tinggal/ Jenis Kelamin	Jumlah jam Kerja				Total
	0	1-34	35-40	>40	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
Perempuan	2,03	30,07	18,46	49,44	100,00
Laki-laki	1,76	18,19	17,65	62,39	100,00
Perdesaan					
Perempuan	2,15	55,78	13,28	28,79	100,00
Laki-laki	2,18	38,64	15,18	44,01	100,00
Perkotaan+Perdesaan					
Perempuan	2,08	42,06	16,05	39,81	100,00
Laki-laki	1,96	27,70	16,50	53,84	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel 3.5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur, dan Jumlah Jam Kerja, 2018

Jenis Kelamin/ Kelompok Umur	Jumlah jam Kerja				Total
	0	1-34	35-40	>40	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perempuan					
15 - 19	0,72	46,63	9,27	43,38	100,00
20 - 24	1,26	29,88	16,48	52,38	100,00
25 - 29	2,01	34,81	19,58	43,60	100,00
30 - 34	2,15	38,75	18,01	41,09	100,00
35 - 39	1,80	40,78	17,15	40,26	100,00
40 - 44	1,92	41,35	16,42	40,30	100,00
45 - 49	1,89	42,42	16,26	39,44	100,00
50 - 54	2,40	45,32	15,50	36,78	100,00
55 - 59	2,65	50,88	14,68	31,79	100,00
60 +	3,50	57,17	11,12	28,21	100,00
Total	2,08	42,06	16,05	39,81	100,00
Laki-laki					
15 - 19	1,09	50,15	9,72	39,04	100,00
20 - 24	1,33	25,25	14,26	59,17	100,00
25 - 29	1,37	21,55	17,07	60,01	100,00
30 - 34	1,46	21,58	17,06	59,90	100,00
35 - 39	1,59	21,93	17,23	59,25	100,00
40 - 44	1,77	22,86	17,58	57,79	100,00
45 - 49	1,90	24,38	17,61	56,11	100,00
50 - 54	2,43	28,48	18,39	50,70	100,00
55 - 59	2,85	34,14	18,23	44,77	100,00
60 +	3,86	48,11	13,48	34,55	100,00
Total	1,96	27,70	16,50	53,84	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

3.4.4. Lapangan Pekerjaan Utama

Komposisi penyebaran jumlah pekerja di suatu wilayah menurut lapangan pekerjaan menunjukkan sektor-sektor apa saja yang menjadi tumpuan kegiatan ekonomi wilayah tersebut. Sebanyak 26,62 persen perempuan berumur 15 tahun ke atas bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan perbandingan antar perkotaan dan perdesaan yang sangat signifikan yaitu 7,15 persen di perkotaan berbanding 48,90 persen di perdesaan. Tingginya pekerja perempuan perdesaan yang bekerja di sektor pertanian sesuai dengan kondisi perdesaan yang masih banyak sektor pertaniannya.

Selain di sektor pertanian, perempuan juga banyak yang bekerja di sektor industri pengolahan yaitu sebanyak 16,45 persen dengan perbandingan 18,91 persen di perkotaan dan 13,64 persen di perdesaan. Kekuatan fisik adalah perbedaan yang cukup mendasar antara perempuan dengan laki-laki. Laki-laki dikodratkan memiliki fisik yang lebih kuat dibandingkan perempuan. Demikian halnya dengan dunia kerja yang membutuhkan kekuatan fisik, persentase perempuan berumur 15 tahun ke atas bekerja pada sektor konstruksi jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki yaitu 0,37 persen berbanding 10,68 persen.

Sektor perdagangan besar juga banyak mempekerjakan baik perempuan maupun laki-laki. Persentase perempuan berumur 15 tahun ke atas bekerja pada sektor perdagangan besar sebanyak 23,71 persen sedangkan laki-laki hanya 15,39 persen. Perbandingan antara daerah perkotaan dan perdesaan untuk perempuan berumur 15 tahun ke atas bekerja pada sektor perdagangan besar juga sangat signifikan yaitu 28,54 di perkotaan dan 18,19 persen di perdesaan.

26,62%

Perempuan usia 15 tahun ke atas bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan

“

Mayoritas perempuan usia 15 tahun ke atas bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

”

Tabel 3.6. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan 17 Golongan Lapangan Pekerjaan Utama Seminggu yang Lalu, 2018

Daerah Tempat Tinggal/ Jenis Kelamin	Lapangan Pekerjaan Utama								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Perkotaan									
Perempuan	7,15	0,18	18,91	0,13	0,32	0,48	28,54	0,89	12,42
Laki-laki	11,39	1,26	17,13	0,53	0,69	10,89	19,92	9,02	6,20
Perdesaan									
Perempuan	48,90	0,34	13,64	0,03	0,10	0,24	18,19	0,12	5,47
Laki-laki	51,75	2,32	9,60	0,24	0,25	10,44	10,18	4,16	2,08
Perkotaan+Perdesaan									
Perempuan	26,62	0,25	16,45	0,08	0,22	0,37	23,71	0,53	9,18
Laki-laki	30,16	1,75	13,63	0,39	0,48	10,68	15,39	6,76	4,29

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Lanjutan Tabel 3.6.

Daerah Tempat Tinggal/ Jenis Kelamin	Lapangan Pekerjaan Utama								
	10	11	12	13	14	15	16	17	
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Perkotaan									
Perempuan	0,92	2,11	0,35	1,30	3,58	9,22	3,42	10,10	
Laki-laki	1,27	2,38	0,70	2,65	6,02	3,72	1,20	5,04	
Perdesaan									
Perempuan	0,27	0,38	0,02	0,22	1,56	6,04	1,49	2,99	
Laki-laki	0,23	0,58	0,04	0,57	2,74	2,38	0,43	2,00	
Perkotaan+Perdesaan									
Perempuan	0,62	1,30	0,19	0,80	2,64	7,74	2,52	6,78	
Laki-laki	0,79	1,54	0,39	1,69	4,49	3,10	0,84	3,63	

Keterangan:

- 1 : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- 2 : Pertambangan dan Penggalian
- 3 : Industri Pengolahan
- 4 : Pengadaan Listrik dan Gas
- 5 : Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
- 6 : Konstruksi
- 7 : Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
- 8 : Transportasi dan Pergudangan
- 9 : Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- 10 : Informasi dan Komunikasi
- 11 : Jasa Keuangan dan Asuransi
- 12 : Real Estat
- 13 : Jasa Perusahaan
- 14 : Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- 15 : Jasa Pendidikan
- 16 : Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- 17 : Jasa Lainnya

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

3.4.5. Status Pekerjaan Utama

Perbandingan status pekerjaan utama antara perempuan dan laki-laki menunjukkan pola yang sama, dimana persentase penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai menempati posisi tertinggi, yaitu untuk perempuan sebesar 36,34 persen dan untuk laki-laki sebesar 41,82 persen. Status pekerja perempuan dan laki-laki yang menjalankan usaha dengan dibantu buruh tetap persentasenya paling rendah, yaitu sebesar 1,86 persen untuk perempuan dan 4,47 persen untuk laki-laki.

Ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, perempuan yang bekerja di perkotaan sebagian besar bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 49,73 persen,

sedangkan di perdesaan didominasi oleh mereka yang bekerja sebagai pekerja keluarga dengan persentase sebesar 34,85 persen. Sementara itu, laki-laki baik yang bekerja di perkotaan maupun perdesaan sebagian besar bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 54,44 persen untuk perkotaan dan 27,31 persen untuk perdesaan (Tabel 3.7).

Kondisi perempuan sebagai pekerja keluarga merupakan gambaran dari keadaan ketenagakerjaan di Indonesia, dimana telah dibahas sebelumnya bahwa laki-laki merupakan pencari nafkah utama dan perempuan pada umumnya ikut bekerja hanya untuk membantu menambah penghasilan keluarga sebagai pekerja keluarga. Persentase perempuan yang

berstatus sebagai pekerja keluarga sebesar 22,57 persen, sedangkan persentase laki-laki sebagai pekerja keluarga cukup rendah, yaitu hanya 5,67 persen (Tabel 3.7).

Perempuan sebagai buruh/karyawan/pegawai terdapat hampir di sebagian besar provinsi di Indonesia. Persentase tertinggi perempuan sebagai buruh/karyawan/pegawai adalah di DKI Jakarta, yaitu sebesar 69,69 persen, sedangkan yang terendah di Papua, yaitu sebesar 13,01 persen. Selain itu, perempuan sebagai pekerja keluarga juga ada hampir di sebagian besar provinsi di Indonesia, dimana persentase tertingginya adalah di Papua, yaitu sebesar 62,32 persen, sedangkan yang terendah di DKI Jakarta, yaitu sebesar 6,01 persen (Lampiran Tabel E.9.1).

22,57%

Perempuan Usia 15 tahun ke atas berkerja sebagai pekerja keluarga

“

Hampir seperempat perempuan usia 15 tahun ke atas yang berkerja berstatus pekerja keluarga.

”

Tabel 3.7. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Status Pekerjaan Utama, 2018

Daerah Tempat Tinggal/ Jenis Kelamin	Status Pekerjaan Utama							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Perkotaan								
Perempuan	20,95	10,99	2,46	49,73	1,68	2,11	12,08	100,00
Laki-laki	18,54	9,34	5,11	54,44	2,04	7,18	3,36	100,00
Perdesaan								
Perempuan	18,47	16,85	1,18	21,02	6,16	1,74	34,58	100,00
Laki-laki	18,63	25,92	3,73	27,31	7,26	8,83	8,33	100,00
Perkotaan+Perdesaan								
Perempuan	19,79	13,72	1,86	36,34	3,77	1,94	22,57	100,00
Laki-laki	18,58	17,05	4,47	41,82	4,47	7,95	5,67	100,00

Keterangan:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 : Berusaha Sendiri | 5 : Pekerja Bebas di Pertanian |
| 2 : Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/
Buruh Tidak Dibayar | 6 : Pekerja Bebas di Non
Pertanian |
| 3 : Berusaha Dibantu Buruh Tetap | 7 : Pekerja Keluarga |
| 4 : Buruh/Karyawan/Pegawai | |

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

3.4.6. Rata-rata Upah

Rata-rata upah/gaji merupakan salah satu aspek paling penting dari informasi pasar tenaga kerja. Informasi mengenai upah penting untuk mengevaluasi standar hidup dan kondisi dari pekerjaan dan kehidupan dari para pekerja. Informasi tersebut

juga dibutuhkan dalam perencanaan ekonomi dan pengembangan sosial, penentuan kebijakan pendapatan dan fiskal, pengaturan perlindungan sosial, dan pengaturan minimum upah/gaji (ILO, 2015).

Berdasarkan konsep yang diterapkan pada Sakernas, upah/gaji bersih adalah upah/gaji bersih yang biasanya diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan/pegawai baik berupa uang atau barang yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan. Upah/gaji bersih yang dimaksud adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan, iuran wajib, pajak penghasilan dan lain sebagainya oleh perusahaan/kantor/majikan (BPS, 2015). Rasio upah antara pekerja perempuan dan laki-laki sangat menarik untuk dibahas dengan melihat perbedaan kondisi antara buruh/karyawan/pegawai perempuan dan laki-laki berdasarkan daerah tempat tinggal, tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan utamanya, dan status perkawinannya.

Rata-rata upah/gaji pekerja perempuan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan, yaitu sebesar Rp2.664.010,- berbanding Rp1.680.421,-. Kemudian secara umum rata-rata upah/gaji pekerja perempuan selalu lebih rendah bila dibandingkan dengan pekerja laki-laki baik di perkotaan maupun di perdesaan (Gambar 3.3).

Salah satu elemen penting yang menentukan tingkat upah/gaji dari pekerja adalah capaian pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang pekerja, semakin tinggi juga upah/gaji yang diharapkan orang tersebut (ADB, 2014).

Rata-rata upah/gaji buruh/karyawan/pegawai perempuan

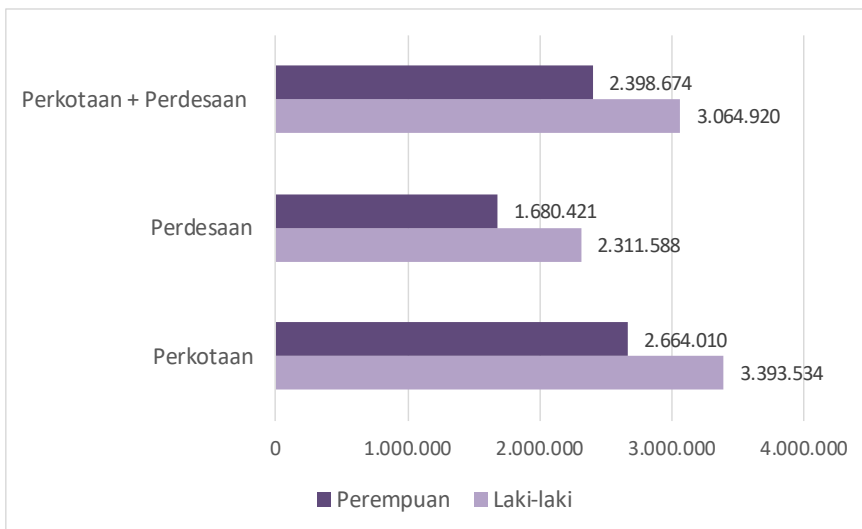
Rp2.398.674

“

Upah/gaji perempuan sebagai buruh/karyawan/pegawai sebulan masih lebih rendah dibandingkan upah/gaji laki-laki .

”

Gambar 3.3. Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai selama Sebulan menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2018



Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel 3.8 menunjukkan dengan jelas bahwa pekerja yang berpendidikan lebih tinggi, memperoleh rata-rata upah/gaji yang besar. Terdapat perbedaan rata-rata upah/gaji yang diperoleh perempuan dengan laki-laki. Hal tersebut tercermin dari rasio upah perempuan dan laki-laki yang selalu kurang dari 100 pada setiap jenjang pendidikan. Perbedaan yang cukup besar terlihat pada tingkat pendidikan tidak/belum tamat, dimana rasio upahnya sebesar 56,24 yang berarti bahwa upah/gaji perempuan hanya 56,24 persen dari upah/gaji laki-laki. Rasio upah/gaji yang diperoleh perempuan dengan laki-laki dengan perbedaan yang paling sedikit adalah pada kelompok pendidikan SMTA kejuruan yaitu dengan rasio 75,37 persen.

Hal yang menarik dapat kita lihat pada perbandingan rata-rata upah/gaji antara pekerja perempuan dan laki-laki menurut lapangan pekerjaan utama, ternyata rata-rata upah/gaji pekerja perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki ada pada (1) sektor listrik/gas, (2) sektor konstruksi,

(3) transportasi dan pergudangan, (4) real estate, dan (5) jasa perusahaan. Selebihnya ada 12 sektor lainnya dimana rata-rata upah/gaji pekerja laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan.

78,26%

Rasio upah/gaji buruh/karyawan/pegawai perempuan terhadap laki-laki

“

Upah/gaji perempuan usia 15 tahun ke atas yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

”

Tabel 3.8. Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/ Pegawai selama Sebulan menurut Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin, 2018

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Rasio Upah
	Perempuan	Laki-laki	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	889.766	1.457.000	61,07
Tidak/Belum Tamat SD	1.028.475	1.828.742	56,24
Sekolah Dasar	1.287.346	2.013.827	63,93
SLTP	1.592.421	2.199.481	72,40
SMTA Umum	2.091.215	3.004.302	69,61
SMTA Kejuruan	2.231.596	2.960.758	75,37
Diploma I/II/III/Akademi	2.968.698	4.503.389	65,92
Universitas	3.756.310	5.391.212	69,67
Total	2.398.674	3.064.920	78,26

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel 3.9. Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/ Pegawai selama Sebulan menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2018

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Rasio Upah
	Perempuan	Laki-laki	
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.327.426	2.029.270	65,41
B. Pertambangan dan Penggalian	3.862.237	4.676.807	82,58
C. Industri Pengolahan	2.196.332	2.991.517	73,42
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4.424.397	3.493.327	126,65
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1.957.991	2.763.817	70,84
F. Konstruksi	3.473.879	2.694.199	128,94
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	2.111.459	2.541.896	83,07
H. Transportasi dan Pergudangan	3.458.367	3.237.585	106,82
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.802.238	2.557.652	70,46
J. Informasi dan Komunikasi	3.666.214	4.223.458	86,81
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.215.839	4.460.715	94,51
L. Real Estat	4.142.789	3.442.513	120,34
M,N. Jasa Perusahaan	3.626.887	3.488.046	103,98
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.459.434	4.020.050	86,05
P. Jasa Pendidikan	2.564.910	3.223.713	79,56
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.186.527	3.690.203	86,35
R,S,T,U Jasa Lainnya	1.293.809	2.239.354	57,78
Total	2.398.674	3.064.920	78,26

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Rasio upah yang memiliki angka diatas 100 menunjukkan bahwa rata-rata upah/gaji bersih buruh/karyawan/pegawai perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Rasio upah untuk sektor listrik dan gas adalah 126,65 persen yang berarti bahwa besarnya upah/gaji bersih pekerja perempuan lebih tinggi 26,65 persen dibandingkan laki-laki, kemudian rasio upah untuk sektor konstruksi adalah 128,94 yang berarti bahwa besarnya upah/gaji bersih pekerja perempuan lebih tinggi 28,94 persen dibandingkan laki-laki. Sementara itu, terendah adalah rasio upah pada sektor jasa lainnya adalah 57,78, yang artinya besarnya upah/gaji bersih pekerja perempuan hanya sebesar 57,78 persennya laki-laki (Tabel 3.9).

Secara umum rata-rata upah/gaji bersih pekerja perempuan berumur 15 tahun ke atas, lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki. Demikian pula halnya bila dilihat berdasarkan

status perkawinan, kelompok pekerja perempuan berumur 15 tahun ke atas baik yang berstatus belum kawin, kawin, cerai hidup, maupun cerai mati memiliki rata-rata upah/gaji bersih yang lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki. (Tabel 3.10).

Pada tingkat provinsi, rata-rata upah/gaji bagi buruh/karyawan/ pegawai perempuan yang tertinggi adalah di DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp. 3.863.548,- dan yang terendah adalah di Nusa Tenggara Barat, yaitu sebesar Rp. 1.664.192,-. Tidak berbeda dengan kelompok perempuan, rata-rata upah/gaji bagi buruh/karyawan/pegawai laki-laki yang tertinggi juga terdapat di DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp. 4.754.794,- dan yang terendah di Nusa Tenggara Timur Rp. 2.101.245,- (Lampiran Tabel E.11).

Tabel 3.10. Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/ Pegawai selama Sebulan menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin, 2018

Status Perkawinan	Jenis Kelamin		Rasio Upah
	Perempuan	Laki-laki	
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	2 249 317	2 307 684	97,47
Kawin	2 520 372	3 391 631	74,31
Cerai Hidup	2 252 832	2 490 975	90,44
Cerai Mati	1 946 021	2 389 277	81,45
Total	2 398 674	3 064 920	78,26

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

3.4.7. Pekerja di Sektor Informal dan Sektor Formal

Sektor informal merupakan bagian penting dari ekonomi dan pasar tenaga kerja di banyak negara. Sektor informal memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja, produksi, dan pendapatan (ILO, 2015). *International Conference of Labour Statisticians (ICLS) ke-15* pada tahun 1993, mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri dari semua orang yang selama periode acuan tertentu bekerja setidaknya di satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan tersebut baik merupakan pekerjaan utama maupun sekunder (ILO, 2015).

Di dalam ulasan berikut, konsep penduduk yang bekerja pada sektor informal adalah penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga. Sementara penduduk yang bekerja pada sektor formal adalah penduduk yang bekerja dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan status buruh/karyawan/pegawai.

Adapun ciri-ciri sektor informal menurut Urip Soewarno dan Hidayat (1979: 38), adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas pada sektor ini tidak terorganisir secara baik karena timbulnya tidak melalui institusi yang ada pada perekonomian modern,
2. Karena kebijakan pemerintah tidak sampai pada sektor ini, maka sektor informal tidak memiliki hubungan langsung dengan pemerintah,
3. Pada umumnya setiap unit usaha tidak memiliki izin usaha dari pemerintah, pola kegiatan tidak teratur dengan baik dalam arti tempat dan jam kerja,
4. Unit usaha pada sektor ini mudah untuk masuk dan keluar dari sektor ke sektor lain,
5. Karena modal dan peralatan serta perputaran usaha relative kecil, maka skala operasi unit usaha ini kecil pula,
6. Teknologi yang digunakan termasuk kedalam teknologi yang sederhana,
7. Untuk mengelola usaha tidak diperlukan tingkat pendidikan tertentu, serta keahliannya didapat dari sistem pendidikan non formal dan pengalaman.

Lebih disederhanakan lagi, biasanya, pekerja sektor informal adalah mereka yang berusaha padausahamilikpribadiataukeluarga, usahanya berskala kecil, sering dibantu oleh buruh tidak tetap atau pekerja yang memiliki hubungan keluarga, serta tidak diatur melalui mekanisme pasar yang kompetitif layaknya sebuah perusahaan. Contoh dari jenis kegiatan pekerja sektor informal antara lain pedagang kaki lima (PKL), nelayan, petani, buruh bangunan, dan lain sebagainya.

Pekerja sektor informal memiliki risiko tidak mendapatkan aspek perlindungan ketenagakerjaan secara hukum seperti upah minimum, uang pesangon, uang lembur, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dan sebagainya. Dengan tidak mendapatkan aspek perlindungan ketenagakerjaan secara hukum tersebut, menyebabkan pekerja informal seringkali hidup dalam ketidakpastian dan rentan menjadi pengangguran bahkan jatuh miskin. Hal inilah yang menjadi tantangan buat pemerintah untuk menata kembali undang-undang agar pekerja informal yang jumlahnya banyak ini terlindungi secara hukum. Padahal, selama ini sektor informal adalah sektor yang menekan angka pengangguran cukup banyak utamanya di negara yang sedang berkembang.

Kemajuan perekonomian sebuah negara dapat pula ditandai dengan adanya transformasi ke arah penurunan pekerja informal. Semakin maju perekonomian, semakin besar peranan sektor formal. Sampai dengan Agustus 2018, sektor informal masih mendominasi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dengan kontribusi sekitar 61,80 persen pekerja perempuan dan 53,71 persen pekerja laki-laki (Tabel 3.11). Sebagian orang menyebut sektor informal sebagai sektor penyelamat. Elastisitas sektor informal dalam menyerap tenaga kerja menjadikan sektor ini selalu bergairah meskipun nilai tambah yang diciptakannya mungkin tidak sebesar nilai tambah sektor formal.

61,80%

Perempuan Usia 15 tahun bekerja pada sektor informal

“

Mayoritas perempuan usia 15 tahun ke atas bekerja pada sektor informal.

”

Tabel 3.11. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Sektor Pekerjaan, 2018

Daerah Tempat Tinggal/ Jenis Kelamin	Sektor Pekerjaan		Total
	Formal	Informal	
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Perempuan	52,19	47,81	100,00
Laki-laki	59,55	40,45	100,00
Perdesaan			
Perempuan	22,20	77,80	100,00
Laki-laki	31,03	68,97	100,00
Perkotaan+Perdesaan			
Perempuan	38,20	61,80	100,00
Laki-laki	46,29	53,71	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tuntutan pekerjaan dengan kualifikasi pendidikan dan ketrampilan memadai di daerah perkotaan menjadi kendala pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan. Mereka yang pada mulanya berkeinginan bekerja di sektor formal pada akhirnya bermuara di sektor informal. Dari 100 pekerja perempuan di perdesaan, sebanyak 78 persen bekerja di sektor informal, sementara di perkotaan, dari 100 pekerja perempuan, lebih dari 48 bekerja di sektor informal.

Bila ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, sebagian besar perempuan perkotaan berumur 15 tahun justru bekerja di sektor formal, yakni sebesar 52,19 persen. Sebaliknya di perdesaan, mayoritas perempuan berumur 15 tahun ke atas bekerja di sektor informal dengan persentase sebesar 77,80 persen. Pola yang sama juga ditunjukkan pada kelompok laki-laki (Tabel 3.11).

Alasan banyak perempuan bekerja di sektor informal adalah tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan perempuan karena salah satu dari ciri sektor informal adalah tidak membutuhkan tingkat pendidikan yang tinggi.

Persentase pekerja perempuan sektor formal yang berpendidikan tamat

SD kebawah hanya 25,75 persen, sedangkan pada sektor informal sebesar 74,25 persen atau sekitar tiga kali lipatnya. Sebaliknya, persentase pekerja perempuan sektor informal yang berpendidikan SMA keatas lebih rendah dibandingkan di sektor formal, yaitu 32,67 persen berbanding 67,33 persen (Tabel 3.12). Hal ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh pada jenis pekerjaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin besar kemungkinan untuk bekerja pada sektor formal.

Kondisi yang sama juga berlaku pada laki-laki. Persentase pekerja laki-laki pada sektor informal yang berpendidikan tamat SD ke bawah adalah sebesar 83,28 persen, sedangkan pada sektor formal, sekitar seperlimanya, yakni sebesar 16,72 persen. Persentase pekerja laki-laki pada sektor informal yang berpendidikan SMA keatas sebesar 35,12 persen, sedangkan pada sektor formal hampir dua kali lipatnya, yaitu sebesar 64,88 persen. Hal tersebut menjelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja pada sektor informal lebih banyak pada mereka yang berpendidikan rendah, sebaliknya pada sektor formal lebih banyak pada mereka yang berpendidikan lebih tinggi (Tabel 3.12).

Tabel 3.12. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu yang Lalu menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Sektor Pekerjaan, 2018

Status Perkawinan	Perempuan		Total	Laki-laki		Total
	Formal	Informal		Formal	Informal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tamat SD ke bawah	25,75	74,25	100,00	16,72	83,28	100,00
SMP	41,68	58,32	100,00	30,64	69,36	100,00
SMA ke atas	67,33	32,67	100,00	64,88	35,12	100,00
Total	46,29	53,71	100,00	38,20	61,80	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

3.4.8. Pengalaman Bekerja Pengurus Rumah Tangga

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perempuan yang mengurus rumah tangga, persentasenya jauh lebih besar dibanding laki-laki, yaitu 36,67 persen dibanding 3,99 persen. Tingginya angka perempuan yang saat ini berstatus hanya mengurus rumah tangga tidak lepas dari berbagai hal. Salah satu yang paling sering didengar adalah kodrat sebagai perempuan yang diciptakan untuk mengurus rumah tangga sedangkan laki-laki kodratnya adalah mencari nafkah.

Keputusan perempuan bekerja untuk memilih mengurus rumah tangga bukan hal yang mudah dilakukan. Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan, baik dari sisi ekonomi maupun pikiran lain, seperti ego atau cita-cita. Namun demikian, manajer rumah tangga bukanlah pekerjaan mudah, mengatur rumah

tangga juga sama rumitnya mengelola sebuah perusahaan.

Seringkali perempuan harus memilih untuk bekerja meningkatkan karier atau mengurus rumah tangga. Di Indonesia, perempuan yang mengurus rumah tangga banyak yang dahulunya pernah bekerja. Perempuan yang saat ini berstatus mengurus rumah tangga dan dahulu pernah bekerja mencapai 65,33 persen. Perempuan di perkotaan (68,20 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (59,42 persen). Laki-laki yang saat ini berstatus hanya mengurus rumah tangga memang jumlahnya sedikit (3,99 persen), namun demikian sebanyak 45,15 persen dari mereka dahulunya pernah bekerja (47,03 persen di perkotaan dan 42,66 persen di perdesaan) (Tabel 3.13).

Tabel 3.13. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Sektor Pekerjaan, 2018

Daerah Tempat Tinggal/ Jenis Kelamin	Pengalaman Bekerja		Total
	Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja	
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Perempuan	68,20	31,80	100,00
Laki-laki	47,03	52,97	100,00
Perdesaan			
Perempuan	59,42	40,58	100,00
Laki-laki	42,66	57,34	100,00
Perkotaan+Perdesaan			
Perempuan	65,33	34,67	100,00
Laki-laki	45,15	54,85	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

3.5. Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Dalam UU No. 18/2017 ditegaskan, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Di Indonesia, kewenangan mengurus pekerja migran diurus oleh Badan Nasional Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Pada tahun 2018 BNP2TKI menempatkan sebanyak 283.640 PMI yang terdiri dari 84.665 PMI laki-laki dan 198.975 PMI perempuan atau 29,85 persen PMI laki-laki dan 70,15 persen

PMI perempuan. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tren penempatan PMI ke luar negeri terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena penghentian penempatan PMI pada pengguna perseorangan ke kawasan Timur Tengah, yang diberlakukan pemerintah melalui Peraturan Menteri Nomor 260/2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan.

198.975

Pekerja migran perempuan pada tahun 2018

“

Dalam beberapa tahun terakhir, pekerja migran perempuan Indonesia selalu mendominasi dibandingkan dengan pekerja migran laki-laki.

”

Tabel 3.14. Banyaknya Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh BNP2TKI menurut Jenis Kelamin, 2014-2018

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	186.244	243.630	429.874
2015	108.970	166.767	275.737
2016	89.059	145.392	234.451
2017	78.258	184.641	262.899
2018	84.665	198.975	283.640

Sumber: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 2018

PEREMPUAN

DAN

TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI



70,49%

7 dari 10 perempuan usia 5 tahun ke atas menggunakan HP.



Perkotaan
75,81%



Perdesaan
64,03%



Perempuan usia 5 tahun ke atas di perkotaan lebih banyak menggunakan HP daripada yang di perdesaan.

37,49%

Lebih dari sepertiga perempuan usia 5 tahun ke atas mengakses internet dalam 3 bulan terakhir



18,05%



Sekitar 2 dari 10 perempuan usia 5 tahun ke atas menggunakan Komputer

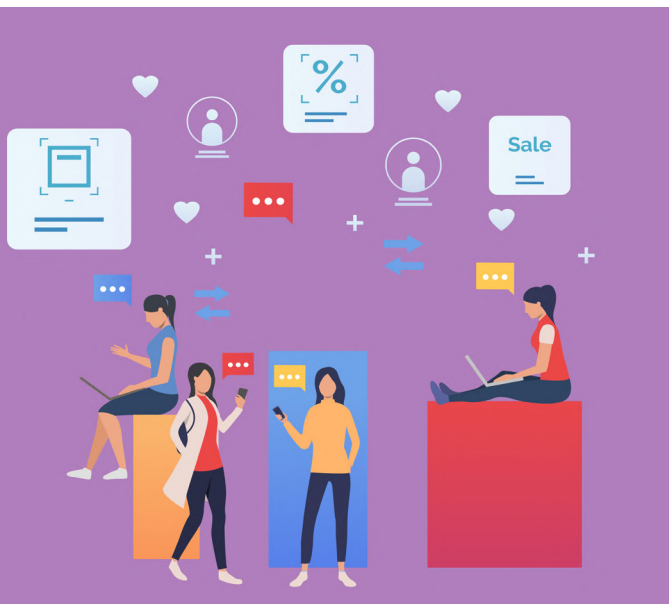


Rp17.033,-



Rp13.767,-

Pengeluaran per kapita sebulan untuk pulsa HP (Rp17.033,-) rumah tangga yang dikepalai perempuan lebih tinggi dari pengeluaran untuk biaya internet (Rp13.767,-)



Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Perempuan Indonesia



1. Latar Belakang

Saat ini teknologi informasi sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat Indonesia. Penggunaan komputer, telepon genggam, termasuk internet sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat. Teknologi informasi telah mengubah cara kita dalam belajar, bekerja, berkomunikasi, berbelanja dan berbagai urusan hidup lainnya. Dengan internet kita juga dapat mengenal bekerja jarak jauh (*remote working*). Orang tidak harus selalu bekerja di belakang meja kantor tetapi bisa di rumah, *café* bahkan di luar kota. Banyak juga yang memanfaatkan internet sebagai tempat berdagang, tempat mengobrol dan juga membuat semacam toko sebagai tempat usahanya. Cara ini bisa lebih murah dan dapat menjangkau lebih banyak orang dan tempat.

Perempuan memiliki banyak peran dalam kehidupan, tidak hanya peran sebagai ibu tetapi juga perannya sebagai profesional di dunia kerja serta peran sosial di tengah masyarakat. Kemajuan perempuan yang semakin setara dengan laki-laki, Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat menjadi “alat bantu” untuk menunjang peran-peran tersebut.

Terkait dengan kelompok masyarakat, harus diakui bahwa pemanfaatan TIK saat ini masih terkena imbas dari isu bias gender. (Melhem, dkk. 2009) menjabarkan bahwa pada negara negara berkembang, salah satu kendala yang dihadapi perempuan dibandingkan dengan laki laki adalah terkait dengan penggunaan dan akses terhadap TIK. Banyak faktor baik teknis, sosial maupun budaya yang membatasi akses perempuan dalam memanfaatkan TIK sebagai sarana pengembangan dan pemberdayaan (Terry dan Gomez, 2011).

Terry dan Gomez (2011) menjabarkan beberapa hambatan yang menyebabkan banyak perempuan di negara-negara berkembang kesulitan untuk memperoleh akses dan memanfaatkan TIK. Selain permasalahan infrastruktur dan konektivitas, hambatan yang sering dihadapi oleh para perempuan adalah masalah ketersediaan waktu dan biaya. Hal ini terkait dengan peran perempuan di negara berkembang yang mayoritas masih mengutamakan peran sebagai ibu rumah tangga, sehingga semua waktunya banyak digunakan untuk mengurus anak dan keluarga.

Keterbatasan penguasaan teknologi tidak lagi menjadi isu utama.

Penguasaan teknologi teranyar justru menjadi tuntutan kaum perempuan modern. Mereka berupaya terus meng-*update* perkembangan teknologi. Kondisi global perkembangan teknologi informasi menuntut para pekerja teknologi informasi untuk menciptakan, menerapkan, dan menggunakan teknologi informasi secara maksimal. Namun para perempuan dalam perkembangan teknologi informasi masih minoritas dibandingkan dengan banyaknya jumlah laki-laki yang masih memegang peranan penting dalam teknologi informasi.

Teknologi yang semakin ramah dan efisien turut memberikan dampak bagi peningkatan kepercayaan diri perempuan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Perempuan juga tak kalah piawai dengan pria dalam penguasaan teknologi. Selain semakin gampang digunakan, teknologi membuat kegiatan bisa dilakukan dengan lebih ringan, berbiaya murah, dan efisien. Perempuan mengakrabi teknologi sebagai upaya untuk menjadi bagian dari tren sekarang ini. Termasuk disini para ibu rumah tangga, meski di rumah tetapi tetap mengikuti tren teknologi dengan aneka cara.

Dalam riset dilakukan pada tahun 2010 oleh MarkPlus Insight, mengenai perempuan dan teknologi yang dilakukan terhadap

1.301 responden diketahui bahwa 30 persen perempuan sangat mengakrabi dan mengakses internet untuk berbagai keperluan. Dominasi perempuan yang lekat dengan kemajuan teknologi terutama yang terkait dengan internet berusia antara 16 – 35 tahun. Bisa dikatakan bahwa perempuan muda sangat akrab dan mulai melekatkan diri dengan teknologi. Tidak salah jika teknologi informasi menjadi bagian dari gaya hidup perempuan di Indonesia. Keterlibatan 45 persen perempuan dalam berbagai akun media sosial juga ikut mengukuhkan kemampuan mereka dalam penguasaan teknologi tersebut.

Anita Borg dari *Institute for Women and Technology* mengatakan, "*We use technology to connect our communities. We create technology because it is who we are intelligent, creative and driven. We lead with compassion and a belief in inclusion. We develop competitive products and find solutions to problems that impact our lives, our nation, our world...*"

Keterlibatan perempuan dalam teknologi tidak hanya meningkatkan pencitraan dirinya. Keterlibatan ini juga membuat perempuan mendapat pengakuan dari teman-teman, keluarga, maupun lingkungan sekitarnya. Selain itu, mereka menggunakan teknologi itu agar tetap terhubung dengan dunia sekitar.



2. Tinjauan Pustaka

Istilah teknologi informasi oleh UNESCO diistilahkan dengan sebutan ICT (*Information and Communication Technology*). Dalam bahasa Indonesianya ICT disebut dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pertama kali di sebut di Indonesai sejak tahun 1970 an saat berdirinya Pustekkomdikbud/Diknas.

Teknologi Informasi dan Komunikasi, adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi Teknologi Informasi dan Komunikasi mengandung pengertian luas yaitu segala kegiatan

yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer (baik perangkat keras maupun perangkat lunak) dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat melampaui bidang teknologi lainnya. Hingga awal abad ke-21, TIK masih terus mengalami berbagai perubahan dan belum terlihat titik jenuhnya (wikipedia.org).

Perempuan dan TIK

Semua lini kehidupan manusia saat ini bergerak ke arah pemanfaatan teknologi. Berkomunikasi, berpindah tempat, melakukan riset, atau sekadar mencari tiket pesawat murah bisa dipermudah dengan teknologi.

Isu gender dan TIK, merupakan satu dari tiga isu penting dan besar yang dihadapi wanita secara global saat ini setelah isu kemiskinan dan kekerasan terhadap perempuan. Bahkan, dalam deklarasi Beijing 1995 dan program aksinya yang diadopsi dari konferensi dunia keempat mengenai wanita, telah dicantumkan isu gender dan TIK tersebut. Mengenai hal ini, banyak pendapat yang mengatakan bahwa TIK merupakan satu sarana penting dalam memberdayakan wanita. Namun ada juga yang berpendapat bahwa TIK hanya untuk pembangunan secara umum dan bukan secara khusus untuk memberdayakan wanita. Kritik terhadap peran TIK untuk memberdayakan wanita ini bertumpu pada suatu pemikiran bahwa sebenarnya kebutuhan paling mendasar yang sangat diperlukan wanita di negara berkembang, lebih kepada penyediaan air bersih, kecukupan pangan, peningkatan kesehatan serta peningkatan pendidikan.

Menurut mereka yang percaya pada pendapat ini, TIK bagi wanita di negara berkembang hanya merupakan barang mewah yang sulit dan mustahil diakses. Pendapat ini kemudian ditangkis dengan argumen bahwa upaya penyediaan air bersih, kecukupan pangan, peningkatan kesehatan, peningkatan pendidikan dan TIK saling bertautan. Pasalnya, akses yang mudah pada informasi yang kemudian berdampak pada meningkatnya komunikasi dapat mengakhiri isolasi wanita dan mempromosikan gaya hidup sehat, ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Lestari, 2010).

Perempuan dan teknologi bukan sekedar bermakna bertemunya sebuah produk dengan pasar potensial lalu menghasilkan keuntungan yang fantastis. Ini juga bisa berarti bertemunya dua kekuatan besar untuk melakukan sebuah perubahan revolusioner menuju masyarakat dan bangsa yang lebih maju dan berkualitas.

Era teknologi informasi adalah momentum kebangkitan peran perempuan. Tidak hanya karena pertumbuhan perempuan pengguna seluler melaju lebih cepat dari kaum laki-laki, dengan teknologi seluler di tangannya, perempuan dapat melakukan perubahan luar biasa. Tidak hanya untuk dirinya, tapi juga keluarganya bahkan juga untuk masyarakat dan negara. Teknologi telah melesatkan peran perempuan ke barisan terdepan sebagai penggerak utama perubahan di negeri ini.

Jika sebelumnya, dalam banyak hal perempuan seringkali dianggap lamban, terbelakang dan tertinggal, nampaknya formula ini tidak berlaku ketika perempuan dihadapkan pada teknologi informasi. Meski secara totalitas masih kalah jumlah dengan kaum

laki-laki, namun kecepatan pertumbuhan dan pemanfaatan teknologi secara optimal oleh kaum perempuan, sangat luar biasa.

Teknologi informasi yang semakin terjangkau dan memasyarakat, memudahkan kaum perempuan untuk terus belajar sepanjang hidupnya (*long life education*) tentang banyak hal tanpa terbatas waktu, jarak, dan juga usia. Semakin kaya dengan ilmu pengetahuan dan informasi, perempuan akan semakin berkualitas. Akan semakin besar kontribusi yang bisa ia berikan untuk masyarakat dan negeri ini.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah mengumumkan data survei pengguna internet Indonesia

2018. Pada tahun itu sebanyak 171,17 juta masyarakat Indonesia telah menggunakan internet. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mencapai 264,16 juta orang, maka penetrasi internet pada 2018 mencapai 64,8 persen. Tingkat penetrasi ini meningkat jika dibandingkan dengan hasil survei yang dilakukan APJII pada 2017, yakni hanya 143,26 juta.

Pola penggunaan internet pun dirasa tetap sama. Pengguna internet di Indonesia kini sebagian besar masih di dominasi oleh pria dengan persentase 53,17 persen. Sedangkan pengguna internet wanita mencapai 46,83 persen (Susenas, 2018).



3. Pembahasan

Dalam pembahasan ini data yang digunakan adalah data hasil Susenas yang dilaksanakan pada bulan Maret 2018. Pembahasan mengenai teknologi informasi dan komunikasi mengacu pada referensi waktu 3 bulan terakhir dan ditanyakan untuk semua penduduk usia 5 tahun ke atas di 300.000 rumah tangga sampel.

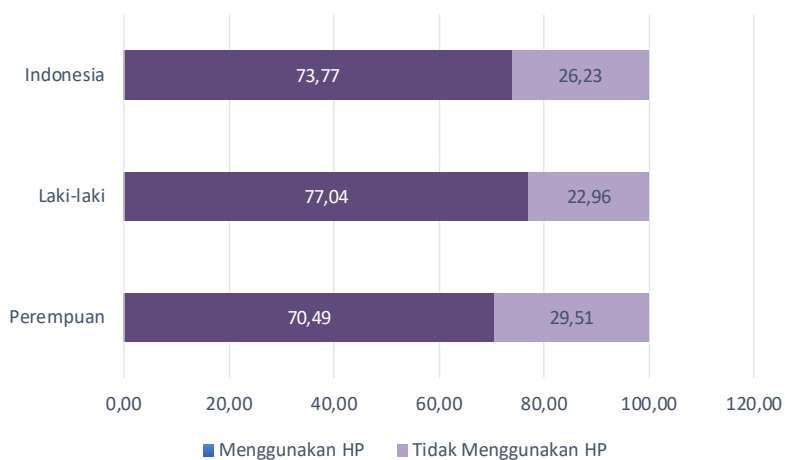
3.1. Penggunaan Telepon Seluler (HP)

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sangat membutuhkan HP sebagai media komunikasi yang sangat praktis dan sangat membantu karena ukurannya yang semakin bervariasi sehingga dapat dibawa kemana saja. HP juga marak digunakan baik dikalangan anak muda, orang tua, bahkan anak-anak yang masih dibawah umur. Dari hasil Susenas 2018 menunjukkan penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan HP sebesar 73,77 persen. Bila dilihat menurut jenis kelamin, 5 dari 7 perempuan menggunakan HP (70,49 persen) dan 7 dari 9 laki-laki menggunakan HP (77,04 persen) (Gambar 4.1).

Tingkat kesejahteraan rumah tangga sedikit banyak memengaruhi dalam penggunaan HP. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki pola yang seragam, yaitu semakin sejahtera maka penggunaan HP semakin besar. Pada tingkat kesejahteraan terendah (kuintil 1) penggunaan HP pada perempuan sebesar 54,11 persen berbanding 60,96 persen pada laki-laki. Sementara itu, pada tingkat kesejahteraan tertinggi (kuintil 5) penggunaan HP meningkat menjadi 87,46 persen pada perempuan dan 90,90 persen pada laki-laki (Gambar 4.2).

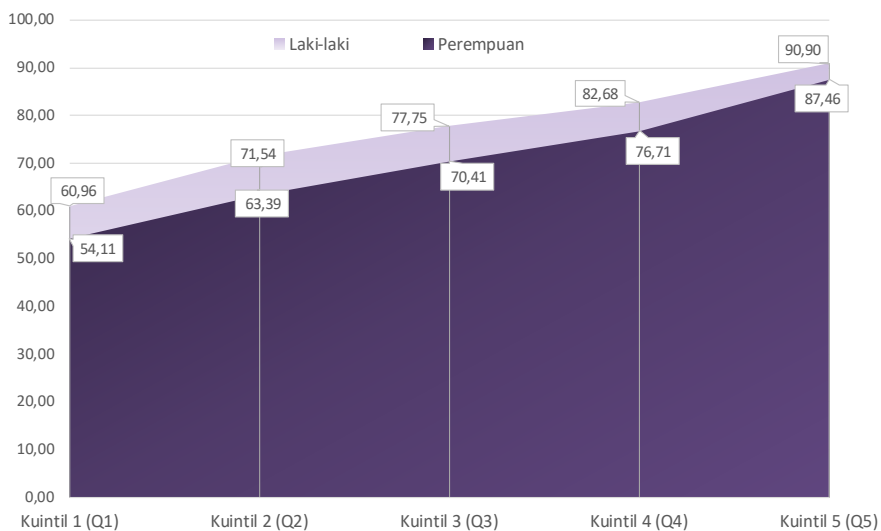
Baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan, persentase penduduk perempuan usia 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler selalu lebih rendah bila dibandingkan dengan laki-laki. Di daerah perkotaan persentase perempuan yang

Gambar 4.1. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel menurut Jenis Kelamin, 2018



Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Gambar 4.2. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel menurut Kuintil Pengeluaran, 2018



Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

menggunakan telepon seluler sebesar 75,81 persen sedangkan laki-laki 81,39 persen. Demikian juga di daerah perdesaan persentase perempuan yang menggunakan telepon seluler sebesar 64,03 persen sedangkan laki-laki 71,77 persen (Lampiran Tabel G.1).

Jika dibandingkan antarprovinsi, terlihat bahwa pada tahun 2018, persentase perempuan yang menggunakan telepon seluler terbesar ada di Kalimantan Timur sebesar 82,55 persen kemudian Kepulauan Riau sebesar 81,31 persen, dan Kalimantan Utara sebesar 80,37 persen sedangkan terendah ada di Papua sebesar 42,55 persen, Nusa Tenggara Timur sebesar 63,14 persen, dan Maluku Utara sebesar 63,72 persen (Lampiran Tabel G.1).

3.2. Kepemilikan Telepon Seluler (HP)

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat, menjangkau semua lapisan umur, apalagi di kalangan penduduk usia muda. Dengan harga HP yang semakin terjangkau, tentunya semakin mempermudah masyarakat untuk memiliki HP. Secara nasional, sebanyak 57,19 persen perempuan berusia 5 tahun ke atas menguasai/memiliki telepon seluler (HP)/nirkabel sedangkan laki-laki angkanya lebih besar lagi yaitu 67,59 persen, dengan kata lain 7 dari 12 perempuan menguasai/memiliki telepon seluler (HP)/nirkabel dan 2 dari 3 laki-laki menguasai/memiliki HP (Gambar 4.3).

Pola kepemilikan HP serupa dengan pola penggunaan HP jika dilihat berdasarkan pada tingkat kesejahteraan, yaitu semakin sejahtera maka persentase kepemilikan HP semakin besar. Hal ini berlaku untuk perempuan maupun laki-laki. Pada tingkat kesejahteraan terendah (kuintil 1) kepemilikan HP pada perempuan sebesar 37,17 persen berbanding 48,61 persen pada laki-laki. Sementara itu, pada tingkat kesejahteraan tertinggi (kuintil 5) penggunaan HP meningkat menjadi 80,93 persen pada perempuan dan 86,16 persen pada laki-laki (Gambar 4.4).

70,49%

Perempuan yang menggunakan telepon seluler

Penggunaan telepon seluler perempuan masih sedikit tertinggal dari laki-laki.

Bila dilihat menurut daerah tempat tinggal, 7 dari 10 penduduk usia 5 tahun ke atas di daerah perkotaan memiliki HP (69,66 persen) sedangkan di daerah perdesaan 6 dari 11 penduduk usia 5 tahun ke atas yang memiliki HP (53,61 persen). Perempuan di daerah perkotaan yang memiliki telepon seluler (HP)/nirkabel hanya sebesar 65,70 persen sedangkan laki-laki sebesar 73,60 persen (Lampiran Tabel G.2). Ketimpangan gender di bidang TIK sudah bisa dilihat dari uraian di atas, yaitu laki-laki lebih banyak yang memiliki telepon seluler (HP)/nirkabel dibandingkan perempuan.

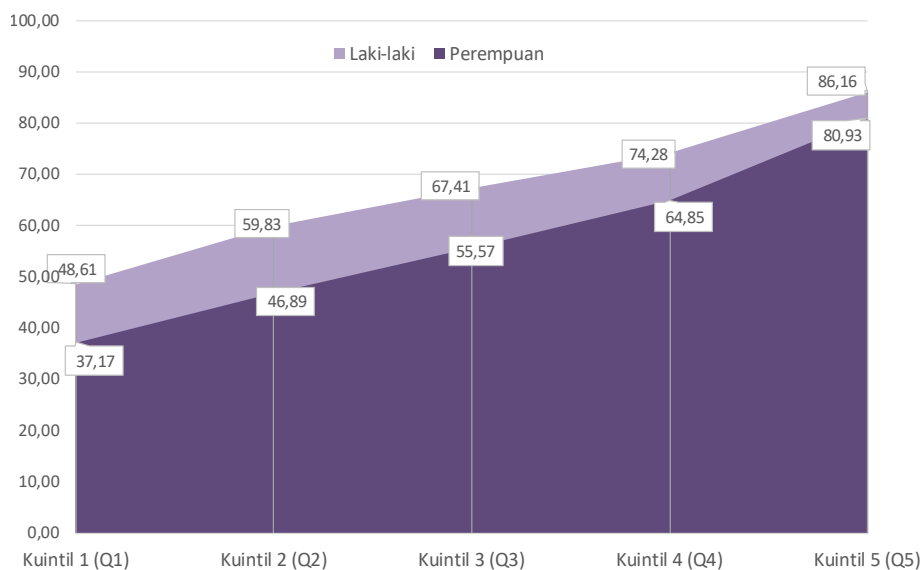
Perempuan yang memiliki telepon seluler (HP)/nirkabel di tiga provinsi terbanyak ada di provinsi Kalimantan Timur (73,44 persen) kemudian DKI Jakarta (73,04 persen) dan Kalimantan Utara (71,43 persen). Sementara itu untuk laki-laki yang memiliki telepon seluler (HP)/nirkabel juga terbanyak ada di DKI Jakarta sebesar 79,27 persen, Kalimantan Timur sebesar 79,00 persen, dan 77,21 persen untuk Kepulauan Riau. Sementara itu perempuan yang memiliki telepon seluler (HP)/nirkabel di tiga provinsi terendah ada di Papua sebesar 35,42 persen kemudian di Nusa Tenggara Timur sebesar 39,60 persen dan Sulawesi Barat 46,58

Gambar 4.3. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Memiliki Telepon Seluler (HP)/Nirkabel menurut Jenis Kelamin, 2018



Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Gambar 4.4. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Memiliki Telepon Seluler (HP)/Nirkabel menurut Kuintil Pengeluaran, 2018



Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

persen. Laki-laki yang memiliki telepon seluler (HP)/nirkabel di tiga provinsi terendah adalah Papua yaitu sebesar 44,98 persen, Nusa Tenggara Timur sebesar 48,34 persen, dan Sulawesi Barat sebesar 54,29 persen.

3.3. Pengeluaran Pulsa HP

Kepemilikan dan penggunaan HP tentunya berimbas kepada pengeluaran rumah tangga yang terkait dengan hal tersebut. Salah satunya adalah pengeluaran rumah tangga untuk pembelian pulsa HP. Secara nasional, rata-rata pengeluaran untuk pembelian pulsa HP per kapita sebulan adalah sebesar Rp17.143,-. Pengeluaran yang dikeluarkan rumah tangga yang dikepalai perempuan ataupun laki-laki tidak jauh berbeda, yaitu masing-masing sebesar Rp17.033,- dan Rp17.157,- per kapita sebulan. Perempuan di perkotaan cenderung memiliki pengeluaran untuk pulsa HP yang lebih besar daripada perempuan di perdesaan, yaitu masing-masing sebesar Rp20.758,- dan Rp11.879,- per kapita sebulan. Pengeluaran untuk pulsa HP rumah tangga yang dikepalai perempuan di perkotaan tidak jauh berbeda

Rp17.033,-

Rata-rata pengeluaran untuk pulsa HP rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan

Pengeluaran untuk pulsa HP rumah tangga yang dikepalai perempuan ataupun laki-laki tidak jauh berbeda.

57,19%

Perempuan yang memiliki telepon seluler

“

Lebih dari separuh perempuan usia 5 tahun ke atas memiliki telepon seluler.

”

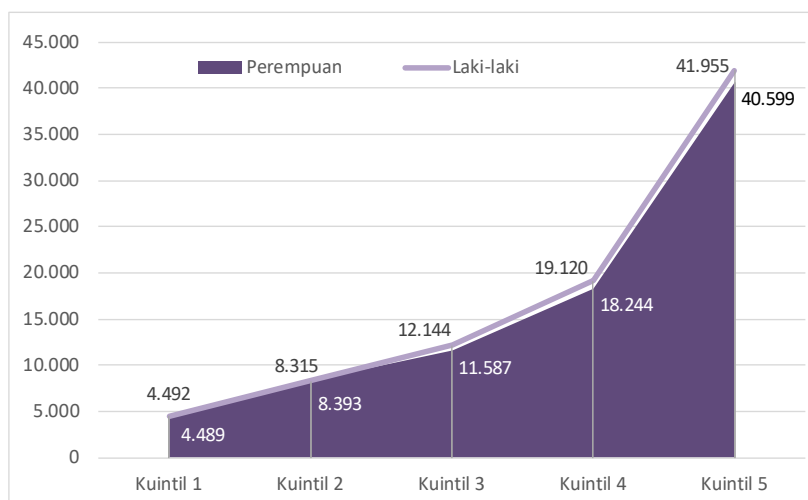
dengan yang dikepalai oleh laki-laki, perbedaannya hanya sekitar 0,76 persen. Sedangkan perbedaan pengeluaran untuk pulsa HP rumah tangga yang dikepalai perempuan dan laki-laki di perdesaan sedikit lebih besar, yaitu sekitar 6,43 persen. Dimana baik di perkotaan maupun di perdesaan pengeluaran untuk pulsa HP rumah tangga yang dikepalai laki-laki sedikit lebih besar daripada yang dikepalai oleh perempuan (Tabel 4.1).

Secara umum, pengeluaran untuk pulsa HP rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan ataupun laki-laki memiliki pola yang sama, yaitu semakin tinggi tingkat kesejahteraan maka semakin besar pula pengeluarannya. Hal ini berlaku untuk rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan maupun laki-laki. Pengeluaran untuk pulsa HP per kapita sebulan pada tiap-tiap level tingkat kesejahteraan, mulai dari tingkat kesejahteraan terendah (kuintil 1) sampai dengan tingkat kesejahteraan yang tertinggi (kuintil 5), baik rumah tangga yang dikepalai perempuan ataupun laki-laki memiliki nilai pengeluaran yang cenderung tidak jauh berbeda (Gambar 4.5).

Tabel 4.1. Rata-rata Pengeluaran untuk Pulsa HP per Kapita Sebulan menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin KRT, 2018

Daerah Tempat Tinggal	Perempuan	Laki-laki	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	20.758	20.917	20.898
Perdesaan	11.879	12.695	12.610
Perkotaan+Perdesaan	17.033	17.157	17.143

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Gambar 4.5. Rata-rata Pengeluaran untuk Pulsa HP per Kapita Sebulan menurut Kuintil Pengeluaran dan Jenis Kelamin KRT, 2018

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

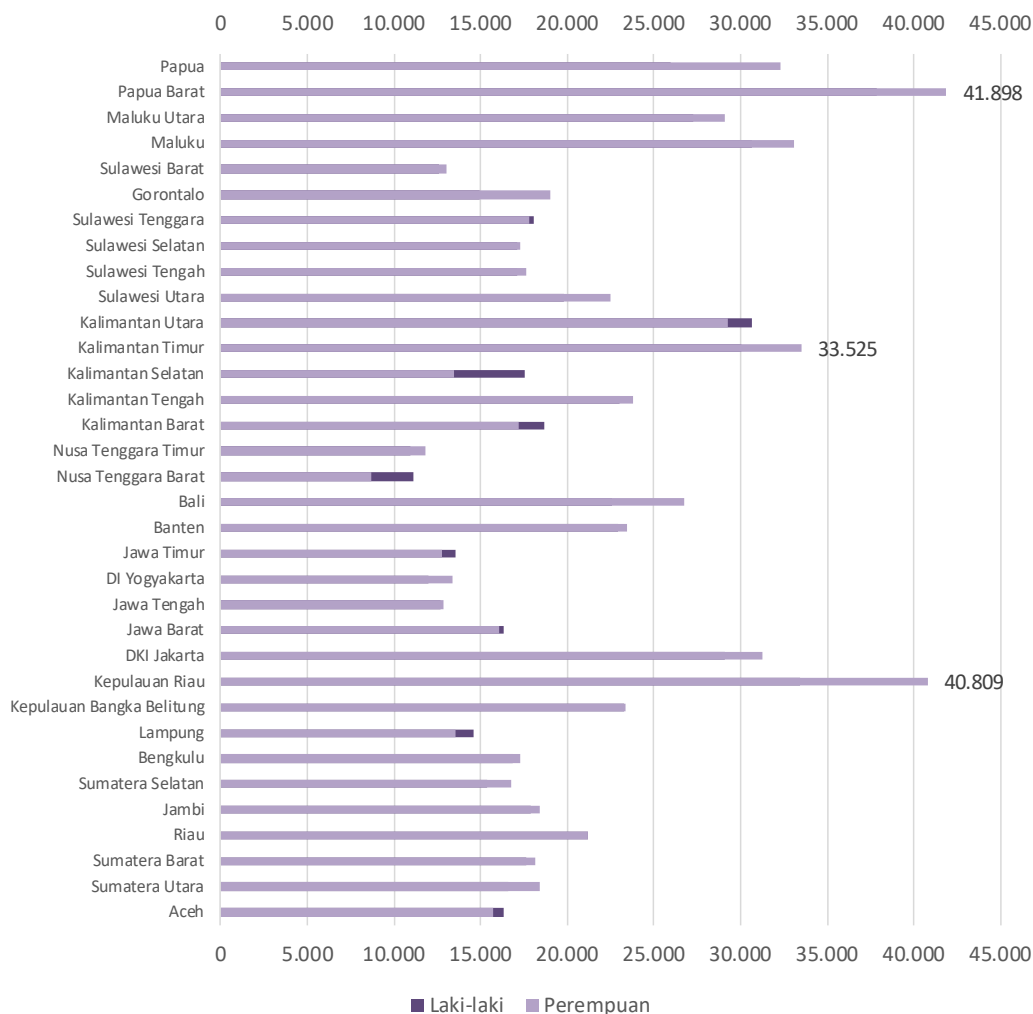
Jika dilihat pada level provinsi, pengeluaran untuk pulsa HP per kapita sebulan rumah tangga yang dikepalai perempuan yang tertinggi di Provinsi Papua Barat, yaitu Rp41.898,- diikuti Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp40.809,- dan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp33.525,-. Pada sebagian besar provinsi, pengeluaran untuk pulsa HP rumah tangga yang dikepalai perempuan selalu lebih besar daripada rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki. Hanya pada 9 provinsi saja, yaitu Aceh, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Sulawesi

Rp41.898,-

Rata-rata pengeluaran pulsa HP per kapita sebulan rumah tangga yang dikepalai perempuan di Provinsi Papua Barat

—
Pengeluaran untuk pulsa HP rumah tangga yang dikepalai perempuan tertinggi di Provinsi Papua Barat.

Gambar 4.6. Rata-rata Pengeluaran untuk Pulsa HP per Kapita Sebulan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin KRT, 2018



Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tenggara pengeluaran untuk pulsa HP rumah tangga yang dikepalai perempuan lebih rendah daripada yang dikepalai oleh laki-laki (Gambar 4.6).

3.4. Penggunaan Komputer (PC/Desktop/Laptop/Notebook/Tablet)

Tak dapat dipungkiri lagi, komputer sudah menjadi barang yang tak asing lagi bagi masyarakat luas. Komputer merupakan salah satu alat komunikasi yang berperan penting bagi kehidupan manusia. Ini juga merupakan alat yang sangat dibutuhkan manusia untuk membantu mereka dalam menyelesaikan pekerjaan bagi perusahaan-perusahaan dan mencari segala sesuatu yang dibutuhkan manusia tanpa menghabiskan waktu mereka.

Sejak beberapa tahun yang lalu komputer sudah digunakan sebagai alat bantu untuk menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data atau informasi yang diperlukan.

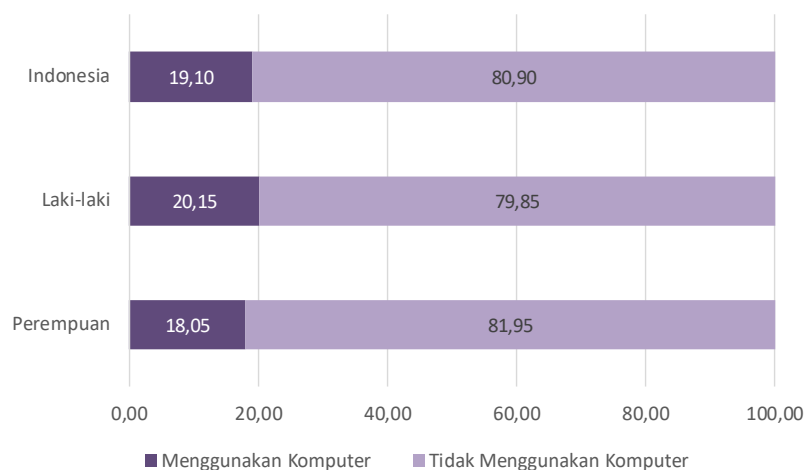
Contoh dari kegunaan komputer antara lain adalah: digunakan untuk membantu pengarsipan di kantor-kantor, digunakan pada bidang animasi untuk membantu pembuatan film-film dengan memanfaatkan kemajuan dalam bidang disain grafik dan pengolahan citra, membantu pemakai dalam menelusuri indeks subjek dan indeks pengarang di perpustakaan, digunakan sebagai pendukung layanan administratif di rumah sakit seperti data pasien, pemesanan tiket pesawat, kereta, serta alat transportasi lainnya, administrasi negara seperti administrasi data kepegawaian dan kependudukan, untuk pengolahan segala macam data, serta segala bidang kegiatan lainnya.

Penggunaan komputer (PC/Desktop/Laptop/Notebok/Tablet) saat ini tidak terbatas hanya di kantor dan sekolah saja, tetapi juga sudah merambah ke rumah tangga. Pada tahun 2018, penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan komputer selama 3 bulan terakhir ada sebanyak 18,05 persen perempuan sedangkan laki-laki besarnya 20,15 persen (Gambar 4.7).

Penggunaan komputer jika dilihat berdasarkan pada tingkat kesejahteraan, menggambarkan pola yang sama antara perempuan dan laki-laki, yaitu semakin sejahtera maka persentase penggunaan komputer semakin besar. Pada tingkat kesejahteraan terendah (kuintil 1) penggunaan HP pada perempuan sebesar 6,40 persen berbanding 6,89 persen pada laki-laki. Sementara itu, pada tingkat kesejahteraan tertinggi (kuintil 5) penggunaan komputer meningkat menjadi 39,37 persen pada perempuan dan 44,92 persen pada laki-laki (Gambar 4.8).

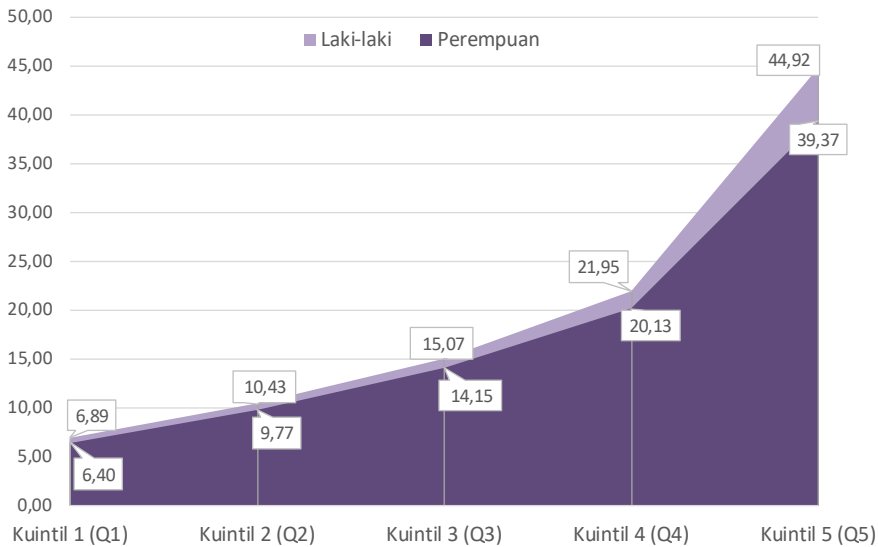
DKI Jakarta merupakan provinsi yang paling besar baik perempuan maupun laki-laki yang menggunakan komputer yaitu 29,42 persen untuk perempuan dan 33,56 persen untuk laki-laki, sementara Papua adalah provinsi yang paling sedikit baik perempuan maupun laki-laki yang menggunakan komputer yaitu 9,78 persen untuk perempuan dan 12,00 persen untuk laki-laki (Lampiran Tabel G.3).

Gambar 4.7. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer menurut Jenis Kelamin, 2018



Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Gambar 4.8. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer menurut Kuintil Pengeluaran, 2018



Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

3.5. Penduduk Mengakses internet

Penetrasi Indonesia di bidang teknologi informasi belakangan ini menjadi sesuatu hal yang menarik untuk disoroti. Banyaknya tantangan seperti luas wilayah, kepadatan penduduk, serta tingkat edukasi masyarakat tentang teknologi informasi ini menjadi salah satu alasannya.

Semakin menjamurnya penggunaan *smartphone* turut serta dalam mengangkat pertumbuhan pengguna internet di Indonesia. Hasil Susenas 2018 mencatat sebesar 39,90 persen penduduk Indonesia usia 5 tahun ke atas mengakses internet dalam 3 bulan terakhir. Perempuan yang mengakses internet sebesar 37,49 persen sedangkan laki-laki sebesar 42,31 persen (Gambar 4.9).

Akses internet pada setiap tingkat kesejahteraan menunjukkan nilai yang berbeda baik pada perempuan maupun laki-laki. Kecenderungannya akses internet terus meningkat seiring semakin sejahteranya rumah tangga. Polanya serupa antara perempuan

atau laki-laki, meskipun persentase akses internet perempuan selalu berada dibawah laki-laki. Pada tingkat kesejahteraan terendah (kuintil 1) akses internet pada perempuan sebesar 17,99 persen berbanding 21,00 persen pada laki-laki. Sementara itu, pada

37,49%

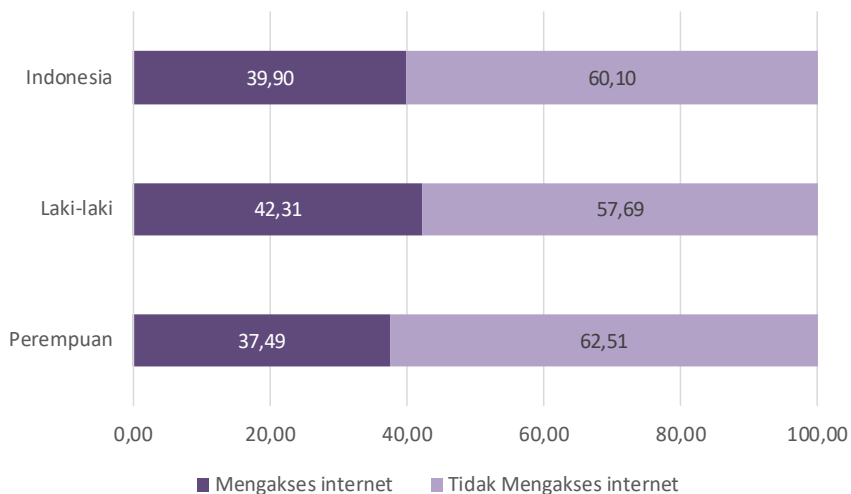
Perempuan usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet

“

Akses internet perempuan Indonesia masih tertinggal dibandingkan laki-laki.

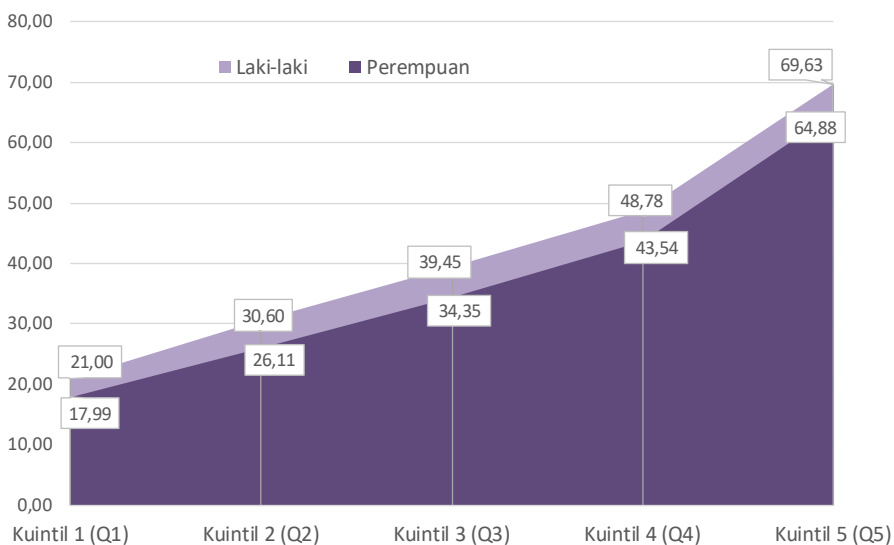
”

Gambar 4.9. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet menurut Jenis Kelamin, 2018



Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Gambar 4.10. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet menurut Kuintil Pengeluaran, 2018



Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

tingkat kesejahteraan tertinggi (kuintil 5) akses internet meningkat menjadi 64,88 persen pada perempuan dan 69,63 persen pada laki-laki (Gambar 4.10).

3.6. Pengeluaran Biaya Internet

Dengan perilaku masyarakat yang semakin banyak mengakses internet, tentunya terdapat biaya yang harus disediakan/dikeluarkan agar kebutuhan berinternet tanpa jeda bisa terpenuhi. Mengeluarkan biaya untuk belanja paket data atau kuota internet sudah bukan kebiasaan asing lagi.

Secara nasional, rata-rata pengeluaran untuk biaya internet perkapita sebulan adalah sebesar Rp12.633,-. Pengeluaran yang dikeluarkan rumah tangga yang dikepalai perempuan ataupun laki-laki tidak jauh berbeda, yaitu masing-masing sebesar Rp13.767,- dan Rp12.490,- per kapita sebulan. Perempuan di perkotaan cenderung memiliki pengeluaran untuk biaya internet yang lebih besar daripada perempuan di pedesaan, yaitu masing-masing sebesar Rp18.879,- dan Rp6.695,- per kapita sebulan. Pengeluaran untuk biaya internet rumah tangga yang dikepalai perempuan di perkotaan tidak jauh berbeda dengan yang dikepalai oleh laki-laki, perbedaannya hanya sekitar 8,30 persen. Sedangkan perbedaan pengeluaran untuk biaya internet rumah

tangga yang dikepalai perempuan dan laki-laki di pedesaan lebih sedikit perbedaannya, yaitu sekitar 1,06 persen. Dimana baik di perkotaan maupun di pedesaan pengeluaran untuk biaya internet rumah tangga yang dikepalai perempuan sedikit lebih besar daripada yang dikepalai oleh laki-laki (Tabel 4.2).

Rp13.767,-

Rata-rata pengeluaran biaya internet rumah tangga yang dikepalai perempuan

“

Secara nasional, pengeluaran biaya internet per kapita sebulan rumah tangga yang dikepalai perempuan lebih besar daripada laki-laki.

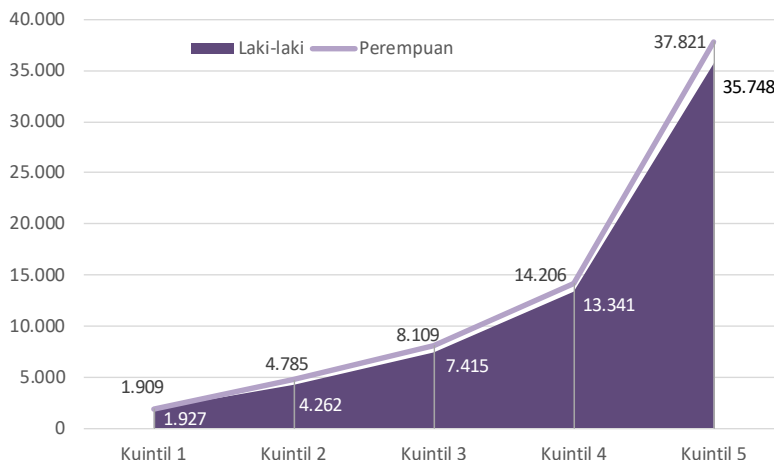
”

Tabel 4.2. Rata-rata Pengeluaran untuk Biaya Internet per Kapita Sebulan menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin KRT, 2018

Daerah Tempat Tinggal	Perempuan	Laki-laki	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	18.879	17.431	17.604
Perdesaan	6.695	6.625	6.632
Perkotaan+Perdesaan	13.767	12.490	12.633

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Gambar 4.11. Rata-rata Pengeluaran untuk Biaya Internet per Kapita Sebulan menurut Kuintil Pengeluaran dan Jenis Kelamin KRT, 2018



Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Pengeluaran untuk biaya internet rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan ataupun laki-laki memiliki pola yang sama, yaitu semakin tinggi tingkat kesejahteraan maka semakin besar pula pengeluarannya. Hal ini berlaku untuk rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan maupun laki-laki. Pada tingkat kesejahteraan terendah (kuintil 1) pengeluaran untuk biaya internet rumah tangga yang dikepalai perempuan sebesar Rp1.909,- per kapita sebulan berbanding Rp1.927,- per kapita sebulan pada rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki. Sementara itu, pada tingkat kesejahteraan tertinggi (kuintil 5) pengeluaran untuk biaya internet meningkat menjadi Rp37.821,- per kapita sebulan pada rumah tangga yang dikepalai perempuan dan Rp35.748,- per kapita sebulan pada rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki (Gambar 4.11).

Jika dilihat pada level provinsi, pengeluaran untuk biaya internet per kapita sebulan rumah tangga yang dikepalai perempuan yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Rp34.458,- diikuti Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp30.729,- dan Provinsi

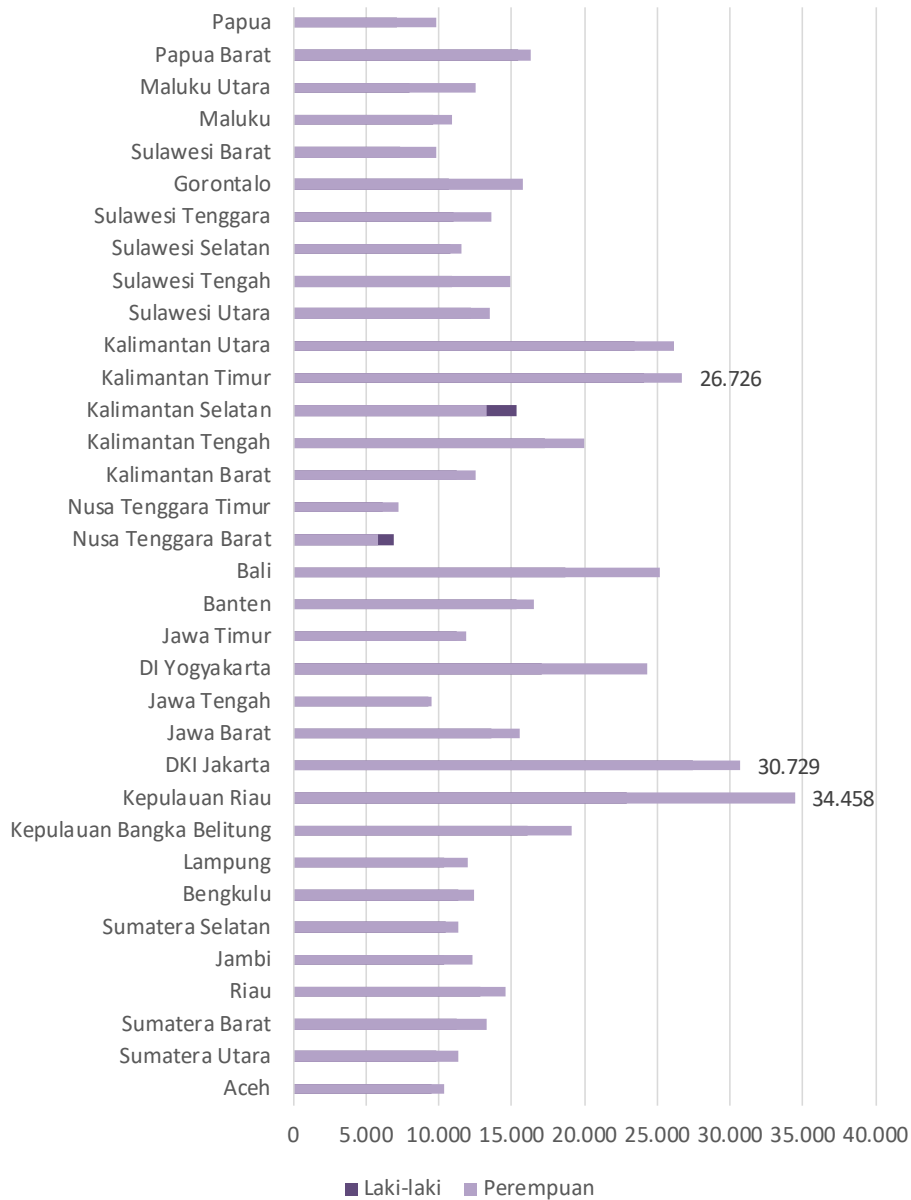
Kalimantan Timur sebesar Rp26.726,-. Pada sebagian besar provinsi, pengeluaran untuk biaya internet rumah tangga yang dikepalai perempuan selalu lebih besar daripada rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki. Hanya pada 2 provinsi saja, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan pengeluaran untuk biaya internet rumah tangga yang dikepalai perempuan lebih rendah daripada yang dikepalai oleh laki-laki (Gambar 4.12).

Rp34.458,-

Rata-rata pengeluaran biaya internet per kapita sebulan rumah tangga yang dikepalai perempuan di Provinsi Kepulauan Riau

—
Pengeluaran untuk biaya internet rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar 4.12. Rata-rata Pengeluaran untuk Biaya Internet per Kapita Sebulan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin KRT, 2018



Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Daftar Pustaka

- Aloysius Uwiyono. 2014. Asas-asas Hukum Perburuhan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 87-88.
- Andreas Sukamto. 2014. Kontribusi Pekerja Perempuan terhadap Pembentukan Pendapatan Keluarga.
- Asri Wijayanti, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafindo, hal. 3-4.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2017. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Indikator Kesejahteraan Rakyat 2018. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2018. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Kesehatan Ibu dan Anak, 2018. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2018. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2018.
- Bappenas. (2014). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional: Buku II Agenda Pembangunan Bidang. Bappenas: Jakarta.
- Bappenas. (2017). Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019. Bappenas: Jakarta.
- Kemendikbud. (2015). Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019. Kemdikbud: Jakarta.
- Bappenas. 2018. Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan menteri PPN/Bappenas RI nomor 7 tahun 2018. Jakarta

- Berlian. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Provinsi Banten, 2011. Hal 64.
<https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/51389>
- Cheng June, dkk. 2012. An ecological quantification of the relationships between water, sanitation and infant, child, and maternal mortality. Diakses dari <https://ehjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1476-069X-11-4>.
- Faktor-faktor yang Terkait dengan Rendahnya Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&act=8&ved=2ahUKEwjku9-5s9nkAhUlaI8KHeUVB9AQFjAGegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fjurnal.dikbud.kemdikbud.go.id%2Findex.php%2Fjpnk%2Farticle%2Fdownload%2F6%2F4&usq=AOvVaw3RtaEz08luSo3IC5cggNpR>
- Fitrianti, Rahmi & Habibullah. (2012). Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan: *Study* pada Perempuan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. *Jurnal Sosiokonsepsia* Vol. 17, No.01 Tahun 2012.
- Gallaway, Julie H. & Alexandra Bernasek. (2004). Literacy and Women's Empowerment in Indonesia: Implications for Policy. *Journal of Economic Issues*, Vol. XXXVIII No.2 June 2004.
- Glewwe, P. & Kremer, M. (2005). Schools, Teachers and Education Outcomes in Developing Countries. Second draft of chapter for Handbook on the Economics of Education.
- Hardijan Rusli, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 108.
- Hidayat, Urip Soewarno. (1979:38). Pengembangan Sektor Informal dalam Pembangunan Nasional: masalah dan prospek. Bandung: PPESM. Fakultas Ekonomi Padjajaran.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2018. *Profil Perempuan Indonesia 2018*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Khairunnisa et al. 2014. Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol 15. Hal 100.
- Khayati, Ani Zuhni. (2008). "Pendidikan dan Independensi Perempuan." *Musawa*, Vol.6 (1): halaman 30.
- Lestari. 2010. *Pemberdayaan Wanita melalui Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2010 (SNATI 2010)

- Melhem, Samia; Morrell, Claudia; Tandon, Nidhi. 2009. "Information and Communication Technologies for Women's Socioeconomic Empowerment". Washington: WORLD BANK WORKING PAPER NO. 176.
- Mukmin Hidayat, (1980). Beberapa Aspek Perjuangan Kaum Wanita. Jakarta. Binacipta.
- Mulyana, Suci Keiva. (2018). Kualitas Pendidikan di Indonesia.
https://www.academia.edu/37877771/Kualitas_Pendidikan_di_Indonesia
- Mustar, Endang E. (2007). Sumber Daya Manusia Perempuan Indonesia, Populasi, 18 (2), 2007, ISSN: 0853 – 0262.
- Nadya, Canty. (2018). Perempuan dan Pendidikan: Implementasi Pemikiran Kartini.
<https://medium.com/lingkaran-solidaritas/perempuan-dan-pendidikan-implementasi-pemikiran-kartini-603fa062b87a>
- Republik Indonesia. 2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Kesehatan Lingkungan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Simanjuntak, P.J., (1985), Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sintayati, Septin M. (2017). Peran UNICEF dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Papua 2010-2015. Yogyakarta: UMY.
<https://kadatebintuni.com/2018/08/27/perempuan-papua-tetap-memposisikan-diri-mereka-sebagai-penolong-suami-dalam-memainkan-peran-mengurus-keluarga-dan-anak-sebagai-wujud-bakti-dan-cinta-kepada-laki-laki/>
- Terry, Allison; Gomez, Ricardo. 2011. "Gender and Public Access Computing: An International Perspective". System Sciences (HICSS), 2011 44th Hawaii International Conference on System Science.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

USAID (2013). Reflection on Education in Indonesia.

<http://www.prestasi-iief.org/index.php/english/feature/68-reflections-on-education-in-indonesia> (27 Agustus 2019)

Vito, Benediktus dkk. (2015). Kesenjangan Pendidikan Desa dan Kota. Prosiding KS: Riset & PKM, Vol.2 No.2 hlm: 147-300.

World Bank. (2019). Overview of Indonesia.

<https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview> (27 Agustus 2019)

WENR. (2019). Education System Profiles: Education in Indonesia.

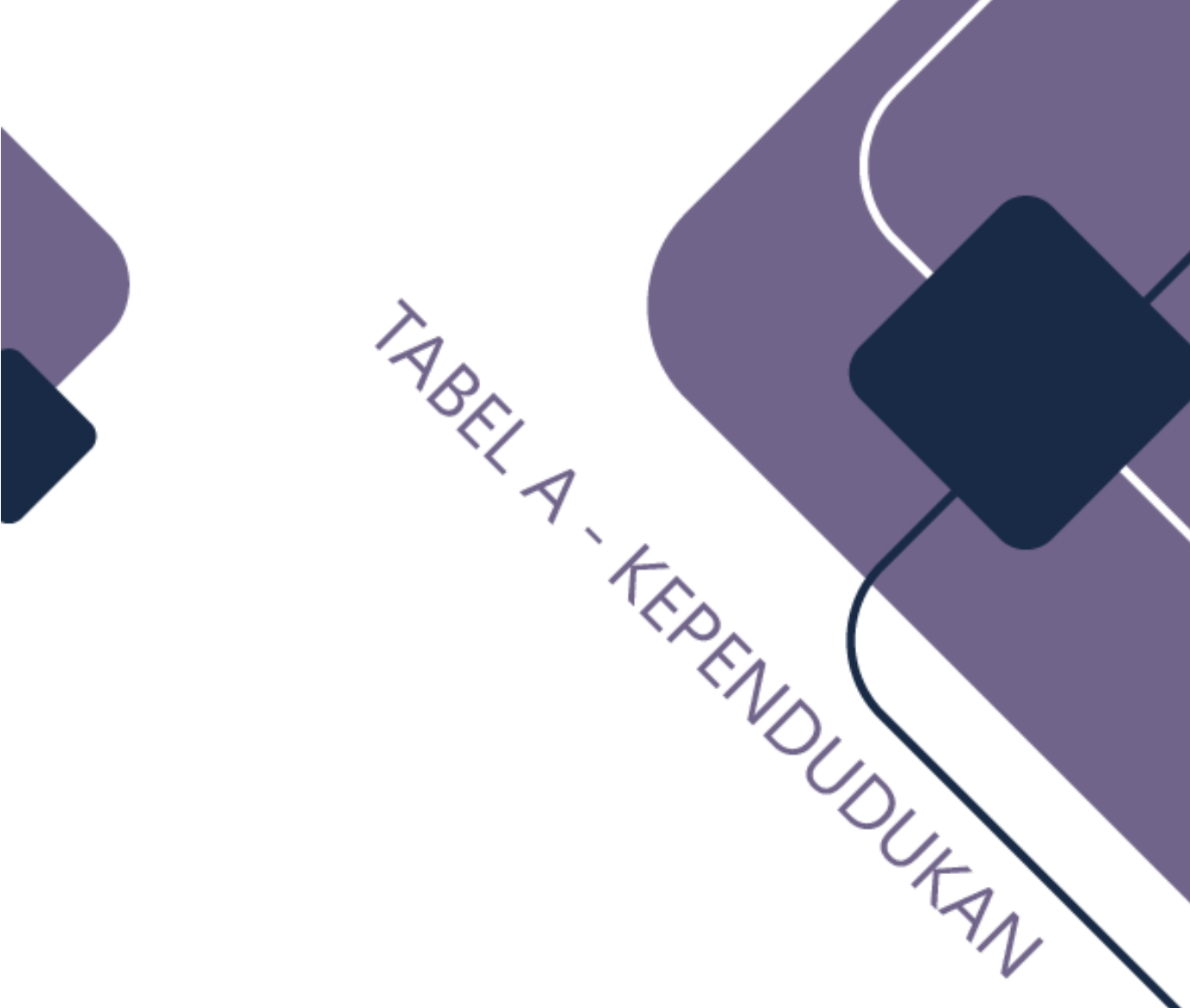
<https://wenr.wes.org/2019/03/education-in-indonesia-2> (27 Agustus 2019)

Wahyuni, Sri dkk. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Melalui Pemberantasan 'Buta Huruf' Guna Menumbuhkembangkan Usaha Kreatif Berbasis Literasi dan Potensi Lokal. Jurnal Inovasi Pendidikan Volume 1 Nomor 2, September 2017, Halaman 48-71.

Widyaningsih. (2010). Persepsi Orang Tua terhadap Nilai Pendidikan Anak Perempuan pada Masyarakat Jawa Tradisional. Diklusi Vol. 14 No.1, Maret 2010.



LAMPIRAN



TABEL A - KEPENDUDUKAN

Tabel A.1. Persentase Penduduk menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Perempuan	Laki-laki	Sex Ratio	Perempuan	Laki-laki	Sex Ratio	Perempuan	Laki-laki	Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	49,82	50,18	100,71	50,18	49,82	99,27	50,07	49,93	99,72
Sumatera Utara	50,21	49,79	99,16	49,97	50,03	100,11	50,10	49,90	99,60
Sumatera Barat	50,28	49,72	98,87	50,19	49,81	99,23	50,23	49,77	99,07
Riau	48,89	51,11	104,55	48,57	51,43	105,87	48,70	51,30	105,33
Jambi	49,39	50,61	102,48	48,78	51,22	104,98	48,98	51,02	104,17
Sumatera Selatan	49,73	50,27	101,07	48,85	51,15	104,72	49,18	50,82	103,35
Bengkulu	49,89	50,11	100,43	48,60	51,40	105,74	49,03	50,97	103,98
Lampung	49,63	50,37	101,51	48,43	51,57	106,48	48,78	51,22	104,98
Kepulauan Bangka Belitung	48,43	51,57	106,49	47,56	52,44	110,26	48,03	51,97	108,22
Kepulauan Riau	49,17	50,83	103,40	48,44	51,56	106,44	49,06	50,94	103,82
DKI Jakarta	49,85	50,15	100,60	-	-	-	49,85	50,15	100,60
Jawa Barat	49,32	50,68	102,76	49,40	50,60	102,41	49,34	50,66	102,67
Jawa Tengah	50,49	49,51	98,05	50,32	49,68	98,72	50,41	49,59	98,38
DI Yogyakarta	50,20	49,80	99,21	51,56	48,44	93,94	50,57	49,43	97,76
Jawa Timur	50,46	49,54	98,19	50,83	49,17	96,73	50,63	49,37	97,49
Banten	49,13	50,87	103,55	48,79	51,21	104,95	49,03	50,97	103,95
Bali	49,47	50,53	102,14	50,18	49,82	99,30	49,71	50,29	101,17
Nusa Tenggara Barat	51,58	48,42	93,87	51,35	48,65	94,74	51,46	48,54	94,34
Nusa Tenggara Timur	49,90	50,10	100,39	50,65	49,35	97,43	50,48	49,52	98,10
Kalimantan Barat	49,85	50,15	100,61	48,72	51,28	105,24	49,10	50,90	103,66
Kalimantan Tengah	48,55	51,45	105,98	47,31	52,69	111,37	47,79	52,21	109,26
Kalimantan Selatan	49,24	50,76	103,08	49,35	50,65	102,64	49,30	50,70	102,85
Kalimantan Timur	47,97	52,03	108,46	46,81	53,19	113,64	47,58	52,42	110,15
Kalimantan Utara	47,45	52,55	110,73	46,37	53,63	115,66	47,00	53,00	112,76
Sulawesi Utara	49,52	50,48	101,96	48,46	51,54	106,36	48,99	51,01	104,13
Sulawesi Tengah	49,82	50,18	100,73	48,59	51,41	105,81	48,93	51,07	104,37
Sulawesi Selatan	50,91	49,09	96,44	51,30	48,70	94,92	51,14	48,86	95,55
Sulawesi Tenggara	49,73	50,27	101,10	49,73	50,27	101,07	49,73	50,27	101,08
Gorontalo	50,74	49,26	97,08	49,37	50,63	102,56	49,90	50,10	100,40
Sulawesi Barat	50,81	49,19	96,83	49,56	50,44	101,76	49,86	50,14	100,57
Maluku	49,86	50,14	100,54	49,37	50,63	102,55	49,58	50,42	101,71
Maluku Utara	49,34	50,66	102,68	48,85	51,15	104,71	48,99	51,01	104,13
Papua Barat	47,58	52,42	110,15	47,19	52,81	111,90	47,35	52,65	111,19
Papua	46,35	53,65	115,77	47,81	52,19	109,17	47,40	52,60	110,96
Indonesia	49,79	50,21	100,84	49,73	50,27	101,10	49,76	50,24	100,96

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel A.2. Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2018

Kelompok Umur	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Perempuan	Laki-laki	Total	Perempuan	Laki-laki	Total	Perempuan	Laki-laki	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0-4	48,84	51,16	100,00	48,97	51,03	100,00	48,90	51,10	100,00
5-9	48,91	51,09	100,00	48,81	51,19	100,00	48,87	51,13	100,00
10-14	48,91	51,09	100,00	48,63	51,37	100,00	48,78	51,22	100,00
15-19	49,38	50,62	100,00	48,12	51,88	100,00	48,81	51,19	100,00
20-24	49,50	50,50	100,00	48,75	51,25	100,00	49,19	50,81	100,00
25-29	49,57	50,43	100,00	49,88	50,12	100,00	49,70	50,30	100,00
30-34	49,96	50,04	100,00	50,31	49,69	100,00	50,11	49,89	100,00
35-39	50,16	49,84	100,00	50,34	49,66	100,00	50,24	49,76	100,00
40-44	49,92	50,08	100,00	50,07	49,93	100,00	49,99	50,01	100,00
45-49	49,66	50,34	100,00	49,82	50,18	100,00	49,73	50,27	100,00
50-54	50,29	49,71	100,00	50,30	49,70	100,00	50,29	49,71	100,00
55-59	49,95	50,05	100,00	50,48	49,52	100,00	50,19	49,81	100,00
60-64	49,89	50,11	100,00	49,88	50,12	100,00	49,88	50,12	100,00
65-69	50,64	49,36	100,00	50,68	49,32	100,00	50,66	49,34	100,00
70-74	54,21	45,79	100,00	54,01	45,99	100,00	54,11	45,89	100,00
75-79	58,52	41,48	100,00	57,82	42,18	100,00	58,17	41,83	100,00
Total	49,79	50,21	100,00	49,73	50,27	100,00	49,76	50,24	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel A.3. Persentase Penduduk menurut Provinsi, Kelompok Umur Produktif/Tidak Produktif, dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	0-14 Tahun		15-64 Tahun		65 Tahun ke Atas	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	49,01	50,99	50,19	49,81	56,14	43,86
Sumatera Utara	49,03	50,97	50,20	49,80	56,28	43,72
Sumatera Barat	49,03	50,97	50,31	49,69	55,64	44,36
Riau	49,09	50,91	48,41	51,59	51,03	48,97
Jambi	49,18	50,82	48,84	51,16	49,89	50,11
Sumatera Selatan	48,89	51,11	49,07	50,93	52,49	47,51
Bengkulu	49,25	50,75	48,77	51,23	51,55	48,45
Lampung	48,74	51,26	48,65	51,35	50,71	49,29
Kepulauan Bangka Belitung	49,15	50,85	47,34	52,66	51,68	48,32
Kepulauan Riau	49,70	50,30	48,76	51,24	49,42	50,58
DKI Jakarta	48,83	51,17	50,04	49,96	52,71	47,29
Jawa Barat	48,76	51,24	49,28	50,72	52,88	47,12
Jawa Tengah	48,65	51,35	50,49	49,51	54,75	45,25
DI Yogyakarta	48,76	51,24	50,42	49,58	55,85	44,15
Jawa Timur	48,86	51,14	50,66	49,34	55,44	44,56
Banten	48,84	51,16	48,95	51,05	52,24	47,76
Bali	48,75	51,25	49,56	50,44	54,31	45,69
Nusa Tenggara Barat	48,88	51,12	52,43	47,57	53,84	46,16
Nusa Tenggara Timur	49,13	50,87	51,00	49,00	53,62	46,38
Kalimantan Barat	48,81	51,19	49,10	50,90	51,02	48,98
Kalimantan Tengah	48,77	51,23	47,34	52,66	48,89	51,11
Kalimantan Selatan	49,05	50,95	49,03	50,97	55,19	44,81
Kalimantan Timur	48,62	51,38	47,16	52,84	47,82	52,18
Kalimantan Utara	48,46	51,54	46,58	53,42	42,81	57,19
Sulawesi Utara	49,01	50,99	48,56	51,44	53,34	46,66
Sulawesi Tengah	49,00	51,00	48,86	51,14	49,50	50,50
Sulawesi Selatan	48,92	51,08	51,48	48,52	57,73	42,27
Sulawesi Tenggara	48,42	51,58	50,23	49,77	52,60	47,40
Gorontalo	49,10	50,90	49,98	50,02	53,43	46,57
Sulawesi Barat	49,09	50,91	49,97	50,03	53,92	46,08
Maluku	49,04	50,96	49,68	50,32	52,32	47,68
Maluku Utara	48,35	51,65	49,22	50,78	50,91	49,09
Papua Barat	48,83	51,17	46,71	53,29	45,87	54,13
Papua	48,25	51,75	47,09	52,91	43,99	56,01
Indonesia	48,85	51,15	49,76	50,24	53,98	46,02

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel A.4. Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*) menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	50,73	50,73	55,12	56,22	53,72	54,45
Sumatera Utara	50,28	51,15	61,95	62,16	55,55	56,16
Sumatera Barat	51,58	53,10	59,22	58,80	55,75	56,24
Riau	49,67	48,50	53,73	51,56	52,06	50,32
Jambi	43,83	43,17	47,77	46,86	46,47	45,66
Sumatera Selatan	46,28	46,98	51,79	50,27	49,67	49,04
Bengkulu	45,96	43,64	50,77	49,57	49,14	47,61
Lampung	46,41	46,65	51,55	50,22	49,97	49,16
Kepulauan Bangka Belitung	47,73	44,12	48,72	44,17	48,18	44,15
Kepulauan Riau	48,82	47,33	54,86	50,92	49,63	47,84
DKI Jakarta	40,68	41,72	-	-	40,68	41,72
Jawa Barat	46,08	45,69	50,04	49,74	47,09	46,72
Jawa Tengah	46,37	46,87	48,80	49,24	47,54	48,02
DI Yogyakarta	43,29	42,48	51,63	51,02	45,49	44,65
Jawa Timur	42,36	42,62	45,01	45,02	43,62	43,75
Banten	43,38	42,94	53,08	52,38	46,04	45,56
Bali	42,99	41,92	48,08	47,81	44,68	43,84
Nusa Tenggara Barat	48,16	53,87	51,58	57,73	49,97	55,92
Nusa Tenggara Timur	52,76	55,83	68,48	72,20	64,64	68,11
Kalimantan Barat	47,82	48,28	51,65	51,33	50,32	50,30
Kalimantan Tengah	44,22	42,82	47,38	43,99	46,12	43,54
Kalimantan Selatan	45,76	44,56	50,61	48,74	48,32	46,76
Kalimantan Timur	44,41	42,45	49,48	45,81	46,02	43,56
Kalimantan Utara	49,34	46,65	53,36	50,98	50,97	48,45
Sulawesi Utara	45,62	42,69	51,09	48,92	48,26	45,76
Sulawesi Tengah	45,71	43,63	52,29	52,48	50,36	49,94
Sulawesi Selatan	48,57	49,99	53,60	56,27	51,47	53,58
Sulawesi Tenggara	53,04	56,12	61,07	64,27	57,89	61,04
Gorontalo	44,26	45,52	50,22	50,04	47,82	48,29
Sulawesi Barat	54,25	55,77	55,00	55,48	54,82	55,54
Maluku	51,71	53,29	65,17	64,89	59,24	59,87
Maluku Utara	48,44	49,22	60,69	62,34	56,96	58,38
Papua Barat	48,87	44,76	54,72	51,02	52,27	48,42
Papua	47,50	41,38	50,29	50,31	49,52	47,67
Indonesia	45,56	45,61	51,58	51,55	48,23	48,24

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel A.5. Persentase penduduk berumur 15-49 tahun menurut Provinsi, Status Perkawinan, dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	41,24	58,76	54,50	45,50	71,88	28,12	90,99	9,01
Sumatera Utara	43,51	56,49	53,56	46,44	65,84	34,16	87,27	12,73
Sumatera Barat	42,99	57,01	53,98	46,02	69,97	30,03	82,07	17,93
Riau	40,11	59,89	53,15	46,85	61,01	38,99	84,39	15,61
Jambi	40,91	59,09	52,91	47,09	60,93	39,07	86,38	13,62
Sumatera Selatan	42,09	57,91	53,72	46,28	60,48	39,52	80,67	19,33
Bengkulu	41,47	58,53	53,35	46,65	59,94	40,06	87,26	12,74
Lampung	41,33	58,67	53,54	46,46	64,26	35,74	79,77	20,23
Kepulauan Bangka Belitung	37,55	62,45	52,79	47,21	42,47	57,53	74,51	25,49
Kepulauan Riau	42,41	57,59	51,97	48,03	65,33	34,67	71,21	28,79
DKI Jakarta	42,98	57,02	52,83	47,17	70,79	29,21	76,58	23,42
Jawa Barat	39,44	60,56	53,51	46,49	60,18	39,82	83,30	16,70
Jawa Tengah	39,96	60,04	55,14	44,86	64,49	35,51	83,26	16,74
DI Yogyakarta	41,52	58,48	53,78	46,22	70,04	29,96	78,19	21,81
Jawa Timur	39,64	60,36	54,70	45,30	62,40	37,60	83,94	16,06
Banten	40,23	59,77	53,27	46,73	63,38	36,62	83,27	16,73
Bali	41,96	58,04	52,56	47,44	50,61	49,39	74,81	25,19
Nusa Tenggara Barat	43,43	56,57	56,25	43,75	64,96	35,04	73,89	26,11
Nusa Tenggara Timur	44,70	55,30	53,39	46,61	81,19	18,81	81,30	18,70
Kalimantan Barat	42,43	57,57	53,77	46,23	58,22	41,78	88,84	11,16
Kalimantan Tengah	38,35	61,65	52,91	47,09	64,41	35,59	73,06	26,94
Kalimantan Selatan	39,61	60,39	53,57	46,43	52,81	47,19	75,70	24,30
Kalimantan Timur	37,93	62,07	52,71	47,29	59,92	40,08	69,57	30,43
Kalimantan Utara	36,96	63,04	52,91	47,09	51,74	48,26	78,44	21,56
Sulawesi Utara	39,41	60,59	53,68	46,32	64,83	35,17	59,08	40,92
Sulawesi Tengah	42,71	57,29	52,89	47,11	65,05	34,95	76,90	23,10
Sulawesi Selatan	45,00	55,00	54,07	45,93	67,11	32,89	79,72	20,28
Sulawesi Tenggara	43,95	56,05	53,38	46,62	64,50	35,50	88,12	11,88
Gorontalo	43,22	56,78	54,05	45,95	66,15	33,85	66,16	33,84
Sulawesi Barat	45,71	54,29	53,37	46,63	47,88	52,12	95,40	4,60
Maluku	44,74	55,26	51,39	48,61	84,64	15,36	67,13	32,87
Maluku Utara	43,36	56,64	52,42	47,58	60,78	39,22	87,33	12,67
Papua Barat	38,53	61,47	52,18	47,82	62,69	37,31	76,35	23,65
Papua	35,47	64,53	51,53	48,47	61,91	38,09	68,09	31,91
Indonesia	40,80	59,20	53,78	46,22	62,99	37,01	81,68	18,32

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018



TABEL B - KARAKTERISTIK
RUMAH TANGGA

Tabel B.1. Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	19,65	80,35	20,75	79,25	20,41	79,59
Sumatera Utara	17,46	82,54	16,42	83,58	16,97	83,03
Sumatera Barat	16,54	83,46	16,01	83,99	16,24	83,76
Riau	12,24	87,76	9,52	90,48	10,62	89,38
Jambi	13,17	86,83	10,94	89,06	11,64	88,36
Sumatera Selatan	15,01	84,99	10,10	89,90	11,86	88,14
Bengkulu	12,79	87,21	9,53	90,47	10,58	89,42
Lampung	13,50	86,50	10,47	89,53	11,31	88,69
Kepulauan Bangka Belitung	11,64	88,36	8,41	91,59	10,14	89,86
Kepulauan Riau	11,26	88,74	12,03	87,97	11,37	88,63
DKI Jakarta	16,92	83,08	-	-	16,92	83,08
Jawa Barat	13,71	86,29	13,62	86,38	13,69	86,31
Jawa Tengah	17,96	82,04	15,35	84,65	16,67	83,33
DI Yogyakarta	21,07	78,93	15,56	84,44	19,61	80,39
Jawa Timur	17,77	82,23	17,49	82,51	17,63	82,37
Banten	12,26	87,74	14,55	85,45	12,91	87,09
Bali	11,44	88,56	8,99	91,01	10,63	89,37
Nusa Tenggara Barat	23,24	76,76	21,91	78,09	22,52	77,48
Nusa Tenggara Timur	19,21	80,79	17,86	82,14	18,18	81,82
Kalimantan Barat	14,36	85,64	10,51	89,49	11,77	88,23
Kalimantan Tengah	10,95	89,05	8,43	91,57	9,38	90,62
Kalimantan Selatan	15,19	84,81	14,92	85,08	15,05	84,95
Kalimantan Timur	11,18	88,82	9,44	90,56	10,60	89,40
Kalimantan Utara	11,24	88,76	7,48	92,52	9,71	90,29
Sulawesi Utara	16,81	83,19	10,86	89,14	13,84	86,16
Sulawesi Tengah	17,68	82,32	10,91	89,09	12,83	87,17
Sulawesi Selatan	20,04	79,96	19,46	80,54	19,70	80,30
Sulawesi Tenggara	16,16	83,84	14,85	85,15	15,35	84,65
Gorontalo	18,57	81,43	11,52	88,48	14,30	85,70
Sulawesi Barat	16,23	83,77	11,77	88,23	12,81	87,19
Maluku	18,35	81,65	12,45	87,55	15,00	85,00
Maluku Utara	16,60	83,40	9,88	90,12	11,88	88,12
Papua Barat	12,44	87,56	10,13	89,87	11,05	88,95
Papua	10,28	89,72	8,63	91,37	9,06	90,94
Indonesia	15,74	84,26	14,48	85,52	15,17	84,83

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel B.2.1. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perkotaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, 2018

Provinsi	Perempuan					Laki-laki				
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	13,80	6,06	13,29	66,85	100,00	4,91	91,86	0,90	2,33	100,00
Sumatera Utara	10,04	6,95	11,14	71,87	100,00	2,07	93,41	1,12	3,40	100,00
Sumatera Barat	25,34	4,84	18,47	51,34	100,00	4,34	92,26	1,15	2,25	100,00
Riau	16,43	4,41	17,06	62,10	100,00	4,50	92,22	1,08	2,20	100,00
Jambi	9,23	5,95	21,39	63,43	100,00	2,46	92,56	2,30	2,68	100,00
Sumatera Selatan	12,45	5,05	12,90	69,60	100,00	2,96	92,41	0,90	3,74	100,00
Bengkulu	18,27	7,44	16,14	58,15	100,00	3,37	93,36	1,60	1,67	100,00
Lampung	16,04	9,89	10,86	63,22	100,00	3,03	93,40	1,04	2,53	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	12,30	8,60	14,74	64,36	100,00	2,76	92,29	1,27	3,67	100,00
Kepulauan Riau	40,21	8,57	17,51	33,70	100,00	7,29	90,42	1,12	1,17	100,00
DKI Jakarta	12,85	8,03	16,37	62,76	100,00	4,25	90,83	1,05	3,87	100,00
Jawa Barat	7,77	6,70	16,96	68,57	100,00	2,48	92,75	1,69	3,08	100,00
Jawa Tengah	7,18	10,40	12,08	70,33	100,00	2,24	92,37	1,09	4,30	100,00
DI Yogyakarta	33,03	6,91	9,11	50,95	100,00	10,14	84,42	1,20	4,24	100,00
Jawa Timur	9,44	12,15	12,73	65,69	100,00	3,56	90,86	1,55	4,03	100,00
Banten	5,32	6,86	20,30	67,52	100,00	2,28	93,97	0,80	2,94	100,00
Bali	36,43	12,31	10,66	40,61	100,00	6,99	89,48	1,27	2,25	100,00
Nusa Tenggara Barat	12,26	28,47	18,00	41,27	100,00	3,79	91,65	2,28	2,27	100,00
Nusa Tenggara Timur	33,57	9,84	7,37	49,22	100,00	9,01	85,28	1,31	4,40	100,00
Kalimantan Barat	11,73	9,18	12,33	66,76	100,00	3,56	91,68	1,68	3,09	100,00
Kalimantan Tengah	16,61	8,58	18,05	56,76	100,00	4,16	91,81	0,91	3,11	100,00
Kalimantan Selatan	15,94	7,03	13,26	63,77	100,00	4,91	90,56	1,43	3,10	100,00
Kalimantan Timur	12,78	8,68	17,25	61,29	100,00	3,24	92,33	1,81	2,62	100,00
Kalimantan Utara	12,73	14,74	20,26	52,27	100,00	5,36	89,52	2,38	2,74	100,00
Sulawesi Utara	21,09	12,48	15,80	50,64	100,00	3,57	89,95	1,59	4,89	100,00
Sulawesi Tengah	26,92	4,18	15,49	53,40	100,00	6,05	89,14	1,00	3,82	100,00
Sulawesi Selatan	19,65	10,72	12,88	56,76	100,00	3,97	91,02	1,07	3,94	100,00
Sulawesi Tenggara	28,12	6,99	11,76	53,13	100,00	5,67	90,52	1,60	2,21	100,00
Gorontalo	19,33	16,15	13,29	51,23	100,00	4,54	89,96	0,93	4,56	100,00
Sulawesi Barat	16,52	12,67	14,50	56,31	100,00	5,41	91,67	2,17	0,75	100,00
Maluku	28,86	8,27	10,49	52,38	100,00	3,34	90,73	0,71	5,22	100,00
Maluku Utara	33,92	11,34	10,19	44,55	100,00	5,45	89,28	2,31	2,96	100,00
Papua Barat	9,35	11,66	15,53	63,46	100,00	4,01	91,75	1,31	2,92	100,00
Papua	16,51	11,26	11,96	60,27	100,00	4,32	90,96	1,09	3,63	100,00
Indonesia	12,15	9,24	14,46	64,15	100,00	3,40	91,83	1,36	3,41	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel B.2.2. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perdesaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, 2018

Provinsi	Perempuan					Laki-laki				
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	3,49	6,40	12,40	77,72	100,00	1,37	94,68	0,96	2,99	100,00
Sumatera Utara	2,59	7,44	9,09	80,87	100,00	0,81	94,19	1,20	3,80	100,00
Sumatera Barat	1,93	5,26	21,32	71,49	100,00	0,90	95,52	0,98	2,60	100,00
Riau	2,05	9,06	16,41	72,48	100,00	1,28	95,62	0,90	2,20	100,00
Jambi	1,61	5,57	14,07	78,76	100,00	0,98	95,35	0,77	2,90	100,00
Sumatera Selatan	2,45	6,19	14,09	77,27	100,00	0,89	95,64	0,84	2,63	100,00
Bengkulu	3,13	5,77	16,82	74,28	100,00	1,00	95,16	1,02	2,82	100,00
Lampung	1,12	9,04	13,90	75,94	100,00	0,91	95,47	1,03	2,60	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	1,50	4,38	17,22	76,91	100,00	2,41	92,96	1,52	3,11	100,00
Kepulauan Riau	3,53	5,67	13,70	77,10	100,00	3,48	91,95	1,62	2,95	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0,72	6,74	17,05	75,49	100,00	0,59	95,46	1,41	2,54	100,00
Jawa Tengah	1,35	15,20	10,35	73,10	100,00	1,10	94,57	0,79	3,53	100,00
DI Yogyakarta	3,48	6,66	17,25	72,61	100,00	1,35	94,51	0,60	3,54	100,00
Jawa Timur	1,71	17,56	11,79	68,94	100,00	1,25	93,52	1,20	4,03	100,00
Banten	0,76	7,65	16,35	75,24	100,00	0,83	94,56	1,52	3,08	100,00
Bali	10,36	9,33	8,33	71,99	100,00	1,41	94,61	1,04	2,93	100,00
Nusa Tenggara Barat	2,16	43,04	15,43	39,36	100,00	0,90	95,30	1,34	2,46	100,00
Nusa Tenggara Timur	6,50	26,21	8,49	58,80	100,00	2,06	92,73	0,66	4,56	100,00
Kalimantan Barat	1,99	12,30	10,07	75,64	100,00	1,83	93,65	0,70	3,82	100,00
Kalimantan Tengah	4,65	11,04	17,43	66,88	100,00	3,33	92,93	1,34	2,39	100,00
Kalimantan Selatan	3,33	7,50	18,97	70,20	100,00	2,70	92,37	1,70	3,23	100,00
Kalimantan Timur	3,14	7,34	14,49	75,03	100,00	2,68	90,90	2,10	4,31	100,00
Kalimantan Utara	10,49	9,68	15,76	64,06	100,00	1,28	94,16	1,74	2,82	100,00
Sulawesi Utara	4,18	11,39	9,47	74,96	100,00	1,20	93,34	1,30	4,16	100,00
Sulawesi Tengah	4,05	5,87	14,74	75,34	100,00	2,13	92,83	1,42	3,62	100,00
Sulawesi Selatan	9,61	12,50	11,82	66,07	100,00	1,52	93,16	1,39	3,93	100,00
Sulawesi Tenggara	5,16	16,85	14,51	63,49	100,00	1,47	94,36	1,50	2,68	100,00
Gorontalo	4,51	16,48	16,78	62,22	100,00	0,73	95,42	0,94	2,91	100,00
Sulawesi Barat	11,40	10,89	16,27	61,44	100,00	2,15	93,70	1,67	2,49	100,00
Maluku	9,54	7,72	11,54	71,20	100,00	1,74	91,73	1,19	5,34	100,00
Maluku Utara	4,49	9,27	11,32	74,93	100,00	1,13	94,09	1,38	3,40	100,00
Papua Barat	10,78	11,45	13,16	64,61	100,00	3,45	90,48	1,19	4,88	100,00
Papua	4,39	9,16	10,18	76,27	100,00	2,22	91,92	0,98	4,87	100,00
Indonesia	2,71	13,12	13,03	71,14	100,00	1,26	94,28	1,12	3,34	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel B.2.3. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perkotaan dan Perdesaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, 2018

Provinsi	Perempuan					Laki-laki				
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	6,59	6,30	12,67	74,45	100,00	2,49	93,79	0,94	2,78	100,00
Sumatera Utara	6,62	7,17	10,20	76,01	100,00	1,47	93,78	1,16	3,59	100,00
Sumatera Barat	12,45	5,07	20,04	62,44	100,00	2,41	94,09	1,06	2,44	100,00
Riau	8,74	6,89	16,71	67,65	100,00	2,56	94,27	0,97	2,20	100,00
Jambi	4,30	5,70	16,66	73,34	100,00	1,43	94,49	1,24	2,84	100,00
Sumatera Selatan	6,98	5,68	13,55	73,79	100,00	1,61	94,53	0,86	3,01	100,00
Bengkulu	9,00	6,42	16,56	68,02	100,00	1,74	94,60	1,20	2,46	100,00
Lampung	6,08	9,32	12,89	71,71	100,00	1,49	94,91	1,03	2,58	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	8,12	6,97	15,70	69,22	100,00	2,60	92,61	1,39	3,40	100,00
Kepulauan Riau	34,81	8,15	16,95	40,09	100,00	6,76	90,63	1,19	1,41	100,00
DKI Jakarta	12,85	8,03	16,37	62,76	100,00	4,25	90,83	1,05	3,87	100,00
Jawa Barat	5,84	6,71	16,99	70,46	100,00	1,96	93,49	1,61	2,93	100,00
Jawa Tengah	4,53	12,58	11,30	71,59	100,00	1,67	93,47	0,94	3,91	100,00
DI Yogyakarta	26,85	6,86	10,81	55,48	100,00	7,71	87,21	1,03	4,05	100,00
Jawa Timur	5,77	14,72	12,28	67,23	100,00	2,45	92,13	1,38	4,03	100,00
Banten	3,86	7,11	19,04	69,99	100,00	1,88	94,14	1,00	2,98	100,00
Bali	29,15	11,47	10,01	49,36	100,00	5,12	91,21	1,19	2,48	100,00
Nusa Tenggara Barat	6,97	36,10	16,66	40,27	100,00	2,22	93,63	1,77	2,37	100,00
Nusa Tenggara Timur	13,27	22,12	8,21	56,40	100,00	3,68	90,99	0,81	4,52	100,00
Kalimantan Barat	5,89	11,05	10,98	72,08	100,00	2,38	93,02	1,01	3,58	100,00
Kalimantan Tengah	9,91	9,96	17,70	62,43	100,00	3,64	92,52	1,18	2,66	100,00
Kalimantan Selatan	9,24	7,28	16,29	67,19	100,00	3,73	91,53	1,57	3,17	100,00
Kalimantan Timur	9,93	8,29	16,43	65,35	100,00	3,05	91,85	1,91	3,19	100,00
Kalimantan Utara	12,03	13,16	18,85	55,95	100,00	3,66	91,45	2,12	2,77	100,00
Sulawesi Utara	14,48	12,05	13,32	60,15	100,00	2,35	91,70	1,44	4,52	100,00
Sulawesi Tengah	12,99	5,21	15,04	66,76	100,00	3,18	91,84	1,30	3,68	100,00
Sulawesi Selatan	13,73	11,77	12,25	62,25	100,00	2,51	92,30	1,26	3,93	100,00
Sulawesi Tenggara	14,37	12,89	13,41	59,33	100,00	3,05	92,91	1,54	2,50	100,00
Gorontalo	12,09	16,31	15,00	56,60	100,00	2,16	93,38	0,94	3,53	100,00
Sulawesi Barat	12,91	11,42	15,75	59,93	100,00	2,88	93,25	1,78	2,10	100,00
Maluku	19,74	8,01	10,99	61,26	100,00	2,41	91,31	0,99	5,29	100,00
Maluku Utara	16,71	10,13	10,85	62,31	100,00	2,34	92,74	1,64	3,28	100,00
Papua Barat	10,14	11,54	14,23	64,09	100,00	3,67	90,98	1,24	4,11	100,00
Papua	7,93	9,77	10,70	71,60	100,00	2,75	91,68	1,01	4,56	100,00
Indonesia	8,07	10,91	13,84	67,17	100,00	2,42	92,95	1,26	3,37	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel B.3.1. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perkotaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah, 2018

Provinsi	Perempuan				Laki-laki			
	Tidak/belum pernah sekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Total	Tidak/belum pernah sekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	4,59	10,19	85,22	100,00	0,21	3,93	95,86	100,00
Sumatera Utara	2,53	4,40	93,07	100,00	0,43	1,52	98,04	100,00
Sumatera Barat	2,76	20,37	76,88	100,00	0,69	3,60	95,72	100,00
Riau	3,35	7,91	88,74	100,00	0,62	2,98	96,40	100,00
Jambi	5,89	4,27	89,84	100,00	0,55	2,11	97,34	100,00
Sumatera Selatan	2,76	4,64	92,60	100,00	0,65	1,93	97,41	100,00
Bengkulu	2,26	9,98	87,76	100,00	0,52	3,74	95,73	100,00
Lampung	7,01	12,14	80,85	100,00	0,76	2,76	96,48	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	6,86	0,78	92,36	100,00	1,50	0,16	98,34	100,00
Kepulauan Riau	4,86	0,93	94,20	100,00	1,09	0,32	98,59	100,00
DKI Jakarta	5,63	2,13	92,25	100,00	0,85	0,93	98,23	100,00
Jawa Barat	9,02	2,84	88,14	100,00	1,66	0,95	97,40	100,00
Jawa Tengah	14,14	2,88	82,98	100,00	2,70	1,08	96,22	100,00
DI Yogyakarta	8,82	25,21	65,97	100,00	1,48	7,17	91,35	100,00
Jawa Timur	12,12	5,10	82,78	100,00	2,45	2,07	95,48	100,00
Banten	12,46	0,30	87,25	100,00	1,99	1,57	96,44	100,00
Bali	7,69	9,07	83,23	100,00	1,51	1,64	96,85	100,00
Nusa Tenggara Barat	23,71	8,20	68,09	100,00	5,51	3,35	91,14	100,00
Nusa Tenggara Timur	5,58	20,08	74,33	100,00	1,81	5,89	92,30	100,00
Kalimantan Barat	14,90	6,67	78,43	100,00	3,41	2,37	94,22	100,00
Kalimantan Tengah	8,33	7,66	84,01	100,00	1,03	2,04	96,93	100,00
Kalimantan Selatan	4,54	7,09	88,38	100,00	0,98	2,24	96,79	100,00
Kalimantan Timur	4,69	1,39	93,92	100,00	1,30	1,54	97,16	100,00
Kalimantan Utara	16,35	6,42	77,23	100,00	1,76	1,65	96,59	100,00
Sulawesi Utara	0,39	11,28	88,33	100,00	0,41	1,35	98,24	100,00
Sulawesi Tengah	2,56	19,22	78,23	100,00	0,49	5,71	93,79	100,00
Sulawesi Selatan	6,45	7,59	85,95	100,00	2,46	3,12	94,43	100,00
Sulawesi Tenggara	11,96	19,43	68,61	100,00	2,57	6,66	90,77	100,00
Gorontalo	1,05	10,24	88,71	100,00	1,23	3,23	95,54	100,00
Sulawesi Barat	6,98	3,50	89,52	100,00	2,46	4,01	93,53	100,00
Maluku	2,34	14,33	83,33	100,00	0,70	2,52	96,77	100,00
Maluku Utara	2,05	24,31	73,64	100,00	0,40	5,68	93,92	100,00
Papua Barat	5,73	3,20	91,07	100,00	0,80	0,85	98,35	100,00
Papua	5,22	3,47	91,31	100,00	1,99	1,05	96,96	100,00
Indonesia	9,35	5,45	85,20	100,00	1,75	1,76	96,48	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel B.3.2. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perdesaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah, 2018

Provinsi	Perempuan				Laki-laki			
	Tidak/belum pernah sekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Total	Tidak/belum pernah sekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	9,15	0,37	90,48	100,00	1,48	0,45	98,07	100,00
Sumatera Utara	9,66	0,37	89,96	100,00	1,95	0,47	97,58	100,00
Sumatera Barat	7,26	1,28	91,46	100,00	1,52	0,29	98,18	100,00
Riau	12,40	0,21	87,40	100,00	1,59	0,54	97,88	100,00
Jambi	15,76	0,18	84,05	100,00	2,76	0,20	97,04	100,00
Sumatera Selatan	11,11	0,46	88,42	100,00	2,01	0,23	97,76	100,00
Bengkulu	21,02	2,63	76,35	100,00	2,22	0,96	96,83	100,00
Lampung	13,85	0,71	85,44	100,00	1,80	0,28	97,92	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	23,69	0,00	76,31	100,00	4,39	0,20	95,40	100,00
Kepulauan Riau	27,07	0,00	72,93	100,00	8,87	0,61	90,52	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	15,81	0,18	84,01	100,00	3,63	0,09	96,28	100,00
Jawa Tengah	24,21	0,06	75,72	100,00	4,99	0,23	94,78	100,00
DI Yogyakarta	30,34	0,68	68,97	100,00	7,90	0,67	91,44	100,00
Jawa Timur	30,05	0,59	69,36	100,00	9,12	0,26	90,62	100,00
Banten	20,40	0,22	79,38	100,00	3,30	0,00	96,70	100,00
Bali	39,40	0,00	60,60	100,00	6,28	0,06	93,66	100,00
Nusa Tenggara Barat	30,26	0,91	68,83	100,00	10,63	1,01	88,36	100,00
Nusa Tenggara Timur	17,43	1,01	81,56	100,00	7,73	0,60	91,67	100,00
Kalimantan Barat	35,28	0,54	64,18	100,00	7,04	0,39	92,57	100,00
Kalimantan Tengah	12,30	0,00	87,70	100,00	1,54	0,52	97,94	100,00
Kalimantan Selatan	10,29	0,76	88,95	100,00	1,77	0,43	97,80	100,00
Kalimantan Timur	17,34	0,00	82,66	100,00	4,00	0,42	95,58	100,00
Kalimantan Utara	20,58	0,00	79,42	100,00	3,68	0,85	95,47	100,00
Sulawesi Utara	0,97	0,57	98,46	100,00	0,78	0,21	99,01	100,00
Sulawesi Tengah	8,79	0,61	90,60	100,00	2,60	0,55	96,85	100,00
Sulawesi Selatan	24,94	0,56	74,50	100,00	9,75	0,25	90,00	100,00
Sulawesi Tenggara	18,73	0,57	80,70	100,00	3,34	0,68	95,98	100,00
Gorontalo	3,54	1,56	94,90	100,00	0,95	0,59	98,47	100,00
Sulawesi Barat	23,41	2,43	74,17	100,00	5,34	0,30	94,36	100,00
Maluku	4,66	0,68	94,65	100,00	1,31	0,47	98,22	100,00
Maluku Utara	6,56	0,61	92,83	100,00	1,67	0,45	97,89	100,00
Papua Barat	14,04	2,94	83,02	100,00	4,30	2,19	93,52	100,00
Papua	53,04	0,00	46,96	100,00	39,40	0,95	59,65	100,00
Indonesia	20,90	0,48	78,63	100,00	5,54	0,34	94,12	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel B.3.3. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perkotaan dan Perdesaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah, 2018

Provinsi	Perempuan				Laki-laki			
	Tidak/belum pernah sekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Total	Tidak/belum pernah sekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	7,78	3,33	88,90	100,00	1,08	1,55	97,37	100,00
Sumatera Utara	5,81	2,55	91,64	100,00	1,16	1,02	97,82	100,00
Sumatera Barat	5,24	9,86	84,90	100,00	1,16	1,75	97,10	100,00
Riau	8,19	3,79	88,02	100,00	1,20	1,51	97,29	100,00
Jambi	12,27	1,63	86,10	100,00	2,08	0,79	97,13	100,00
Sumatera Selatan	7,32	2,36	90,32	100,00	1,54	0,82	97,64	100,00
Bengkulu	13,75	5,48	80,77	100,00	1,69	1,83	96,48	100,00
Lampung	11,58	4,51	83,91	100,00	1,51	0,96	97,53	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	13,37	0,48	86,15	100,00	2,87	0,18	96,94	100,00
Kepulauan Riau	8,13	0,80	91,07	100,00	2,16	0,36	97,48	100,00
DKI Jakarta	5,63	2,13	92,25	100,00	0,85	0,93	98,23	100,00
Jawa Barat	10,87	2,11	87,02	100,00	2,20	0,71	97,09	100,00
Jawa Tengah	18,71	1,60	79,69	100,00	3,85	0,65	95,50	100,00
DI Yogyakarta	13,32	20,08	66,60	100,00	3,26	5,37	91,38	100,00
Jawa Timur	20,65	2,95	76,40	100,00	5,65	1,20	93,15	100,00
Banten	15,00	0,27	84,73	100,00	2,35	1,13	96,51	100,00
Bali	16,54	6,54	76,92	100,00	3,11	1,11	95,78	100,00
Nusa Tenggara Barat	27,14	4,38	68,48	100,00	8,29	2,08	89,63	100,00
Nusa Tenggara Timur	14,47	5,78	79,75	100,00	6,35	1,84	91,82	100,00
Kalimantan Barat	27,12	2,99	69,89	100,00	5,88	1,02	93,09	100,00
Kalimantan Tengah	10,55	3,37	86,08	100,00	1,35	1,09	97,56	100,00
Kalimantan Selatan	7,59	3,73	88,68	100,00	1,40	1,27	97,33	100,00
Kalimantan Timur	8,42	0,98	90,60	100,00	2,21	1,16	96,63	100,00
Kalimantan Utara	17,67	4,41	77,91	100,00	2,56	1,32	96,12	100,00
Sulawesi Utara	0,62	7,09	92,29	100,00	0,60	0,76	98,63	100,00
Sulawesi Tengah	6,36	7,88	85,76	100,00	2,04	1,94	96,03	100,00
Sulawesi Selatan	17,35	3,45	79,20	100,00	6,82	1,40	91,78	100,00
Sulawesi Tenggara	16,02	8,14	75,85	100,00	3,05	2,94	94,01	100,00
Gorontalo	2,27	6,00	91,74	100,00	1,05	1,57	97,37	100,00
Sulawesi Barat	18,56	2,74	78,70	100,00	4,69	1,13	94,18	100,00
Maluku	3,44	7,89	88,67	100,00	1,06	1,32	97,62	100,00
Maluku Utara	4,69	10,45	84,87	100,00	1,31	1,92	96,77	100,00
Papua Barat	10,30	3,06	86,64	100,00	2,92	1,66	95,42	100,00
Papua	39,09	1,01	59,90	100,00	29,92	0,97	69,11	100,00
Indonesia	14,34	3,30	82,36	100,00	3,48	1,11	95,40	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel B.4.1. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perkotaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018

Provinsi	Perempuan					Laki-laki				
	Tidak memiliki ijazah	SD	SMP	SMA+	Total	Tidak memiliki ijazah	SD	SMP	SMA+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	22,20	25,10	17,80	34,91	100,00	10,02	15,35	13,01	61,62	100,00
Sumatera Utara	20,66	23,73	16,30	39,31	100,00	6,20	16,69	20,33	56,78	100,00
Sumatera Barat	21,87	17,00	14,99	46,14	100,00	13,32	12,71	19,49	54,49	100,00
Riau	22,38	21,81	17,41	38,40	100,00	8,25	13,49	17,33	60,93	100,00
Jambi	30,80	22,43	14,60	32,17	100,00	11,88	16,82	16,83	54,47	100,00
Sumatera Selatan	27,87	30,29	14,59	27,25	100,00	12,66	20,28	17,13	49,94	100,00
Bengkulu	17,61	24,08	12,34	45,98	100,00	8,95	16,73	14,82	59,50	100,00
Lampung	27,38	22,96	15,00	34,66	100,00	12,68	22,24	18,67	46,42	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	32,50	28,37	13,96	25,18	100,00	17,47	21,71	17,16	43,67	100,00
Kepulauan Riau	15,67	10,69	15,94	57,70	100,00	6,27	14,38	14,53	64,82	100,00
DKI Jakarta	16,59	23,46	17,24	42,71	100,00	3,20	11,89	20,60	64,31	100,00
Jawa Barat	31,52	29,92	12,27	26,29	100,00	14,16	26,45	16,58	42,82	100,00
Jawa Tengah	42,42	25,63	10,97	20,98	100,00	17,17	27,59	17,93	37,31	100,00
DI Yogyakarta	26,40	16,39	10,76	46,45	100,00	13,61	13,29	14,70	58,40	100,00
Jawa Timur	40,80	24,97	12,91	21,32	100,00	18,51	25,60	16,33	39,55	100,00
Banten	38,25	23,47	12,71	25,58	100,00	14,74	18,19	15,55	51,52	100,00
Bali	25,23	16,75	9,12	48,91	100,00	9,79	17,24	14,09	58,89	100,00
Nusa Tenggara Barat	49,36	20,39	10,52	19,73	100,00	26,71	19,45	12,47	41,37	100,00
Nusa Tenggara Timur	22,43	16,29	12,18	49,10	100,00	15,38	17,73	11,59	55,30	100,00
Kalimantan Barat	36,95	24,92	9,70	28,43	100,00	20,43	17,39	13,30	48,88	100,00
Kalimantan Tengah	26,94	20,87	12,66	39,53	100,00	9,51	19,90	18,31	52,27	100,00
Kalimantan Selatan	31,87	23,77	11,36	32,99	100,00	14,44	19,21	14,88	51,47	100,00
Kalimantan Timur	27,13	24,43	14,15	34,28	100,00	7,84	16,52	16,20	59,44	100,00
Kalimantan Utara	43,40	15,62	14,93	26,06	100,00	12,16	17,83	18,49	51,51	100,00
Sulawesi Utara	18,20	16,02	13,73	52,05	100,00	15,08	15,51	15,23	54,18	100,00
Sulawesi Tengah	21,68	25,10	12,38	40,83	100,00	10,27	17,27	13,69	58,77	100,00
Sulawesi Selatan	28,46	19,80	11,71	40,03	100,00	13,89	18,14	13,58	54,39	100,00
Sulawesi Tenggara	27,54	16,59	10,50	45,37	100,00	15,12	13,83	10,31	60,74	100,00
Gorontalo	23,37	21,08	11,59	43,97	100,00	28,24	19,52	11,88	40,36	100,00
Sulawesi Barat	33,57	26,85	11,76	27,81	100,00	24,64	16,49	12,59	46,28	100,00
Maluku	13,71	23,51	19,13	43,65	100,00	9,77	13,95	11,77	64,51	100,00
Maluku Utara	12,82	12,27	8,18	66,73	100,00	11,17	11,98	15,01	61,85	100,00
Papua Barat	15,76	28,77	15,42	40,04	100,00	8,38	14,13	13,70	63,79	100,00
Papua	19,97	26,54	7,84	45,65	100,00	7,64	15,68	13,39	63,30	100,00
Indonesia	32,08	24,74	13,00	30,18	100,00	13,67	21,68	16,72	47,93	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel B.4.2. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perdesaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018

Provinsi	Perempuan					Laki-laki				
	Tidak memiliki ijazah	SD	SMP	SMA+	Total	Tidak memiliki ijazah	SD	SMP	SMA+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	43,32	33,98	10,50	12,20	100,00	17,11	32,37	21,18	29,35	100,00
Sumatera Utara	44,90	29,63	11,55	13,92	100,00	16,98	28,48	23,04	31,50	100,00
Sumatera Barat	57,07	20,06	9,86	13,01	100,00	30,62	26,02	19,01	24,35	100,00
Riau	56,91	24,75	10,80	7,54	100,00	20,40	33,26	19,92	26,42	100,00
Jambi	60,28	22,32	9,02	8,38	100,00	19,88	35,91	19,29	24,92	100,00
Sumatera Selatan	56,97	30,34	6,64	6,06	100,00	22,71	38,66	18,72	19,90	100,00
Bengkulu	61,32	23,05	6,44	9,19	100,00	20,84	32,59	19,36	27,21	100,00
Lampung	58,98	23,51	8,70	8,81	100,00	23,34	34,33	21,05	21,28	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	66,17	20,58	3,85	9,40	100,00	33,03	33,66	14,25	19,06	100,00
Kepulauan Riau	73,21	19,98	2,31	4,50	100,00	37,88	32,27	10,79	19,06	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	50,96	39,67	5,13	4,24	100,00	21,06	50,89	15,17	12,88	100,00
Jawa Tengah	59,41	26,82	7,95	5,82	100,00	27,67	42,08	16,07	14,18	100,00
DI Yogyakarta	54,35	23,85	11,14	10,66	100,00	24,15	30,72	18,56	26,57	100,00
Jawa Timur	61,73	25,98	7,30	4,99	100,00	30,77	38,98	14,60	15,65	100,00
Banten	59,17	31,92	5,78	3,13	100,00	26,97	46,04	13,24	13,76	100,00
Bali	69,35	16,56	3,07	11,02	100,00	24,85	31,15	14,78	29,22	100,00
Nusa Tenggara Barat	56,08	22,31	9,99	11,63	100,00	38,16	23,79	13,01	25,04	100,00
Nusa Tenggara Timur	52,64	33,17	6,01	8,17	100,00	35,31	35,60	9,86	19,23	100,00
Kalimantan Barat	70,68	19,58	4,43	5,31	100,00	34,44	33,71	13,62	18,23	100,00
Kalimantan Tengah	50,41	31,89	7,58	10,11	100,00	17,01	39,72	18,84	24,43	100,00
Kalimantan Selatan	63,35	23,71	6,25	6,69	100,00	25,00	37,40	16,46	21,15	100,00
Kalimantan Timur	50,38	31,92	8,59	9,11	100,00	17,89	34,69	17,86	29,56	100,00
Kalimantan Utara	61,78	17,35	5,91	14,96	100,00	23,56	29,16	13,93	33,35	100,00
Sulawesi Utara	42,30	27,08	11,04	19,58	100,00	24,58	28,88	18,48	28,07	100,00
Sulawesi Tengah	39,51	41,66	6,49	12,34	100,00	19,13	39,71	16,05	25,11	100,00
Sulawesi Selatan	57,82	24,05	6,52	11,62	100,00	34,97	29,39	13,57	22,06	100,00
Sulawesi Tenggara	55,02	25,28	7,72	11,98	100,00	24,20	28,63	16,22	30,95	100,00
Gorontalo	36,25	33,82	11,91	18,02	100,00	43,80	33,30	8,61	14,29	100,00
Sulawesi Barat	56,41	23,29	7,20	13,10	100,00	28,65	34,53	13,22	23,60	100,00
Maluku	33,19	35,79	8,01	23,00	100,00	14,67	35,10	16,99	33,25	100,00
Maluku Utara	49,70	33,54	5,08	11,68	100,00	21,82	33,66	15,80	28,72	100,00
Papua Barat	42,63	24,39	7,45	25,52	100,00	17,10	24,58	14,55	43,77	100,00
Papua	65,21	17,55	6,86	10,39	100,00	47,73	19,45	10,65	22,17	100,00
Indonesia	56,35	28,10	7,65	7,90	100,00	26,38	37,38	16,31	19,93	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel B.4.3. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perkotaan dan Perdesaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018

Provinsi	Perempuan					Laki-laki				
	Tidak memiliki ijazah	SD	SMP	SMA+	Total	Tidak memiliki ijazah	SD	SMP	SMA+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	36,96	31,31	12,69	19,04	100,00	14,87	27,00	18,60	39,53	100,00
Sumatera Utara	31,81	26,44	14,11	27,64	100,00	11,35	22,33	21,63	44,69	100,00
Sumatera Barat	41,25	18,69	12,17	27,90	100,00	23,01	20,17	19,22	37,60	100,00
Riau	40,84	23,38	13,88	21,90	100,00	15,58	25,43	18,89	40,10	100,00
Jambi	49,85	22,36	11,00	16,79	100,00	17,42	30,05	18,54	34,00	100,00
Sumatera Selatan	43,77	30,31	10,25	15,67	100,00	19,24	32,31	18,17	30,28	100,00
Bengkulu	44,37	23,45	8,73	23,46	100,00	17,12	27,63	17,94	37,31	100,00
Lampung	48,46	23,33	10,80	17,41	100,00	20,44	31,04	20,40	28,12	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	45,53	25,35	10,05	19,07	100,00	24,86	27,39	15,77	31,97	100,00
Kepulauan Riau	24,14	12,06	13,93	49,86	100,00	10,63	16,85	14,01	58,50	100,00
DKI Jakarta	16,59	23,46	17,24	42,71	100,00	3,20	11,89	20,60	64,31	100,00
Jawa Barat	36,82	32,58	10,32	20,28	100,00	16,05	33,15	16,19	34,61	100,00
Jawa Tengah	50,13	26,17	9,60	14,10	100,00	22,43	34,84	17,00	25,73	100,00
DI Yogyakarta	32,24	17,95	10,84	38,97	100,00	16,53	18,12	15,77	49,59	100,00
Jawa Timur	50,75	25,45	10,24	13,56	100,00	24,40	32,02	15,50	28,07	100,00
Banten	44,95	26,18	10,49	18,38	100,00	18,15	25,96	14,90	40,98	100,00
Bali	37,54	16,70	7,43	38,34	100,00	14,85	21,91	14,32	48,92	100,00
Nusa Tenggara Barat	52,88	21,40	10,24	15,48	100,00	32,92	21,81	12,76	32,51	100,00
Nusa Tenggara Timur	45,09	28,95	7,55	18,41	100,00	30,65	31,43	10,27	27,66	100,00
Kalimantan Barat	57,17	21,72	6,54	14,57	100,00	29,98	28,51	13,52	28,00	100,00
Kalimantan Tengah	40,08	27,05	9,82	23,05	100,00	14,23	32,38	18,64	34,74	100,00
Kalimantan Selatan	48,60	23,74	8,64	19,01	100,00	20,10	28,97	15,73	35,20	100,00
Kalimantan Timur	33,99	26,64	12,51	26,86	100,00	11,22	22,62	16,76	49,41	100,00
Kalimantan Utara	49,14	16,16	12,11	22,59	100,00	16,90	22,54	16,59	43,96	100,00
Sulawesi Utara	27,62	20,34	12,68	39,36	100,00	19,97	22,40	16,91	40,72	100,00
Sulawesi Tengah	32,54	35,19	8,79	23,48	100,00	16,76	33,70	15,42	34,13	100,00
Sulawesi Selatan	45,77	22,31	8,65	23,28	100,00	26,50	24,87	13,58	35,05	100,00
Sulawesi Tenggara	44,00	21,79	8,83	25,38	100,00	20,78	23,04	13,99	42,19	100,00
Gorontalo	29,66	27,30	11,75	31,29	100,00	37,98	28,15	9,83	24,04	100,00
Sulawesi Barat	49,67	24,34	8,55	17,44	100,00	27,75	30,50	13,08	28,68	100,00
Maluku	22,90	29,30	13,89	33,91	100,00	12,64	26,33	14,82	46,22	100,00
Maluku Utara	34,38	24,71	6,37	34,54	100,00	18,82	27,56	15,58	38,04	100,00
Papua Barat	30,55	26,36	11,04	32,05	100,00	13,67	20,47	14,22	51,65	100,00
Papua	52,02	20,17	7,14	20,67	100,00	37,57	18,49	11,34	32,59	100,00
Indonesia	42,57	26,19	10,69	20,55	100,00	19,47	28,85	16,53	35,15	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel B.5. Persentase Kepala Rumah Tangga yang Bekerja menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	51,08	90,84	63,54	94,55	59,79	93,37
Sumatera Utara	57,84	89,92	78,68	94,33	67,43	92,03
Sumatera Barat	47,63	87,34	67,46	94,90	58,55	91,58
Riau	62,66	91,39	61,36	95,98	61,96	94,16
Jambi	59,30	90,71	62,79	95,11	61,56	93,76
Sumatera Selatan	54,20	87,72	65,39	95,76	60,31	92,98
Bengkulu	57,91	91,46	67,06	96,63	63,51	95,01
Lampung	60,71	91,20	65,19	95,56	63,70	94,37
Kepulauan Bangka Belitung	55,91	90,60	60,34	95,26	57,62	92,81
Kepulauan Riau	70,63	92,07	52,13	94,58	67,91	92,42
DKI Jakarta	55,17	87,05	-	-	55,17	87,05
Jawa Barat	51,23	90,43	54,75	93,40	52,19	91,24
Jawa Tengah	56,56	87,51	61,02	93,38	58,58	90,45
DI Yogyakarta	51,81	83,47	74,90	93,92	56,64	86,36
Jawa Timur	59,97	88,97	68,43	94,47	64,00	91,61
Banten	53,83	90,32	56,11	94,08	54,56	91,37
Bali	77,79	91,75	79,29	94,08	78,21	92,53
Nusa Tenggara Barat	61,56	89,02	65,25	94,86	63,49	92,19
Nusa Tenggara Timur	53,04	85,40	82,50	95,81	75,13	93,38
Kalimantan Barat	52,30	87,16	73,74	96,26	65,16	93,36
Kalimantan Tengah	63,85	90,38	70,94	97,03	67,82	94,57
Kalimantan Selatan	57,52	90,93	70,62	95,43	64,49	93,35
Kalimantan Timur	62,37	89,19	66,34	94,69	63,54	91,04
Kalimantan Utara	56,44	89,98	72,71	93,16	61,52	91,30
Sulawesi Utara	50,12	86,69	54,92	92,60	52,00	89,74
Sulawesi Tengah	58,06	86,04	66,14	95,70	62,98	93,11
Sulawesi Selatan	49,92	86,55	52,79	92,97	51,61	90,39
Sulawesi Tenggara	62,54	88,22	69,21	95,53	66,53	92,77
Gorontalo	68,74	90,90	67,17	96,89	67,97	94,65
Sulawesi Barat	66,78	90,63	66,12	95,43	66,32	94,36
Maluku	60,92	88,44	65,40	94,08	63,03	91,74
Maluku Utara	59,35	90,83	65,01	96,62	62,66	94,99
Papua Barat	60,92	89,85	78,12	94,92	70,38	92,92
Papua	72,79	89,04	88,93	98,06	84,22	95,77
Indonesia	56,13	89,16	65,26	94,60	60,08	91,64

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel B.6.1. Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan, 2018

Provinsi	Berusaha sendiri	Berusaha dibantu buruh tdk tetap/ buruh tdk bayar	Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	Buruh/ karyawan/ pegawai	Pekerja bebas	Pekerja tidak dibayar	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	43,47	16,13	6,69	25,49	6,40	1,83	100,00
Sumatera Utara	43,26	18,26	4,51	24,39	7,74	1,84	100,00
Sumatera Barat	44,69	13,97	4,52	24,57	10,26	2,00	100,00
Riau	43,76	12,40	6,10	28,79	7,30	1,65	100,00
Jambi	45,36	12,25	4,34	29,95	6,03	2,07	100,00
Sumatera Selatan	41,51	19,18	3,41	28,50	5,16	2,24	100,00
Bengkulu	43,49	14,41	4,71	25,94	8,95	2,49	100,00
Lampung	43,42	19,37	4,52	18,58	12,25	1,86	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	46,84	5,98	3,69	35,95	6,65	0,89	100,00
Kepulauan Riau	24,71	4,30	0,34	66,64	3,11	0,89	100,00
DKI Jakarta	43,31	0,89	3,39	48,29	4,11	0,01	100,00
Jawa Barat	35,73	9,74	4,16	33,78	15,57	1,02	100,00
Jawa Tengah	38,93	14,37	4,74	28,88	11,04	2,04	100,00
DI Yogyakarta	40,97	15,80	5,32	27,29	6,99	3,63	100,00
Jawa Timur	38,69	16,85	4,55	25,67	12,49	1,75	100,00
Banten	41,67	6,36	2,27	38,32	9,71	1,67	100,00
Bali	36,89	6,82	3,25	44,96	6,08	2,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	37,99	21,12	3,42	15,26	21,14	1,06	100,00
Nusa Tenggara Timur	44,03	36,58	1,33	11,95	3,16	2,95	100,00
Kalimantan Barat	49,05	19,43	3,75	20,36	5,83	1,59	100,00
Kalimantan Tengah	46,33	13,10	1,64	35,88	1,99	1,07	100,00
Kalimantan Selatan	49,78	16,37	2,46	24,51	6,04	0,85	100,00
Kalimantan Timur	46,29	10,37	7,88	30,89	3,98	0,59	100,00
Kalimantan Utara	39,15	8,53	2,07	40,79	4,43	5,03	100,00
Sulawesi Utara	43,63	6,35	4,64	38,79	6,35	0,25	100,00
Sulawesi Tengah	45,11	20,10	2,94	25,28	4,59	1,98	100,00
Sulawesi Selatan	40,93	21,13	3,65	25,73	5,02	3,53	100,00
Sulawesi Tenggara	50,00	22,65	3,40	18,97	4,05	0,93	100,00
Gorontalo	42,97	7,76	5,57	34,60	7,93	1,17	100,00
Sulawesi Barat	47,85	28,33	3,36	14,83	2,84	2,78	100,00
Maluku	52,16	12,51	1,38	27,13	3,91	2,92	100,00
Maluku Utara	45,91	12,07	6,53	31,53	2,32	1,65	100,00
Papua Barat	46,56	15,07	2,28	33,11	0,30	2,67	100,00
Papua	42,47	37,51	0,10	14,88	1,44	3,60	100,00
Indonesia	40,50	14,97	4,12	28,61	10,08	1,72	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel B.6.2. Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-laki yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan, 2018

Provinsi	Berusaha sendiri	Berusaha dibantu buruh tdk tetap/ buruh tdk bayar	Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	Buruh/ karyawan/ pegawai	Pekerja bebas	Pekerja tidak dibayar	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	32,00	16,50	5,86	36,86	8,10	0,69	100,00
Sumatera Utara	26,35	16,57	4,66	42,37	9,19	0,86	100,00
Sumatera Barat	32,95	15,03	4,86	32,35	12,92	1,89	100,00
Riau	27,66	12,17	6,76	42,87	9,97	0,57	100,00
Jambi	35,08	15,96	5,83	36,08	6,44	0,60	100,00
Sumatera Selatan	27,14	25,92	4,58	35,63	6,09	0,63	100,00
Bengkulu	29,18	26,35	5,34	30,08	8,12	0,93	100,00
Lampung	30,31	23,65	4,91	26,07	14,20	0,87	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	31,55	10,68	6,83	44,37	6,09	0,48	100,00
Kepulauan Riau	25,37	3,93	3,66	61,39	5,22	0,43	100,00
DKI Jakarta	26,57	2,56	3,51	61,28	5,58	0,49	100,00
Jawa Barat	26,40	9,44	4,50	44,17	14,86	0,62	100,00
Jawa Tengah	23,17	19,39	4,52	35,55	16,03	1,32	100,00
DI Yogyakarta	20,52	19,29	5,28	42,40	11,10	1,41	100,00
Jawa Timur	23,28	19,03	5,27	35,60	15,65	1,18	100,00
Banten	25,37	5,64	4,31	54,41	9,38	0,90	100,00
Bali	19,41	16,30	4,24	48,00	9,71	2,33	100,00
Nusa Tenggara Barat	22,02	25,96	5,12	28,71	17,04	1,14	100,00
Nusa Tenggara Timur	25,77	43,06	3,16	23,62	3,33	1,06	100,00
Kalimantan Barat	28,15	23,10	4,09	37,55	6,49	0,61	100,00
Kalimantan Tengah	29,12	12,76	4,60	47,64	5,24	0,64	100,00
Kalimantan Selatan	31,64	16,61	3,87	41,58	5,56	0,74	100,00
Kalimantan Timur	28,14	8,42	4,31	54,29	4,41	0,44	100,00
Kalimantan Utara	26,35	10,30	6,45	53,26	2,80	0,85	100,00
Sulawesi Utara	36,23	7,26	4,52	37,80	13,07	1,10	100,00
Sulawesi Tengah	33,31	25,14	5,37	28,14	7,37	0,67	100,00
Sulawesi Selatan	33,33	23,09	4,52	32,69	5,39	0,99	100,00
Sulawesi Tenggara	33,34	24,89	5,30	30,16	5,39	0,93	100,00
Gorontalo	36,65	17,70	5,79	27,11	11,96	0,79	100,00
Sulawesi Barat	33,70	28,70	4,20	27,46	4,97	0,97	100,00
Maluku	42,20	16,91	2,92	32,90	4,06	1,01	100,00
Maluku Utara	38,22	21,32	5,20	29,83	4,27	1,16	100,00
Papua Barat	28,53	17,60	3,70	46,73	2,92	0,52	100,00
Papua	24,67	47,81	1,64	22,82	1,57	1,49	100,00
Indonesia	26,52	16,59	4,68	39,62	11,64	0,95	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel B.7.1. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perkotaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga, 2018

Provinsi	Perempuan					Laki-laki				
	1	2-3	4-5	6+	Total	1	2-3	4-5	6+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	20,37	38,43	26,88	14,32	100,00	3,78	24,73	48,89	22,60	100,00
Sumatera Utara	19,21	41,91	28,58	10,30	100,00	2,29	27,45	50,13	20,13	100,00
Sumatera Barat	21,73	47,63	19,32	11,32	100,00	4,11	30,04	43,78	22,07	100,00
Riau	21,91	36,01	29,85	12,23	100,00	4,05	30,81	48,83	16,32	100,00
Jambi	16,14	36,21	37,66	9,99	100,00	3,58	33,72	50,39	12,31	100,00
Sumatera Selatan	17,40	40,48	27,96	14,17	100,00	1,84	29,39	50,97	17,80	100,00
Bengkulu	28,97	42,89	22,32	5,83	100,00	3,79	31,07	53,37	11,77	100,00
Lampung	22,14	39,47	24,12	14,27	100,00	2,90	32,96	48,22	15,91	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	22,26	47,57	27,56	2,61	100,00	3,78	35,28	48,76	12,19	100,00
Kepulauan Riau	26,77	47,28	21,38	4,57	100,00	6,21	37,12	46,09	10,58	100,00
DKI Jakarta	23,69	45,50	21,20	9,60	100,00	5,91	37,96	45,22	10,92	100,00
Jawa Barat	27,29	46,25	19,41	7,06	100,00	3,95	38,25	46,64	11,16	100,00
Jawa Tengah	29,67	43,11	20,64	6,57	100,00	3,52	36,39	47,85	12,24	100,00
DI Yogyakarta	46,45	34,78	14,75	4,01	100,00	11,36	35,88	43,13	9,63	100,00
Jawa Timur	31,19	41,96	20,53	6,32	100,00	4,91	39,86	44,36	10,87	100,00
Banten	15,31	47,74	26,60	10,35	100,00	3,27	30,80	52,27	13,67	100,00
Bali	42,46	41,58	13,16	2,79	100,00	6,81	35,81	41,90	15,49	100,00
Nusa Tenggara Barat	24,34	54,17	17,20	4,29	100,00	3,83	38,10	47,61	10,45	100,00
Nusa Tenggara Timur	30,59	36,09	22,19	11,13	100,00	7,24	22,39	37,08	33,29	100,00
Kalimantan Barat	13,09	38,54	34,09	14,28	100,00	3,49	28,40	47,46	20,64	100,00
Kalimantan Tengah	26,18	44,69	21,08	8,06	100,00	4,19	34,74	48,70	12,37	100,00
Kalimantan Selatan	28,63	48,06	16,56	6,75	100,00	5,78	35,53	49,09	9,59	100,00
Kalimantan Timur	21,46	44,54	21,88	12,11	100,00	4,82	33,22	47,80	14,16	100,00
Kalimantan Utara	19,70	34,46	32,01	13,83	100,00	6,73	30,21	44,84	18,22	100,00
Sulawesi Utara	31,69	40,15	18,81	9,36	100,00	5,03	34,80	43,79	16,39	100,00
Sulawesi Tengah	29,03	42,46	16,17	12,34	100,00	5,91	33,53	41,05	19,51	100,00
Sulawesi Selatan	19,75	40,19	24,56	15,50	100,00	2,70	27,67	44,22	25,41	100,00
Sulawesi Tenggara	24,10	43,63	19,28	12,99	100,00	5,35	26,83	42,59	25,23	100,00
Gorontalo	23,55	45,21	20,02	11,22	100,00	4,14	31,12	45,30	19,44	100,00
Sulawesi Barat	13,17	41,84	26,53	18,46	100,00	4,65	28,67	43,11	23,57	100,00
Maluku	22,91	32,15	20,75	24,19	100,00	4,04	23,32	44,24	28,40	100,00
Maluku Utara	25,03	43,57	17,57	13,83	100,00	5,62	23,86	40,37	30,14	100,00
Papua Barat	16,11	44,83	18,98	20,08	100,00	6,49	28,76	41,18	23,57	100,00
Papua	15,34	43,04	21,28	20,35	100,00	6,06	33,47	39,06	21,41	100,00
Indonesia	26,66	43,60	21,42	8,32	100,00	4,34	35,51	46,68	13,48	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel B.7.2. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perdesaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga, 2018

Provinsi	Perempuan					Laki-laki				
	1	2-3	4-5	6+	Total	1	2-3	4-5	6+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	23,61	39,00	25,18	12,20	100,00	2,07	26,82	49,83	21,28	100,00
Sumatera Utara	27,42	41,92	22,16	8,50	100,00	2,32	29,73	45,42	22,53	100,00
Sumatera Barat	28,19	38,16	23,38	10,26	100,00	2,13	29,87	46,40	21,60	100,00
Riau	19,99	44,60	23,67	11,74	100,00	2,18	33,58	48,74	15,50	100,00
Jambi	25,64	42,08	25,10	7,18	100,00	2,23	38,85	47,91	11,00	100,00
Sumatera Selatan	24,60	42,85	26,03	6,51	100,00	1,50	36,01	50,49	12,00	100,00
Bengkulu	36,53	38,74	19,69	5,04	100,00	2,22	37,28	51,17	9,32	100,00
Lampung	24,86	49,02	23,11	3,00	100,00	2,24	42,11	46,60	9,04	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	28,29	47,54	22,82	1,35	100,00	2,91	38,78	48,59	9,72	100,00
Kepulauan Riau	27,57	31,84	29,49	11,10	100,00	4,49	36,49	48,15	10,87	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	44,28	36,70	15,92	3,11	100,00	2,44	48,70	41,24	7,62	100,00
Jawa Tengah	33,37	43,99	18,99	3,65	100,00	2,00	42,39	44,50	11,11	100,00
DI Yogyakarta	36,46	38,85	21,76	2,93	100,00	3,21	48,27	39,56	8,96	100,00
Jawa Timur	32,03	43,13	20,41	4,43	100,00	2,39	45,49	42,05	10,08	100,00
Banten	25,70	37,29	26,18	10,84	100,00	1,86	32,01	48,55	17,58	100,00
Bali	47,53	38,75	10,14	3,58	100,00	2,05	38,87	42,12	16,97	100,00
Nusa Tenggara Barat	17,54	63,29	15,71	3,46	100,00	1,81	45,62	43,31	9,26	100,00
Nusa Tenggara Timur	17,87	38,28	30,81	13,04	100,00	2,29	22,64	43,86	31,21	100,00
Kalimantan Barat	21,26	41,73	28,49	8,53	100,00	2,18	32,55	47,63	17,64	100,00
Kalimantan Tengah	25,51	41,52	25,96	7,01	100,00	4,78	41,86	42,20	11,16	100,00
Kalimantan Selatan	30,69	46,99	18,05	4,27	100,00	2,94	42,82	44,49	9,76	100,00
Kalimantan Timur	29,60	40,93	22,73	6,74	100,00	4,30	34,00	46,49	15,21	100,00
Kalimantan Utara	24,72	37,92	17,44	19,92	100,00	2,75	31,47	43,92	21,87	100,00
Sulawesi Utara	22,61	42,90	26,82	7,67	100,00	2,76	39,67	43,21	14,35	100,00
Sulawesi Tengah	22,94	45,82	19,81	11,43	100,00	2,58	36,07	44,84	16,51	100,00
Sulawesi Selatan	22,41	43,61	22,61	11,36	100,00	2,00	30,96	46,26	20,78	100,00
Sulawesi Tenggara	22,99	39,40	26,26	11,36	100,00	2,53	30,38	44,55	22,55	100,00
Gorontalo	23,80	45,58	20,32	10,30	100,00	1,13	33,70	46,58	18,59	100,00
Sulawesi Barat	15,68	46,81	24,01	13,49	100,00	2,20	31,21	44,98	21,61	100,00
Maluku	20,68	35,36	22,85	21,12	100,00	1,80	23,46	41,33	33,41	100,00
Maluku Utara	15,89	39,93	26,95	17,23	100,00	1,71	23,57	45,29	29,43	100,00
Papua Barat	22,71	40,08	19,08	18,14	100,00	5,53	33,38	39,36	21,73	100,00
Papua	27,50	44,70	21,59	6,21	100,00	5,31	41,22	37,01	16,46	100,00
Indonesia	29,55	42,72	21,25	6,48	100,00	2,36	39,26	44,59	13,79	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel B.7.3. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perkotaan dan Perdesaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga, 2018

Provinsi	Perempuan					Laki-laki				
	1	2-3	4-5	6+	Total	1	2-3	4-5	6+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	22,64	38,83	25,69	12,84	100,00	2,61	26,16	49,53	21,70	100,00
Sumatera Utara	22,99	41,91	25,63	9,47	100,00	2,31	28,54	47,87	21,28	100,00
Sumatera Barat	25,29	42,42	21,55	10,74	100,00	3,00	29,94	45,25	21,81	100,00
Riau	20,88	40,60	26,55	11,96	100,00	2,92	32,48	48,78	15,82	100,00
Jambi	22,28	40,00	29,54	8,17	100,00	2,65	37,28	48,67	11,40	100,00
Sumatera Selatan	21,34	41,78	26,91	9,98	100,00	1,62	33,72	50,66	14,00	100,00
Bengkulu	33,60	40,35	20,71	5,34	100,00	2,71	35,34	51,86	10,09	100,00
Lampung	23,95	45,84	23,45	6,76	100,00	2,42	39,62	47,04	10,91	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	24,59	47,56	25,73	2,13	100,00	3,37	36,94	48,68	11,01	100,00
Kepulauan Riau	26,89	45,00	22,58	5,53	100,00	5,97	37,03	46,37	10,62	100,00
DKI Jakarta	23,69	45,50	21,20	9,60	100,00	5,91	37,96	45,22	10,92	100,00
Jawa Barat	31,92	43,64	18,45	5,98	100,00	3,54	41,11	45,16	10,19	100,00
Jawa Tengah	31,35	43,51	19,89	5,25	100,00	2,76	39,39	46,18	11,68	100,00
DI Yogyakarta	44,36	35,64	16,21	3,79	100,00	9,10	39,31	42,14	9,44	100,00
Jawa Timur	31,59	42,52	20,47	5,42	100,00	3,70	42,57	43,25	10,49	100,00
Banten	18,64	44,39	26,46	10,51	100,00	2,87	31,14	51,23	14,76	100,00
Bali	43,88	40,79	12,32	3,01	100,00	5,21	36,84	41,97	15,99	100,00
Nusa Tenggara Barat	20,77	58,95	16,42	3,85	100,00	2,74	42,18	45,28	9,81	100,00
Nusa Tenggara Timur	21,05	37,73	28,65	12,57	100,00	3,45	22,58	42,27	31,70	100,00
Kalimantan Barat	17,99	40,45	30,73	10,83	100,00	2,60	31,23	47,58	18,60	100,00
Kalimantan Tengah	25,81	42,92	23,81	7,47	100,00	4,56	39,22	44,60	11,61	100,00
Kalimantan Selatan	29,72	47,49	17,35	5,43	100,00	4,26	39,44	46,62	9,68	100,00
Kalimantan Timur	23,86	43,48	22,13	10,53	100,00	4,65	33,48	47,36	14,51	100,00
Kalimantan Utara	21,26	35,54	27,46	15,73	100,00	5,07	30,74	44,46	19,73	100,00
Sulawesi Utara	28,14	41,22	21,94	8,70	100,00	3,86	37,31	43,49	15,34	100,00
Sulawesi Tengah	25,32	44,51	18,39	11,79	100,00	3,47	35,39	43,83	17,31	100,00
Sulawesi Selatan	21,32	42,21	23,41	13,06	100,00	2,28	29,63	45,44	22,64	100,00
Sulawesi Tenggara	23,43	41,09	23,46	12,01	100,00	3,59	29,04	43,81	23,56	100,00
Gorontalo	23,67	45,39	20,17	10,77	100,00	2,25	32,74	46,10	18,91	100,00
Sulawesi Barat	14,94	45,35	24,75	14,96	100,00	2,75	30,64	44,56	22,05	100,00
Maluku	21,86	33,66	21,74	22,74	100,00	2,73	23,40	42,54	31,33	100,00
Maluku Utara	19,68	41,44	23,06	15,82	100,00	2,81	23,65	43,91	29,63	100,00
Papua Barat	19,74	42,21	19,04	19,01	100,00	5,91	31,56	40,07	22,45	100,00
Papua	23,95	44,22	21,50	10,33	100,00	5,50	39,26	37,53	17,71	100,00
Indonesia	27,91	43,22	21,34	7,52	100,00	3,44	37,22	45,72	13,62	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel B.8.1. Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan menurut Provinsi, Distribusi Pengeluaran per Kapita Sebulan, dan Jumlah Anggota Rumah Tangga, 2018

Provinsi	Distribusi Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)					
	40% bawah		40% menengah		20% atas	
	1-2	3+	1-2	3+	1-2	3+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	25,45	74,55	45,27	54,73	59,50	40,50
Sumatera Utara	25,06	74,94	47,02	52,98	63,32	36,68
Sumatera Barat	32,04	67,96	50,40	49,60	67,92	32,08
Riau	23,89	76,11	38,28	61,72	71,34	28,66
Jambi	30,07	69,93	41,14	58,86	61,85	38,15
Sumatera Selatan	25,34	74,66	44,28	55,72	63,16	36,84
Bengkulu	35,85	64,15	61,59	38,41	72,78	27,22
Lampung	31,93	68,07	53,08	46,92	66,71	33,29
Kepulauan Bangka Belitung	32,56	67,44	51,67	48,33	77,12	22,88
Kepulauan Riau	30,50	69,50	45,79	54,21	69,52	30,48
DKI Jakarta	21,01	78,99	52,05	47,95	66,11	33,89
Jawa Barat	46,38	53,62	55,20	44,80	69,75	30,25
Jawa Tengah	45,24	54,76	54,69	45,31	72,01	27,99
DI Yogyakarta	55,95	44,05	60,55	39,45	80,26	19,74
Jawa Timur	45,62	54,38	55,58	44,42	68,80	31,20
Banten	26,98	73,02	44,71	55,29	57,74	42,26
Bali	54,60	45,40	73,39	26,61	78,93	21,07
Nusa Tenggara Barat	40,67	59,33	55,59	44,41	68,08	31,92
Nusa Tenggara Timur	10,02	89,98	36,94	63,06	70,30	29,70
Kalimantan Barat	17,06	82,94	44,03	55,97	59,51	40,49
Kalimantan Tengah	27,00	73,00	53,37	46,63	64,65	35,35
Kalimantan Selatan	41,87	58,13	60,40	39,60	79,65	20,35
Kalimantan Timur	21,48	78,52	45,36	54,64	66,50	33,50
Kalimantan Utara	22,55	77,45	44,65	55,35	74,95	25,05
Sulawesi Utara	20,37	79,63	48,56	51,44	73,66	26,34
Sulawesi Tengah	29,92	70,08	50,05	49,95	71,34	28,66
Sulawesi Selatan	32,85	67,15	46,51	53,49	60,38	39,62
Sulawesi Tenggara	24,62	75,38	47,98	52,02	68,51	31,49
Gorontalo	20,85	79,15	48,07	51,93	70,42	29,58
Sulawesi Barat	28,53	71,47	36,21	63,79	55,04	44,96
Maluku	3,86	96,14	36,49	63,51	72,05	27,95
Maluku Utara	9,70	90,30	38,61	61,39	63,18	36,82
Papua Barat	11,54	88,46	37,12	62,88	77,07	22,93
Papua	20,13	79,87	50,28	49,72	72,90	27,10
Indonesia	39,41	60,59	51,84	48,16	67,97	32,03

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel B.8.2. Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-laki menurut Provinsi, Distribusi Pengeluaran per Kapita Sebulan, dan Jumlah Anggota Rumah Tangga, 2018

Provinsi	Distribusi Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)					
	40% bawah		40% menengah		20% atas	
	1-2	3+	1-2	3+	1-2	3+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	4,00	96,00	8,33	91,67	22,18	77,82
Sumatera Utara	3,70	96,30	10,97	89,03	27,02	72,98
Sumatera Barat	5,65	94,35	11,53	88,47	28,97	71,03
Riau	3,17	96,83	10,39	89,61	30,42	69,58
Jambi	5,28	94,72	11,74	88,26	26,62	73,38
Sumatera Selatan	4,80	95,20	11,21	88,79	24,74	75,26
Bengkulu	6,01	93,99	13,73	86,27	26,48	73,52
Lampung	6,46	93,54	11,33	88,67	23,86	76,14
Kepulauan Bangka Belitung	6,21	93,79	12,28	87,72	30,06	69,94
Kepulauan Riau	5,90	94,10	20,17	79,83	36,05	63,95
DKI Jakarta	5,67	94,33	21,32	78,68	34,63	65,37
Jawa Barat	11,23	88,77	15,78	84,22	29,23	70,77
Jawa Tengah	12,06	87,94	15,24	84,76	26,88	73,12
DI Yogyakarta	16,69	83,31	18,51	81,49	42,76	57,24
Jawa Timur	13,37	86,63	17,38	82,62	30,42	69,58
Banten	4,32	95,68	9,68	90,32	23,96	76,04
Bali	12,63	87,37	20,11	79,89	35,98	64,02
Nusa Tenggara Barat	10,08	89,92	14,37	85,63	27,83	72,17
Nusa Tenggara Timur	2,11	97,89	8,98	91,02	26,78	73,22
Kalimantan Barat	4,44	95,56	9,23	90,77	25,03	74,97
Kalimantan Tengah	6,25	93,75	12,83	87,17	37,56	62,44
Kalimantan Selatan	7,33	92,67	16,01	83,99	32,09	67,91
Kalimantan Timur	3,94	96,06	13,57	86,43	34,86	65,14
Kalimantan Utara	4,41	95,59	10,23	89,77	37,57	62,43
Sulawesi Utara	5,73	94,27	18,32	81,68	34,87	65,13
Sulawesi Tengah	5,75	94,25	13,66	86,34	34,15	65,85
Sulawesi Selatan	6,17	93,83	11,21	88,79	22,58	77,42
Sulawesi Tenggara	2,88	97,12	10,67	89,33	26,63	73,37
Gorontalo	6,10	93,90	12,08	87,92	27,43	72,57
Sulawesi Barat	4,40	95,60	11,08	88,92	27,79	72,21
Maluku	1,27	98,73	8,19	91,81	24,35	75,65
Maluku Utara	1,24	98,76	7,44	92,56	24,80	75,20
Papua Barat	4,34	95,66	13,39	86,61	37,52	62,48
Papua	7,29	92,71	20,26	79,74	46,39	53,61
Indonesia	9,33	90,67	14,15	85,85	29,08	70,92

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018



TABEL C - PENDIDIKAN

Tabel C.1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	98,72	99,67	96,34	98,67	97,09	98,99
Sumatera Utara	99,41	99,81	97,65	99,21	98,61	99,53
Sumatera Barat	99,21	99,55	98,26	99,38	98,69	99,46
Riau	99,25	99,86	98,55	99,34	98,83	99,55
Jambi	98,37	99,64	96,59	98,82	97,17	99,08
Sumatera Selatan	99,24	99,76	97,24	99,02	98,00	99,29
Bengkulu	98,92	99,34	95,76	98,77	96,82	98,96
Lampung	97,28	99,17	94,67	97,97	95,47	98,33
Kepulauan Bangka Belitung	97,65	99,02	96,02	97,99	96,91	98,54
Kepulauan Riau	98,93	99,57	95,56	97,44	98,46	99,26
DKI Jakarta	99,55	99,89	-	-	99,55	99,89
Jawa Barat	98,12	99,34	96,93	98,57	97,81	99,14
Jawa Tengah	93,07	97,58	88,15	95,00	90,68	96,32
DI Yogyakarta	95,05	98,24	86,38	93,89	92,66	97,09
Jawa Timur	93,29	97,27	84,01	92,47	88,85	94,99
Banten	97,25	99,06	94,00	98,32	96,34	98,85
Bali	93,26	98,00	82,22	93,47	89,48	96,49
Nusa Tenggara Barat	86,31	93,77	80,85	90,17	83,42	91,86
Nusa Tenggara Timur	96,38	97,50	88,74	91,93	90,57	93,30
Kalimantan Barat	93,67	97,65	87,24	94,53	89,48	95,58
Kalimantan Tengah	99,25	99,70	98,68	99,34	98,91	99,48
Kalimantan Selatan	98,47	99,47	96,89	98,93	97,63	99,19
Kalimantan Timur	98,91	99,53	97,75	98,95	98,53	99,34
Kalimantan Utara	95,74	97,23	92,00	94,32	94,21	96,01
Sulawesi Utara	99,94	99,92	99,89	99,73	99,92	99,83
Sulawesi Tengah	99,45	99,55	96,30	98,08	97,22	98,50
Sulawesi Selatan	95,20	97,49	86,61	90,67	90,19	93,56
Sulawesi Tenggara	95,65	97,76	90,50	95,59	92,51	96,44
Gorontalo	99,47	99,18	98,31	98,04	98,77	98,48
Sulawesi Barat	93,61	96,37	90,47	93,92	91,23	94,49
Maluku	99,48	99,84	98,69	99,08	99,03	99,40
Maluku Utara	99,07	99,93	97,77	99,09	98,16	99,34
Papua Barat	98,65	99,54	94,67	97,39	96,34	98,28
Papua	97,97	98,62	60,97	74,51	71,26	81,69
Indonesia	96,46	98,67	90,93	95,67	93,99	97,33

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel C.2. Persentase Penduduk Berumur 15 - 24 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	100,00	99,89	99,91	99,89	99,94	99,89
Sumatera Utara	99,77	99,98	99,70	99,89	99,74	99,93
Sumatera Barat	99,91	99,87	99,92	99,49	99,92	99,66
Riau	100,00	99,87	99,96	99,73	99,98	99,79
Jambi	100,00	99,89	99,91	100,00	99,94	99,96
Sumatera Selatan	99,96	99,91	99,87	99,87	99,91	99,88
Bengkulu	100,00	100,00	100,00	99,72	100,00	99,82
Lampung	99,69	99,77	99,92	99,88	99,84	99,85
Kepulauan Bangka Belitung	99,56	100,00	100,00	100,00	99,77	100,00
Kepulauan Riau	99,90	100,00	100,00	100,00	99,91	100,00
DKI Jakarta	100,00	99,93	-	-	100,00	99,93
Jawa Barat	100,00	100,00	100,00	99,94	100,00	99,99
Jawa Tengah	99,95	99,89	99,91	99,78	99,93	99,83
DI Yogyakarta	100,00	100,00	100,00	99,98	100,00	100,00
Jawa Timur	99,88	99,89	99,87	99,89	99,87	99,89
Banten	100,00	100,00	100,00	99,85	100,00	99,96
Bali	99,93	100,00	99,61	100,00	99,83	100,00
Nusa Tenggara Barat	100,00	99,44	99,72	99,83	99,86	99,64
Nusa Tenggara Timur	99,67	99,56	98,14	98,05	98,56	98,45
Kalimantan Barat	100,00	99,84	99,92	99,53	99,95	99,64
Kalimantan Tengah	100,00	100,00	99,93	99,59	99,96	99,75
Kalimantan Selatan	99,95	99,67	100,00	100,00	99,98	99,84
Kalimantan Timur	100,00	100,00	99,99	100,00	100,00	100,00
Kalimantan Utara	99,47	99,47	99,83	98,53	99,62	99,09
Sulawesi Utara	100,00	100,00	100,00	99,80	100,00	99,91
Sulawesi Tengah	100,00	99,78	99,65	99,52	99,76	99,60
Sulawesi Selatan	99,74	99,68	99,51	99,09	99,62	99,35
Sulawesi Tenggara	100,00	99,88	99,80	99,41	99,88	99,61
Gorontalo	99,92	99,78	99,83	99,85	99,87	99,82
Sulawesi Barat	99,59	100,00	99,58	99,02	99,58	99,25
Maluku	100,00	99,82	99,55	99,45	99,75	99,61
Maluku Utara	99,69	100,00	99,92	99,93	99,84	99,95
Papua Barat	100,00	100,00	98,65	99,48	99,22	99,70
Papua	99,68	99,81	78,59	87,69	84,76	91,59
Indonesia	99,94	99,92	99,38	99,47	99,70	99,72

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel C.3. Persentase Penduduk Berumur 60 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	88,86	97,36	74,71	89,82	78,78	92,02
Sumatera Utara	95,74	98,46	89,76	96,22	92,83	97,39
Sumatera Barat	95,77	98,11	90,47	96,94	92,65	97,42
Riau	90,32	98,74	83,17	93,81	85,98	95,72
Jambi	85,42	97,07	72,71	90,12	76,82	92,30
Sumatera Selatan	95,21	98,52	82,66	94,26	87,33	95,77
Bengkulu	88,92	93,15	67,56	91,78	73,64	92,15
Lampung	83,08	96,28	67,54	88,61	71,87	90,61
Kepulauan Bangka Belitung	87,10	95,92	78,10	93,01	83,17	94,60
Kepulauan Riau	87,03	96,84	80,68	89,41	85,50	95,17
DKI Jakarta	96,08	99,32	-	-	96,08	99,32
Jawa Barat	85,44	94,60	81,85	91,51	84,31	93,63
Jawa Tengah	69,13	88,59	55,57	80,01	62,24	84,18
DI Yogyakarta	75,51	91,93	57,90	75,52	69,24	86,18
Jawa Timur	70,36	86,74	44,84	71,64	57,19	79,04
Banten	78,32	93,96	71,01	90,96	75,73	92,92
Bali	67,12	88,69	41,36	75,33	56,36	83,20
Nusa Tenggara Barat	36,16	68,58	31,81	63,82	33,80	65,95
Nusa Tenggara Timur	79,33	90,18	60,50	75,13	64,30	78,12
Kalimantan Barat	67,74	88,35	44,79	72,86	53,01	78,19
Kalimantan Tengah	90,23	96,98	85,07	93,85	86,99	95,00
Kalimantan Selatan	89,01	97,75	75,71	89,88	81,54	93,41
Kalimantan Timur	89,36	97,07	80,16	90,39	86,21	94,64
Kalimantan Utara	73,24	87,26	55,46	64,22	65,40	76,80
Sulawesi Utara	99,94	99,70	99,46	99,28	99,70	99,48
Sulawesi Tengah	94,62	97,73	78,67	89,55	82,91	91,55
Sulawesi Selatan	78,85	90,12	51,29	68,27	61,41	76,30
Sulawesi Tenggara	67,32	83,40	54,02	80,79	58,67	81,72
Gorontalo	98,31	95,91	91,47	90,42	94,19	92,42
Sulawesi Barat	75,65	84,43	57,15	74,26	62,07	76,70
Maluku	96,05	99,51	96,33	98,78	96,22	99,07
Maluku Utara	90,79	99,55	81,15	91,83	83,78	93,78
Papua Barat	93,01	98,36	73,70	85,32	81,68	90,27
Papua	89,50	93,90	48,30	60,82	65,66	73,59
Indonesia	79,40	92,14	62,84	82,29	71,39	87,37

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel C.4.1. Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018

Provinsi	Tidak memiliki ijazah	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat	D1-D4/S1	S2/S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	15,89	23,08	21,73	25,72	13,11	0,46
Sumatera Utara	13,07	19,76	24,11	32,72	9,92	0,43
Sumatera Barat	21,34	18,38	19,37	26,66	13,67	0,58
Riau	15,97	23,58	21,92	27,41	10,84	0,28
Jambi	19,80	25,01	21,61	24,53	8,91	0,13
Sumatera Selatan	19,55	28,07	20,29	23,98	7,78	0,33
Bengkulu	18,63	25,12	20,59	23,47	11,56	0,62
Lampung	20,93	25,41	26,01	20,40	6,93	0,31
Kepulauan Bangka Belitung	23,01	25,23	19,86	24,03	7,68	0,20
Kepulauan Riau	11,97	15,92	18,18	43,37	10,42	0,15
DKI Jakarta	5,74	15,48	20,81	41,52	15,57	0,87
Jawa Barat	16,80	30,58	21,93	22,90	7,42	0,38
Jawa Tengah	24,46	28,20	22,26	18,67	6,23	0,19
DI Yogyakarta	19,09	16,51	17,78	32,33	13,47	0,83
Jawa Timur	26,25	26,91	20,23	19,86	6,49	0,26
Banten	17,82	26,83	20,75	25,65	8,42	0,53
Bali	23,06	22,17	17,37	25,86	11,18	0,36
Nusa Tenggara Barat	33,95	21,07	18,36	18,15	8,29	0,19
Nusa Tenggara Timur	27,45	31,33	16,62	16,34	7,96	0,30
Kalimantan Barat	29,06	26,16	19,29	18,53	6,65	0,32
Kalimantan Tengah	17,48	30,99	21,30	21,38	8,57	0,28
Kalimantan Selatan	22,94	26,79	19,85	20,81	9,21	0,40
Kalimantan Timur	13,71	22,86	21,56	29,77	11,54	0,56
Kalimantan Utara	17,59	22,76	21,60	26,46	11,18	0,40
Sulawesi Utara	16,08	18,97	20,53	32,92	10,82	0,68
Sulawesi Tengah	17,64	30,41	19,14	21,42	10,94	0,45
Sulawesi Selatan	24,87	23,25	18,48	20,88	11,95	0,56
Sulawesi Tenggara	21,10	20,44	20,19	25,97	11,69	0,62
Gorontalo	26,52	26,22	16,04	21,64	9,15	0,43
Sulawesi Barat	27,09	25,54	19,40	17,24	10,38	0,35
Maluku	12,94	23,34	18,86	31,02	13,20	0,65
Maluku Utara	19,34	25,71	19,49	23,49	11,72	0,25
Papua Barat	17,17	19,74	20,51	27,56	14,73	0,29
Papua	44,00	19,07	13,52	16,21	6,93	0,27
Indonesia	20,74	25,79	20,94	23,54	8,61	0,37

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel C.4.2. Persentase Penduduk Laki-laki Usia 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018

Provinsi	Tidak memiliki ijazah	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat	D1-D4/S1	S2/S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	11,17	22,17	22,57	33,23	10,06	0,80
Sumatera Utara	8,77	20,28	25,60	37,17	7,82	0,37
Sumatera Barat	18,13	20,39	22,59	30,10	8,17	0,62
Riau	13,09	22,91	21,95	33,98	7,73	0,35
Jambi	13,35	26,65	21,79	30,34	7,60	0,27
Sumatera Selatan	15,69	28,16	21,68	28,06	5,66	0,75
Bengkulu	14,51	25,41	22,18	27,78	9,42	0,70
Lampung	16,12	27,78	25,28	24,87	5,47	0,48
Kepulauan Bangka Belitung	20,91	26,00	19,81	25,59	7,40	0,28
Kepulauan Riau	9,29	16,60	18,44	45,90	9,29	0,48
DKI Jakarta	3,07	10,96	20,65	48,39	15,80	1,13
Jawa Barat	12,42	29,30	21,62	28,72	7,32	0,62
Jawa Tengah	16,76	29,35	24,46	22,95	6,07	0,41
DI Yogyakarta	12,70	15,64	18,87	39,54	12,14	1,10
Jawa Timur	18,04	27,71	21,16	26,14	6,47	0,49
Banten	13,65	23,68	20,44	32,33	8,96	0,94
Bali	13,32	19,44	17,93	36,24	12,24	0,83
Nusa Tenggara Barat	26,93	19,65	19,23	24,30	9,52	0,37
Nusa Tenggara Timur	26,29	29,22	16,13	19,83	8,10	0,42
Kalimantan Barat	24,08	27,10	18,97	22,63	6,70	0,52
Kalimantan Tengah	12,56	30,00	21,61	27,01	8,42	0,41
Kalimantan Selatan	16,53	27,00	20,13	27,60	8,03	0,72
Kalimantan Timur	10,21	19,52	21,12	38,15	10,23	0,76
Kalimantan Utara	13,71	21,13	22,10	31,78	10,62	0,66
Sulawesi Utara	16,24	19,99	20,00	34,34	8,77	0,66
Sulawesi Tengah	15,14	29,62	19,01	27,11	8,33	0,80
Sulawesi Selatan	20,72	23,46	18,44	27,09	9,50	0,80
Sulawesi Tenggara	16,85	19,96	19,85	31,15	11,34	0,84
Gorontalo	33,07	25,11	14,20	20,83	6,26	0,53
Sulawesi Barat	25,04	27,92	17,72	20,03	8,52	0,77
Maluku	11,28	21,24	19,63	37,13	10,06	0,66
Maluku Utara	15,65	23,38	19,56	31,19	9,78	0,44
Papua Barat	11,97	18,79	19,79	34,58	13,80	1,07
Papua	33,18	19,48	15,44	23,44	8,03	0,43
Indonesia	15,29	25,47	21,53	29,18	7,93	0,59

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel C.5.1. Persentase Penduduk Perempuan Usia 15-59 Tahun menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018

Provinsi	Tidak memiliki ijazah	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat	D1-D4/S1	S2/S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	11,76	21,83	23,47	28,08	14,36	0,49
Sumatera Utara	9,09	18,11	25,78	35,75	10,79	0,47
Sumatera Barat	15,31	17,84	21,06	29,81	15,29	0,68
Riau	12,62	22,96	23,29	29,25	11,59	0,29
Jambi	14,83	25,18	23,47	26,67	9,72	0,14
Sumatera Selatan	14,73	28,05	21,96	26,41	8,50	0,36
Bengkulu	13,28	25,31	22,41	25,68	12,64	0,69
Lampung	14,42	26,10	28,77	22,71	7,65	0,35
Kepulauan Bangka Belitung	18,45	24,62	21,73	26,44	8,53	0,22
Kepulauan Riau	8,68	15,28	18,98	45,86	11,04	0,16
DKI Jakarta	3,93	14,09	21,67	43,28	16,17	0,86
Jawa Barat	11,70	30,00	24,50	25,29	8,09	0,41
Jawa Tengah	15,00	29,62	25,99	22,02	7,15	0,22
DI Yogyakarta	8,74	14,93	20,57	38,82	15,99	0,95
Jawa Timur	17,28	27,56	23,50	23,76	7,60	0,30
Banten	13,90	26,86	22,34	27,36	9,01	0,54
Bali	15,23	21,69	19,99	29,91	12,76	0,42
Nusa Tenggara Barat	27,44	22,31	20,58	20,25	9,21	0,21
Nusa Tenggara Timur	22,30	31,88	18,56	18,02	8,91	0,33
Kalimantan Barat	23,39	27,43	21,28	20,24	7,30	0,36
Kalimantan Tengah	14,38	30,84	22,82	22,62	9,04	0,30
Kalimantan Selatan	17,84	27,28	21,69	22,68	10,06	0,45
Kalimantan Timur	10,07	22,37	22,75	31,89	12,33	0,60
Kalimantan Utara	13,00	23,12	22,81	28,42	12,20	0,44
Sulawesi Utara	11,83	17,25	21,83	36,25	12,08	0,75
Sulawesi Tengah	14,20	29,31	20,58	23,37	12,03	0,51
Sulawesi Selatan	18,46	23,63	20,65	23,43	13,24	0,60
Sulawesi Tenggara	15,71	20,14	22,07	28,49	12,91	0,68
Gorontalo	23,20	25,87	17,11	23,43	9,94	0,46
Sulawesi Barat	22,83	25,97	20,96	18,69	11,16	0,39
Maluku	9,97	21,46	19,79	33,92	14,13	0,73
Maluku Utara	15,75	24,94	20,87	25,43	12,74	0,28
Papua Barat	15,29	18,53	21,44	28,86	15,57	0,30
Papua	43,92	18,56	13,63	16,67	6,95	0,26
Indonesia	14,63	25,74	23,31	26,36	9,56	0,41

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel C.5.2. Persentase Penduduk Laki-laki Usia 15-59 Tahun menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018

Provinsi	Tidak memiliki ijazah	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat	D1-D4/S1	S2/S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	8,86	20,58	23,88	35,23	10,62	0,83
Sumatera Utara	6,79	19,01	26,42	39,28	8,15	0,35
Sumatera Barat	14,44	19,86	24,00	32,31	8,72	0,66
Riau	11,01	21,92	23,09	35,76	7,87	0,36
Jambi	10,32	26,06	23,00	32,32	8,04	0,27
Sumatera Selatan	13,12	27,79	22,41	30,03	5,95	0,71
Bengkulu	11,42	24,46	23,89	29,69	9,82	0,72
Lampung	11,78	27,04	27,68	27,17	5,81	0,52
Kepulauan Bangka Belitung	18,30	25,76	20,84	27,03	7,78	0,29
Kepulauan Riau	7,48	15,79	18,83	47,73	9,68	0,48
DKI Jakarta	2,40	9,71	21,15	50,35	15,46	0,93
Jawa Barat	9,57	28,29	23,21	30,70	7,62	0,62
Jawa Tengah	10,56	28,85	27,66	26,03	6,52	0,39
DI Yogyakarta	6,48	13,60	20,45	44,72	13,68	1,08
Jawa Timur	11,62	26,44	23,92	30,17	7,38	0,48
Banten	11,44	22,79	21,73	33,89	9,22	0,93
Bali	9,09	17,05	19,49	40,39	13,13	0,85
Nusa Tenggara Barat	22,56	19,38	21,19	26,33	10,14	0,39
Nusa Tenggara Timur	22,78	29,40	17,58	21,42	8,39	0,43
Kalimantan Barat	20,17	27,52	20,45	24,28	7,03	0,55
Kalimantan Tengah	10,73	29,59	22,41	28,34	8,55	0,38
Kalimantan Selatan	14,09	26,60	21,42	28,96	8,22	0,71
Kalimantan Timur	8,23	18,26	21,75	40,27	10,72	0,76
Kalimantan Utara	10,69	20,73	22,92	33,57	11,43	0,67
Sulawesi Utara	13,49	19,25	20,74	36,69	9,18	0,65
Sulawesi Tengah	13,03	28,71	20,12	28,37	8,91	0,86
Sulawesi Selatan	16,93	23,48	19,88	29,08	9,77	0,86
Sulawesi Tenggara	14,35	19,09	21,14	32,70	11,86	0,85
Gorontalo	30,98	24,63	15,00	22,16	6,66	0,57
Sulawesi Barat	22,63	27,77	18,79	21,29	8,74	0,78
Maluku	9,48	19,55	20,42	39,64	10,30	0,61
Maluku Utara	13,38	22,40	20,26	33,03	10,47	0,47
Papua Barat	10,61	17,47	20,71	36,01	14,08	1,12
Papua	32,90	19,14	15,77	23,68	8,08	0,44
Indonesia	11,54	24,53	23,25	31,70	8,39	0,59

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel C.6.1. Persentase Penduduk Perempuan Usia 60 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018

Provinsi	Tidak memiliki ijazah	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat	D1-D4/S1	S2/S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	51,56	33,87	6,69	5,38	2,25	0,24
Sumatera Utara	42,71	32,03	11,62	10,15	3,38	0,11
Sumatera Barat	56,78	21,55	9,40	8,15	4,13	0,00
Riau	54,40	30,68	6,23	6,30	2,24	0,14
Jambi	63,70	23,54	5,23	5,65	1,80	0,08
Sumatera Selatan	57,79	28,27	7,08	4,66	2,05	0,15
Bengkulu	66,36	23,50	4,36	3,81	1,97	0,00
Lampung	68,79	20,36	5,74	3,46	1,66	0,00
Kepulauan Bangka Belitung	60,39	30,15	4,47	4,26	0,73	0,00
Kepulauan Riau	56,91	24,76	7,13	9,26	1,94	0,00
DKI Jakarta	21,44	27,53	13,40	26,27	10,37	0,98
Jawa Barat	52,34	34,58	4,05	6,20	2,73	0,10
Jawa Tengah	68,35	21,60	4,93	3,09	1,97	0,07
DI Yogyakarta	62,98	23,19	5,95	4,77	2,78	0,33
Jawa Timur	70,21	23,73	4,21	0,74	1,01	0,10
Banten	59,71	26,49	3,85	7,42	2,16	0,36
Bali	66,67	24,81	2,80	3,28	2,43	0,00
Nusa Tenggara Barat	82,73	11,79	1,69	2,44	1,36	0,00
Nusa Tenggara Timur	64,00	27,37	2,92	4,40	1,22	0,08
Kalimantan Barat	75,74	15,69	2,94	4,39	1,23	0,00
Kalimantan Tengah	52,68	32,68	4,03	7,35	3,16	0,10
Kalimantan Selatan	66,05	22,61	4,34	4,95	2,05	0,00
Kalimantan Timur	54,88	28,40	8,23	5,85	2,64	0,00
Kalimantan Utara	66,22	18,96	8,83	5,66	0,33	0,00
Sulawesi Utara	39,57	28,47	13,34	14,48	3,86	0,28
Sulawesi Tengah	44,56	39,03	7,87	6,11	2,42	0,00
Sulawesi Selatan	64,12	20,95	5,23	5,30	4,08	0,32
Sulawesi Tenggara	66,93	22,96	4,20	4,55	1,27	0,09
Gorontalo	52,50	28,93	7,69	7,65	2,97	0,26
Sulawesi Barat	65,25	21,70	5,40	4,27	3,37	0,00
Maluku	37,10	38,64	11,27	7,36	5,63	0,00
Maluku Utara	54,35	33,28	6,05	4,55	1,77	0,00
Papua Barat	44,16	37,02	7,12	8,93	2,64	0,14
Papua	45,66	30,10	11,26	6,17	6,41	0,39
Indonesia	60,77	26,12	5,48	5,08	2,42	0,14

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel C.6.2. Persentase Penduduk Laki-laki Usia 60 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018

Provinsi	Tidak memiliki ijazah	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat	D1-D4/S1	S2/S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	33,92	37,87	9,70	13,49	4,52	0,50
Sumatera Utara	26,13	31,38	18,43	18,70	4,90	0,47
Sumatera Barat	43,87	24,02	12,72	14,74	4,34	0,31
Riau	37,65	34,51	8,50	12,95	6,06	0,33
Jambi	40,97	31,98	10,80	12,31	3,68	0,26
Sumatera Selatan	37,99	31,42	15,32	11,03	3,14	1,12
Bengkulu	42,70	34,14	6,54	10,33	5,77	0,51
Lampung	48,83	33,36	7,18	7,53	2,91	0,19
Kepulauan Bangka Belitung	45,03	28,28	10,33	12,31	3,85	0,20
Kepulauan Riau	36,37	28,64	12,57	18,56	3,43	0,43
DKI Jakarta	9,36	22,70	15,99	30,07	18,90	2,97
Jawa Barat	34,00	37,01	9,60	13,72	5,05	0,63
Jawa Tengah	48,84	31,96	7,92	7,05	3,74	0,48
DI Yogyakarta	44,08	25,94	10,92	13,46	4,38	1,21
Jawa Timur	53,42	34,70	5,99	3,89	1,46	0,54
Banten	38,45	33,69	5,98	14,87	6,08	0,94
Bali	40,57	34,88	7,87	9,48	6,45	0,75
Nusa Tenggara Barat	60,87	21,71	3,99	8,55	4,64	0,24
Nusa Tenggara Timur	53,26	27,89	4,99	7,65	5,87	0,34
Kalimantan Barat	57,79	23,47	6,19	8,41	3,85	0,28
Kalimantan Tengah	33,87	34,80	12,31	11,48	6,81	0,71
Kalimantan Selatan	40,10	30,84	7,66	14,43	6,13	0,84
Kalimantan Timur	31,65	33,14	14,31	15,19	4,95	0,77
Kalimantan Utara	44,21	25,18	13,75	13,74	2,46	0,66
Sulawesi Utara	33,82	24,69	15,28	19,30	6,16	0,74
Sulawesi Tengah	32,72	37,11	9,80	16,62	3,50	0,25
Sulawesi Selatan	48,78	23,27	7,74	12,33	7,49	0,38
Sulawesi Tenggara	39,75	27,93	8,05	17,01	6,57	0,69
Gorontalo	51,91	29,48	6,94	8,82	2,63	0,22
Sulawesi Barat	49,51	29,49	6,89	7,21	6,27	0,63
Maluku	27,40	36,41	12,52	14,66	7,88	1,14
Maluku Utara	38,16	33,04	12,69	13,03	2,94	0,14
Papua Barat	30,91	37,25	7,00	14,48	10,00	0,36
Papua	38,38	25,76	9,54	19,14	7,09	0,10
Indonesia	42,64	32,34	9,01	10,81	4,56	0,63

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel C.7. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	10,63	11,10	8,57	9,04	9,22	9,70
Sumatera Utara	10,43	10,60	8,28	8,79	9,45	9,78
Sumatera Barat	10,55	10,44	7,99	7,95	9,14	9,06
Riau	10,50	10,58	7,90	8,33	8,97	9,25
Jambi	10,01	10,40	7,62	8,31	8,41	8,99
Sumatera Selatan	9,98	10,22	7,25	7,72	8,30	8,65
Bengkulu	10,84	10,94	7,71	8,23	8,76	9,11
Lampung	9,70	9,99	7,38	7,86	8,09	8,48
Kepulauan Bangka Belitung	9,26	9,46	6,71	7,11	8,10	8,36
Kepulauan Riau	10,39	10,66	6,73	7,04	9,88	10,13
DKI Jakarta	10,75	11,37	-	-	10,75	11,37
Jawa Barat	8,88	9,52	6,58	7,21	8,29	8,93
Jawa Tengah	8,36	9,19	6,48	7,27	7,45	8,25
DI Yogyakarta	10,15	10,83	7,26	8,15	9,36	10,12
Jawa Timur	8,57	9,40	6,30	7,26	7,49	8,39
Banten	9,34	10,08	6,41	7,35	8,53	9,31
Bali	9,31	10,48	6,43	8,04	8,33	9,67
Nusa Tenggara Barat	8,07	9,08	6,36	7,55	7,17	8,27
Nusa Tenggara Timur	9,93	10,24	6,77	7,12	7,52	7,89
Kalimantan Barat	9,17	9,81	6,32	7,03	7,31	7,97
Kalimantan Tengah	9,73	10,38	7,48	8,01	8,37	8,91
Kalimantan Selatan	9,44	9,99	6,92	7,70	8,11	8,78
Kalimantan Timur	10,03	10,71	7,81	8,33	9,32	9,91
Kalimantan Utara	9,65	9,91	7,83	8,74	8,90	9,42
Sulawesi Utara	10,47	10,40	8,65	8,44	9,58	9,43
Sulawesi Tengah	10,39	10,75	7,86	8,12	8,60	8,87
Sulawesi Selatan	9,87	10,30	7,12	7,43	8,27	8,64
Sulawesi Tenggara	10,29	10,71	7,74	8,42	8,74	9,32
Gorontalo	9,45	8,83	7,31	6,64	8,17	7,49
Sulawesi Barat	9,41	9,50	7,33	7,61	7,83	8,05
Maluku	11,04	11,05	8,67	8,96	9,71	9,86
Maluku Utara	10,78	11,13	7,96	8,56	8,82	9,33
Papua Barat	10,69	10,89	8,42	9,45	9,37	10,05
Papua	10,41	10,54	4,25	5,89	5,97	7,27
Indonesia	9,31	9,93	6,95	7,62	8,26	8,90

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel C.8.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Perkotaan dan Perdesaan			
	SD	SMP	SMA	PT	SD	SMP	SMA	PT	SD	SMP	SMA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	111,86	100,42	92,91	65,32	114,37	97,52	84,41	26,51	113,61	98,35	87,10	39,87
Sumatera Utara	111,12	87,30	98,17	36,35	112,17	88,90	92,67	16,66	111,66	88,08	95,65	28,12
Sumatera Barat	106,93	99,03	95,63	61,01	112,36	86,25	87,37	16,68	110,08	91,68	91,11	39,45
Riau	105,80	94,77	104,08	37,04	109,36	96,39	77,82	20,58	107,99	95,76	88,65	27,81
Jambi	108,95	88,11	102,76	54,62	112,91	84,82	75,34	16,63	111,66	85,77	84,83	29,98
Sumatera Selatan	110,73	94,08	85,41	45,20	113,81	86,14	75,13	10,37	112,70	88,92	79,38	24,30
Bengkulu	116,85	92,72	90,50	60,79	114,03	96,12	83,12	25,60	114,95	95,00	85,85	38,22
Lampung	109,81	93,83	97,95	37,71	110,61	95,43	77,13	10,64	110,39	94,93	84,13	20,03
Kepulauan Bangka Belitung	107,20	87,90	97,01	14,84	109,73	95,92	68,84	10,97	108,40	91,46	83,41	13,05
Kepulauan Riau	106,73	90,20	98,25	22,31	109,51	92,05	82,45	9,56	107,13	90,46	95,67	21,08
DKI Jakarta	105,95	92,42	76,52	29,63	-	-	-	-	105,95	92,42	76,52	29,63
Jawa Barat	105,71	92,37	79,21	25,93	105,69	97,99	57,34	7,94	105,70	93,86	73,40	21,88
Jawa Tengah	106,53	93,16	87,30	25,87	108,68	93,40	76,53	11,32	107,59	93,28	82,15	19,16
DI Yogyakarta	103,50	90,55	92,98	71,94	103,85	119,12	75,87	19,70	103,60	98,12	88,72	62,97
Jawa Timur	104,10	95,60	86,70	38,43	108,25	92,86	68,60	14,57	106,08	94,34	78,13	27,51
Banten	108,74	96,30	72,46	37,33	111,11	91,97	59,76	7,35	109,49	94,91	69,08	29,02
Bali	101,84	94,83	87,73	39,29	103,99	95,77	88,20	12,51	102,56	95,18	87,89	31,81
Nusa Tenggara Barat	110,43	89,89	98,31	35,36	109,61	93,73	74,45	14,56	109,98	91,91	85,64	25,07
Nusa Tenggara Timur	108,97	96,54	102,62	52,35	115,71	87,44	73,77	17,02	114,42	89,38	81,52	27,26
Kalimantan Barat	115,75	95,36	79,97	36,01	118,42	78,11	79,88	7,24	117,59	83,80	79,91	17,85
Kalimantan Tengah	107,98	92,04	92,53	28,66	110,34	100,63	69,45	17,31	109,38	97,47	78,03	22,17
Kalimantan Selatan	106,95	95,22	74,28	29,31	110,69	80,73	78,10	12,64	108,96	86,30	76,08	20,79
Kalimantan Timur	107,29	89,09	94,31	36,13	104,99	90,08	100,11	15,15	106,49	89,44	96,19	29,47
Kalimantan Utara	102,76	94,63	96,93	30,58	99,51	109,01	77,28	14,92	101,43	100,95	88,62	24,56
Sulawesi Utara	108,69	93,23	89,20	42,55	109,20	89,92	82,12	21,66	108,96	91,62	85,86	33,34
Sulawesi Tengah	101,57	95,55	107,56	77,01	105,11	96,78	77,22	20,64	104,18	96,44	88,00	38,42
Sulawesi Selatan	110,07	94,54	87,66	53,87	111,24	84,27	85,48	24,81	110,76	88,22	86,46	38,31
Sulawesi Tenggara	110,62	86,15	88,90	68,74	111,67	81,91	79,10	16,13	111,32	83,57	83,11	39,90
Gorontalo	112,46	84,97	85,94	48,27	114,50	79,61	83,30	22,81	113,74	81,52	84,30	33,99
Sulawesi Barat	108,52	94,66	106,38	44,31	111,09	79,41	86,19	20,40	110,46	82,30	91,31	26,61
Maluku	112,65	92,08	102,69	61,68	113,45	98,29	83,10	27,27	113,16	95,60	91,58	43,92
Maluku Utara	110,64	98,29	83,48	62,79	113,98	91,92	85,41	21,90	113,13	93,39	84,80	36,34
Papua Barat	104,99	86,02	105,59	48,20	111,83	90,91	75,56	23,42	109,30	88,97	88,89	33,69
Papua	103,37	97,08	108,39	30,67	90,30	79,01	45,73	8,88	93,44	83,71	62,64	15,74
Indonesia	106,91	93,13	86,15	35,48	109,82	91,27	74,74	14,47	108,29	92,25	81,04	26,70

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel C.8.2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Laki-laki menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Perkotaan dan Perdesaan			
	SD	SMP	SMA	PT	SD	SMP	SMA	PT	SD	SMP	SMA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	111,62	100,54	93,12	55,93	115,16	100,06	77,96	21,67	114,09	100,20	82,60	33,47
Sumatera Utara	109,53	92,10	91,01	29,52	111,56	91,45	83,64	15,08	110,57	91,77	87,47	23,31
Sumatera Barat	109,65	93,18	81,95	57,27	113,43	87,97	73,44	12,53	111,85	90,15	77,10	34,19
Riau	104,01	97,01	85,12	46,51	107,11	89,74	75,65	16,38	105,92	92,55	79,51	29,03
Jambi	111,09	92,95	91,19	46,48	112,76	87,68	64,24	15,43	112,28	89,35	73,41	25,28
Sumatera Selatan	114,88	88,82	89,83	33,48	115,87	81,64	67,52	9,33	115,51	84,30	75,52	19,08
Bengkulu	111,93	95,35	99,86	49,47	112,38	86,36	77,78	15,79	112,24	89,36	85,31	26,97
Lampung	109,70	92,40	98,27	31,35	109,89	93,96	71,35	7,55	109,83	93,49	79,08	15,52
Kepulauan Bangka Belitung	113,06	85,21	91,39	11,33	114,74	76,26	70,67	6,42	113,88	81,00	81,04	8,96
Kepulauan Riau	107,06	96,49	84,01	25,65	109,92	85,84	105,59	5,62	107,47	94,38	87,11	23,28
DKI Jakarta	104,62	97,21	71,49	31,72	-	-	-	-	104,62	97,21	71,49	31,72
Jawa Barat	106,70	90,23	81,66	23,74	106,93	82,98	64,35	7,64	106,76	88,32	77,20	20,02
Jawa Tengah	107,42	90,59	93,14	25,06	110,10	90,87	78,72	8,52	108,74	90,72	86,06	17,29
DI Yogyakarta	108,04	92,75	87,01	67,45	107,51	105,98	84,24	17,48	107,89	96,01	86,25	59,06
Jawa Timur	106,00	94,29	91,31	32,79	108,69	96,75	68,53	10,81	107,28	95,47	80,06	22,91
Banten	107,86	90,92	80,73	33,08	112,99	83,81	60,86	7,05	109,51	88,65	74,18	25,93
Bali	103,79	96,93	84,67	34,51	102,78	97,12	93,32	16,14	103,43	97,00	87,59	29,26
Nusa Tenggara Barat	106,70	98,67	96,23	28,77	108,69	93,53	90,84	18,87	107,78	95,84	93,39	23,82
Nusa Tenggara Timur	115,22	95,07	95,60	51,13	119,54	85,80	65,91	11,85	118,71	87,68	74,23	22,95
Kalimantan Barat	114,84	85,77	95,59	41,56	117,11	80,76	69,41	7,99	116,39	82,29	78,59	19,76
Kalimantan Tengah	108,92	89,49	82,93	30,80	111,66	97,00	64,97	11,81	110,61	94,10	71,75	19,41
Kalimantan Selatan	106,73	92,61	83,26	33,95	115,21	80,94	67,62	12,38	111,42	86,06	75,31	22,98
Kalimantan Timur	109,59	92,51	101,75	35,86	109,44	100,38	84,85	16,22	109,54	95,38	95,99	29,54
Kalimantan Utara	106,06	92,71	104,56	13,43	99,73	121,88	70,24	10,96	103,09	104,86	89,80	12,46
Sulawesi Utara	106,56	84,40	86,29	35,22	111,27	86,62	71,08	13,98	109,08	85,55	78,86	25,71
Sulawesi Tengah	107,79	89,81	96,45	53,03	105,88	89,18	71,50	17,76	106,32	89,33	79,36	29,81
Sulawesi Selatan	107,74	88,28	82,52	48,86	111,31	83,99	73,63	14,47	109,83	85,74	77,20	30,67
Sulawesi Tenggara	109,80	88,93	104,52	58,27	110,65	85,47	74,49	21,82	110,34	86,79	86,60	38,46
Gorontalo	109,99	76,55	87,51	39,60	110,47	80,34	82,37	16,07	110,29	78,85	84,20	25,95
Sulawesi Barat	107,42	68,47	88,69	39,96	106,56	86,99	74,95	16,41	106,77	82,41	78,07	22,00
Maluku	107,76	97,00	92,37	52,39	113,60	94,61	76,23	23,54	111,37	95,56	83,26	36,61
Maluku Utara	110,67	90,14	97,04	61,26	115,40	88,62	89,27	20,78	114,31	89,03	91,60	35,13
Papua Barat	103,87	92,20	108,45	29,97	117,17	89,09	81,06	24,34	112,07	90,35	92,29	26,71
Papua	110,63	108,79	112,09	21,59	91,23	85,43	52,27	12,32	95,43	91,52	67,10	15,79
Indonesia	107,51	92,09	87,14	32,19	110,47	89,41	72,50	11,94	108,91	90,82	80,33	23,59

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel C.8.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Perkotaan dan Perdesaan			
	SD	SMP	SMA	PT	SD	SMP	SMA	PT	SD	SMP	SMA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	97,52	88,77	79,10	50,42	99,52	85,52	69,85	20,35	98,91	86,44	72,77	30,70
Sumatera Utara	95,58	75,00	69,60	25,05	98,84	80,54	71,33	14,65	97,26	77,70	70,39	20,71
Sumatera Barat	96,99	82,80	75,74	45,91	99,56	77,32	72,68	13,48	98,48	79,65	74,06	30,13
Riau	95,57	79,56	74,86	27,69	98,28	82,24	61,91	14,72	97,24	81,19	67,25	20,42
Jambi	97,11	77,45	68,67	32,69	99,70	78,01	60,31	12,61	98,88	77,85	63,20	19,67
Sumatera Selatan	93,81	72,11	65,70	28,03	99,46	81,12	61,15	7,45	97,42	77,96	63,03	15,68
Bengkulu	99,11	81,96	70,07	39,02	98,59	79,66	67,17	17,37	98,76	80,42	68,24	25,14
Lampung	98,49	82,94	66,54	27,57	98,93	80,86	59,31	6,53	98,81	81,51	61,74	13,83
Kepulauan Bangka Belitung	95,59	76,27	71,04	12,98	98,78	79,13	51,44	10,48	97,10	77,54	61,58	11,82
Kepulauan Riau	98,52	83,03	75,92	17,08	99,74	86,72	64,67	9,56	98,69	83,55	74,08	16,35
DKI Jakarta	97,56	78,63	60,94	22,32	-	-	-	-	97,56	78,63	60,94	22,32
Jawa Barat	98,35	81,90	59,95	21,16	96,59	81,95	47,25	5,36	97,90	81,91	56,58	17,60
Jawa Tengah	97,70	82,71	62,88	20,53	97,77	78,72	54,65	9,31	97,74	80,82	58,94	15,35
DI Yogyakarta	99,64	82,07	76,49	57,25	98,93	93,20	63,57	12,65	99,44	85,02	73,27	49,60
Jawa Timur	97,94	84,46	67,57	24,68	97,59	79,82	55,22	11,61	97,77	82,32	61,72	18,70
Banten	98,43	84,80	60,70	25,31	95,86	82,05	50,49	6,17	97,61	83,92	57,99	20,01
Bali	95,65	83,65	73,33	32,42	95,94	86,36	74,15	8,53	95,75	84,65	73,61	25,74
Nusa Tenggara Barat	99,21	83,47	73,16	25,95	98,86	82,54	52,67	10,06	99,02	82,98	62,28	18,08
Nusa Tenggara Timur	90,56	68,89	66,40	36,09	97,13	71,09	54,71	11,30	95,87	70,62	57,85	18,48
Kalimantan Barat	95,35	68,44	56,96	27,51	97,62	64,76	51,71	4,40	96,92	65,97	53,69	12,92
Kalimantan Tengah	98,81	74,73	60,66	21,15	99,18	81,99	53,39	12,36	99,03	79,32	56,09	16,12
Kalimantan Selatan	97,60	77,60	61,47	26,20	98,68	72,25	55,10	9,91	98,18	74,31	58,47	17,88
Kalimantan Timur	99,13	77,63	68,89	26,89	97,21	77,84	74,30	12,22	98,47	77,71	70,65	22,23
Kalimantan Utara	95,63	77,53	72,39	21,34	87,46	76,32	55,90	11,49	92,28	77,00	65,41	17,55
Sulawesi Utara	92,75	77,72	68,26	29,37	96,98	76,56	63,13	16,08	94,95	77,15	65,84	23,51
Sulawesi Tengah	90,50	73,71	82,42	45,09	92,37	77,97	60,99	14,73	91,88	76,79	68,61	24,31
Sulawesi Selatan	97,41	78,87	63,59	43,04	98,68	74,40	61,90	20,80	98,16	76,12	62,66	31,13
Sulawesi Tenggara	95,90	76,88	68,53	46,14	98,60	73,76	59,12	9,72	97,71	74,99	62,98	26,18
Gorontalo	99,42	77,98	60,22	38,47	98,49	71,38	58,01	17,02	98,84	73,73	58,85	26,44
Sulawesi Barat	94,10	70,70	67,45	32,81	96,76	70,90	62,20	15,99	96,12	70,86	63,53	20,36
Maluku	94,13	72,03	72,00	47,48	96,56	76,89	61,42	22,47	95,68	74,79	66,00	34,57
Maluku Utara	95,27	81,28	65,16	43,33	97,56	75,39	62,26	17,84	96,98	76,74	63,19	26,84
Papua Barat	92,98	68,19	69,49	35,90	92,69	68,90	52,50	19,52	92,80	68,62	60,05	26,31
Papua	91,44	70,91	69,89	25,51	74,80	50,11	33,31	6,02	78,81	55,52	43,18	12,15
Indonesia	97,43	80,78	64,99	26,23	97,29	78,17	57,50	11,05	97,37	79,55	61,64	19,89

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel C.8.4. Angka Partisipasi Murni (APM) Laki-laki menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Perkotaan dan Perdesaan			
	SD	SMP	SMA	PT	SD	SMP	SMA	PT	SD	SMP	SMA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	99,00	90,60	72,93	39,93	99,40	84,53	65,62	16,41	99,27	86,33	67,86	24,51
Sumatera Utara	97,03	81,71	65,01	20,35	98,90	79,73	63,18	13,29	97,98	80,71	64,13	17,31
Sumatera Barat	98,46	76,43	65,35	41,97	99,08	73,00	57,97	10,36	98,82	74,43	61,15	25,67
Riau	96,36	78,55	63,64	38,00	97,85	75,96	57,55	12,55	97,28	76,96	60,03	23,23
Jambi	98,12	81,24	71,26	24,28	99,63	80,77	52,34	12,10	99,19	80,92	58,78	15,97
Sumatera Selatan	95,91	74,80	62,93	21,21	99,61	76,63	53,47	6,76	98,27	75,95	56,86	12,59
Bengkulu	98,14	79,40	70,76	32,50	98,66	74,03	58,64	11,87	98,50	75,82	62,77	18,72
Lampung	99,60	76,65	61,35	23,75	99,58	80,07	54,82	5,07	99,59	79,05	56,70	11,32
Kepulauan Bangka Belitung	97,79	74,73	59,76	8,55	98,86	66,31	48,62	4,82	98,31	70,77	54,19	6,75
Kepulauan Riau	99,60	86,27	70,59	17,62	99,42	82,92	79,88	4,45	99,57	85,61	71,92	16,06
DKI Jakarta	98,47	82,83	59,10	21,92	-	-	-	-	98,47	82,83	59,10	21,92
Jawa Barat	98,85	82,13	60,27	19,82	97,91	74,76	51,79	6,12	98,60	80,19	58,08	16,65
Jawa Tengah	97,74	78,34	65,47	17,68	97,81	77,41	53,66	6,87	97,77	77,89	59,67	12,60
DI Yogyakarta	99,56	79,63	67,29	50,79	99,53	90,90	67,84	11,18	99,55	82,41	67,44	44,14
Jawa Timur	98,12	83,60	70,05	21,89	97,84	79,58	52,33	8,52	97,99	81,67	61,29	15,89
Banten	98,76	80,54	62,03	20,04	97,36	72,68	54,10	6,61	98,31	78,03	59,41	16,35
Bali	97,08	87,85	71,31	26,04	95,71	86,06	74,50	13,47	96,60	87,21	72,38	22,45
Nusa Tenggara Barat	99,07	89,47	72,84	20,41	98,43	81,03	65,65	13,39	98,72	84,82	69,05	16,90
Nusa Tenggara Timur	94,95	70,73	66,57	34,03	96,71	64,53	43,05	7,42	96,37	65,79	49,65	14,94
Kalimantan Barat	96,93	66,58	62,51	30,84	97,41	65,53	41,19	5,33	97,26	65,85	48,67	14,27
Kalimantan Tengah	99,35	74,21	56,95	19,64	98,99	73,99	47,93	8,77	99,12	74,07	51,33	13,12
Kalimantan Selatan	98,76	78,70	65,94	29,59	99,91	69,31	48,65	9,68	99,39	73,42	57,15	19,46
Kalimantan Timur	98,98	79,25	68,15	26,67	97,14	85,27	62,97	13,20	98,34	81,45	66,38	22,34
Kalimantan Utara	96,87	80,45	63,75	9,49	88,86	77,79	61,49	7,08	93,11	79,34	62,78	8,55
Sulawesi Utara	92,80	68,05	62,61	24,52	96,75	74,55	57,26	9,81	94,91	71,41	60,00	17,93
Sulawesi Tengah	92,36	64,88	68,18	35,50	94,11	71,12	56,51	14,07	93,70	69,63	60,19	21,39
Sulawesi Selatan	97,45	75,28	59,62	37,26	98,24	73,39	56,08	12,16	97,91	74,16	57,50	23,98
Sulawesi Tenggara	95,51	77,69	69,96	38,32	98,36	78,50	57,90	15,13	97,33	78,19	62,76	25,72
Gorontalo	98,13	62,85	53,01	29,90	97,87	66,39	57,54	13,55	97,96	65,00	55,93	20,41
Sulawesi Barat	96,78	60,17	56,19	16,61	95,18	70,55	50,76	12,58	95,57	67,98	52,00	13,54
Maluku	91,63	73,20	70,16	43,16	98,58	73,57	55,06	18,44	95,93	73,42	61,64	29,64
Maluku Utara	94,53	76,53	66,09	33,52	97,99	75,69	64,02	14,81	97,19	75,92	64,64	21,44
Papua Barat	92,26	76,72	75,29	20,30	95,85	64,68	59,02	17,20	94,47	69,57	65,69	18,51
Papua	93,54	75,51	69,24	15,74	75,57	52,51	37,37	7,16	79,46	58,51	45,27	10,37
Indonesia	98,03	80,45	64,31	23,30	97,51	75,65	54,47	9,24	97,79	78,18	59,74	17,33

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018



TABEL D - KESEHATAN DAN
KELUARGA BERENCANA
(KB)

Tabel D.1. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Provinsi	Perempuan			Laki-laki		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	29,61	34,18	32,76	24,71	28,91	27,59
Sumatera Utara	26,26	25,99	26,13	23,00	24,25	23,59
Sumatera Barat	32,32	31,00	31,58	27,54	26,83	27,14
Riau	29,77	31,07	30,54	27,00	29,89	28,73
Jambi	21,85	24,31	23,51	21,03	21,51	21,36
Sumatera Selatan	34,17	28,09	30,38	28,40	25,88	26,81
Bengkulu	25,59	29,78	28,39	23,86	26,73	25,81
Lampung	30,61	32,51	31,94	29,03	29,60	29,43
Kepulauan Bangka Belitung	32,34	30,73	31,60	26,95	26,81	26,88
Kepulauan Riau	23,04	25,64	23,40	20,92	24,49	21,43
DKI Jakarta	30,75	-	30,75	26,92	-	26,92
Jawa Barat	31,87	34,75	32,62	28,65	31,90	29,49
Jawa Tengah	36,88	35,72	36,32	32,98	31,71	32,36
DI Yogyakarta	36,17	37,36	36,50	34,19	33,88	34,11
Jawa Timur	35,12	35,45	35,28	31,53	33,13	32,29
Banten	31,62	39,96	34,02	29,58	34,02	30,87
Bali	28,82	37,15	31,66	26,25	34,51	29,01
Nusa Tenggara Barat	41,13	39,93	40,49	38,02	35,46	36,65
Nusa Tenggara Timur	36,92	40,03	39,33	33,60	36,79	36,05
Kalimantan Barat	28,86	30,65	30,04	25,26	28,43	27,38
Kalimantan Tengah	28,75	30,50	29,81	26,71	26,64	26,67
Kalimantan Selatan	34,66	35,76	35,25	30,58	31,96	31,32
Kalimantan Timur	31,34	26,20	29,66	27,00	24,40	26,13
Kalimantan Utara	31,17	35,85	33,11	26,84	32,65	29,30
Sulawesi Utara	27,69	32,62	30,12	25,66	30,20	27,95
Sulawesi Tengah	34,83	32,53	33,18	29,73	29,78	29,77
Sulawesi Selatan	31,88	29,76	30,64	28,79	27,32	27,94
Sulawesi Tenggara	28,53	30,65	29,84	24,55	26,57	25,80
Gorontalo	36,01	39,30	38,01	34,03	37,03	35,89
Sulawesi Barat	31,38	29,85	30,22	31,39	27,92	28,73
Maluku	20,57	20,72	20,66	18,13	20,21	19,34
Maluku Utara	21,57	20,56	20,85	19,17	19,04	19,07
Papua Barat	27,26	24,40	25,57	21,67	22,10	21,92
Papua	21,04	16,62	17,82	19,98	16,39	17,40
Indonesia	32,33	32,89	32,58	28,94	29,86	29,36

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel D.2. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan, Sakit, dan Tidak Berobat Jalan Karena Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Provinsi	Perempuan			Laki-laki		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	43,49	31,58	34,94	48,03	35,59	39,10
Sumatera Utara	49,99	50,80	50,37	52,75	53,50	53,11
Sumatera Barat	39,56	34,83	36,97	44,62	38,76	41,38
Riau	55,54	63,56	60,40	57,04	66,34	62,83
Jambi	54,55	59,79	58,22	57,63	61,18	60,07
Sumatera Selatan	60,83	60,24	60,49	63,25	62,27	62,66
Bengkulu	55,68	57,89	57,22	61,75	63,03	62,65
Lampung	49,31	52,32	51,45	56,04	57,54	57,11
Kepulauan Bangka Belitung	48,41	51,02	49,57	50,78	54,40	52,47
Kepulauan Riau	52,63	41,10	50,86	59,21	45,47	56,96
DKI Jakarta	44,36	-	44,36	47,68	-	47,68
Jawa Barat	45,88	49,27	46,82	50,58	52,02	50,98
Jawa Tengah	47,21	47,75	47,47	50,95	50,69	50,83
DI Yogyakarta	50,55	42,06	48,15	53,97	43,87	51,31
Jawa Timur	51,38	49,35	50,41	54,29	52,07	53,21
Banten	48,59	59,01	52,11	52,23	60,89	55,00
Bali	40,15	28,53	35,50	41,00	36,23	39,10
Nusa Tenggara Barat	53,33	53,88	53,62	56,93	55,03	55,94
Nusa Tenggara Timur	60,39	46,24	49,25	60,48	51,23	53,23
Kalimantan Barat	49,64	58,00	55,25	52,16	61,93	58,93
Kalimantan Tengah	66,44	65,17	65,65	67,79	66,39	66,92
Kalimantan Selatan	63,39	60,43	61,78	69,71	66,34	67,87
Kalimantan Timur	51,01	44,12	49,02	55,05	52,74	54,33
Kalimantan Utara	53,39	56,51	54,79	50,65	59,34	54,75
Sulawesi Utara	48,07	46,72	47,35	50,40	50,44	50,42
Sulawesi Tengah	59,60	55,41	56,66	65,01	59,45	60,98
Sulawesi Selatan	54,47	50,64	52,29	59,63	54,81	56,89
Sulawesi Tenggara	65,79	54,41	58,58	66,76	58,55	61,54
Gorontalo	45,36	54,14	50,87	47,80	60,74	56,07
Sulawesi Barat	49,31	49,57	49,51	53,62	53,18	53,29
Maluku	60,75	55,79	57,86	62,74	59,00	60,45
Maluku Utara	48,72	54,27	52,62	54,73	57,79	56,91
Papua Barat	53,72	45,12	48,87	56,10	45,79	49,92
Papua	40,15	46,26	44,31	45,56	48,44	47,51
Indonesia	49,06	50,30	49,63	52,77	53,75	53,22

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel D.3. Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Provinsi	Perempuan			Laki-laki		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	56,51	68,42	65,06	51,97	64,41	60,90
Sumatera Utara	50,01	49,20	49,63	47,25	46,50	46,89
Sumatera Barat	60,44	65,17	63,03	55,38	61,24	58,62
Riau	44,46	36,44	39,60	42,96	33,66	37,17
Jambi	45,45	40,21	41,78	42,37	38,82	39,93
Sumatera Selatan	39,17	39,76	39,51	36,75	37,73	37,34
Bengkulu	44,32	42,11	42,78	38,25	36,97	37,35
Lampung	50,69	47,68	48,55	43,96	42,46	42,89
Kepulauan Bangka Belitung	51,59	48,98	50,43	49,22	45,60	47,53
Kepulauan Riau	47,37	58,90	49,14	40,79	54,53	43,04
DKI Jakarta	55,64	-	55,64	52,32	-	52,32
Jawa Barat	54,12	50,73	53,18	49,42	47,98	49,02
Jawa Tengah	52,79	52,25	52,53	49,05	49,31	49,17
DI Yogyakarta	49,45	57,94	51,85	46,03	56,13	48,69
Jawa Timur	48,62	50,65	49,59	45,71	47,93	46,79
Banten	51,41	40,99	47,89	47,77	39,11	45,00
Bali	59,85	71,47	64,50	59,00	63,77	60,90
Nusa Tenggara Barat	46,67	46,12	46,38	43,07	44,97	44,06
Nusa Tenggara Timur	39,61	53,76	50,75	39,52	48,77	46,77
Kalimantan Barat	50,36	42,00	44,75	47,84	38,07	41,07
Kalimantan Tengah	33,56	34,83	34,35	32,21	33,61	33,08
Kalimantan Selatan	36,61	39,57	38,22	30,29	33,66	32,13
Kalimantan Timur	48,99	55,88	50,98	44,95	47,26	45,67
Kalimantan Utara	46,61	43,49	45,21	49,35	40,66	45,25
Sulawesi Utara	51,93	53,28	52,65	49,60	49,56	49,58
Sulawesi Tengah	40,40	44,59	43,34	34,99	40,55	39,02
Sulawesi Selatan	45,53	49,36	47,71	40,37	45,19	43,11
Sulawesi Tenggara	34,21	45,59	41,42	33,24	41,45	38,46
Gorontalo	54,64	45,86	49,13	52,20	39,26	43,93
Sulawesi Barat	50,69	50,43	50,49	46,38	46,82	46,71
Maluku	39,25	44,21	42,14	37,26	41,00	39,55
Maluku Utara	51,28	45,73	47,38	45,27	42,21	43,09
Papua Barat	46,28	54,88	51,13	43,90	54,21	50,08
Papua	59,85	53,74	55,69	54,44	51,56	52,49
Indonesia	50,94	49,70	50,37	47,23	46,25	46,78

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel D.4.1. Persentase Penduduk Perempuan yang Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Provinsi dan Tempat Berobat Jalan, 2018

Provinsi	Rumah Sakit Pemerintah	Rumah Sakit Swasta	Praktik Dokter/Bidan	Klinik/Praktik Dokter Bersama	Puskesmas/Pustu	UKBM*	Praktik Pengobatan Tradisional	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	13,95	2,48	30,10	10,47	49,07	5,15	2,18	0,87
Sumatera Utara	5,93	7,93	49,42	12,83	23,11	2,63	2,84	1,05
Sumatera Barat	10,72	5,40	43,11	8,52	31,44	3,65	4,01	0,40
Riau	9,19	8,44	35,83	19,82	26,31	2,77	2,35	1,23
Jambi	10,80	6,59	36,78	9,28	36,18	3,21	3,03	1,30
Sumatera Selatan	6,44	5,30	47,37	10,21	30,56	3,68	3,16	0,42
Bengkulu	7,00	3,83	47,43	13,53	30,11	1,77	2,30	0,19
Lampung	3,53	5,55	50,88	10,44	29,99	2,28	2,22	0,70
Kepulauan Bangka Belitung	9,34	12,11	32,86	11,77	33,13	6,49	2,85	1,28
Kepulauan Riau	11,10	8,29	21,78	24,88	33,96	2,07	2,19	0,86
DKI Jakarta	14,53	12,10	7,63	23,36	45,32	2,20	0,87	1,00
Jawa Barat	7,13	9,57	29,62	21,42	34,82	1,99	1,44	1,03
Jawa Tengah	6,28	6,45	44,86	13,35	29,15	3,77	1,15	0,64
DI Yogyakarta	8,02	16,44	27,41	13,60	38,68	1,59	1,18	0,95
Jawa Timur	5,54	6,74	48,83	11,74	25,65	4,88	1,79	0,99
Banten	5,36	8,80	26,55	30,50	32,58	1,14	1,85	0,78
Bali	7,49	5,08	54,25	11,50	24,85	0,34	0,84	0,26
Nusa Tenggara Barat	6,21	1,07	35,68	11,33	47,69	3,90	2,14	2,00
Nusa Tenggara Timur	4,57	2,42	11,53	6,40	69,83	8,41	0,70	0,11
Kalimantan Barat	7,05	3,76	31,27	10,98	42,29	8,88	3,12	0,59
Kalimantan Tengah	15,41	1,43	28,30	8,22	43,63	4,85	1,50	0,54
Kalimantan Selatan	8,93	2,42	34,65	10,77	41,22	6,00	2,08	1,42
Kalimantan Timur	11,18	9,39	17,93	19,89	43,62	1,59	0,74	0,18
Kalimantan Utara	11,90	1,31	20,71	14,44	56,87	0,99	0,77	0,09
Sulawesi Utara	9,32	6,02	35,40	12,12	39,57	1,79	1,41	0,82
Sulawesi Tengah	11,57	1,47	22,89	5,79	54,83	6,39	1,44	0,75
Sulawesi Selatan	10,01	3,71	21,08	10,21	55,34	3,12	1,11	1,34
Sulawesi Tenggara	9,56	0,98	27,57	7,28	51,83	3,29	3,64	0,99
Gorontalo	8,40	0,77	28,00	13,50	55,48	1,02	2,29	1,31
Sulawesi Barat	4,99	0,53	16,46	3,23	69,14	3,95	0,98	4,45
Maluku	5,68	2,61	19,59	5,73	61,95	3,24	1,82	1,30
Maluku Utara	11,77	1,77	16,62	8,79	58,31	4,24	2,19	0,53
Papua Barat	13,39	4,74	9,89	6,71	66,67	1,42	1,11	0,26
Papua	19,63	2,48	6,71	7,39	64,87	1,55	0,57	0,54
Indonesia	7,51	6,91	35,91	14,98	35,30	3,37	1,71	0,89

*) UKBM = Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel D.4.2. Persentase Penduduk Laki-laki yang Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Provinsi dan Tempat Berobat Jalan, 2018

Provinsi	Rumah Sakit Pemerintah	Rumah Sakit Swasta	Praktik Dokter/Bidan	Klinik/Praktik Dokter Bersama	Puskesmas/Pustu	UKBM*	Praktik Pengobatan Tradisional	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	14,29	2,83	29,44	11,97	45,99	4,41	3,21	1,26
Sumatera Utara	7,42	8,84	47,48	12,60	22,43	2,71	3,50	1,12
Sumatera Barat	10,74	6,02	42,12	8,98	30,39	3,39	3,95	0,70
Riau	8,22	12,33	33,84	20,44	25,72	2,14	2,47	0,91
Jambi	9,21	5,61	38,76	10,31	32,64	3,11	3,45	2,86
Sumatera Selatan	7,71	6,51	47,25	10,56	27,47	3,75	2,64	0,26
Bengkulu	9,80	3,27	51,56	11,68	25,56	0,70	3,34	0,84
Lampung	3,87	5,84	52,61	10,89	26,47	1,92	2,70	1,30
Kepulauan Bangka Belitung	8,82	11,04	40,72	11,83	30,60	3,88	1,80	0,83
Kepulauan Riau	14,00	9,15	15,76	25,36	35,35	1,83	0,86	2,65
DKI Jakarta	16,32	12,74	6,95	26,11	39,98	1,46	1,27	1,35
Jawa Barat	6,96	9,86	30,82	23,71	29,90	2,15	2,09	0,88
Jawa Tengah	6,89	6,51	45,95	15,19	25,32	2,35	1,81	1,01
DI Yogyakarta	7,65	18,89	31,28	14,87	28,93	2,34	1,41	0,69
Jawa Timur	6,81	7,03	48,41	12,70	24,03	4,03	2,42	0,95
Banten	5,62	8,82	26,10	31,46	29,27	1,16	2,86	1,05
Bali	9,07	4,11	55,35	12,22	22,13	0,26	1,26	0,37
Nusa Tenggara Barat	5,85	1,04	38,26	12,60	41,88	3,36	2,78	1,71
Nusa Tenggara Timur	5,74	2,81	11,63	5,82	67,67	8,51	0,81	0,15
Kalimantan Barat	8,27	4,00	30,91	8,85	42,09	8,49	2,80	0,66
Kalimantan Tengah	13,60	2,16	27,82	10,29	44,57	3,90	1,87	0,76
Kalimantan Selatan	11,64	2,36	39,97	10,74	35,62	2,58	2,04	1,27
Kalimantan Timur	12,49	9,60	18,37	20,19	40,20	0,92	0,99	0,34
Kalimantan Utara	14,72	1,04	21,38	14,78	53,65	0,55	0,30	0,45
Sulawesi Utara	9,94	7,71	35,65	12,38	37,16	1,52	1,33	0,78
Sulawesi Tengah	13,13	1,09	24,31	4,68	51,11	7,26	3,22	0,90
Sulawesi Selatan	12,53	3,60	21,65	11,91	49,69	2,82	1,48	1,49
Sulawesi Tenggara	8,77	2,05	26,46	6,98	52,77	2,42	4,22	0,89
Gorontalo	7,38	0,81	32,90	11,03	49,72	1,51	2,65	1,17
Sulawesi Barat	6,86	0,90	19,98	3,15	65,93	3,21	1,22	3,09
Maluku	10,23	1,98	22,06	7,16	56,27	2,67	1,91	0,70
Maluku Utara	12,73	0,38	17,75	8,26	54,44	7,54	0,99	0,86
Papua Barat	14,27	5,65	12,22	7,95	61,17	1,06	1,08	0,39
Papua	18,90	2,83	7,19	8,51	64,37	1,33	1,01	0,98
Indonesia	8,19	7,30	36,34	16,23	31,91	2,87	2,22	0,99

*) UKBM = Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel D.5. Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Provinsi	Perempuan			Laki-laki		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	9,19	7,59	8,09	5,75	4,96	5,21
Sumatera Utara	5,11	3,71	4,45	2,78	2,53	2,66
Sumatera Barat	7,65	5,42	6,40	3,62	2,93	3,23
Riau	6,32	4,00	4,94	3,46	2,77	3,05
Jambi	6,06	4,29	4,86	3,61	2,78	3,04
Sumatera Selatan	4,88	3,68	4,13	3,06	2,35	2,61
Bengkulu	8,61	4,90	6,14	5,39	2,93	3,72
Lampung	6,11	5,28	5,53	4,16	2,85	3,23
Kepulauan Bangka Belitung	5,56	3,88	4,79	3,75	2,77	3,29
Kepulauan Riau	4,93	4,29	4,84	2,41	2,19	2,38
DKI Jakarta	5,44	-	5,44	3,33	-	3,33
Jawa Barat	5,78	4,56	5,47	3,58	3,51	3,56
Jawa Tengah	7,23	6,86	7,05	5,20	4,57	4,89
DI Yogyakarta	7,71	6,75	7,45	5,20	5,71	5,34
Jawa Timur	6,02	5,20	5,63	4,11	3,90	4,01
Banten	5,44	2,97	4,73	3,05	1,50	2,60
Bali	5,56	4,75	5,28	3,50	3,61	3,53
Nusa Tenggara Barat	7,11	7,23	7,17	4,45	5,43	4,98
Nusa Tenggara Timur	7,41	4,76	5,36	4,12	2,53	2,90
Kalimantan Barat	6,75	3,46	4,58	4,03	2,15	2,77
Kalimantan Tengah	5,11	3,05	3,86	3,38	2,39	2,77
Kalimantan Selatan	5,16	4,05	4,57	2,48	2,63	2,56
Kalimantan Timur	7,33	5,61	6,77	4,04	3,48	3,85
Kalimantan Utara	9,40	6,39	8,16	5,25	4,25	4,83
Sulawesi Utara	7,15	6,61	6,88	5,74	5,28	5,51
Sulawesi Tengah	9,09	5,90	6,81	5,68	4,01	4,47
Sulawesi Selatan	9,16	6,45	7,57	5,10	4,08	4,50
Sulawesi Tenggara	5,94	4,61	5,12	3,53	2,96	3,18
Gorontalo	9,48	6,34	7,57	6,16	3,47	4,49
Sulawesi Barat	7,45	3,55	4,49	5,78	2,59	3,33
Maluku	4,94	1,98	3,22	3,01	1,96	2,40
Maluku Utara	7,22	2,78	4,06	3,67	2,26	2,66
Papua Barat	7,69	5,16	6,19	4,26	2,59	3,27
Papua	5,89	2,13	3,14	4,18	1,27	2,09
Indonesia	6,23	5,08	5,71	3,91	3,41	3,68

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel D.6. Angka Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Provinsi, Status Pemakaian Alat/Cara KB dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Provinsi	Yang sedang menggunakan			Tidak menggunakan lagi			Tidak pernah menggunakan		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)
Aceh	45,01	47,76	46,92	16,96	15,08	15,66	38,03	37,16	37,43
Sumatera Utara	49,03	46,52	47,84	9,94	11,63	10,74	41,03	41,86	41,42
Sumatera Barat	42,43	50,21	46,86	13,18	15,30	14,39	44,39	34,49	38,75
Riau	44,98	58,82	53,50	12,80	12,25	12,46	42,23	28,93	34,05
Jambi	53,19	65,74	62,04	10,66	10,55	10,58	36,15	23,70	27,38
Sumatera Selatan	55,51	70,79	65,58	10,08	9,47	9,68	34,41	19,74	24,75
Bengkulu	56,67	68,61	65,01	14,58	10,74	11,89	28,75	20,65	23,09
Lampung	59,90	69,10	66,60	11,65	10,71	10,97	28,45	20,19	22,43
Kepulauan Bangka Belitung	59,74	70,86	64,94	12,52	8,63	10,70	27,75	20,51	24,36
Kepulauan Riau	45,14	62,46	47,56	10,07	16,10	10,91	44,79	21,44	41,53
DKI Jakarta	50,93	-	50,93	7,94	-	7,94	41,13	-	41,13
Jawa Barat	61,93	68,23	63,63	8,06	10,21	8,64	30,01	21,56	27,73
Jawa Tengah	56,30	65,72	61,10	11,66	11,49	11,58	32,03	22,79	27,32
DI Yogyakarta	52,59	66,06	56,38	9,62	10,87	9,97	37,79	23,07	33,65
Jawa Timur	59,82	65,84	62,80	9,64	11,36	10,49	30,54	22,80	26,71
Banten	59,60	65,91	61,41	9,56	13,09	10,57	30,84	20,99	28,02
Bali	57,45	69,42	61,48	8,79	8,94	8,84	33,76	21,64	29,68
Nusa Tenggara Barat	55,86	53,70	54,65	19,35	22,57	21,15	24,79	23,73	24,19
Nusa Tenggara Timur	46,73	42,60	43,47	12,54	18,58	17,30	40,74	38,82	39,23
Kalimantan Barat	56,07	67,64	64,04	12,49	11,73	11,97	31,44	20,63	23,99
Kalimantan Tengah	60,02	68,82	65,56	14,46	11,79	12,78	25,52	19,39	21,66
Kalimantan Selatan	63,34	70,73	67,42	17,56	15,65	16,51	19,10	13,62	16,08
Kalimantan Timur	53,87	63,11	57,01	9,54	9,85	9,65	36,59	27,04	33,34
Kalimantan Utara	44,67	55,87	49,46	17,24	15,96	16,69	38,09	28,17	33,85
Sulawesi Utara	56,83	69,03	63,13	13,44	8,21	10,74	29,73	22,76	26,13
Sulawesi Tengah	51,26	58,98	57,04	12,92	12,31	12,47	35,82	28,71	30,49
Sulawesi Selatan	44,28	50,44	48,02	18,38	16,16	17,04	37,33	33,39	34,95
Sulawesi Tenggara	54,50	50,39	51,84	16,32	21,12	19,43	29,18	28,49	28,74
Gorontalo	53,64	64,95	60,90	16,97	12,85	14,33	29,38	22,20	24,77
Sulawesi Barat	47,24	51,45	50,53	16,75	14,46	14,96	36,01	34,10	34,52
Maluku	44,19	40,58	42,00	13,51	11,87	12,51	42,30	47,55	45,49
Maluku Utara	46,34	54,82	52,52	14,20	13,21	13,48	39,46	31,97	34,00
Papua Barat	33,63	37,04	35,69	16,63	10,72	13,05	49,74	52,25	51,26
Papua	37,39	19,61	23,82	11,03	6,69	7,72	51,57	73,71	68,46
Indonesia	56,45	61,32	58,73	10,39	12,19	11,23	33,16	26,49	30,04

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel D.7.1. Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin di Perkotaan menurut Provinsi dan Alat/Cara KB yang sedang Digunakan, 2018

Provinsi	MOW/ Tubek- tomi	MOP/ Vasek- tomi	AKDR/ IUD	Suntik KB	Susuk KB	Pil KB	Kondom	Intravag/ kondom wanita/ diafragma	Menyusui Alami	Pantang Berkala	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	2,99	0,08	7,49	48,67	2,51	23,59	9,54	0,00	0,27	4,51	0,35
Sumatera Utara	7,67	0,29	4,06	38,67	8,19	17,45	17,32	0,00	0,65	4,55	1,14
Sumatera Barat	8,15	0,76	13,51	39,42	7,99	13,91	10,78	0,03	0,59	4,72	0,14
Riau	5,92	0,74	8,44	42,26	2,81	20,40	11,71	0,11	1,26	4,66	1,69
Jambi	1,58	0,34	6,43	55,14	5,38	28,34	1,17	0,03	0,20	1,26	0,11
Sumatera Selatan	2,22	0,48	5,01	53,64	7,93	18,35	7,39	0,17	0,14	4,46	0,22
Bengkulu	4,29	1,27	10,59	51,96	9,45	12,68	4,56	0,64	0,83	3,37	0,36
Lampung	1,34	0,32	6,18	53,95	8,23	19,10	6,73	0,03	0,13	3,69	0,32
Kepulauan Bangka Belitung	4,46	0,48	5,44	50,79	4,10	28,90	2,11	0,40	0,15	2,62	0,53
Kepulauan Riau	4,89	0,11	9,16	33,60	3,97	24,16	16,98	0,00	1,04	5,99	0,09
DKI Jakarta	4,73	0,70	17,05	45,42	3,63	15,87	10,98	0,07	0,04	1,34	0,17
Jawa Barat	3,17	0,54	11,01	51,20	3,48	19,50	9,77	0,09	0,18	0,92	0,15
Jawa Tengah	6,76	0,51	11,12	48,63	7,67	13,03	5,55	0,06	0,11	6,31	0,25
DI Yogyakarta	6,13	0,40	28,92	27,43	2,51	9,67	16,42	0,00	0,28	8,24	0,00
Jawa Timur	5,19	0,46	10,91	47,48	5,67	22,57	4,72	0,07	0,15	2,46	0,32
Banten	2,25	0,40	8,41	54,35	4,20	16,84	12,74	0,01	0,00	0,70	0,12
Bali	7,18	0,78	23,61	35,36	2,61	12,95	9,71	0,00	1,43	5,12	1,25
Nusa Tenggara Barat	3,59	0,19	11,24	53,23	12,54	10,06	8,06	0,00	0,27	0,76	0,06
Nusa Tenggara Timur	7,20	0,00	10,95	25,41	11,90	10,25	9,46	0,00	0,40	24,32	0,12
Kalimantan Barat	4,50	1,17	8,94	45,37	1,92	28,53	7,04	0,05	0,19	2,01	0,28
Kalimantan Tengah	1,20	0,00	4,47	55,91	3,40	29,09	4,21	0,07	0,22	1,25	0,19
Kalimantan Selatan	2,43	0,33	3,72	39,45	4,43	40,76	2,90	0,23	0,15	5,55	0,06
Kalimantan Timur	4,12	0,44	9,79	34,49	3,99	30,19	14,16	0,19	0,27	2,19	0,17
Kalimantan Utara	2,90	0,00	9,83	48,86	4,59	26,16	5,11	0,00	0,89	1,66	0,00
Sulawesi Utara	3,81	0,80	7,36	46,39	12,10	21,30	5,38	0,07	0,00	2,38	0,40
Sulawesi Tengah	3,32	0,00	8,57	38,01	9,09	26,79	10,08	0,00	0,37	3,35	0,42
Sulawesi Selatan	2,25	0,18	7,27	45,98	7,04	20,71	13,01	0,33	0,32	2,68	0,24
Sulawesi Tenggara	1,34	0,00	5,28	33,21	10,76	29,46	4,84	0,00	0,26	14,31	0,54
Gorontalo	3,97	0,68	8,75	37,12	20,61	26,48	0,17	0,00	0,00	2,22	0,00
Sulawesi Barat	0,50	0,00	5,32	40,09	6,04	28,83	15,76	0,00	0,00	1,76	1,71
Maluku	1,17	0,00	1,77	48,55	10,01	16,27	6,30	0,06	0,92	13,91	1,03
Maluku Utara	1,47	0,50	5,79	53,01	14,72	11,43	12,14	0,00	0,00	0,21	0,73
Papua Barat	3,12	0,00	1,44	63,24	5,12	22,80	0,00	0,00	1,11	2,93	0,24
Papua	4,01	0,29	6,11	48,49	11,78	14,93	7,85	0,00	2,78	2,28	1,49
Indonesia	4,33	0,48	10,71	47,60	5,33	19,14	8,87	0,08	0,24	2,93	0,30

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel D.7.2. Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin di Perdesaan menurut Provinsi dan Alat/Cara KB yang sedang Digunakan, 2018

Provinsi	MOW/ Tubek- tomi	MOP/ Vasek- tomi	AKDR/ IUD	Suntik KB	Susuk KB	Pil KB	Kondom	Intravag/ kondom wanita/ diafragma	Menyusui Alami	Pantang Berkala	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	1,04	0,41	3,06	66,45	3,61	17,47	5,60	0,09	0,00	2,05	0,22
Sumatera Utara	6,52	0,24	3,13	45,07	13,21	18,37	8,98	0,13	0,80	1,76	1,79
Sumatera Barat	4,06	0,70	5,80	57,57	13,96	13,90	2,16	0,17	0,28	1,12	0,28
Riau	2,01	0,31	2,54	54,26	6,87	25,20	6,97	0,15	0,10	1,25	0,35
Jambi	0,96	0,47	2,26	62,74	9,47	23,04	0,28	0,00	0,04	0,65	0,09
Sumatera Selatan	1,01	0,43	1,12	69,02	14,97	11,16	1,21	0,03	0,18	0,80	0,07
Bengkulu	1,59	0,79	2,49	61,29	16,13	15,76	0,82	0,24	0,20	0,54	0,15
Lampung	1,24	0,46	2,93	60,49	13,08	16,49	3,77	0,00	0,12	1,13	0,29
Kepulauan Bangka Belitung	0,79	0,09	2,86	55,63	7,67	31,29	0,60	0,06	0,00	0,80	0,19
Kepulauan Riau	2,41	0,25	0,68	55,83	9,15	25,85	3,05	0,00	0,00	2,28	0,48
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	1,97	0,44	4,50	56,06	5,21	23,55	8,13	0,04	0,00	0,03	0,07
Jawa Tengah	4,33	0,86	6,68	56,27	11,74	12,47	3,45	0,02	0,01	4,13	0,05
DI Yogyakarta	4,53	0,53	19,70	36,05	14,34	13,00	7,21	0,00	0,18	3,78	0,69
Jawa Timur	3,01	0,52	5,47	59,63	8,19	19,27	2,87	0,07	0,07	0,70	0,20
Banten	0,94	0,00	1,27	71,68	8,49	12,53	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Bali	4,40	0,86	25,24	48,82	3,65	11,28	3,40	0,12	0,00	1,71	0,53
Nusa Tenggara Barat	2,54	0,31	5,39	64,95	14,78	7,41	3,55	0,00	0,13	0,59	0,35
Nusa Tenggara Timur	4,37	0,01	5,78	51,67	21,52	8,39	1,41	0,04	0,11	6,18	0,53
Kalimantan Barat	1,80	0,43	2,00	61,40	4,53	28,33	0,78	0,00	0,24	0,34	0,15
Kalimantan Tengah	0,56	0,15	1,09	63,63	6,02	26,34	1,61	0,04	0,11	0,39	0,05
Kalimantan Selatan	1,15	0,24	0,86	49,14	6,76	40,74	0,49	0,00	0,00	0,50	0,13
Kalimantan Timur	1,87	0,05	6,04	45,18	4,99	33,17	6,83	0,36	0,37	0,98	0,16
Kalimantan Utara	3,68	0,00	3,07	45,72	9,20	30,66	4,46	0,00	0,63	2,57	0,00
Sulawesi Utara	1,99	0,64	4,28	44,92	22,18	21,34	2,85	0,04	0,10	1,41	0,24
Sulawesi Tengah	1,70	0,23	3,87	42,79	10,99	34,88	4,06	0,00	0,25	0,77	0,47
Sulawesi Selatan	0,88	0,14	3,07	57,36	12,60	21,56	2,67	0,00	0,24	1,02	0,45
Sulawesi Tenggara	1,57	0,55	1,30	50,61	15,62	25,00	1,07	0,00	0,11	3,71	0,46
Gorontalo	1,18	0,71	5,24	45,52	24,78	22,25	0,03	0,00	0,00	0,16	0,12
Sulawesi Barat	1,10	0,18	1,85	46,00	15,26	30,74	3,68	0,08	0,10	0,49	0,51
Maluku	0,46	0,15	0,66	60,88	12,20	11,83	8,16	0,00	0,12	4,62	0,92
Maluku Utara	0,99	0,18	1,27	63,24	19,12	7,79	6,83	0,13	0,14	0,31	0,00
Papua Barat	2,09	0,37	4,48	61,59	11,76	18,23	0,66	0,07	0,07	0,15	0,55
Papua	1,35	0,00	1,44	35,87	5,60	10,17	9,45	0,00	8,74	1,21	26,17
Indonesia	2,53	0,46	4,48	57,44	10,14	18,92	3,94	0,05	0,17	1,44	0,42

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel D.7.3. Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin di Perkotaan dan Perdesaan menurut Provinsi dan Alat/Cara KB yang sedang Digunakan, 2018

Provinsi	MOW/ Tubek- tomi	MOP/ Vasek- tomi	AKDR/ IUD	Suntik KB	Susuk KB	Pil KB	Kondom	Intravag/ kondom wanita/ diafragma	Menyusui Alami	Pantang Berkala	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	1,61	0,31	4,37	61,22	3,29	19,27	6,76	0,06	0,08	2,77	0,26
Sumatera Utara	7,15	0,27	3,63	41,61	10,50	17,87	13,49	0,06	0,72	3,26	1,44
Sumatera Barat	5,66	0,72	8,81	50,49	11,63	13,90	5,52	0,12	0,40	2,52	0,23
Riau	3,27	0,45	4,45	50,38	5,55	23,65	8,51	0,14	0,47	2,35	0,78
Jambi	1,12	0,44	3,32	60,81	8,43	24,38	0,51	0,01	0,08	0,80	0,10
Sumatera Selatan	1,36	0,44	2,24	64,58	12,94	13,23	3,00	0,07	0,17	1,86	0,11
Bengkulu	2,30	0,92	4,62	58,84	14,38	14,95	1,80	0,34	0,36	1,29	0,21
Lampung	1,27	0,43	3,73	58,89	11,90	17,12	4,49	0,01	0,12	1,75	0,30
Kepulauan Bangka Belitung	2,59	0,28	4,13	53,26	5,93	30,12	1,34	0,23	0,08	1,69	0,36
Kepulauan Riau	4,43	0,13	7,61	37,68	4,93	24,47	14,42	0,00	0,85	5,31	0,16
DKI Jakarta	4,73	0,70	17,05	45,42	3,63	15,87	10,98	0,07	0,04	1,34	0,17
Jawa Barat	2,82	0,51	9,12	52,61	3,98	20,67	9,29	0,08	0,13	0,66	0,12
Jawa Tengah	5,43	0,70	8,68	52,82	9,90	12,72	4,40	0,04	0,06	5,12	0,14
DI Yogyakarta	5,60	0,44	25,88	30,27	6,41	10,77	13,38	0,00	0,24	6,77	0,23
Jawa Timur	4,06	0,49	8,09	53,78	6,98	20,86	3,76	0,07	0,11	1,55	0,25
Banten	1,84	0,28	6,21	59,68	5,52	15,51	10,39	0,01	0,00	0,48	0,08
Bali	6,13	0,81	24,23	40,48	3,01	12,32	7,31	0,04	0,88	3,82	0,98
Nusa Tenggara Barat	3,02	0,26	8,02	59,68	13,77	8,60	5,57	0,00	0,20	0,67	0,22
Nusa Tenggara Timur	5,01	0,01	6,96	45,69	19,33	8,81	3,24	0,03	0,17	10,31	0,44
Kalimantan Barat	2,54	0,63	3,89	57,04	3,82	28,38	2,48	0,01	0,23	0,79	0,18
Kalimantan Tengah	0,78	0,10	2,23	61,01	5,13	27,28	2,49	0,05	0,14	0,68	0,10
Kalimantan Selatan	1,69	0,28	2,07	45,05	5,77	40,75	1,50	0,10	0,07	2,63	0,10
Kalimantan Timur	3,27	0,29	8,38	38,51	4,37	31,31	11,40	0,25	0,31	1,73	0,17
Kalimantan Utara	3,28	0,00	6,57	47,35	6,81	28,33	4,80	0,00	0,77	2,10	0,00
Sulawesi Utara	2,78	0,71	5,62	45,56	17,80	21,32	3,95	0,05	0,06	1,84	0,31
Sulawesi Tengah	2,07	0,17	4,93	41,71	10,56	33,05	5,42	0,00	0,28	1,35	0,46
Sulawesi Selatan	1,38	0,16	4,60	53,22	10,58	21,25	6,43	0,12	0,27	1,62	0,37
Sulawesi Tenggara	1,48	0,34	2,77	44,17	13,82	26,65	2,47	0,00	0,16	7,63	0,49
Gorontalo	2,06	0,70	6,35	42,87	23,47	23,59	0,08	0,00	0,00	0,81	0,08
Sulawesi Barat	0,98	0,15	2,56	44,79	13,37	30,35	6,15	0,07	0,08	0,75	0,75
Maluku	0,75	0,09	1,12	55,79	11,29	13,66	7,39	0,03	0,45	8,46	0,97
Maluku Utara	1,10	0,26	2,35	60,79	18,07	8,66	8,10	0,10	0,10	0,29	0,17
Papua Barat	2,47	0,23	3,35	62,21	9,29	19,93	0,41	0,04	0,46	1,18	0,43
Papua	2,34	0,11	3,17	40,56	7,90	11,94	8,86	0,00	6,52	1,61	16,99
Indonesia	3,45	0,47	7,68	52,40	7,68	19,03	6,47	0,06	0,21	2,20	0,36

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel D.8. Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Usia Perkawinan Pertama, 2018

Provinsi	Perkotaan						Perdesaan						Perkotaan dan Perdesaan				
	≤ 16	17-18	19-20	21+	(6)	(7)	17-18	19-20	21+	(10)	(11)	≤ 16	17-18	19-20	21+	(15)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Aceh	6,55	13,86	22,76	56,83	100,00	11,50	19,38	23,96	45,16	100,00	10,00	17,70	23,60	48,70	100,00		
Sumatera Utara	3,99	12,01	22,09	61,91	100,00	7,26	15,44	26,59	50,71	100,00	5,53	13,63	24,22	56,62	100,00		
Sumatera Barat	5,94	11,28	18,50	64,28	100,00	13,13	19,13	25,49	42,25	100,00	10,06	15,78	22,51	51,65	100,00		
Riau	5,94	11,99	22,20	59,87	100,00	12,92	22,47	26,86	37,75	100,00	10,16	18,34	25,02	46,48	100,00		
Jambi	9,21	15,26	20,70	54,83	100,00	19,11	25,81	25,55	29,53	100,00	16,07	22,57	24,06	37,30	100,00		
Sumatera Selatan	8,92	15,19	22,43	53,46	100,00	16,26	25,79	25,14	32,81	100,00	13,66	22,03	24,18	40,13	100,00		
Bengkulu	11,23	13,20	21,58	53,99	100,00	19,10	25,39	25,22	30,29	100,00	16,66	21,61	24,09	37,64	100,00		
Lampung	10,53	15,59	23,09	50,79	100,00	16,39	23,44	25,58	34,59	100,00	14,74	21,23	24,88	39,15	100,00		
Kepulauan Bangka Belitung	7,99	15,99	22,37	53,65	100,00	15,68	25,11	26,04	33,17	100,00	11,55	20,21	24,07	44,17	100,00		
Kepulauan Riau	3,99	9,04	18,70	68,27	100,00	11,83	24,37	26,38	37,42	100,00	5,20	11,39	19,88	63,53	100,00		
DKI Jakarta	8,12	11,52	21,11	59,25	100,00	-	-	-	-	-	8,12	11,52	21,11	59,25	100,00		
Jawa Barat	16,78	20,16	23,04	40,02	100,00	31,74	29,17	21,20	17,89	100,00	20,93	22,66	22,53	33,88	100,00		
Jawa Tengah	12,71	18,14	21,92	47,23	100,00	21,03	25,21	22,91	30,85	100,00	16,91	21,71	22,42	38,96	100,00		
DI Yogyakarta	4,62	12,19	17,74	65,45	100,00	9,82	20,27	27,98	41,93	100,00	6,21	14,66	20,87	58,26	100,00		
Jawa Timur	15,48	17,26	22,21	45,05	100,00	26,04	25,42	22,55	25,99	100,00	20,73	21,32	22,38	35,57	100,00		
Banten	11,35	15,86	24,63	48,16	100,00	23,53	25,38	24,61	26,48	100,00	14,97	18,69	24,62	41,72	100,00		
Bali	2,79	14,40	21,79	61,02	100,00	4,57	22,64	27,55	45,24	100,00	3,43	17,35	23,85	55,37	100,00		
Nusa Tenggara Barat	13,43	21,84	24,89	39,84	100,00	17,65	24,34	23,52	34,49	100,00	15,76	23,22	24,14	36,88	100,00		
Nusa Tenggara Timur	3,41	10,65	18,36	67,58	100,00	5,51	14,75	23,49	56,25	100,00	5,06	13,88	22,40	58,66	100,00		
Kalimantan Barat	9,60	16,17	23,81	50,42	100,00	15,71	22,63	25,90	35,76	100,00	13,73	20,53	25,23	40,51	100,00		
Kalimantan Tengah	11,93	20,56	22,66	44,85	100,00	19,46	26,61	24,26	29,67	100,00	16,63	24,34	23,66	35,37	100,00		
Kalimantan Selatan	16,12	19,09	23,47	41,32	100,00	28,16	24,81	22,21	24,82	100,00	22,77	22,25	22,77	32,21	100,00		
Kalimantan Timur	9,35	15,98	21,81	52,86	100,00	17,01	24,42	25,76	32,81	100,00	11,91	18,81	23,13	46,15	100,00		
Kalimantan Utara	12,95	14,38	24,24	48,43	100,00	16,31	21,22	22,98	39,49	100,00	14,36	17,26	23,71	44,67	100,00		
Sulawesi Utara	7,96	13,03	24,62	54,39	100,00	11,03	19,35	26,49	43,13	100,00	9,52	16,25	25,57	48,66	100,00		
Sulawesi Tengah	9,64	15,83	21,38	53,15	100,00	14,66	22,91	23,41	39,02	100,00	13,34	21,05	22,88	42,73	100,00		
Sulawesi Selatan	12,36	15,28	19,31	53,05	100,00	18,92	21,46	20,41	39,21	100,00	16,37	19,06	19,98	44,59	100,00		
Sulawesi Tenggara	11,86	22,25	19,09	46,80	100,00	19,95	24,56	23,44	32,05	100,00	17,07	23,74	21,88	37,31	100,00		
Gorontalo	8,52	14,39	26,44	50,65	100,00	15,03	23,62	24,61	36,74	100,00	12,57	20,13	25,30	42,00	100,00		
Sulawesi Barat	13,07	18,63	21,44	46,86	100,00	18,49	22,54	23,64	35,33	100,00	17,26	21,65	23,14	37,95	100,00		
Maluku	5,05	10,10	21,18	63,67	100,00	7,73	16,12	25,10	51,05	100,00	6,64	13,68	23,51	56,17	100,00		
Maluku Utara	6,83	11,98	21,32	59,87	100,00	10,13	22,55	26,20	41,12	100,00	9,21	19,61	24,84	46,34	100,00		
Papua Barat	7,11	12,03	23,33	57,53	100,00	11,36	20,68	23,63	44,33	100,00	9,66	17,23	23,52	49,59	100,00		
Papua	6,79	14,60	25,08	53,53	100,00	11,25	20,27	28,32	40,16	100,00	10,10	18,80	27,48	43,62	100,00		
Indonesia	12,17	16,69	22,26	48,88	100,00	19,65	23,84	23,76	32,75	100,00	15,66	20,03	22,96	41,35	100,00		

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018



TABEL E -- KETENAGAKERJAAN

Tabel E.1.1. Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu, 2018

Provinsi	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	45,10	3,46	11,39	36,95	3,11	100,00
Sumatera Utara	56,56	3,41	8,72	28,75	2,56	100,00
Sumatera Barat	51,00	3,53	12,09	30,45	2,93	100,00
Riau	42,08	3,57	9,13	42,98	2,23	100,00
Jambi	49,52	2,43	8,17	37,47	2,41	100,00
Sumatera Selatan	51,29	2,27	8,81	35,01	2,62	100,00
Bengkulu	53,77	2,38	10,72	30,98	2,15	100,00
Lampung	49,18	2,31	7,70	38,42	2,39	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	48,24	1,95	8,35	39,39	2,06	100,00
Kepulauan Riau	43,62	2,56	8,23	42,98	2,62	100,00
DKI Jakarta	45,77	2,71	8,93	39,39	3,21	100,00
Jawa Barat	38,68	3,69	8,44	46,60	2,59	100,00
Jawa Tengah	54,11	2,30	7,97	32,00	3,62	100,00
DI Yogyakarta	62,28	2,14	7,96	24,61	3,01	100,00
Jawa Timur	53,36	2,07	7,57	33,76	3,24	100,00
Banten	41,37	3,56	9,55	43,13	2,39	100,00
Bali	69,84	0,58	7,39	20,03	2,16	100,00
Nusa Tenggara Barat	52,45	1,80	6,59	36,01	3,14	100,00
Nusa Tenggara Timur	58,11	1,75	11,27	26,19	2,68	100,00
Kalimantan Barat	50,68	2,38	8,10	36,00	2,84	100,00
Kalimantan Tengah	49,28	2,66	7,83	38,24	1,99	100,00
Kalimantan Selatan	53,44	2,08	7,60	34,49	2,39	100,00
Kalimantan Timur	42,05	3,30	9,72	42,32	2,61	100,00
Kalimantan Utara	47,62	2,58	9,32	38,66	1,82	100,00
Sulawesi Utara	41,34	3,92	8,27	42,04	4,43	100,00
Sulawesi Tengah	51,76	2,17	9,43	34,54	2,11	100,00
Sulawesi Selatan	44,63	2,56	10,25	39,04	3,53	100,00
Sulawesi Tenggara	53,75	2,22	9,88	31,51	2,63	100,00
Gorontalo	48,59	2,73	8,61	37,54	2,53	100,00
Sulawesi Barat	51,53	2,04	10,19	34,08	2,16	100,00
Maluku	45,09	4,50	12,83	34,78	2,79	100,00
Maluku Utara	46,57	3,22	10,57	36,86	2,78	100,00
Papua Barat	49,65	2,76	12,58	33,29	1,71	100,00
Papua	68,79	2,01	7,35	20,66	1,19	100,00
Indonesia	49,15	2,73	8,58	36,67	2,88	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel E.1.2. Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu, 2018

Provinsi	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	75,53	4,73	10,76	2,78	6,20	100,00
Sumatera Utara	79,39	4,59	8,73	2,95	4,34	100,00
Sumatera Barat	76,40	3,95	10,12	3,81	5,73	100,00
Riau	79,27	4,50	8,92	3,28	4,03	100,00
Jambi	81,41	2,85	7,31	3,59	4,85	100,00
Sumatera Selatan	79,88	3,52	7,73	3,72	5,15	100,00
Bengkulu	80,94	2,54	8,88	3,14	4,50	100,00
Lampung	83,64	3,32	6,26	2,99	3,79	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	80,87	2,95	6,93	4,47	4,78	100,00
Kepulauan Riau	76,08	6,60	9,52	3,89	3,91	100,00
DKI Jakarta	74,27	5,29	8,73	4,16	7,54	100,00
Jawa Barat	76,53	6,56	8,45	3,76	4,69	100,00
Jawa Tengah	77,28	3,91	8,45	4,82	5,54	100,00
DI Yogyakarta	79,90	2,78	8,60	5,29	3,43	100,00
Jawa Timur	80,45	3,51	7,59	4,00	4,45	100,00
Banten	74,21	7,20	9,52	3,29	5,78	100,00
Bali	81,61	1,52	8,17	5,72	2,98	100,00
Nusa Tenggara Barat	75,65	3,18	7,28	6,20	7,69	100,00
Nusa Tenggara Timur	78,47	2,48	10,64	4,24	4,16	100,00
Kalimantan Barat	80,28	3,46	7,94	3,58	4,74	100,00
Kalimantan Tengah	83,35	2,95	6,92	3,80	2,99	100,00
Kalimantan Selatan	80,46	4,22	7,41	3,77	4,15	100,00
Kalimantan Timur	77,32	5,17	8,29	4,39	4,83	100,00
Kalimantan Utara	78,52	4,35	8,66	3,34	5,13	100,00
Sulawesi Utara	75,38	4,71	7,11	6,01	6,79	100,00
Sulawesi Tengah	81,93	2,59	8,65	3,20	3,63	100,00
Sulawesi Selatan	75,91	4,24	9,15	4,84	5,85	100,00
Sulawesi Tenggara	81,32	2,33	8,57	4,06	3,72	100,00
Gorontalo	80,83	2,71	7,56	4,66	4,25	100,00
Sulawesi Barat	81,25	2,29	8,40	3,47	4,58	100,00
Maluku	71,52	4,64	12,54	4,66	6,64	100,00
Maluku Utara	77,04	3,01	10,49	3,90	5,57	100,00
Papua Barat	75,90	5,61	11,07	4,01	3,41	100,00
Papua	83,40	2,99	7,79	2,60	3,21	100,00
Indonesia	78,23	4,46	8,39	3,99	4,92	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel E.1.3. Persentase Penduduk Perkotaan Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu, 2018

Provinsi	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	57,31	4,71	13,33	19,75	4,90	100,00
Sumatera Utara	63,75	4,82	9,65	18,16	3,61	100,00
Sumatera Barat	61,18	4,40	12,89	17,17	4,35	100,00
Riau	59,14	5,75	9,92	21,64	3,54	100,00
Jambi	63,94	3,58	9,05	19,47	3,96	100,00
Sumatera Selatan	59,31	3,87	10,44	21,84	4,55	100,00
Bengkulu	62,43	2,73	13,66	17,41	3,77	100,00
Lampung	62,87	4,04	9,45	19,62	4,02	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	61,99	2,80	8,40	22,94	3,87	100,00
Kepulauan Riau	59,53	4,96	9,17	23,12	3,21	100,00
DKI Jakarta	59,95	3,99	8,83	21,85	5,37	100,00
Jawa Barat	57,62	5,17	9,01	24,52	3,68	100,00
Jawa Tengah	63,74	3,47	9,21	18,92	4,66	100,00
DI Yogyakarta	68,97	2,92	9,40	15,57	3,14	100,00
Jawa Timur	64,32	3,13	8,92	19,77	3,86	100,00
Banten	58,51	4,83	10,39	22,29	3,98	100,00
Bali	73,21	1,15	8,98	14,13	2,53	100,00
Nusa Tenggara Barat	60,89	2,70	8,04	22,57	5,80	100,00
Nusa Tenggara Timur	56,66	4,24	17,06	18,53	3,51	100,00
Kalimantan Barat	58,19	4,90	9,24	23,20	4,47	100,00
Kalimantan Tengah	64,82	3,73	9,20	19,94	2,32	100,00
Kalimantan Selatan	62,36	4,48	8,46	20,47	4,23	100,00
Kalimantan Timur	58,24	4,74	9,37	23,26	4,38	100,00
Kalimantan Utara	63,20	3,25	10,25	19,78	3,52	100,00
Sulawesi Utara	57,69	5,35	8,40	22,80	5,76	100,00
Sulawesi Tengah	64,75	3,52	11,55	17,34	2,84	100,00
Sulawesi Selatan	55,86	5,11	11,85	22,37	4,82	100,00
Sulawesi Tenggara	62,31	3,19	13,11	18,27	3,12	100,00
Gorontalo	61,33	3,28	9,50	22,42	3,46	100,00
Sulawesi Barat	62,88	4,09	10,76	18,06	4,21	100,00
Maluku	53,53	5,99	15,42	19,75	5,31	100,00
Maluku Utara	55,81	3,29	14,67	21,09	5,15	100,00
Papua Barat	59,38	6,70	13,18	17,74	3,00	100,00
Papua	59,86	5,48	12,27	19,13	3,26	100,00
Indonesia	61,00	4,21	9,56	21,16	4,07	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel E.1.4. Persentase Penduduk Perdesaan Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu, 2018

Provinsi	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	61,52	3,79	9,99	20,18	4,51	100,00
Sumatera Utara	72,87	2,97	7,58	13,36	3,22	100,00
Sumatera Barat	65,67	3,13	9,50	17,43	4,27	100,00
Riau	62,56	2,89	8,42	23,24	2,89	100,00
Jambi	66,73	2,19	7,09	20,48	3,51	100,00
Sumatera Selatan	69,67	2,33	6,95	17,54	3,51	100,00
Bengkulu	70,17	2,33	7,85	16,51	3,13	100,00
Lampung	68,58	2,29	5,87	20,54	2,71	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	69,37	2,07	6,64	18,90	3,01	100,00
Kepulauan Riau	64,64	1,84	6,61	23,14	3,77	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	58,28	5,06	6,69	26,41	3,57	100,00
Jawa Tengah	67,21	2,71	7,20	18,42	4,46	100,00
DI Yogyakarta	75,99	1,23	5,34	14,02	3,41	100,00
Jawa Timur	69,16	2,37	6,08	18,59	3,81	100,00
Banten	57,02	6,88	7,36	24,26	4,47	100,00
Bali	81,12	0,83	5,22	10,17	2,65	100,00
Nusa Tenggara Barat	65,95	2,21	5,84	21,18	4,82	100,00
Nusa Tenggara Timur	71,71	1,43	9,01	14,48	3,37	100,00
Kalimantan Barat	69,79	1,86	7,36	17,54	3,45	100,00
Kalimantan Tengah	68,85	2,19	6,11	20,20	2,65	100,00
Kalimantan Selatan	71,33	2,00	6,65	17,59	2,44	100,00
Kalimantan Timur	65,94	3,32	8,09	20,14	2,52	100,00
Kalimantan Utara	65,94	3,98	6,96	19,37	3,74	100,00
Sulawesi Utara	59,78	3,20	6,89	24,64	5,49	100,00
Sulawesi Tengah	68,16	1,90	7,96	19,08	2,90	100,00
Sulawesi Selatan	62,54	2,04	8,09	22,81	4,51	100,00
Sulawesi Tenggara	70,25	1,79	7,18	17,59	3,20	100,00
Gorontalo	67,00	2,31	7,08	20,29	3,32	100,00
Sulawesi Barat	67,17	1,67	8,93	19,08	3,15	100,00
Maluku	62,32	3,39	10,41	19,66	4,23	100,00
Maluku Utara	64,72	3,04	8,81	19,63	3,81	100,00
Papua Barat	66,52	2,60	10,81	17,73	2,34	100,00
Papua	83,55	1,30	5,63	7,67	1,85	100,00
Indonesia	67,02	2,82	7,14	19,34	3,69	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel E.1.5. Persentase Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu, 2018

Provinsi	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	60,16	4,09	11,07	20,04	4,64	100,00
Sumatera Utara	67,83	3,99	8,72	16,02	3,44	100,00
Sumatera Barat	63,53	3,73	11,12	17,31	4,31	100,00
Riau	61,18	4,05	9,03	22,59	3,16	100,00
Jambi	65,82	2,64	7,73	20,15	3,66	100,00
Sumatera Selatan	65,78	2,91	8,26	19,15	3,90	100,00
Bengkulu	67,60	2,46	9,78	16,81	3,35	100,00
Lampung	66,84	2,83	6,96	20,26	3,11	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	65,31	2,47	7,61	21,12	3,48	100,00
Kepulauan Riau	60,11	4,61	8,88	23,13	3,27	100,00
DKI Jakarta	59,95	3,99	8,83	21,85	5,37	100,00
Jawa Barat	57,78	5,14	8,44	24,98	3,65	100,00
Jawa Tengah	65,47	3,09	8,21	18,67	4,56	100,00
DI Yogyakarta	70,91	2,46	8,27	15,14	3,22	100,00
Jawa Timur	66,60	2,77	7,58	19,21	3,83	100,00
Banten	58,08	5,41	9,53	22,85	4,12	100,00
Bali	75,74	1,05	7,78	12,86	2,57	100,00
Nusa Tenggara Barat	63,46	2,45	6,92	21,86	5,30	100,00
Nusa Tenggara Timur	68,06	2,11	10,96	15,46	3,40	100,00
Kalimantan Barat	65,72	2,93	8,02	19,52	3,81	100,00
Kalimantan Tengah	67,22	2,81	7,35	20,10	2,52	100,00
Kalimantan Selatan	67,11	3,16	7,50	18,94	3,28	100,00
Kalimantan Timur	60,70	4,29	8,96	22,26	3,78	100,00
Kalimantan Utara	64,28	3,54	8,96	19,62	3,61	100,00
Sulawesi Utara	58,69	4,32	7,68	23,68	5,63	100,00
Sulawesi Tengah	67,14	2,38	9,03	18,56	2,88	100,00
Sulawesi Selatan	59,65	3,37	9,72	22,62	4,64	100,00
Sulawesi Tenggara	67,50	2,28	9,23	17,82	3,17	100,00
Gorontalo	64,63	2,72	8,09	21,18	3,38	100,00
Sulawesi Barat	66,30	2,16	9,30	18,87	3,37	100,00
Maluku	58,33	4,57	12,69	19,70	4,72	100,00
Maluku Utara	62,10	3,11	10,53	20,06	4,20	100,00
Papua Barat	63,60	4,28	11,78	17,73	2,61	100,00
Papua	76,58	2,53	7,59	11,04	2,27	100,00
Indonesia	63,66	3,59	8,49	20,36	3,90	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel E.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan dan Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	47,69	76,32	48,96	82,17	48,56	80,26
Sumatera Utara	55,61	81,96	65,40	86,45	59,97	83,98
Sumatera Barat	53,43	78,07	55,53	82,42	54,53	80,35
Riau	49,30	79,98	43,14	86,29	45,66	83,77
Jambi	54,98	79,86	50,44	86,35	51,95	84,26
Sumatera Selatan	49,23	77,34	56,26	86,93	53,56	83,41
Bengkulu	53,05	77,51	57,76	86,33	56,15	83,48
Lampung	51,93	81,84	51,29	89,13	51,49	86,96
Kepulauan Bangka Belitung	47,54	81,08	53,58	87,03	50,19	83,81
Kepulauan Riau	46,02	82,55	47,51	83,68	46,18	82,68
DKI Jakarta	48,47	79,57	-	-	48,47	79,57
Jawa Barat	43,06	82,08	40,25	86,24	42,37	83,09
Jawa Tengah	56,15	78,79	56,66	83,60	56,41	81,19
DI Yogyakarta	62,81	80,96	68,32	87,54	64,42	82,69
Jawa Timur	53,82	81,49	57,20	86,76	55,43	83,96
Banten	45,19	80,83	44,28	82,84	44,93	81,40
Bali	67,08	81,46	77,29	86,82	70,41	83,13
Nusa Tenggara Barat	52,75	75,69	55,72	81,84	54,25	78,83
Nusa Tenggara Timur	50,67	71,22	62,74	84,15	59,86	80,96
Kalimantan Barat	47,15	79,23	56,36	86,09	53,06	83,74
Kalimantan Tengah	53,16	83,02	51,09	88,42	51,94	86,29
Kalimantan Selatan	52,56	80,75	58,14	88,16	55,52	84,68
Kalimantan Timur	44,72	79,88	46,79	87,78	45,35	82,49
Kalimantan Utara	51,58	79,93	47,88	87,13	50,20	82,87
Sulawesi Utara	49,08	77,02	40,89	83,31	45,26	80,08
Sulawesi Tengah	55,23	81,47	53,35	85,76	53,92	84,52
Sulawesi Selatan	46,64	76,18	47,60	83,24	47,19	80,15
Sulawesi Tenggara	53,78	77,43	57,14	86,92	55,97	83,66
Gorontalo	49,86	80,37	52,42	85,70	51,31	83,53
Sulawesi Barat	55,09	79,80	53,17	84,47	53,57	83,55
Maluku	48,19	70,98	50,78	80,41	49,60	76,16
Maluku Utara	46,33	71,64	51,24	83,48	49,79	80,04
Papua Barat	52,18	78,46	52,57	83,61	52,41	81,51
Papua	49,19	78,52	79,33	89,84	70,80	86,39
Indonesia	50,09	80,39	54,13	85,60	51,88	82,69

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel E.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan dan Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	7,76	7,48	6,83	5,18	7,12	5,89
Sumatera Utara	7,03	7,02	4,25	3,66	5,68	5,47
Sumatera Barat	7,09	6,44	5,92	3,59	6,47	4,91
Riau	9,58	8,44	6,44	3,47	7,82	5,37
Jambi	5,74	5,00	4,09	2,67	4,67	3,38
Sumatera Selatan	5,90	6,26	3,34	3,17	4,24	4,22
Bengkulu	4,40	4,03	4,16	2,61	4,24	3,04
Lampung	5,77	6,20	3,90	2,88	4,49	3,81
Kepulauan Bangka Belitung	4,35	4,30	3,36	2,66	3,89	3,52
Kepulauan Riau	5,89	8,67	2,77	2,78	5,54	7,98
DKI Jakarta	5,58	6,65	N.A	N.A	5,58	6,65
Jawa Barat	8,68	7,99	8,77	7,62	8,70	7,90
Jawa Tengah	4,52	5,64	3,63	4,04	4,08	4,82
DI Yogyakarta	4,00	4,12	1,81	1,41	3,32	3,37
Jawa Timur	4,06	5,03	3,38	3,26	3,73	4,18
Banten	7,04	7,93	10,18	11,07	7,92	8,84
Bali	0,90	2,07	0,67	1,33	0,82	1,83
Nusa Tenggara Barat	3,72	4,66	2,94	3,47	3,31	4,03
Nusa Tenggara Timur	7,30	6,72	1,82	2,05	2,93	3,07
Kalimantan Barat	8,22	7,49	2,73	2,52	4,48	4,13
Kalimantan Tengah	6,84	4,60	3,87	2,69	5,12	3,41
Kalimantan Selatan	4,79	7,92	2,92	2,59	3,75	4,98
Kalimantan Timur	7,10	7,75	7,64	3,54	7,27	6,27
Kalimantan Utara	4,01	5,41	7,20	5,05	5,14	5,25
Sulawesi Utara	9,57	7,79	7,41	4,02	8,66	5,88
Sulawesi Tengah	5,26	5,08	3,45	2,28	4,02	3,06
Sulawesi Selatan	7,66	8,84	3,78	2,77	5,43	5,29
Sulawesi Tenggara	5,20	4,64	3,34	1,93	3,96	2,79
Gorontalo	6,50	4,14	4,46	2,66	5,31	3,24
Sulawesi Barat	6,49	5,83	3,07	2,03	3,81	2,74
Maluku	12,08	8,68	6,68	4,22	9,08	6,09
Maluku Utara	5,60	5,55	6,80	3,13	6,47	3,76
Papua Barat	10,25	10,08	1,82	4,83	5,27	6,89
Papua	8,57	8,29	1,43	1,62	2,83	3,46
Indonesia	6,13	6,66	4,24	3,91	5,26	5,40

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel E.4.1. Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Perkotaan dan Perdesaan			
	Tamat SD ke Bawah	SMP	Tamat SMA ke Atas	Total	Tamat SD ke Bawah	SMP	Tamat SMA ke Atas	Total	Tamat SD ke Bawah	SMP	Tamat SMA ke Atas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	17,01	15,08	67,91	100,00	41,38	18,81	39,81	100,00	33,77	17,65	48,59	100,00
Sumatera Utara	19,17	17,06	63,76	100,00	41,82	21,27	36,91	100,00	30,34	19,14	50,52	100,00
Sumatera Barat	23,61	13,66	62,73	100,00	47,48	17,37	35,15	100,00	36,39	15,65	47,96	100,00
Riau	17,31	14,22	68,47	100,00	47,30	15,66	37,04	100,00	34,33	15,04	50,63	100,00
Jambi	23,97	12,80	63,23	100,00	53,46	18,14	28,40	100,00	43,22	16,29	40,49	100,00
Sumatera Selatan	28,94	12,03	59,03	100,00	60,10	16,61	23,29	100,00	49,30	15,02	35,68	100,00
Bengkulu	21,18	14,80	64,02	100,00	52,61	19,77	27,62	100,00	42,48	18,17	39,35	100,00
Lampung	27,30	14,79	57,91	100,00	50,89	23,82	25,29	100,00	43,56	21,01	35,43	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	28,07	11,59	60,35	100,00	67,09	13,63	19,28	100,00	46,49	12,55	40,96	100,00
Kepulauan Riau	17,60	8,43	73,97	100,00	56,76	11,41	31,83	100,00	22,08	8,77	69,15	100,00
DKI Jakarta	21,11	15,49	63,40	100,00	-	-	-	-	21,11	15,49	63,40	100,00
Jawa Barat	32,10	19,16	48,75	100,00	64,36	17,05	18,58	100,00	39,64	18,67	41,70	100,00
Jawa Tengah	37,80	17,95	44,25	100,00	62,99	18,05	18,96	100,00	50,40	18,00	31,60	100,00
DI Yogyakarta	25,90	13,15	60,95	100,00	52,51	18,69	28,80	100,00	34,25	14,89	50,86	100,00
Jawa Timur	35,71	17,71	46,58	100,00	66,20	16,60	17,20	100,00	50,72	17,16	32,11	100,00
Banten	24,75	17,87	57,38	100,00	68,18	15,99	15,83	100,00	36,63	17,36	46,01	100,00
Bali	30,79	13,40	55,81	100,00	57,07	15,43	27,50	100,00	40,23	14,13	45,64	100,00
Nusa Tenggara Barat	44,66	15,54	39,80	100,00	57,82	17,13	25,05	100,00	51,52	16,37	32,11	100,00
Nusa Tenggara Timur	25,81	12,38	61,81	100,00	67,11	11,46	21,43	100,00	59,16	11,64	29,20	100,00
Kalimantan Barat	29,85	13,95	56,20	100,00	65,69	14,87	19,44	100,00	54,72	14,59	30,69	100,00
Kalimantan Tengah	28,04	15,13	56,84	100,00	55,98	16,72	27,31	100,00	44,39	16,06	39,55	100,00
Kalimantan Selatan	30,32	17,80	51,88	100,00	62,79	16,66	20,55	100,00	48,51	17,16	34,33	100,00
Kalimantan Timur	23,63	13,86	62,51	100,00	46,52	17,07	36,41	100,00	30,83	14,87	54,29	100,00
Kalimantan Utara	22,68	11,67	65,66	100,00	48,48	15,36	36,16	100,00	31,64	12,95	55,40	100,00
Sulawesi Utara	19,64	15,46	64,90	100,00	37,41	17,10	45,49	100,00	27,23	16,16	56,61	100,00
Sulawesi Tengah	26,09	13,93	59,98	100,00	52,08	16,67	31,25	100,00	44,04	15,82	40,14	100,00
Sulawesi Selatan	23,07	12,78	64,15	100,00	53,00	17,07	29,93	100,00	40,61	15,29	44,10	100,00
Sulawesi Tenggara	18,92	12,19	68,89	100,00	50,65	16,25	33,11	100,00	40,17	14,91	44,92	100,00
Gorontalo	33,99	13,37	52,64	100,00	59,19	11,78	29,03	100,00	48,78	12,44	38,78	100,00
Sulawesi Barat	33,41	15,28	51,31	100,00	57,96	14,24	27,80	100,00	52,80	14,46	32,74	100,00
Maluku	17,76	14,12	68,12	100,00	45,81	16,62	37,57	100,00	33,75	15,55	50,71	100,00
Maluku Utara	18,48	12,90	68,62	100,00	50,73	14,45	34,82	100,00	41,74	14,02	44,24	100,00
Papua Barat	22,87	10,42	66,70	100,00	53,70	14,64	31,65	100,00	41,76	13,01	45,23	100,00
Papua	23,00	11,78	65,22	100,00	79,36	9,36	11,28	100,00	68,92	9,81	21,27	100,00
Indonesia	29,76	16,60	53,63	100,00	59,06	17,10	23,84	100,00	43,43	16,83	39,74	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel E.4.2. Persentase Penduduk Laki-laki Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Perkotaan dan Perdesaan			
	Tamat SD ke Bawah	SMP	Tamat SMA ke Atas	Total	Tamat SD ke Bawah	SMP	Tamat SMA ke Atas	Total	Tamat SD ke Bawah	SMP	Tamat SMA ke Atas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	16,68	17,96	65,37	100,00	34,53	24,90	40,57	100,00	29,06	22,78	48,16	100,00
Sumatera Utara	18,40	20,36	61,24	100,00	36,71	25,05	38,24	100,00	27,03	22,57	50,40	100,00
Sumatera Barat	25,65	18,01	56,34	100,00	47,38	22,78	29,84	100,00	37,47	20,61	41,92	100,00
Riau	18,18	17,51	64,31	100,00	44,53	22,00	33,47	100,00	34,80	20,34	44,86	100,00
Jambi	23,78	17,22	59,00	100,00	46,70	22,01	31,28	100,00	39,81	20,57	39,61	100,00
Sumatera Selatan	27,09	13,52	59,40	100,00	51,61	20,25	28,14	100,00	43,43	18,00	38,57	100,00
Bengkulu	18,85	18,85	62,31	100,00	45,51	23,25	31,24	100,00	37,59	21,94	40,46	100,00
Lampung	27,35	18,34	54,31	100,00	47,20	26,86	25,94	100,00	41,77	24,53	33,70	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	28,09	17,83	54,08	100,00	63,11	15,40	21,49	100,00	44,95	16,66	38,39	100,00
Kepulauan Riau	17,84	14,07	68,08	100,00	61,65	13,65	24,70	100,00	23,26	14,02	62,72	100,00
DKI Jakarta	13,79	15,56	70,64	100,00	-	-	-	-	13,79	15,56	70,64	100,00
Jawa Barat	30,92	18,12	50,96	100,00	60,90	19,06	20,04	100,00	38,52	18,36	43,12	100,00
Jawa Tengah	34,71	19,99	45,30	100,00	56,53	21,46	22,01	100,00	46,01	20,75	33,23	100,00
DI Yogyakarta	18,89	16,84	64,27	100,00	38,07	25,52	36,41	100,00	24,32	19,30	56,38	100,00
Jawa Timur	30,29	18,04	51,67	100,00	56,49	20,21	23,30	100,00	43,06	19,10	37,84	100,00
Banten	23,74	16,85	59,42	100,00	63,67	18,63	17,69	100,00	35,02	17,35	47,63	100,00
Bali	20,00	11,71	68,29	100,00	43,38	19,22	37,39	100,00	27,66	14,17	58,16	100,00
Nusa Tenggara Barat	38,27	16,34	45,39	100,00	49,47	17,27	33,26	100,00	44,23	16,84	38,93	100,00
Nusa Tenggara Timur	25,55	12,76	61,69	100,00	62,71	13,28	24,01	100,00	54,94	13,17	31,89	100,00
Kalimantan Barat	30,76	14,10	55,15	100,00	58,56	17,86	23,58	100,00	49,87	16,68	33,45	100,00
Kalimantan Tengah	26,55	16,10	57,36	100,00	50,66	21,60	27,74	100,00	41,63	19,54	38,84	100,00
Kalimantan Selatan	29,78	16,60	53,62	100,00	56,07	19,15	24,79	100,00	44,64	18,04	37,32	100,00
Kalimantan Timur	19,41	14,59	66,00	100,00	40,47	20,85	38,68	100,00	27,05	16,86	56,09	100,00
Kalimantan Utara	22,62	13,94	63,43	100,00	43,63	16,57	39,80	100,00	31,66	15,07	53,27	100,00
Sulawesi Utara	23,63	19,02	57,35	100,00	43,79	22,42	33,80	100,00	34,05	20,77	45,18	100,00
Sulawesi Tengah	28,33	17,15	54,52	100,00	51,98	18,43	29,59	100,00	45,50	18,08	36,42	100,00
Sulawesi Selatan	27,43	15,28	57,29	100,00	54,26	17,61	28,13	100,00	43,53	16,68	39,79	100,00
Sulawesi Tenggara	16,63	13,71	69,66	100,00	43,84	18,79	37,37	100,00	35,35	17,20	47,45	100,00
Gorontalo	41,83	12,56	45,61	100,00	68,41	11,08	20,50	100,00	58,10	11,66	30,25	100,00
Sulawesi Barat	36,95	13,66	49,39	100,00	57,45	15,40	27,15	100,00	53,71	15,08	31,20	100,00
Maluku	16,08	15,46	68,47	100,00	40,63	19,56	39,81	100,00	30,60	17,88	51,52	100,00
Maluku Utara	18,62	15,27	66,11	100,00	41,44	20,91	37,65	100,00	35,61	19,47	44,92	100,00
Papua Barat	16,45	13,59	69,96	100,00	40,16	17,27	42,57	100,00	31,19	15,88	52,93	100,00
Papua	16,17	14,34	69,49	100,00	59,72	15,66	24,62	100,00	48,28	15,32	36,40	100,00
Indonesia	26,98	17,47	55,55	100,00	52,75	20,48	26,77	100,00	38,96	18,87	42,16	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel E.5.1. Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2018

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan dan Perdesaan				
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	23,94	63,01	3,63	9,42	100,00	17,84	66,37	3,78	12,01	100,00	19,74	65,32	3,74	11,20	100,00
Sumatera Utara	24,11	62,02	4,60	9,27	100,00	17,60	66,56	2,77	13,07	100,00	20,90	64,26	3,70	11,14	100,00
Sumatera Barat	18,71	67,29	5,08	8,92	100,00	9,93	73,76	5,39	10,92	100,00	14,01	70,75	5,25	9,99	100,00
Riau	25,49	64,25	4,03	6,23	100,00	14,81	73,52	3,29	8,38	100,00	19,42	69,51	3,61	7,45	100,00
Jambi	23,32	64,85	4,05	7,78	100,00	11,24	75,27	3,62	9,86	100,00	15,44	71,65	3,77	9,14	100,00
Sumatera Selatan	22,43	64,87	3,99	8,72	100,00	7,92	81,76	2,35	7,98	100,00	12,95	75,90	2,92	8,23	100,00
Bengkulu	15,90	71,11	3,99	9,00	100,00	6,30	82,52	3,31	7,86	100,00	9,40	78,84	3,53	8,23	100,00
Lampung	20,35	68,08	3,30	8,28	100,00	8,73	82,48	1,88	6,91	100,00	12,34	78,00	2,32	7,34	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	22,97	63,93	6,05	7,04	100,00	14,40	75,50	3,20	6,90	100,00	18,93	69,40	4,70	6,97	100,00
Kepulauan Riau	28,87	64,04	2,43	4,66	100,00	15,18	68,46	5,47	10,89	100,00	27,30	64,55	2,78	5,37	100,00
DKI Jakarta	29,45	58,64	4,20	7,71	100,00	-	-	-	-	-	29,45	58,64	4,20	7,71	100,00
Jawa Barat	21,63	64,43	5,61	8,33	100,00	8,08	73,91	5,88	12,14	100,00	18,46	66,64	5,68	9,22	100,00
Jawa Tengah	14,32	71,33	3,68	10,67	100,00	6,84	80,37	2,68	10,11	100,00	10,58	75,85	3,18	10,39	100,00
DI Yogyakarta	18,00	69,29	3,23	9,48	100,00	6,61	79,69	2,95	10,76	100,00	14,43	72,55	3,14	9,88	100,00
Jawa Timur	13,63	70,34	4,51	11,52	100,00	6,62	76,51	3,44	13,43	100,00	10,18	73,38	3,99	12,46	100,00
Banten	22,16	66,51	3,72	7,61	100,00	10,82	74,73	3,45	11,00	100,00	19,06	68,76	3,65	8,54	100,00
Bali	19,49	72,13	1,84	6,54	100,00	13,02	78,09	1,39	7,50	100,00	17,17	74,27	1,68	6,88	100,00
Nusa Tenggara Barat	17,90	65,88	6,29	9,92	100,00	11,19	74,43	6,15	8,22	100,00	14,40	70,34	6,22	9,03	100,00
Nusa Tenggara Timur	26,91	62,04	2,72	8,33	100,00	16,95	70,96	2,67	9,42	100,00	18,87	69,24	2,68	9,21	100,00
Kalimantan Barat	23,11	62,69	4,21	9,99	100,00	9,86	79,37	2,72	8,05	100,00	13,92	74,27	3,18	8,64	100,00
Kalimantan Tengah	20,50	69,04	3,90	6,56	100,00	10,51	77,60	4,29	7,60	100,00	14,65	74,05	4,13	7,17	100,00
Kalimantan Selatan	18,65	67,40	4,55	9,39	100,00	9,65	74,10	4,58	11,67	100,00	13,61	71,15	4,57	10,67	100,00
Kalimantan Timur	23,95	64,45	4,64	6,96	100,00	11,45	78,50	3,30	6,76	100,00	20,01	68,87	4,22	6,89	100,00
Kalimantan Utara	21,34	68,31	3,24	7,12	100,00	13,46	75,51	3,61	7,42	100,00	18,60	70,81	3,37	7,22	100,00
Sulawesi Utara	16,85	69,16	4,81	9,18	100,00	10,65	77,34	3,43	8,58	100,00	14,20	72,65	4,22	8,92	100,00
Sulawesi Tengah	21,43	64,53	4,18	9,86	100,00	11,22	76,44	2,82	9,52	100,00	14,38	72,76	3,24	9,63	100,00
Sulawesi Selatan	25,54	61,92	4,72	7,83	100,00	17,48	68,07	4,06	10,39	100,00	20,81	65,52	4,33	9,33	100,00
Sulawesi Tenggara	22,39	65,40	2,88	9,34	100,00	12,45	73,36	3,78	10,42	100,00	15,73	70,73	3,48	10,06	100,00
Gorontalo	17,00	69,45	4,26	9,29	100,00	9,72	80,64	3,28	6,35	100,00	12,73	76,02	3,69	7,56	100,00
Sulawesi Barat	28,72	60,38	3,33	7,56	100,00	14,46	76,67	2,56	6,31	100,00	17,45	73,25	2,72	6,57	100,00
Maluku	21,73	66,26	4,08	7,93	100,00	12,20	76,53	2,85	8,42	100,00	16,30	72,12	3,38	8,21	100,00
Maluku Utara	24,58	60,46	6,00	8,96	100,00	13,31	75,89	2,74	8,06	100,00	16,45	71,59	3,65	8,31	100,00
Papua Barat	23,05	63,40	3,30	10,24	100,00	9,92	77,48	2,40	10,21	100,00	15,01	72,02	2,75	10,22	100,00
Papua	19,19	65,90	4,90	10,01	100,00	11,36	79,90	0,92	7,83	100,00	12,81	77,31	1,66	8,23	100,00
Indonesia	19,96	66,51	4,39	9,14	100,00	10,17	76,04	3,31	10,48	100,00	15,39	70,96	3,89	9,76	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel E.5.2. Persentase Penduduk Laki-laki Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2018

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan dan Perdesaan				
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	28,44	69,83	0,87	0,86	100,00	28,87	68,74	1,00	1,39	100,00	28,74	69,07	0,96	1,22	100,00
Sumatera Utara	25,47	71,16	1,31	2,05	100,00	26,50	70,40	0,98	2,12	100,00	25,96	70,80	1,15	2,08	100,00
Sumatera Barat	26,99	70,29	1,42	1,30	100,00	23,45	73,05	1,62	1,87	100,00	25,06	71,79	1,53	1,61	100,00
Riau	25,04	72,55	1,25	1,16	100,00	22,76	74,10	1,63	1,51	100,00	23,60	73,53	1,49	1,38	100,00
Jambi	28,20	68,83	1,19	1,78	100,00	20,95	76,47	1,18	1,40	100,00	23,13	74,17	1,19	1,51	100,00
Sumatera Selatan	24,76	71,86	1,48	1,90	100,00	21,43	75,37	1,71	1,49	100,00	22,54	74,20	1,64	1,62	100,00
Bengkulu	21,42	75,40	2,06	1,12	100,00	19,49	77,08	1,43	2,00	100,00	20,06	76,58	1,62	1,74	100,00
Lampung	23,85	72,71	1,61	1,82	100,00	21,62	75,30	1,62	1,46	100,00	22,23	74,59	1,62	1,56	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	24,17	72,07	2,59	1,16	100,00	23,79	72,25	2,01	1,95	100,00	23,99	72,16	2,31	1,54	100,00
Kepulauan Riau	20,23	77,81	1,22	0,73	100,00	18,29	78,07	2,47	1,16	100,00	19,99	77,84	1,38	0,79	100,00
DKI Jakarta	26,47	70,37	1,70	1,47	100,00	-	-	-	-	-	26,47	70,37	1,70	1,47	100,00
Jawa Barat	22,18	74,09	2,05	1,68	100,00	14,56	81,15	2,52	1,77	100,00	20,25	75,88	2,17	1,70	100,00
Jawa Tengah	21,73	74,33	1,69	2,25	100,00	16,31	79,71	1,44	2,54	100,00	18,92	77,12	1,56	2,40	100,00
DI Yogyakarta	26,91	69,62	1,35	2,11	100,00	14,05	81,81	1,41	2,73	100,00	23,28	73,07	1,37	2,29	100,00
Jawa Timur	21,24	74,58	1,65	2,53	100,00	16,30	78,84	1,73	3,13	100,00	18,83	76,66	1,69	2,82	100,00
Banten	22,19	74,38	2,05	1,38	100,00	18,67	78,29	1,44	1,60	100,00	21,20	75,48	1,88	1,44	100,00
Bali	21,95	75,37	1,12	1,56	100,00	18,84	76,78	1,45	2,93	100,00	20,93	75,83	1,23	2,01	100,00
Nusa Tenggara Barat	20,89	74,31	2,50	2,30	100,00	17,93	78,05	1,69	2,34	100,00	19,31	76,30	2,07	2,32	100,00
Nusa Tenggara Timur	30,99	66,38	0,57	2,05	100,00	27,94	68,84	0,82	2,41	100,00	28,58	68,32	0,77	2,34	100,00
Kalimantan Barat	26,07	70,45	1,89	1,59	100,00	23,07	73,53	1,18	2,23	100,00	24,01	72,56	1,40	2,03	100,00
Kalimantan Tengah	21,22	75,28	2,37	1,12	100,00	21,44	74,95	1,87	1,74	100,00	21,36	75,07	2,06	1,51	100,00
Kalimantan Selatan	20,94	74,55	2,62	1,89	100,00	20,38	74,78	2,76	2,09	100,00	20,62	74,68	2,70	2,00	100,00
Kalimantan Timur	20,51	76,23	1,63	1,64	100,00	23,34	73,16	1,81	1,69	100,00	21,54	75,11	1,70	1,66	100,00
Kalimantan Utara	23,53	74,23	1,69	0,55	100,00	26,79	71,38	0,77	1,06	100,00	24,93	73,01	1,29	0,77	100,00
Sulawesi Utara	20,53	74,67	2,02	2,78	100,00	18,76	76,34	1,81	3,09	100,00	19,61	75,53	1,91	2,94	100,00
Sulawesi Tengah	23,91	70,25	3,30	2,54	100,00	21,78	73,83	2,18	2,20	100,00	22,36	72,85	2,49	2,30	100,00
Sulawesi Selatan	26,84	69,88	1,76	1,53	100,00	24,34	71,62	2,06	1,98	100,00	25,34	70,92	1,94	1,80	100,00
Sulawesi Tenggara	26,88	69,32	2,48	1,31	100,00	23,77	72,14	2,11	1,98	100,00	24,74	71,26	2,22	1,77	100,00
Gorontalo	23,53	71,76	2,11	2,60	100,00	19,43	76,26	2,06	2,25	100,00	21,02	74,51	2,08	2,39	100,00
Sulawesi Barat	26,03	71,22	2,02	0,73	100,00	24,61	71,04	2,33	2,02	100,00	24,87	71,07	2,27	1,79	100,00
Maluku	25,66	70,35	1,88	2,11	100,00	22,23	74,97	0,86	1,94	100,00	23,63	73,08	1,28	2,01	100,00
Maluku Utara	21,30	75,55	1,76	1,39	100,00	19,98	76,26	1,48	2,28	100,00	20,32	76,08	1,55	2,05	100,00
Papua Barat	23,53	72,71	2,02	1,75	100,00	18,55	77,35	1,55	2,56	100,00	20,43	75,59	1,73	2,25	100,00
Papua	21,02	74,82	2,06	2,10	100,00	18,83	76,47	0,97	3,74	100,00	19,40	76,03	1,26	3,31	100,00
Indonesia	23,04	73,33	1,78	1,85	100,00	19,77	76,35	1,65	2,23	100,00	21,52	74,73	1,72	2,03	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel E.6.1. Persentase Penduduk Perkotaan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Jumlah Jam Kerja, 2018

Provinsi	Perempuan					Laki-laki				
	0	1-34	35-40	>40	Total	0	1-34	35-40	>40	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	2,11	44,08	21,91	31,90	100,00	2,37	24,67	19,87	53,09	100,00
Sumatera Utara	1,63	32,82	14,65	50,91	100,00	1,45	17,53	12,92	68,10	100,00
Sumatera Barat	2,66	36,05	17,00	44,29	100,00	1,63	23,99	16,55	57,82	100,00
Riau	1,97	29,80	18,00	50,22	100,00	1,84	17,45	19,49	61,22	100,00
Jambi	1,79	35,32	23,29	39,60	100,00	1,51	18,91	17,20	62,38	100,00
Sumatera Selatan	1,18	31,38	18,76	48,68	100,00	1,53	15,47	14,60	68,40	100,00
Bengkulu	2,75	34,02	18,20	45,02	100,00	3,52	21,64	15,97	58,87	100,00
Lampung	1,39	31,52	19,28	47,81	100,00	1,08	19,67	18,27	60,99	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	2,64	33,17	20,50	43,70	100,00	3,32	19,52	16,09	61,07	100,00
Kepulauan Riau	1,31	24,71	17,55	56,43	100,00	1,56	10,27	21,35	66,82	100,00
DKI Jakarta	0,68	19,88	26,61	52,83	100,00	0,36	9,73	23,76	66,15	100,00
Jawa Barat	1,88	26,11	19,14	52,88	100,00	1,37	15,78	18,48	64,37	100,00
Jawa Tengah	2,48	30,21	17,23	50,07	100,00	2,64	21,25	15,82	60,29	100,00
DI Yogyakarta	2,36	35,24	18,20	44,20	100,00	1,51	26,48	17,45	54,56	100,00
Jawa Timur	1,70	34,58	14,74	48,98	100,00	1,58	22,29	14,85	61,27	100,00
Banten	1,55	22,43	23,42	52,60	100,00	1,36	10,36	22,66	65,62	100,00
Bali	2,35	28,73	16,31	52,61	100,00	1,12	19,42	17,30	62,16	100,00
Nusa Tenggara Barat	9,44	46,19	12,20	32,17	100,00	9,12	36,57	13,48	40,83	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,67	39,67	19,47	39,18	100,00	2,55	25,91	18,12	53,42	100,00
Kalimantan Barat	2,01	34,50	18,59	44,91	100,00	2,13	20,59	17,13	60,16	100,00
Kalimantan Tengah	2,20	35,43	17,80	44,57	100,00	1,67	20,67	19,99	57,66	100,00
Kalimantan Selatan	1,96	37,08	18,12	42,84	100,00	2,03	22,36	16,76	58,85	100,00
Kalimantan Timur	2,30	24,80	20,02	52,88	100,00	2,55	15,30	17,68	64,47	100,00
Kalimantan Utara	3,27	28,89	22,48	45,36	100,00	3,63	19,50	14,90	61,97	100,00
Sulawesi Utara	1,14	29,81	19,55	49,50	100,00	1,87	18,45	16,10	63,58	100,00
Sulawesi Tengah	3,53	34,45	24,27	37,75	100,00	3,38	27,25	17,66	51,71	100,00
Sulawesi Selatan	1,92	32,58	18,30	47,21	100,00	2,53	21,12	16,94	59,41	100,00
Sulawesi Tenggara	3,71	36,34	19,98	39,97	100,00	2,69	22,14	20,31	54,86	100,00
Gorontalo	2,63	31,56	21,34	44,46	100,00	1,65	18,99	13,92	65,44	100,00
Sulawesi Barat	2,76	41,74	17,06	38,43	100,00	4,17	30,34	18,20	47,29	100,00
Maluku	3,82	30,90	20,73	44,55	100,00	2,33	18,54	15,93	63,20	100,00
Maluku Utara	4,44	29,00	24,90	41,65	100,00	2,88	17,08	19,76	60,27	100,00
Papua Barat	4,01	30,18	17,10	48,71	100,00	3,86	12,28	20,70	63,17	100,00
Papua	2,71	27,62	23,77	45,90	100,00	2,06	15,29	18,95	63,70	100,00
Indonesia	2,03	30,07	18,46	49,44	100,00	1,76	18,19	17,65	62,39	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel E.6.2. Persentase Penduduk Perdesaan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Jumlah Jam Kerja, 2018

Provinsi	Perempuan					Laki-laki				
	0	1-34	35-40	>40	Total	0	1-34	35-40	>40	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	4,49	59,99	15,60	19,92	100,00	1,59	40,65	17,33	40,43	100,00
Sumatera Utara	2,17	58,43	15,23	24,17	100,00	1,35	46,35	16,25	36,05	100,00
Sumatera Barat	2,33	53,76	14,20	29,71	100,00	1,97	42,28	15,90	39,86	100,00
Riau	2,13	59,30	11,13	27,44	100,00	1,98	47,00	13,97	37,05	100,00
Jambi	2,04	58,68	16,09	23,19	100,00	1,15	43,69	17,58	37,58	100,00
Sumatera Selatan	1,54	60,04	14,19	24,23	100,00	1,93	47,22	16,72	34,12	100,00
Bengkulu	2,05	57,96	15,92	24,07	100,00	1,87	43,07	19,62	35,44	100,00
Lampung	1,63	59,28	12,16	26,94	100,00	2,19	44,58	14,29	38,94	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	1,54	51,88	14,62	31,96	100,00	1,73	29,64	18,26	50,37	100,00
Kepulauan Riau	2,69	52,82	15,23	29,25	100,00	2,07	35,85	16,67	45,41	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	2,79	45,62	13,36	38,23	100,00	2,51	28,70	14,63	54,16	100,00
Jawa Tengah	2,20	48,70	13,28	35,83	100,00	2,80	30,35	13,76	53,08	100,00
DI Yogyakarta	2,31	53,69	13,35	30,66	100,00	1,96	33,44	14,71	49,90	100,00
Jawa Timur	1,53	57,70	10,65	30,12	100,00	1,42	36,85	13,71	48,02	100,00
Banten	1,70	49,01	16,18	33,11	100,00	1,42	27,49	16,85	54,24	100,00
Bali	1,08	47,36	12,99	38,57	100,00	2,18	37,78	14,07	45,96	100,00
Nusa Tenggara Barat	5,87	54,91	10,17	29,04	100,00	6,38	43,30	11,24	39,09	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,64	72,07	11,39	14,90	100,00	2,29	53,73	15,52	28,46	100,00
Kalimantan Barat	1,88	63,59	12,25	22,28	100,00	1,65	46,94	16,24	35,17	100,00
Kalimantan Tengah	2,22	53,59	14,07	30,11	100,00	2,64	32,82	16,02	48,52	100,00
Kalimantan Selatan	2,69	58,79	13,51	25,00	100,00	2,50	39,63	14,70	43,16	100,00
Kalimantan Timur	1,62	52,41	17,45	28,52	100,00	3,00	27,10	16,63	53,27	100,00
Kalimantan Utara	1,32	58,77	14,81	25,10	100,00	1,72	46,60	14,74	36,93	100,00
Sulawesi Utara	2,13	48,81	16,31	32,75	100,00	1,81	35,38	16,53	46,28	100,00
Sulawesi Tengah	3,06	61,49	12,29	23,16	100,00	2,27	43,19	16,21	38,34	100,00
Sulawesi Selatan	2,26	59,30	11,31	27,14	100,00	2,67	47,24	12,67	37,42	100,00
Sulawesi Tenggara	3,57	59,31	12,33	24,79	100,00	3,04	42,59	14,44	39,94	100,00
Gorontalo	1,54	51,31	17,68	29,46	100,00	2,43	31,45	15,80	50,32	100,00
Sulawesi Barat	2,96	67,11	9,45	20,48	100,00	2,80	53,40	15,34	28,45	100,00
Maluku	2,91	53,42	13,48	30,18	100,00	4,02	34,05	17,42	44,52	100,00
Maluku Utara	2,62	51,91	16,36	29,12	100,00	3,34	30,36	15,71	50,58	100,00
Papua Barat	3,94	54,94	16,92	24,19	100,00	3,35	32,49	21,59	42,58	100,00
Papua	0,56	57,83	26,71	14,90	100,00	1,34	49,05	27,91	21,71	100,00
Indonesia	2,15	55,78	13,28	28,79	100,00	2,18	38,64	15,18	44,01	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel E.6.3. Persentase Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Jumlah Jam Kerja, 2018

Provinsi	Perempuan					Laki-laki				
	0	1-34	35-40	>40	Total	0	1-34	35-40	>40	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	3,75	55,02	17,57	23,66	100,00	1,83	35,76	18,11	44,31	100,00
Sumatera Utara	1,90	45,44	14,94	37,73	100,00	1,40	31,11	14,49	53,00	100,00
Sumatera Barat	2,48	45,53	15,50	36,48	100,00	1,82	33,94	16,20	48,05	100,00
Riau	2,06	46,54	14,10	37,29	100,00	1,93	36,09	16,01	45,97	100,00
Jambi	1,95	50,57	18,59	28,89	100,00	1,26	36,24	17,47	45,03	100,00
Sumatera Selatan	1,42	50,10	15,78	32,71	100,00	1,80	36,63	16,01	45,55	100,00
Bengkulu	2,28	50,24	16,66	30,82	100,00	2,36	36,71	18,53	42,40	100,00
Lampung	1,55	50,65	14,37	33,42	100,00	1,89	37,76	15,37	44,97	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	2,12	42,00	17,72	38,16	100,00	2,55	24,40	17,13	55,92	100,00
Kepulauan Riau	1,47	27,94	17,28	53,31	100,00	1,62	13,44	20,77	64,17	100,00
DKI Jakarta	0,68	19,88	26,61	52,83	100,00	0,36	9,73	23,76	66,15	100,00
Jawa Barat	2,09	30,66	17,79	49,46	100,00	1,66	19,05	17,51	61,78	100,00
Jawa Tengah	2,34	39,46	15,26	42,94	100,00	2,73	25,97	14,75	56,56	100,00
DI Yogyakarta	2,34	41,03	16,68	39,95	100,00	1,63	28,45	16,67	53,24	100,00
Jawa Timur	1,62	45,96	12,73	39,69	100,00	1,51	29,39	14,30	54,81	100,00
Banten	1,59	29,71	21,44	47,27	100,00	1,37	15,20	21,02	62,41	100,00
Bali	1,89	35,42	15,12	47,57	100,00	1,47	25,44	16,24	56,85	100,00
Nusa Tenggara Barat	7,58	50,74	11,14	30,54	100,00	7,66	40,15	12,29	39,90	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,64	65,84	12,95	19,57	100,00	2,34	47,91	16,07	33,68	100,00
Kalimantan Barat	1,92	54,69	14,19	29,20	100,00	1,80	38,69	16,52	42,99	100,00
Kalimantan Tengah	2,21	46,06	15,62	36,11	100,00	2,28	28,27	17,51	51,94	100,00
Kalimantan Selatan	2,37	49,24	15,54	32,85	100,00	2,30	32,13	15,59	49,98	100,00
Kalimantan Timur	2,09	33,49	19,21	45,21	100,00	2,71	19,58	17,30	60,41	100,00
Kalimantan Utara	2,59	39,27	19,82	38,32	100,00	2,81	31,15	14,83	51,20	100,00
Sulawesi Utara	1,56	37,92	18,16	42,35	100,00	1,84	27,19	16,32	54,64	100,00
Sulawesi Tengah	3,21	53,12	16,00	27,68	100,00	2,57	38,82	16,61	42,00	100,00
Sulawesi Selatan	2,12	48,23	14,20	35,45	100,00	2,61	36,80	14,38	46,21	100,00
Sulawesi Tenggara	3,62	51,73	14,86	29,80	100,00	2,93	36,21	16,27	44,59	100,00
Gorontalo	1,99	43,16	19,19	35,66	100,00	2,13	26,61	15,07	56,19	100,00
Sulawesi Barat	2,92	61,79	11,04	24,25	100,00	3,05	49,20	15,86	31,89	100,00
Maluku	3,30	43,74	16,60	36,36	100,00	3,33	27,71	16,81	52,15	100,00
Maluku Utara	3,12	45,52	18,74	32,61	100,00	3,22	26,97	16,75	53,06	100,00
Papua Barat	3,97	45,35	16,99	33,69	100,00	3,54	24,84	21,25	50,37	100,00
Papua	0,96	52,24	26,16	20,64	100,00	1,53	40,18	25,55	32,74	100,00
Indonesia	2,08	42,06	16,05	39,81	100,00	1,96	27,70	16,50	53,84	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel E.7. Persentase Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Jumlah Jam Kerja, 2018

Provinsi	Perempuan					Laki-laki				
	0	1-34	35-40	>40	Total	0	1-34	35-40	>40	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Perkotaan										
15 - 19	0,78	32,81	9,62	56,78	100,00	1,22	36,21	9,30	53,26	100,00
20 - 24	0,96	19,08	18,11	61,85	100,00	1,34	15,60	15,33	67,73	100,00
25 - 29	1,79	23,59	23,35	51,27	100,00	1,01	12,58	18,52	67,88	100,00
30 - 34	2,44	27,54	20,87	49,15	100,00	1,27	13,11	18,08	67,54	100,00
35 - 39	1,85	29,83	19,96	48,36	100,00	1,36	13,47	18,15	67,02	100,00
40 - 44	1,98	30,60	18,44	48,99	100,00	1,50	14,76	18,73	65,01	100,00
45 - 49	1,65	31,30	18,11	48,94	100,00	1,83	15,92	18,49	63,76	100,00
50 - 54	2,41	33,33	18,07	46,18	100,00	2,33	19,53	20,26	57,88	100,00
55 - 59	2,89	39,12	16,69	41,30	100,00	2,85	24,81	19,41	52,93	100,00
60 +	3,63	44,54	11,89	39,94	100,00	3,73	39,84	13,46	42,97	100,00
Total	2,03	30,07	18,46	49,44	100,00	1,76	18,19	17,65	62,39	100,00
Perdesaan										
15 - 19	0,65	63,20	8,85	27,30	100,00	0,99	59,79	10,01	29,20	100,00
20 - 24	1,72	46,57	13,95	37,76	100,00	1,32	36,10	13,05	49,53	100,00
25 - 29	2,32	50,52	14,30	32,86	100,00	1,82	33,09	15,20	49,88	100,00
30 - 34	1,80	52,80	14,42	30,99	100,00	1,71	32,60	15,72	49,96	100,00
35 - 39	1,74	53,74	13,83	30,69	100,00	1,89	32,80	16,06	49,26	100,00
40 - 44	1,86	53,69	14,12	30,33	100,00	2,10	32,94	16,14	48,82	100,00
45 - 49	2,15	54,67	14,22	28,97	100,00	1,99	34,64	16,54	46,83	100,00
50 - 54	2,38	57,60	12,87	27,14	100,00	2,55	38,99	16,21	42,26	100,00
55 - 59	2,42	61,89	12,80	22,89	100,00	2,85	43,98	16,99	36,18	100,00
60 +	3,40	66,91	10,52	19,16	100,00	3,97	54,98	13,49	27,57	100,00
Total	2,15	55,78	13,28	28,79	100,00	2,18	38,64	15,18	44,01	100,00
Perkotaan+Perdesaan										
15 - 19	0,72	46,63	9,27	43,38	100,00	1,09	50,15	9,72	39,04	100,00
20 - 24	1,26	29,88	16,48	52,38	100,00	1,33	25,25	14,26	59,17	100,00
25 - 29	2,01	34,81	19,58	43,60	100,00	1,37	21,55	17,07	60,01	100,00
30 - 34	2,15	38,75	18,01	41,09	100,00	1,46	21,58	17,06	59,90	100,00
35 - 39	1,80	40,78	17,15	40,26	100,00	1,59	21,93	17,23	59,25	100,00
40 - 44	1,92	41,35	16,42	40,30	100,00	1,77	22,86	17,58	57,79	100,00
45 - 49	1,89	42,42	16,26	39,44	100,00	1,90	24,38	17,61	56,11	100,00
50 - 54	2,40	45,32	15,50	36,78	100,00	2,43	28,48	18,39	50,70	100,00
55 - 59	2,65	50,88	14,68	31,79	100,00	2,85	34,14	18,23	44,77	100,00
60 +	3,50	57,17	11,12	28,21	100,00	3,86	48,11	13,48	34,55	100,00
Total	2,08	42,06	16,05	39,81	100,00	1,96	27,70	16,50	53,84	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel E.8.1. Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2018

Provinsi	Status Pekerjaan Utama							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	18,94	12,29	2,20	34,83	3,73	1,66	26,35	100,00
Sumatera Utara	18,90	14,49	1,73	36,18	2,12	1,76	24,82	100,00
Sumatera Barat	20,38	17,39	2,01	29,58	5,41	2,23	23,00	100,00
Riau	22,89	10,33	2,57	38,55	2,39	0,89	22,38	100,00
Jambi	19,71	12,63	1,51	36,27	3,77	0,68	25,42	100,00
Sumatera Selatan	19,58	11,56	1,36	30,91	2,85	0,72	33,02	100,00
Bengkulu	15,93	12,75	1,81	25,79	4,97	0,72	38,01	100,00
Lampung	17,33	14,15	1,39	27,38	5,21	1,96	32,59	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	18,58	8,33	3,06	40,68	5,90	1,32	22,13	100,00
Kepulauan Riau	24,27	5,37	2,25	57,83	0,48	1,28	8,52	100,00
DKI Jakarta	17,56	5,65	2,50	65,12	0,00	1,73	7,44	100,00
Jawa Barat	22,27	13,02	1,80	46,33	4,70	2,77	9,11	100,00
Jawa Tengah	20,56	14,88	2,21	34,28	4,24	2,58	21,25	100,00
DI Yogyakarta	18,52	16,01	2,94	37,11	1,52	1,13	22,78	100,00
Jawa Timur	18,32	15,34	1,97	30,55	5,50	2,00	26,32	100,00
Banten	19,97	9,96	1,68	49,79	3,58	2,15	12,87	100,00
Bali	16,71	16,26	2,71	40,03	2,96	2,50	18,82	100,00
Nusa Tenggara Barat	23,79	15,91	1,40	22,03	9,45	5,28	22,15	100,00
Nusa Tenggara Timur	18,12	19,73	0,42	19,26	1,65	0,60	40,23	100,00
Kalimantan Barat	20,71	12,88	1,30	29,65	0,86	0,71	33,89	100,00
Kalimantan Tengah	22,80	11,53	1,13	37,35	1,04	0,23	25,94	100,00
Kalimantan Selatan	24,29	12,04	1,98	30,04	2,32	1,36	27,95	100,00
Kalimantan Timur	21,77	10,14	2,14	47,85	0,49	1,33	16,28	100,00
Kalimantan Utara	19,17	8,83	1,47	48,74	2,88	0,99	17,92	100,00
Sulawesi Utara	26,20	9,32	1,73	43,67	2,47	1,87	14,74	100,00
Sulawesi Tengah	16,56	15,19	1,58	31,95	3,01	0,95	30,75	100,00
Sulawesi Selatan	19,32	14,93	1,55	32,68	4,30	0,82	26,40	100,00
Sulawesi Tenggara	17,88	17,03	1,61	30,35	1,05	1,12	30,97	100,00
Gorontalo	22,80	12,30	1,02	40,87	4,07	1,50	17,43	100,00
Sulawesi Barat	18,84	16,27	1,00	22,26	2,03	1,40	38,20	100,00
Maluku	24,78	12,90	1,01	33,34	0,33	1,11	26,53	100,00
Maluku Utara	18,19	13,66	1,19	31,59	1,25	0,22	33,89	100,00
Papua Barat	21,75	13,55	1,20	33,00	0,00	0,15	30,36	100,00
Papua	9,97	14,50	0,39	13,51	0,22	0,12	61,29	100,00
Indonesia	19,79	13,72	1,86	36,34	3,77	1,94	22,57	100,00

Keterangan:

1 = Berusaha sendiri

2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar

3 = Berusaha dibantu buruh tetap

4 = Buruh/Karyawan/Pegawai

5 = Pekerja bebas di pertanian

6 = Pekerja bebas di nonpertanian

7 = Pekerja keluarga

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel E.8.2. Persentase Penduduk Laki-laki Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2018

Provinsi	Status Pekerjaan Utama							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	21,81	17,67	5,47	37,58	4,59	6,96	5,92	100,00
Sumatera Utara	18,72	16,09	4,34	42,86	4,22	5,58	8,19	100,00
Sumatera Barat	20,04	19,94	5,42	32,73	7,50	7,95	6,42	100,00
Riau	21,87	11,69	6,48	40,92	9,10	4,82	5,12	100,00
Jambi	22,02	16,57	6,43	41,39	4,42	3,88	5,29	100,00
Sumatera Selatan	21,30	21,46	4,02	38,79	3,75	3,29	7,41	100,00
Bengkulu	19,29	27,11	4,61	29,93	5,67	6,03	7,36	100,00
Lampung	18,47	22,39	3,48	25,97	8,66	11,99	9,04	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	22,75	12,52	8,80	44,80	3,33	4,30	3,51	100,00
Kepulauan Riau	18,50	3,91	3,98	67,07	0,59	3,82	2,12	100,00
DKI Jakarta	21,02	4,05	5,18	65,99	0,08	1,96	1,71	100,00
Jawa Barat	19,60	10,82	4,17	49,42	4,40	9,22	2,37	100,00
Jawa Tengah	17,16	18,78	4,56	36,37	4,28	13,21	5,65	100,00
DI Yogyakarta	14,04	19,84	5,30	44,78	1,26	10,05	4,73	100,00
Jawa Timur	14,94	20,56	4,47	37,47	6,67	9,53	6,36	100,00
Banten	18,20	8,42	3,97	55,88	3,72	7,52	2,29	100,00
Bali	11,74	16,37	5,86	51,01	3,05	6,19	5,77	100,00
Nusa Tenggara Barat	17,94	25,56	3,61	28,28	6,25	11,31	7,06	100,00
Nusa Tenggara Timur	16,89	34,44	3,18	24,09	1,93	3,59	15,88	100,00
Kalimantan Barat	18,57	20,74	3,97	42,39	3,20	4,08	7,04	100,00
Kalimantan Tengah	20,15	14,60	4,81	49,19	2,43	3,10	5,71	100,00
Kalimantan Selatan	22,92	18,26	4,45	41,90	2,66	3,99	5,82	100,00
Kalimantan Timur	18,55	8,67	4,71	60,01	1,59	3,11	3,37	100,00
Kalimantan Utara	20,02	8,35	5,07	56,70	2,12	2,78	4,97	100,00
Sulawesi Utara	26,64	9,34	3,83	40,46	6,18	9,23	4,34	100,00
Sulawesi Tengah	21,36	24,60	5,09	28,16	5,15	6,71	8,94	100,00
Sulawesi Selatan	21,53	22,68	4,83	33,92	2,44	5,45	9,15	100,00
Sulawesi Tenggara	19,45	22,49	5,47	34,89	1,59	4,87	11,24	100,00
Gorontalo	27,43	16,91	3,59	33,22	5,30	8,07	5,47	100,00
Sulawesi Barat	20,97	29,17	1,41	25,57	4,26	5,71	12,90	100,00
Maluku	29,34	18,23	2,89	33,94	2,12	4,87	8,62	100,00
Maluku Utara	26,69	22,68	3,60	29,91	2,69	3,54	10,89	100,00
Papua Barat	20,69	18,40	3,71	49,36	0,19	2,12	5,53	100,00
Papua	14,45	44,05	1,81	26,68	0,32	0,95	11,73	100,00
Indonesia	18,58	17,05	4,47	41,82	4,47	7,95	5,67	100,00

Keterangan:

1 = Berusaha sendiri

2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar

3 = Berusaha dibantu buruh tetap

4 = Buruh/Karyawan/Pegawai

5 = Pekerja bebas di pertanian

6 = Pekerja bebas di nonpertanian

7 = Pekerja keluarga

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel E.8.3. Persentase Penduduk Perkotaan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2018

Provinsi	Status Pekerjaan Utama							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	19,55	9,49	5,29	50,66	1,44	5,27	8,30	100,00
Sumatera Utara	20,41	8,99	4,12	52,71	1,14	4,57	8,06	100,00
Sumatera Barat	19,81	13,51	4,96	43,13	3,39	5,46	9,73	100,00
Riau	17,86	8,23	5,32	54,56	1,39	4,69	7,95	100,00
Jambi	18,81	9,79	5,59	50,43	1,80	4,63	8,94	100,00
Sumatera Selatan	21,17	8,79	4,18	55,49	0,67	2,89	6,80	100,00
Bengkulu	19,43	13,68	5,13	46,68	1,94	3,22	9,93	100,00
Lampung	20,08	10,59	4,17	45,52	1,68	9,34	8,62	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	20,21	7,33	7,37	55,08	1,11	3,02	5,87	100,00
Kepulauan Riau	18,31	3,97	3,53	67,09	0,24	2,87	3,99	100,00
DKI Jakarta	19,69	4,66	4,16	65,66	0,05	1,87	3,91	100,00
Jawa Barat	19,97	9,15	3,59	55,03	2,23	6,14	3,89	100,00
Jawa Tengah	19,89	12,11	4,23	46,11	2,13	7,41	8,12	100,00
DI Yogyakarta	15,97	14,74	4,76	47,47	0,92	5,90	10,24	100,00
Jawa Timur	17,65	13,27	3,96	46,74	3,67	5,75	8,97	100,00
Banten	19,15	5,70	3,37	62,32	0,95	4,37	4,13	100,00
Bali	14,73	11,99	5,42	54,09	1,17	4,03	8,57	100,00
Nusa Tenggara Barat	23,53	16,12	3,14	35,19	4,99	7,74	9,27	100,00
Nusa Tenggara Timur	20,74	11,82	3,90	49,98	0,65	2,19	10,73	100,00
Kalimantan Barat	19,14	7,51	4,55	58,02	0,78	2,72	7,29	100,00
Kalimantan Tengah	19,23	10,10	4,64	53,90	0,38	1,62	10,13	100,00
Kalimantan Selatan	24,26	8,72	5,43	50,11	0,83	3,21	7,45	100,00
Kalimantan Timur	18,72	6,74	4,20	61,64	0,52	3,22	4,96	100,00
Kalimantan Utara	16,57	6,30	4,75	62,89	0,27	2,27	6,95	100,00
Sulawesi Utara	24,21	6,35	3,20	52,34	2,30	5,52	6,08	100,00
Sulawesi Tengah	19,80	12,12	4,37	49,14	1,02	3,18	10,37	100,00
Sulawesi Selatan	20,22	9,75	4,99	51,66	1,42	3,75	8,21	100,00
Sulawesi Tenggara	18,08	11,61	5,72	51,09	0,21	2,65	10,65	100,00
Gorontalo	26,35	7,52	4,00	49,33	1,20	5,72	5,89	100,00
Sulawesi Barat	24,47	13,70	2,77	42,32	1,35	4,26	11,13	100,00
Maluku	26,19	9,75	2,54	48,71	0,88	3,07	8,85	100,00
Maluku Utara	23,50	8,37	3,34	52,55	0,44	3,88	7,92	100,00
Papua Barat	21,29	8,62	4,10	57,09	0,19	2,14	6,56	100,00
Papua	22,56	10,73	3,38	54,64	0,19	1,57	6,92	100,00
Indonesia	19,47	9,97	4,08	52,62	1,90	5,22	6,72	100,00

Keterangan:

1 = Berusaha sendiri

2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar

3 = Berusaha dibantu buruh tetap

4 = Buruh/Karyawan/Pegawai

5 = Pekerja bebas di pertanian

6 = Pekerja bebas di nonpertanian

7 = Pekerja keluarga

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel E.8.4. Persentase Penduduk Perdesaan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2018

Provinsi	Status Pekerjaan Utama							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	21,25	18,37	3,77	30,23	5,52	4,81	16,05	100,00
Sumatera Utara	17,06	22,36	2,28	26,34	5,70	3,32	22,95	100,00
Sumatera Barat	20,49	23,48	3,23	21,53	9,42	5,76	16,09	100,00
Riau	25,00	13,16	5,08	30,88	10,35	2,75	12,78	100,00
Jambi	22,27	17,60	4,17	34,42	5,29	1,81	14,44	100,00
Sumatera Selatan	20,36	22,18	2,39	25,65	4,80	1,99	22,61	100,00
Bengkulu	17,34	24,97	2,80	20,18	6,93	4,29	23,49	100,00
Lampung	17,25	22,99	2,15	18,82	9,73	8,01	21,05	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	22,45	15,09	6,13	30,54	7,64	3,50	14,65	100,00
Kepulauan Riau	37,02	7,81	2,16	39,55	2,85	3,17	7,44	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	22,03	18,87	2,78	28,16	11,44	9,95	6,79	100,00
Jawa Tengah	17,34	21,96	2,94	25,31	6,31	10,00	16,15	100,00
DI Yogyakarta	16,23	26,14	3,03	26,82	2,45	6,42	18,92	100,00
Jawa Timur	14,94	23,81	2,91	22,01	8,82	7,17	20,34	100,00
Banten	17,97	17,34	2,65	31,65	10,69	8,91	10,78	100,00
Bali	12,68	24,64	2,47	30,32	6,55	5,39	17,95	100,00
Nusa Tenggara Barat	17,75	26,06	2,21	16,95	10,01	9,54	17,49	100,00
Nusa Tenggara Timur	16,59	32,12	1,49	14,90	2,10	2,31	30,50	100,00
Kalimantan Barat	19,49	22,37	2,24	28,35	3,00	2,84	21,70	100,00
Kalimantan Tengah	22,24	15,72	2,83	39,48	2,94	2,41	14,38	100,00
Kalimantan Selatan	22,85	21,32	1,97	27,25	3,85	2,76	20,00	100,00
Kalimantan Timur	21,26	13,68	3,26	45,49	2,56	1,23	12,51	100,00
Kalimantan Utara	24,43	11,81	2,49	40,73	5,52	2,01	13,02	100,00
Sulawesi Utara	28,90	12,49	3,00	30,16	7,65	7,92	9,88	100,00
Sulawesi Tengah	19,44	24,64	3,52	21,71	5,68	5,08	19,93	100,00
Sulawesi Selatan	20,98	26,43	2,58	21,01	4,35	3,58	21,07	100,00
Sulawesi Tenggara	19,17	24,39	3,09	24,63	1,92	3,71	23,09	100,00
Gorontalo	25,24	20,22	1,71	27,40	7,23	5,50	12,70	100,00
Sulawesi Barat	19,10	26,62	0,89	19,95	3,88	3,97	25,60	100,00
Maluku	28,57	20,76	1,89	22,98	1,82	3,66	20,32	100,00
Maluku Utara	23,59	23,30	2,49	22,63	2,78	1,76	23,44	100,00
Papua Barat	20,94	21,57	1,98	34,91	0,07	0,94	19,59	100,00
Papua	9,59	37,90	0,57	11,14	0,30	0,31	40,19	100,00
Indonesia	18,57	22,41	2,74	24,87	6,83	6,08	18,49	100,00

Keterangan:

1 = Berusaha sendiri

2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar

3 = Berusaha dibantu buruh tetap

4 = Buruh/Karyawan/Pegawai

5 = Pekerja bebas di pertanian

6 = Pekerja bebas di nonpertanian

7 = Pekerja keluarga

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel E.8.5. Persentase Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2018

Provinsi	Status Pekerjaan Utama							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	20,72	15,63	4,23	36,54	4,26	4,95	13,66	100,00
Sumatera Utara	18,80	15,41	3,24	40,04	3,33	3,97	15,21	100,00
Sumatera Barat	20,18	18,90	4,03	31,45	6,65	5,62	13,17	100,00
Riau	22,21	11,23	5,17	40,13	6,85	3,51	10,90	100,00
Jambi	21,17	15,12	4,62	39,51	4,18	2,70	12,70	100,00
Sumatera Selatan	20,64	17,65	3,00	35,76	3,40	2,30	17,26	100,00
Bengkulu	17,98	21,50	3,52	28,31	5,40	3,96	19,33	100,00
Lampung	18,06	19,43	2,73	26,48	7,42	8,39	17,48	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	21,28	11,04	6,78	43,35	4,24	3,25	10,07	100,00
Kepulauan Riau	20,56	4,43	3,37	63,77	0,55	2,91	4,41	100,00
DKI Jakarta	19,69	4,66	4,16	65,66	0,05	1,87	3,91	100,00
Jawa Barat	20,48	11,55	3,39	48,39	4,50	7,08	4,60	100,00
Jawa Tengah	18,59	17,14	3,57	35,49	4,26	8,73	12,22	100,00
DI Yogyakarta	16,05	18,12	4,24	41,34	1,38	6,05	12,81	100,00
Jawa Timur	16,32	18,43	3,45	34,63	6,19	6,44	14,54	100,00
Banten	18,82	8,96	3,17	53,75	3,67	5,64	5,99	100,00
Bali	14,03	16,32	4,41	45,96	3,01	4,50	11,78	100,00
Nusa Tenggara Barat	20,48	21,37	2,65	25,56	7,64	8,69	13,61	100,00
Nusa Tenggara Timur	17,43	28,02	1,97	21,98	1,81	2,28	26,51	100,00
Kalimantan Barat	19,38	17,76	2,96	37,56	2,31	2,80	17,23	100,00
Kalimantan Tengah	21,07	13,54	3,53	45,08	1,95	2,10	12,73	100,00
Kalimantan Selatan	23,46	15,82	3,48	37,23	2,53	2,96	14,52	100,00
Kalimantan Timur	19,60	9,15	3,87	56,04	1,23	2,53	7,58	100,00
Kalimantan Utara	19,73	8,51	3,84	53,98	2,38	2,17	9,39	100,00
Sulawesi Utara	26,49	9,33	3,10	41,57	4,90	6,69	7,93	100,00
Sulawesi Tengah	19,54	21,04	3,76	29,59	4,34	4,53	17,18	100,00
Sulawesi Selatan	20,67	19,67	3,55	33,44	3,16	3,65	15,86	100,00
Sulawesi Tenggara	18,82	20,31	3,93	33,08	1,37	3,37	19,12	100,00
Gorontalo	25,68	15,17	2,62	36,11	4,83	5,59	9,99	100,00
Sulawesi Barat	20,14	24,12	1,25	24,27	3,39	4,02	22,80	100,00
Maluku	27,58	16,17	2,16	33,71	1,43	3,42	15,53	100,00
Maluku Utara	23,57	19,36	2,71	30,53	2,16	2,32	19,35	100,00
Papua Barat	21,08	16,63	2,79	43,37	0,12	1,40	14,61	100,00
Papua	12,57	31,65	1,22	21,15	0,28	0,60	32,53	100,00
Indonesia	19,05	15,76	3,46	39,70	4,20	5,62	12,20	100,00

Keterangan:

1 = Berusaha sendiri

2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar

3 = Berusaha dibantu buruh tetap

4 = Buruh/Karyawan/Pegawai

5 = Pekerja bebas di pertanian

6 = Pekerja bebas di nonpertanian

7 = Pekerja keluarga

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel E.9.1. Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Sektor Pekerjaan, 2018

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Formal	Informal	Total	Formal	Informal	Total	Formal	Informal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	55,00	45,00	100,00	28,87	71,13	100,00	37,03	62,97	100,00
Sumatera Utara	53,27	46,73	100,00	22,11	77,89	100,00	37,91	62,09	100,00
Sumatera Barat	43,22	56,78	100,00	21,50	78,50	100,00	31,59	68,41	100,00
Riau	54,69	45,31	100,00	30,78	69,22	100,00	41,12	58,88	100,00
Jambi	51,26	48,74	100,00	30,62	69,38	100,00	37,78	62,22	100,00
Sumatera Selatan	53,47	46,53	100,00	21,02	78,98	100,00	32,27	67,73	100,00
Bengkulu	46,63	53,37	100,00	18,56	81,44	100,00	27,61	72,39	100,00
Lampung	51,58	48,42	100,00	18,49	81,51	100,00	28,77	71,23	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	59,01	40,99	100,00	26,66	73,34	100,00	43,74	56,26	100,00
Kepulauan Riau	63,17	36,83	100,00	36,23	63,77	100,00	60,08	39,92	100,00
DKI Jakarta	67,63	32,37	100,00	-	-	-	67,63	32,37	100,00
Jawa Barat	55,05	44,95	100,00	25,42	74,58	100,00	48,13	51,87	100,00
Jawa Tengah	47,92	52,08	100,00	25,08	74,92	100,00	36,49	63,51	100,00
DI Yogyakarta	47,47	52,53	100,00	23,85	76,15	100,00	40,05	59,95	100,00
Jawa Timur	45,25	54,75	100,00	19,38	80,62	100,00	32,52	67,48	100,00
Banten	60,72	39,28	100,00	26,91	73,09	100,00	51,47	48,53	100,00
Bali	51,25	48,75	100,00	27,54	72,46	100,00	42,74	57,26	100,00
Nusa Tenggara Barat	33,72	66,28	100,00	13,99	86,01	100,00	23,43	76,57	100,00
Nusa Tenggara Timur	49,68	50,32	100,00	12,53	87,47	100,00	19,68	80,32	100,00
Kalimantan Barat	54,69	45,31	100,00	20,49	79,51	100,00	30,95	69,05	100,00
Kalimantan Tengah	48,85	51,15	100,00	31,12	68,88	100,00	38,47	61,53	100,00
Kalimantan Selatan	48,19	51,81	100,00	19,33	80,67	100,00	32,02	67,98	100,00
Kalimantan Timur	56,13	43,87	100,00	36,63	63,37	100,00	49,99	50,01	100,00
Kalimantan Utara	58,77	41,23	100,00	34,16	65,84	100,00	50,21	49,79	100,00
Sulawesi Utara	53,13	46,87	100,00	35,02	64,98	100,00	45,40	54,60	100,00
Sulawesi Tengah	53,38	46,62	100,00	24,64	75,36	100,00	33,53	66,47	100,00
Sulawesi Selatan	52,41	47,59	100,00	21,39	78,61	100,00	34,23	65,77	100,00
Sulawesi Tenggara	49,66	50,34	100,00	23,23	76,77	100,00	31,96	68,04	100,00
Gorontalo	58,90	41,10	100,00	29,95	70,05	100,00	41,90	58,10	100,00
Sulawesi Barat	40,77	59,23	100,00	18,60	81,40	100,00	23,26	76,74	100,00
Maluku	50,18	49,82	100,00	22,41	77,59	100,00	34,35	65,65	100,00
Maluku Utara	55,29	44,71	100,00	24,09	75,91	100,00	32,79	67,21	100,00
Papua Barat	48,76	51,24	100,00	24,97	75,03	100,00	34,19	65,81	100,00
Papua	49,88	50,12	100,00	5,73	94,27	100,00	13,90	86,10	100,00
Indonesia	52,19	47,81	100,00	22,20	77,80	100,00	38,20	61,80	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel E.9.2. Persentase Penduduk Laki-laki Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Sektor Pekerjaan, 2018

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Formal	Informal	Total	Formal	Informal	Total	Formal	Informal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	56,53	43,47	100,00	37,10	62,90	100,00	43,05	56,95	100,00
Sumatera Utara	59,33	40,67	100,00	33,60	66,40	100,00	47,20	52,80	100,00
Sumatera Barat	51,50	48,50	100,00	26,96	73,04	100,00	38,15	61,85	100,00
Riau	62,93	37,07	100,00	38,31	61,69	100,00	47,40	52,60	100,00
Jambi	59,22	40,78	100,00	42,92	57,08	100,00	47,82	52,18	100,00
Sumatera Selatan	63,71	36,29	100,00	32,35	67,65	100,00	42,81	57,19	100,00
Bengkulu	55,41	44,59	100,00	25,72	74,28	100,00	34,54	65,46	100,00
Lampung	48,49	51,51	100,00	22,28	77,72	100,00	29,45	70,55	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	64,35	35,65	100,00	42,00	58,00	100,00	53,59	46,41	100,00
Kepulauan Riau	74,80	25,20	100,00	44,53	55,47	100,00	71,06	28,94	100,00
DKI Jakarta	71,18	28,82	100,00	-	-	-	71,18	28,82	100,00
Jawa Barat	60,43	39,57	100,00	33,45	66,55	100,00	53,59	46,41	100,00
Jawa Tengah	52,17	47,83	100,00	30,47	69,53	100,00	40,93	59,07	100,00
DI Yogyakarta	55,93	44,07	100,00	35,24	64,76	100,00	50,08	49,92	100,00
Jawa Timur	54,44	45,56	100,00	28,79	71,21	100,00	41,94	58,06	100,00
Banten	68,39	31,61	100,00	38,15	61,85	100,00	59,85	40,15	100,00
Bali	66,22	33,78	100,00	37,71	62,29	100,00	56,87	43,13	100,00
Nusa Tenggara Barat	41,96	58,04	100,00	23,05	76,95	100,00	31,89	68,11	100,00
Nusa Tenggara Timur	56,88	43,12	100,00	19,44	80,56	100,00	27,27	72,73	100,00
Kalimantan Barat	67,29	32,71	100,00	36,84	63,16	100,00	46,36	53,64	100,00
Kalimantan Tengah	64,22	35,78	100,00	47,87	52,13	100,00	54,00	46,00	100,00
Kalimantan Selatan	60,36	39,64	100,00	35,58	64,42	100,00	46,35	53,65	100,00
Kalimantan Timur	70,91	29,09	100,00	53,85	46,15	100,00	64,72	35,28	100,00
Kalimantan Utara	72,91	27,09	100,00	47,01	52,99	100,00	61,77	38,23	100,00
Sulawesi Utara	57,05	42,95	100,00	32,34	67,66	100,00	44,28	55,72	100,00
Sulawesi Tengah	53,60	46,40	100,00	25,57	74,43	100,00	33,25	66,75	100,00
Sulawesi Selatan	59,45	40,55	100,00	24,95	75,05	100,00	38,75	61,25	100,00
Sulawesi Tenggara	61,84	38,16	100,00	30,62	69,38	100,00	40,36	59,64	100,00
Gorontalo	49,73	50,27	100,00	28,62	71,38	100,00	36,81	63,19	100,00
Sulawesi Barat	48,29	51,71	100,00	22,23	77,77	100,00	26,99	73,01	100,00
Maluku	51,97	48,03	100,00	26,36	73,64	100,00	36,83	63,17	100,00
Maluku Utara	56,28	43,72	100,00	25,71	74,29	100,00	33,51	66,49	100,00
Papua Barat	68,53	31,47	100,00	43,66	56,34	100,00	53,07	46,93	100,00
Papua	62,18	37,82	100,00	16,49	83,51	100,00	28,49	71,51	100,00
Indonesia	59,55	40,45	100,00	31,03	68,97	100,00	46,29	53,71	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel E.10. Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan selama Sebulan menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	2.166.206	2.836.454	1.591.066	2.173.845	1.859.893	2.442.457
Sumatera Utara	2.003.365	2.689.516	1.681.554	2.156.131	1.911.245	2.511.167
Sumatera Barat	2.623.778	2.873.380	2.057.693	2.512.110	2.412.959	2.740.224
Riau	2.442.491	3.151.385	1.695.888	2.313.508	2.131.631	2.737.275
Jambi	2.404.458	2.876.937	1.502.428	2.076.527	1.925.321	2.375.338
Sumatera Selatan	2.274.631	3.022.711	1.299.719	1.987.864	1.853.838	2.509.630
Bengkulu	2.399.053	3.040.275	1.746.249	2.450.141	2.103.664	2.735.184
Lampung	2.210.111	2.926.346	1.552.569	2.110.194	1.916.659	2.483.567
Kepulauan Bangka Belitung	2.438.764	3.256.138	1.576.815	2.530.604	2.195.825	2.991.994
Kepulauan Riau	3.417.044	4.876.445	1.958.907	2.632.626	3.313.528	4.704.876
DKI Jakarta	3.863.548	4.754.794	-	-	3.863.548	4.754.794
Jawa Barat	2.944.121	3.555.953	2.082.046	2.360.348	2.839.054	3.372.108
Jawa Tengah	1.945.511	2.540.490	1.496.428	2.197.348	1.791.221	2.410.735
DI Yogyakarta	1.880.054	2.418.376	1.413.077	1.968.188	1.794.791	2.328.701
Jawa Timur	2.179.900	2.872.895	1.494.127	2.137.217	1.981.964	2.634.797
Banten	3.738.766	4.349.293	2.412.766	2.525.297	3.554.940	4.026.690
Bali	2.612.439	3.386.434	1.901.916	2.503.919	2.445.032	3.192.996
Nusa Tenggara Barat	1.815.935	2.567.210	1.320.501	2.422.223	1.664.192	2.512.715
Nusa Tenggara Timur	2.348.674	2.685.303	1.542.244	1.730.809	1.933.420	2.153.314
Kalimantan Barat	2.389.487	2.833.585	1.570.387	2.311.838	2.007.271	2.549.838
Kalimantan Tengah	2.774.568	3.175.147	1.903.421	2.751.822	2.353.753	2.939.545
Kalimantan Selatan	2.373.755	3.129.149	1.704.093	2.752.138	2.142.430	2.962.022
Kalimantan Timur	3.104.916	4.345.041	2.504.321	3.605.302	2.963.561	4.123.380
Kalimantan Utara	2.827.946	3.303.089	2.612.264	3.250.772	2.776.079	3.285.766
Sulawesi Utara	3.136.228	3.311.127	2.443.503	2.688.819	2.905.581	3.084.924
Sulawesi Tengah	2.251.694	2.788.251	1.637.548	2.288.210	1.938.762	2.522.294
Sulawesi Selatan	2.868.978	3.413.190	1.557.672	2.309.431	2.384.165	2.998.139
Sulawesi Tenggara	2.887.661	3.234.364	1.495.840	2.461.034	2.206.651	2.834.546
Gorontalo	2.036.861	2.547.852	1.800.125	2.019.517	1.936.050	2.294.012
Sulawesi Barat	1.650.630	2.077.797	1.757.418	2.112.261	1.718.176	2.101.245
Maluku	2.557.885	2.975.200	2.055.814	2.084.960	2.368.059	2.610.635
Maluku Utara	2.713.100	3.213.819	1.796.149	2.592.245	2.226.941	2.868.660
Papua Barat	3.091.462	3.471.472	2.506.384	3.007.321	2.824.018	3.233.246
Papua	3.597.518	5.121.343	3.169.258	3.697.019	3.454.515	4.506.552
Indonesia	2.664.010	3.393.534	1.680.421	2.311.588	2.398.674	3.064.920

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel E.11. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu yang Lalu menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Sektor Pekerjaan, 2018

Provinsi	Perempuan			Laki-laki		
	Formal	Informal	Total	Formal	Informal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tamat SD ke bawah	25,75	74,25	100,00	16,72	83,28	100,00
SMP	41,68	58,32	100,00	30,64	69,36	100,00
SMA ke atas	67,33	32,67	100,00	64,88	35,12	100,00
Total	46,29	53,71	100,00	38,2	61,8	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel E.12. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu yang Lalu menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Sektor Pekerjaan, 2018

Provinsi	Perempuan			Laki-laki		
	Formal	Informal	Total	Formal	Informal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15 – 19	49,71	50,29	100,00	38,33	61,67	100,00
20 – 24	65,73	34,27	100,00	58,70	41,30	100,00
25 – 29	57,50	42,50	100,00	60,40	39,60	100,00
30 – 34	46,28	53,72	100,00	56,15	43,85	100,00
35 – 39	39,06	60,94	100,00	51,15	48,85	100,00
40 – 44	34,18	65,82	100,00	47,73	52,27	100,00
45 – 49	30,48	69,52	100,00	44,04	55,96	100,00
50 – 54	27,44	72,56	100,00	40,44	59,56	100,00
55 – 59	21,58	78,42	100,00	32,66	67,34	100,00
60 +	10,71	89,29	100,00	17,58	82,42	100,00
Total	38,20	61,80	100,00	46,29	53,71	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel E.13. Persentase Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai selama Sebulan menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2018

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Rasio Upah
	Perempuan	Laki-laki	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	889.766	1.457.000	61,07
Tidak/Belum Tamat SD	1.028.475	1.828.742	56,24
Sekolah Dasar	1.287.346	2.013.827	63,93
S L T P	1.592.421	2.199.481	72,40
SMTA Umum	2.091.215	3.004.302	69,61
SMTA Kejuruan	2.231.596	2.960.758	75,37
Diploma I/II/III/ Akademi	2.968.698	4.503.389	65,92
Universitas	3.756.310	5.391.212	69,67
Total	2.398.674	3.064.920	78,26

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel E.14. Persentase Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai selama Sebulan menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2018

Lapangan Pekerjaan Utama (1)	Jenis Kelamin		Rasio Upah (5)
	Perempuan (2)	Laki-laki (3)	
A - Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.327.426	2.029.270	65,41
B - Pertambangan dan Penggalian	3.862.237	4.676.807	82,58
C - Industri Pengolahan	2.196.332	2.991.517	73,42
D - Pengadaan Listrik dan Gas	4.424.397	3.493.327	126,65
E - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1.957.991	2.763.817	70,84
F - Konstruksi	3.473.879	2.694.199	128,94
G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	2.111.459	2.541.896	83,07
H - Transportasi dan Pergudangan	3.458.367	3.237.585	106,82
I - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.802.238	2.557.652	70,46
J - Informasi dan Komunikasi	3.666.214	4.223.458	86,81
K - Jasa Keuangan dan Asuransi	4.215.839	4.460.715	94,51
L - Real Estat	4.142.789	3.442.513	120,34
M,N - Jasa Perusahaan	3.626.887	3.488.046	103,98
O - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.459.434	4.020.050	86,05
P - Jasa Pendidikan	2.564.910	3.223.713	79,56
Q - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.186.527	3.690.203	86,35
R,S,T,U - Jasa Lainnya	1.293.809	2.239.354	57,78
Indonesia	2.398.674	3.064.920	78,26

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel E.15. Persentase Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai selama Sebulan menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin, 2018

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Rasio Upah
	Perempuan	Laki-laki	
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	2.249.317	2.307.684	97,47
Kawin	2.520.372	3.391.631	74,31
Cerai Hidup	2.252.832	2.490.975	90,44
Cerai Mati	1.946.021	2.389.277	81,45
Total	2.398.674	3.064.920	78,26

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2018

Tabel E.16. Jumlah Pekerja Migran Indonesia menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	2014		2015		2016		2017		2018	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(7)	(6)	(7)
Aceh	411	540	553	233	584	182	527	153	703	222
Sumatera Utara	12.202	2.580	10.405	1.649	12.063	2.074	15.436	1.673	14.964	2.939
Sumatera Barat	708	519	650	139	690	122	763	182	905	176
Riau	226	642	229	332	373	244	404	233	705	312
Jambi	410	425	329	199	231	143	165	96	208	131
Sumatera Selatan	1.328	630	971	439	1.252	328	1.738	368	1.621	265
Bengkulu	83	236	78	216	64	156	163	131	252	154
Lampung	12.657	5.843	11.255	4.854	11.266	4.783	11.785	3.586	13.810	5.033
Kepulauan Bangka Belitung	12	37	4	18	6	19	11	6	9	14
Kepulauan Riau	273	950	318	486	452	616	398	1.485	322	902
DKI Jakarta	1.051	6.510	457	755	419	392	580	321	557	289
Jawa Barat	77.888	27.591	50.344	12.720	40.891	10.156	42.224	8.620	47.775	9.455
Jawa Tengah	55.272	37.319	40.068	17.010	35.606	13.906	42.925	12.107	46.580	14.854
DI Yogyakarta	1.845	1.963	1.102	754	846	582	1.141	393	1.003	431
Jawa Timur	49.582	28.724	31.417	16.896	27.652	15.483	51.712	12.372	54.245	16.136
Banten	5.885	3.835	2.539	1.731	1.543	1.141	1.423	897	1.432	948
Bali	2.024	5.692	1.648	3.221	1.184	2.074	1.788	3.084	1.931	2.250
Nusa Tenggara Barat	13.014	48.125	9.643	42.100	6.588	33.827	6.842	28.152	6.877	25.680
Nusa Tenggara Timur	3.306	2.209	2.135	1.172	1.904	453	1.696	264	1.836	241
Kalimantan Barat	1.511	3.679	735	1.496	636	1.198	559	766	647	1.167
Kalimantan Tengah	30	39	10	14	6	9	28	11	32	16
Kalimantan Selatan	426	285	326	96	153	70	98	34	127	44
Kalimantan Timur	67	382	28	151	91	337	659	2.102	456	1.272
Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	3	6	148	413
Sulawesi Utara	257	819	226	203	155	30	379	83	441	70
Sulawesi Tengah	604	145	474	68	255	39	462	30	579	223
Sulawesi Selatan	2.112	5.385	673	1.675	337	567	398	728	406	691
Sulawesi Tenggara	223	348	87	93	91	35	173	124	268	92
Gorontalo	18	19	2	2	3	1	43	0	26	1
Sulawesi Barat	138	312	46	86	39	75	68	168	75	207
Maluku	52	260	11	67	7	7	44	60	33	9
Maluku Utara	2	119	1	84	1	7	1	7	5	10
Papua Barat	5	42	1	5	3	0	1	7	1	3
Papua	8	40	2	6	1	3	4	9	2	9
Indonesia	243.630	186.244	166.767	108.970	145.392	89.059	184.641	78.258	198.981	84.659

Sumber: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)



TABEL F -- PERUMAHAN

Tabel F.1.1. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Perempuan, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Luas Lantai per Meter Persegi per Kapita, 2018

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	<10m ² per Kapita	≥10m ² per Kapita	Total	<10m ² per Kapita	≥10m ² per Kapita	Total	<10m ² per Kapita	≥10m ² per Kapita	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	12,76	87,24	100,00	15,44	84,56	100,00	14,64	85,36	100,00
Sumatera Utara	11,10	88,90	100,00	13,75	86,25	100,00	12,32	87,68	100,00
Sumatera Barat	16,06	83,94	100,00	10,18	89,82	100,00	12,82	87,18	100,00
Riau	13,89	86,11	100,00	10,85	89,15	100,00	12,27	87,73	100,00
Jambi	13,25	86,75	100,00	9,30	90,70	100,00	10,70	89,30	100,00
Sumatera Selatan	16,72	83,28	100,00	16,72	83,28	100,00	16,72	83,28	100,00
Bengkulu	11,83	88,17	100,00	8,86	91,14	100,00	10,01	89,99	100,00
Lampung	10,96	89,04	100,00	2,94	97,06	100,00	5,61	94,39	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	8,73	91,27	100,00	3,34	96,66	100,00	6,65	93,35	100,00
Kepulauan Riau	21,21	78,79	100,00	8,32	91,68	100,00	19,31	80,69	100,00
DKI Jakarta	25,72	74,28	100,00	-	-	-	25,72	74,28	100,00
Jawa Barat	9,05	90,95	100,00	5,91	94,09	100,00	8,19	91,81	100,00
Jawa Tengah	6,91	93,09	100,00	2,63	97,37	100,00	4,97	95,03	100,00
DI Yogyakarta	16,49	83,51	100,00	1,77	98,23	100,00	13,42	86,58	100,00
Jawa Timur	10,48	89,52	100,00	4,34	95,66	100,00	7,56	92,44	100,00
Banten	7,75	92,25	100,00	10,04	89,96	100,00	8,48	91,52	100,00
Bali	17,18	82,82	100,00	5,00	95,00	100,00	13,78	86,22	100,00
Nusa Tenggara Barat	19,83	80,17	100,00	14,51	85,49	100,00	17,04	82,96	100,00
Nusa Tenggara Timur	26,15	73,85	100,00	22,34	77,66	100,00	23,29	76,71	100,00
Kalimantan Barat	12,76	87,24	100,00	12,05	87,95	100,00	12,34	87,66	100,00
Kalimantan Tengah	10,02	89,98	100,00	13,87	86,13	100,00	12,18	87,82	100,00
Kalimantan Selatan	13,59	86,41	100,00	7,42	92,58	100,00	10,31	89,69	100,00
Kalimantan Timur	15,65	84,35	100,00	15,38	84,62	100,00	15,57	84,43	100,00
Kalimantan Utara	22,21	77,79	100,00	12,83	87,17	100,00	19,28	80,72	100,00
Sulawesi Utara	15,65	84,35	100,00	15,35	84,65	100,00	15,54	84,46	100,00
Sulawesi Tengah	17,10	82,90	100,00	12,53	87,47	100,00	14,31	85,69	100,00
Sulawesi Selatan	15,68	84,32	100,00	7,93	92,07	100,00	11,11	88,89	100,00
Sulawesi Tenggara	25,60	74,40	100,00	12,89	87,11	100,00	17,99	82,01	100,00
Gorontalo	19,33	80,67	100,00	12,71	87,29	100,00	16,09	83,91	100,00
Sulawesi Barat	11,81	88,19	100,00	11,04	88,96	100,00	11,26	88,74	100,00
Maluku	30,80	69,20	100,00	22,02	77,98	100,00	26,66	73,34	100,00
Maluku Utara	22,18	77,82	100,00	15,48	84,52	100,00	18,26	81,74	100,00
Papua Barat	19,97	80,03	100,00	18,10	81,90	100,00	18,94	81,06	100,00
Papua	26,20	73,80	100,00	38,78	61,22	100,00	35,11	64,89	100,00
Indonesia	12,55	87,45	100,00	8,62	91,38	100,00	10,85	89,15	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel F.1.2. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Laki-laki, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Luas Lantai per Meter Persegi per Kapita, 2018

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	<10m ² per Kapita	≥10m ² per Kapita	Total	<10m ² per Kapita	≥10m ² per Kapita	Total	<10m ² per Kapita	≥10m ² per Kapita	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	20,79	79,21	100,00	28,87	71,13	100,00	26,32	73,68	100,00
Sumatera Utara	18,77	81,23	100,00	28,91	71,09	100,00	23,62	76,38	100,00
Sumatera Barat	20,04	79,96	100,00	22,27	77,73	100,00	21,29	78,71	100,00
Riau	18,64	81,36	100,00	19,89	80,11	100,00	19,40	80,60	100,00
Jambi	16,31	83,69	100,00	16,50	83,50	100,00	16,44	83,56	100,00
Sumatera Selatan	27,00	73,00	100,00	24,65	75,35	100,00	25,46	74,54	100,00
Bengkulu	19,25	80,75	100,00	21,15	78,85	100,00	20,56	79,44	100,00
Lampung	13,23	86,77	100,00	6,85	93,15	100,00	8,59	91,41	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	14,21	85,79	100,00	10,47	89,53	100,00	12,43	87,57	100,00
Kepulauan Riau	18,40	81,60	100,00	16,91	83,09	100,00	18,19	81,81	100,00
DKI Jakarta	40,06	59,94	100,00	-	-	-	40,06	59,94	100,00
Jawa Barat	21,49	78,51	100,00	17,74	82,26	100,00	20,46	79,54	100,00
Jawa Tengah	9,49	90,51	100,00	4,88	95,12	100,00	7,19	92,81	100,00
DI Yogyakarta	11,00	89,00	100,00	1,66	98,34	100,00	8,42	91,58	100,00
Jawa Timur	14,23	85,77	100,00	6,91	93,09	100,00	10,72	89,28	100,00
Banten	17,44	82,56	100,00	16,33	83,67	100,00	17,13	82,87	100,00
Bali	25,87	74,13	100,00	14,97	85,03	100,00	22,21	77,79	100,00
Nusa Tenggara Barat	28,94	71,06	100,00	26,84	73,16	100,00	27,80	72,20	100,00
Nusa Tenggara Timur	38,43	61,57	100,00	35,50	64,50	100,00	36,19	63,81	100,00
Kalimantan Barat	13,44	86,56	100,00	22,53	77,47	100,00	19,63	80,37	100,00
Kalimantan Tengah	21,26	78,74	100,00	22,03	77,97	100,00	21,75	78,25	100,00
Kalimantan Selatan	20,79	79,21	100,00	16,01	83,99	100,00	18,22	81,78	100,00
Kalimantan Timur	20,36	79,64	100,00	18,49	81,51	100,00	19,73	80,27	100,00
Kalimantan Utara	22,23	77,77	100,00	16,84	83,16	100,00	19,99	80,01	100,00
Sulawesi Utara	24,02	75,98	100,00	24,96	75,04	100,00	24,51	75,49	100,00
Sulawesi Tengah	21,05	78,95	100,00	25,06	74,94	100,00	23,98	76,02	100,00
Sulawesi Selatan	21,74	78,26	100,00	15,40	84,60	100,00	17,95	82,05	100,00
Sulawesi Tenggara	21,26	78,74	100,00	20,70	79,30	100,00	20,91	79,09	100,00
Gorontalo	23,71	76,29	100,00	33,65	66,35	100,00	29,93	70,07	100,00
Sulawesi Barat	21,90	78,10	100,00	24,72	75,28	100,00	24,09	75,91	100,00
Maluku	32,99	67,01	100,00	33,12	66,88	100,00	33,07	66,93	100,00
Maluku Utara	19,81	80,19	100,00	23,37	76,63	100,00	22,37	77,63	100,00
Papua Barat	30,01	69,99	100,00	29,25	70,75	100,00	29,55	70,45	100,00
Papua	36,11	63,89	100,00	61,12	38,88	100,00	54,78	45,22	100,00
Indonesia	19,89	80,11	100,00	16,88	83,12	100,00	18,52	81,48	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel F.2.1. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Perempuan, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Lantai Terluas, 2018

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Bukan Tanah	Tanah	Total	Bukan Tanah	Tanah	Total	Bukan Tanah	Tanah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	98,91	1,09	100,00	94,44	5,56	100,00	95,78	4,22	100,00
Sumatera Utara	99,29	0,71	100,00	97,92	2,08	100,00	98,66	1,34	100,00
Sumatera Barat	99,32	0,68	100,00	99,72	0,28	100,00	99,54	0,46	100,00
Riau	99,85	0,15	100,00	99,05	0,95	100,00	99,42	0,58	100,00
Jambi	98,39	1,61	100,00	97,03	2,97	100,00	97,51	2,49	100,00
Sumatera Selatan	99,42	0,58	100,00	93,66	6,34	100,00	96,28	3,72	100,00
Bengkulu	99,53	0,47	100,00	97,01	2,99	100,00	97,99	2,01	100,00
Lampung	97,95	2,05	100,00	91,99	8,01	100,00	93,97	6,03	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	99,30	0,70	100,00	100,00	0,00	100,00	99,57	0,43	100,00
Kepulauan Riau	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DKI Jakarta	99,81	0,19	100,00	-	-	-	99,81	0,19	100,00
Jawa Barat	97,78	2,22	100,00	95,34	4,66	100,00	97,11	2,89	100,00
Jawa Tengah	92,53	7,47	100,00	77,33	22,67	100,00	85,63	14,37	100,00
DI Yogyakarta	98,74	1,26	100,00	85,08	14,92	100,00	95,88	4,12	100,00
Jawa Timur	95,96	4,04	100,00	80,52	19,48	100,00	88,62	11,38	100,00
Banten	96,25	3,75	100,00	93,95	6,05	100,00	95,51	4,49	100,00
Bali	99,10	0,90	100,00	90,80	9,20	100,00	96,78	3,22	100,00
Nusa Tenggara Barat	98,16	1,84	100,00	95,82	4,18	100,00	96,94	3,06	100,00
Nusa Tenggara Timur	95,80	4,20	100,00	70,09	29,91	100,00	76,52	23,48	100,00
Kalimantan Barat	100,00	0,00	100,00	99,46	0,54	100,00	99,68	0,32	100,00
Kalimantan Tengah	100,00	0,00	100,00	99,03	0,97	100,00	99,46	0,54	100,00
Kalimantan Selatan	100,00	0,00	100,00	99,44	0,56	100,00	99,70	0,30	100,00
Kalimantan Timur	100,00	0,00	100,00	97,44	2,56	100,00	99,25	0,75	100,00
Kalimantan Utara	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Sulawesi Utara	96,84	3,16	100,00	95,61	4,39	100,00	96,36	3,64	100,00
Sulawesi Tengah	96,56	3,44	100,00	96,51	3,49	100,00	96,53	3,47	100,00
Sulawesi Selatan	98,10	1,90	100,00	99,19	0,81	100,00	98,74	1,26	100,00
Sulawesi Tenggara	98,34	1,66	100,00	98,25	1,75	100,00	98,28	1,72	100,00
Gorontalo	99,63	0,37	100,00	97,03	2,97	100,00	98,36	1,64	100,00
Sulawesi Barat	99,39	0,61	100,00	97,37	2,63	100,00	97,97	2,03	100,00
Maluku	98,65	1,35	100,00	91,76	8,24	100,00	95,40	4,60	100,00
Maluku Utara	99,22	0,78	100,00	92,31	7,69	100,00	95,18	4,82	100,00
Papua Barat	98,93	1,07	100,00	97,72	2,28	100,00	98,26	1,74	100,00
Papua	96,87	3,13	100,00	67,22	32,78	100,00	75,86	24,14	100,00
Indonesia	97,17	2,83	100,00	88,80	11,20	100,00	93,56	6,44	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel F.2.2. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Laki-laki, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Lantai Terluas, 2018

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Bukan Tanah	Tanah	Total	Bukan Tanah	Tanah	Total	Bukan Tanah	Tanah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	98,90	1,10	100,00	94,80	5,20	100,00	96,09	3,91	100,00
Sumatera Utara	99,19	0,81	100,00	96,34	3,66	100,00	97,83	2,17	100,00
Sumatera Barat	99,71	0,29	100,00	98,94	1,06	100,00	99,28	0,72	100,00
Riau	99,86	0,14	100,00	98,56	1,44	100,00	99,08	0,92	100,00
Jambi	98,89	1,11	100,00	98,01	1,99	100,00	98,28	1,72	100,00
Sumatera Selatan	99,64	0,36	100,00	94,84	5,16	100,00	96,50	3,50	100,00
Bengkulu	99,57	0,43	100,00	96,39	3,61	100,00	97,38	2,62	100,00
Lampung	98,18	1,82	100,00	92,89	7,11	100,00	94,33	5,67	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	99,87	0,13	100,00	99,84	0,16	100,00	99,86	0,14	100,00
Kepulauan Riau	99,63	0,37	100,00	99,78	0,22	100,00	99,65	0,35	100,00
DKI Jakarta	99,80	0,20	100,00	-	-	-	99,80	0,20	100,00
Jawa Barat	98,72	1,28	100,00	96,21	3,79	100,00	98,03	1,97	100,00
Jawa Tengah	94,59	5,41	100,00	82,36	17,64	100,00	88,46	11,54	100,00
DI Yogyakarta	99,01	0,99	100,00	92,56	7,44	100,00	97,22	2,78	100,00
Jawa Timur	96,97	3,03	100,00	85,81	14,19	100,00	91,61	8,39	100,00
Banten	98,50	1,50	100,00	93,93	6,07	100,00	97,22	2,78	100,00
Bali	99,20	0,80	100,00	97,07	2,93	100,00	98,49	1,51	100,00
Nusa Tenggara Barat	98,65	1,35	100,00	97,53	2,47	100,00	98,04	1,96	100,00
Nusa Tenggara Timur	95,74	4,26	100,00	74,63	25,37	100,00	79,56	20,44	100,00
Kalimantan Barat	100,00	0,00	100,00	99,67	0,33	100,00	99,78	0,22	100,00
Kalimantan Tengah	99,80	0,20	100,00	99,04	0,96	100,00	99,32	0,68	100,00
Kalimantan Selatan	99,78	0,22	100,00	99,37	0,63	100,00	99,56	0,44	100,00
Kalimantan Timur	99,75	0,25	100,00	98,78	1,22	100,00	99,42	0,58	100,00
Kalimantan Utara	99,74	0,26	100,00	100,00	0,00	100,00	99,85	0,15	100,00
Sulawesi Utara	97,80	2,20	100,00	95,63	4,37	100,00	96,68	3,32	100,00
Sulawesi Tengah	99,46	0,54	100,00	96,37	3,63	100,00	97,20	2,80	100,00
Sulawesi Selatan	98,88	1,12	100,00	98,98	1,02	100,00	98,94	1,06	100,00
Sulawesi Tenggara	98,34	1,66	100,00	97,03	2,97	100,00	97,52	2,48	100,00
Gorontalo	99,43	0,57	100,00	98,16	1,84	100,00	98,63	1,37	100,00
Sulawesi Barat	98,02	1,98	100,00	96,77	3,23	100,00	97,05	2,95	100,00
Maluku	98,34	1,66	100,00	93,10	6,90	100,00	95,27	4,73	100,00
Maluku Utara	98,62	1,38	100,00	91,68	8,32	100,00	93,63	6,37	100,00
Papua Barat	99,27	0,73	100,00	98,15	1,85	100,00	98,59	1,41	100,00
Papua	98,77	1,23	100,00	68,33	31,67	100,00	76,04	23,96	100,00
Indonesia	98,17	1,83	100,00	91,53	8,47	100,00	95,14	4,86	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel F.3.1. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Perempuan, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Atap Terluas, 2018

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan dan Perdesaan				
	Beton	Gen-teng	Jerami/ijuk/daun/rumbia	Lain-nya	Total	Beton	Gen-teng	Jerami/ijuk/daun/rumbia	Lain-nya	Total	Beton	Gen-teng	Jerami/ijuk/daun/rumbia	Lain-nya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	2,74	4,46	2,68	90,11	100,00	0,88	1,14	6,83	91,15	100,00	1,44	2,14	5,58	90,84	100,00
Sumatera Utara	2,68	2,50	0,30	94,53	100,00	0,67	0,36	3,26	95,71	100,00	1,76	1,51	1,66	95,07	100,00
Sumatera Barat	2,47	2,98	0,24	94,31	100,00	0,36	1,37	0,20	98,06	100,00	1,31	2,09	0,22	96,38	100,00
Riau	2,23	2,12	0,00	95,65	100,00	0,42	4,84	3,01	91,73	100,00	1,26	3,58	1,61	93,55	100,00
Jambi	2,09	15,46	0,19	82,26	100,00	1,20	24,28	0,18	74,34	100,00	1,51	21,16	0,18	77,14	100,00
Sumatera Selatan	3,25	47,64	0,06	49,05	100,00	1,53	65,40	1,18	31,88	100,00	2,31	57,35	0,67	39,67	100,00
Bengkulu	0,17	5,19	0,00	94,64	100,00	0,27	6,49	0,25	92,99	100,00	0,23	5,99	0,15	93,63	100,00
Lampung	1,61	82,86	0,00	15,54	100,00	0,82	88,67	0,24	10,26	100,00	1,08	86,74	0,16	12,02	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	0,47	14,11	0,00	85,43	100,00	0,43	15,19	0,00	84,38	100,00	0,45	14,53	0,00	85,02	100,00
Kepulauan Riau	3,28	6,21	0,30	90,20	100,00	0,00	2,21	1,51	96,28	100,00	2,80	5,62	0,48	91,10	100,00
DKI Jakarta	3,86	44,93	0,00	51,21	100,00	-	-	-	-	-	3,86	44,93	0,00	51,21	100,00
Jawa Barat	3,11	81,34	0,01	15,54	100,00	1,31	92,89	0,23	5,58	100,00	2,62	84,49	0,07	12,83	100,00
Jawa Tengah	1,85	88,49	0,00	9,66	100,00	1,23	88,21	0,10	10,46	100,00	1,57	88,36	0,05	10,02	100,00
DI Yogyakarta	1,17	92,66	0,00	6,18	100,00	0,00	96,01	0,00	3,99	100,00	0,92	93,36	0,00	5,72	100,00
Jawa Timur	2,36	89,58	0,00	8,06	100,00	1,44	95,94	0,04	2,58	100,00	1,92	92,61	0,02	5,45	100,00
Banten	2,29	74,30	0,68	22,73	100,00	0,43	86,20	3,79	9,58	100,00	1,69	78,12	1,67	18,51	100,00
Bali	3,60	80,66	0,00	15,74	100,00	1,51	69,84	0,00	28,66	100,00	3,02	77,64	0,00	19,34	100,00
Nusa Tenggara Barat	2,44	65,54	0,00	32,02	100,00	2,65	58,02	0,77	38,56	100,00	2,55	61,60	0,40	35,45	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,72	0,51	0,93	97,84	100,00	0,00	0,32	10,57	89,11	100,00	0,18	0,36	8,16	91,29	100,00
Kalimantan Barat	0,41	2,92	1,15	95,53	100,00	0,00	1,75	3,38	94,87	100,00	0,16	2,22	2,49	95,13	100,00
Kalimantan Tengah	4,13	17,21	1,44	77,22	100,00	0,14	5,70	3,44	90,73	100,00	1,89	10,76	2,56	84,79	100,00
Kalimantan Selatan	1,14	6,48	0,70	91,68	100,00	0,19	2,04	5,67	92,11	100,00	0,64	4,12	3,34	91,90	100,00
Kalimantan Timur	1,79	13,11	0,00	85,10	100,00	0,01	0,84	0,84	98,31	100,00	1,26	9,49	0,25	89,00	100,00
Kalimantan Utara	0,22	0,45	0,00	99,34	100,00	0,49	1,70	0,00	97,81	100,00	0,31	0,84	0,00	98,86	100,00
Sulawesi Utara	4,52	0,35	0,13	95,00	100,00	1,62	0,52	0,63	97,23	100,00	3,39	0,41	0,32	95,87	100,00
Sulawesi Tengah	0,41	0,68	2,69	96,21	100,00	1,25	1,67	8,68	88,40	100,00	0,92	1,28	6,34	91,45	100,00
Sulawesi Selatan	2,37	5,68	0,39	91,56	100,00	0,51	1,30	2,67	95,52	100,00	1,27	3,10	1,73	93,90	100,00
Sulawesi Tenggara	1,91	3,26	0,83	94,00	100,00	0,41	4,10	6,16	89,32	100,00	1,02	3,76	4,02	91,20	100,00
Gorontalo	0,41	1,87	0,13	97,58	100,00	0,00	0,80	1,97	97,23	100,00	0,21	1,34	1,03	97,41	100,00
Sulawesi Barat	0,00	2,12	1,83	96,05	100,00	0,52	0,48	7,46	91,54	100,00	0,36	0,97	5,80	92,87	100,00
Maluku	1,41	0,73	1,61	96,26	100,00	0,40	0,00	9,11	90,49	100,00	0,93	0,38	5,15	93,54	100,00
Maluku Utara	3,03	0,00	0,00	96,97	100,00	1,51	0,93	4,33	93,23	100,00	2,14	0,54	2,53	94,78	100,00
Papua Barat	1,28	1,37	0,00	97,35	100,00	0,00	0,83	1,33	97,84	100,00	0,58	1,07	0,73	97,62	100,00
Papua	3,22	3,42	0,78	92,58	100,00	0,08	0,20	35,78	63,94	100,00	0,99	1,14	25,58	72,29	100,00
Indonesia	2,51	61,66	0,18	35,65	100,00	1,02	55,61	2,23	41,14	100,00	1,87	59,04	1,07	38,02	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel F.3.2. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Laki-laki, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Atap Terluas, 2018

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan dan Perdesaan				
	Beton	Gen-teng	Jerami/ ijuk/ daun/ rumbia	Lain-nya	Total	Beton	Gen-teng	Jerami/ ijuk/ daun/ rumbia	Lain-nya	Total	Beton	Gen-teng	Jerami/ ijuk/ daun/ rumbia	Lain-nya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	4,48	5,42	1,52	88,57	100,00	1,66	1,18	4,23	92,92	100,00	2,55	2,52	3,38	91,55	100,00
Sumatera Utara	3,25	2,64	0,93	93,17	100,00	1,03	0,80	3,94	94,23	100,00	2,19	1,76	2,37	93,68	100,00
Sumatera Barat	1,52	3,23	0,15	95,10	100,00	1,01	1,85	0,79	96,35	100,00	1,23	2,46	0,51	95,80	100,00
Riau	3,75	3,94	0,03	92,27	100,00	0,79	3,13	1,69	94,39	100,00	1,96	3,45	1,04	93,55	100,00
Jambi	3,65	17,71	0,33	78,31	100,00	1,92	25,62	0,58	71,88	100,00	2,45	23,19	0,50	73,85	100,00
Sumatera Selatan	3,00	47,21	0,31	49,47	100,00	1,32	62,64	1,75	34,29	100,00	1,90	57,31	1,26	39,54	100,00
Bengkulu	0,95	3,39	0,00	95,66	100,00	0,87	6,59	0,13	92,41	100,00	0,89	5,59	0,09	93,42	100,00
Lampung	0,60	82,22	0,00	17,19	100,00	0,85	86,20	0,13	12,81	100,00	0,78	85,12	0,09	14,00	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	1,76	13,40	0,35	84,49	100,00	0,65	6,07	0,40	92,89	100,00	1,23	9,92	0,37	88,48	100,00
Kepulauan Riau	3,79	6,53	0,16	89,52	100,00	1,06	0,50	3,47	94,97	100,00	3,41	5,70	0,62	90,27	100,00
DKI Jakarta	3,50	39,44	0,00	57,07	100,00	-	-	-	-	-	3,50	39,44	0,00	57,07	100,00
Jawa Barat	3,66	78,86	0,01	17,47	100,00	1,54	92,56	0,30	5,60	100,00	3,08	82,62	0,09	14,22	100,00
Jawa Tengah	2,14	87,10	0,02	10,74	100,00	1,22	87,21	0,02	11,55	100,00	1,68	87,16	0,02	11,15	100,00
DI Yogyakarta	0,52	95,35	0,00	4,13	100,00	0,44	98,09	0,00	1,47	100,00	0,50	96,11	0,00	3,39	100,00
Jawa Timur	2,81	88,64	0,00	8,55	100,00	2,01	94,76	0,01	3,21	100,00	2,43	91,58	0,01	5,98	100,00
Banten	3,12	71,20	0,06	25,62	100,00	1,63	85,45	3,68	9,23	100,00	2,70	75,18	1,07	21,05	100,00
Bali	2,28	79,65	0,01	18,06	100,00	2,12	71,88	0,17	25,83	100,00	2,23	77,04	0,07	20,67	100,00
Nusa Tenggara Barat	3,14	62,88	0,12	33,86	100,00	1,80	54,48	0,22	43,50	100,00	2,41	58,32	0,17	39,09	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,38	0,65	0,86	98,10	100,00	0,10	0,38	10,04	89,47	100,00	0,17	0,45	7,90	91,49	100,00
Kalimantan Barat	0,92	3,28	0,78	95,02	100,00	0,22	1,97	3,21	94,60	100,00	0,44	2,38	2,44	94,73	100,00
Kalimantan Tengah	1,67	16,79	0,40	81,14	100,00	0,42	10,11	1,17	88,30	100,00	0,88	12,58	0,89	85,65	100,00
Kalimantan Selatan	0,98	7,54	1,00	90,48	100,00	0,09	5,67	4,99	89,26	100,00	0,50	6,54	3,14	89,82	100,00
Kalimantan Timur	1,61	9,58	0,07	88,73	100,00	0,44	4,81	0,29	94,46	100,00	1,22	7,98	0,15	90,66	100,00
Kalimantan Utara	2,09	2,28	0,00	95,63	100,00	1,33	0,16	0,12	98,39	100,00	1,78	1,40	0,05	96,78	100,00
Sulawesi Utara	2,97	2,54	0,31	94,19	100,00	1,41	1,43	1,50	95,66	100,00	2,16	1,97	0,92	94,95	100,00
Sulawesi Tengah	0,90	1,58	3,35	94,16	100,00	0,37	1,77	10,56	87,31	100,00	0,51	1,72	8,63	89,14	100,00
Sulawesi Selatan	2,35	3,76	0,87	93,02	100,00	0,85	1,35	2,85	94,95	100,00	1,45	2,32	2,05	94,17	100,00
Sulawesi Tenggara	0,82	1,71	1,91	95,56	100,00	0,45	6,49	6,02	87,04	100,00	0,59	4,68	4,47	90,26	100,00
Gorontalo	0,30	2,30	0,38	97,02	100,00	0,02	1,34	5,52	93,12	100,00	0,13	1,70	3,59	94,58	100,00
Sulawesi Barat	3,11	0,53	4,21	92,15	100,00	0,44	1,39	7,37	90,80	100,00	1,04	1,20	6,67	91,10	100,00
Maluku	1,05	1,26	2,61	95,08	100,00	1,19	1,30	9,00	88,51	100,00	1,13	1,28	6,35	91,23	100,00
Maluku Utara	3,18	0,00	0,60	96,22	100,00	1,87	0,64	5,39	92,10	100,00	2,24	0,46	4,04	93,26	100,00
Papua Barat	1,24	1,50	0,00	97,26	100,00	0,48	0,75	1,03	97,75	100,00	0,78	1,04	0,62	97,56	100,00
Papua	1,96	3,59	0,78	93,67	100,00	0,19	0,26	39,06	60,49	100,00	0,64	1,10	29,36	68,90	100,00
Indonesia	2,83	59,69	0,19	37,29	100,00	1,22	53,20	2,53	43,06	100,00	2,09	56,73	1,26	39,92	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel F.4.1. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Perempuan, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Dinding Terluas, 2018

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan dan Perdesaan				
	Tem-bok	Kayu/papan	Bambu	Lain-nya	Total	Tem-bok	Kayu/papan	Bambu	Lain-nya	Total	Tem-bok	Kayu/papan	Bambu	Lain-nya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	62,77	35,04	0,12	2,07	100,00	43,00	53,23	0,47	3,31	100,00	48,95	47,75	0,36	2,93	100,00
Sumatera Utara	77,54	18,29	0,21	3,95	100,00	44,75	49,43	1,15	4,68	100,00	62,46	32,61	0,64	4,29	100,00
Sumatera Barat	83,05	15,22	0,00	1,73	100,00	67,50	26,61	0,42	5,47	100,00	74,49	21,49	0,23	3,79	100,00
Riau	77,51	19,46	0,00	3,03	100,00	48,10	49,93	0,00	1,97	100,00	61,79	35,75	0,00	2,46	100,00
Jambi	73,02	26,24	0,00	0,74	100,00	57,34	40,83	0,00	1,83	100,00	62,88	35,67	0,00	1,44	100,00
Sumatera Selatan	73,92	26,08	0,00	0,00	100,00	46,50	51,14	1,21	1,15	100,00	58,93	39,78	0,66	0,63	100,00
Bengkulu	85,78	9,78	0,48	3,96	100,00	51,49	40,33	0,24	7,93	100,00	64,79	28,49	0,34	6,39	100,00
Lampung	91,19	5,06	0,00	3,75	100,00	73,17	18,59	0,77	7,47	100,00	79,16	14,09	0,52	6,23	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	85,43	14,57	0,00	0,00	100,00	59,85	40,15	0,00	0,00	100,00	75,53	24,47	0,00	0,00	100,00
Kepulauan Riau	84,32	14,71	0,00	0,97	100,00	50,72	37,48	0,00	11,81	100,00	79,37	18,06	0,00	2,56	100,00
DKI Jakarta	94,03	5,50	0,00	0,47	100,00	-	-	-	-	-	94,03	5,50	0,00	0,47	100,00
Jawa Barat	89,98	1,85	0,39	7,78	100,00	65,85	3,89	1,71	28,55	100,00	83,39	2,41	0,75	13,44	100,00
Jawa Tengah	87,02	9,95	0,19	2,84	100,00	65,18	26,30	0,85	7,68	100,00	77,11	17,37	0,49	5,03	100,00
DI Yogyakarta	97,94	0,90	0,00	1,16	100,00	79,00	12,03	0,00	8,97	100,00	93,98	3,22	0,00	2,79	100,00
Jawa Timur	94,03	2,82	0,29	2,85	100,00	74,28	13,52	1,18	11,03	100,00	84,64	7,90	0,71	6,74	100,00
Banten	93,70	1,89	0,49	3,91	100,00	68,76	2,14	1,70	27,40	100,00	85,71	1,97	0,88	11,44	100,00
Bali	97,89	1,20	0,00	0,92	100,00	93,12	0,75	0,54	5,59	100,00	96,56	1,07	0,15	2,22	100,00
Nusa Tenggara Barat	91,72	2,55	0,98	4,74	100,00	78,40	9,13	1,37	11,09	100,00	84,74	6,00	1,19	8,07	100,00
Nusa Tenggara Timur	67,42	7,27	7,18	18,14	100,00	32,47	11,99	21,43	34,11	100,00	41,21	10,81	17,87	30,12	100,00
Kalimantan Barat	72,06	11,90	0,00	16,04	100,00	34,50	34,98	0,00	30,52	100,00	49,54	25,74	0,00	24,72	100,00
Kalimantan Tengah	49,73	48,46	0,00	1,81	100,00	11,51	85,53	0,00	2,97	100,00	28,32	69,22	0,00	2,46	100,00
Kalimantan Selatan	28,03	68,67	0,00	3,30	100,00	9,11	89,57	0,00	1,31	100,00	17,98	79,78	0,00	2,24	100,00
Kalimantan Timur	55,68	44,32	0,00	0,00	100,00	17,74	82,08	0,00	0,19	100,00	44,48	55,47	0,00	0,05	100,00
Kalimantan Utara	48,04	51,74	0,00	0,22	100,00	13,81	86,19	0,00	0,00	100,00	37,35	62,50	0,00	0,15	100,00
Sulawesi Utara	78,50	19,04	0,16	2,30	100,00	67,28	27,48	0,64	4,60	100,00	74,11	22,34	0,35	3,20	100,00
Sulawesi Tengah	77,02	22,56	0,00	0,42	100,00	57,39	40,58	0,83	1,20	100,00	65,06	33,54	0,50	0,89	100,00
Sulawesi Selatan	66,16	20,62	0,44	12,77	100,00	28,21	50,47	1,06	20,26	100,00	43,78	38,22	0,81	17,18	100,00
Sulawesi Tenggara	68,31	30,86	0,00	0,83	100,00	29,41	67,48	0,00	3,11	100,00	45,02	52,79	0,00	2,19	100,00
Gorontalo	91,28	4,14	0,00	4,58	100,00	73,01	17,40	0,65	8,94	100,00	82,35	10,62	0,32	6,71	100,00
Sulawesi Barat	58,25	27,64	0,00	14,11	100,00	35,10	52,14	1,44	11,32	100,00	41,93	44,91	1,01	12,14	100,00
Maluku	87,95	10,07	0,00	1,98	100,00	76,03	19,46	0,41	4,10	100,00	82,33	14,50	0,19	2,98	100,00
Maluku Utara	92,59	7,41	0,00	0,00	100,00	74,11	22,08	0,75	3,07	100,00	81,78	15,99	0,44	1,79	100,00
Papua Barat	83,98	11,85	0,00	4,17	100,00	57,96	38,14	0,00	3,90	100,00	69,67	26,31	0,00	4,02	100,00
Papua	70,88	27,65	0,00	1,47	100,00	13,10	78,29	0,00	8,62	100,00	29,95	63,52	0,00	6,53	100,00
Indonesia	86,36	9,13	0,30	4,20	100,00	58,31	27,92	1,66	12,10	100,00	74,24	17,25	0,89	7,62	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel F.4.2. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Laki-laki, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Dinding Terluas, 2018

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan dan Perdesaan				
	Tem-bok	Kayu/papan	Bambu	Lain-nya	Total	Tem-bok	Kayu/papan	Bambu	Lain-nya	Total	Tem-bok	Kayu/papan	Bambu	Lain-nya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	68,76	29,58	0,00	1,66	100,00	48,60	47,91	0,27	3,23	100,00	54,96	42,13	0,18	2,73	100,00
Sumatera Utara	78,24	17,95	0,12	3,69	100,00	49,72	44,33	0,50	5,45	100,00	64,60	30,56	0,31	4,53	100,00
Sumatera Barat	82,90	15,07	0,03	2,00	100,00	66,72	29,14	0,31	3,83	100,00	73,83	22,96	0,18	3,03	100,00
Riau	76,90	21,18	0,00	1,91	100,00	46,79	50,05	0,09	3,07	100,00	58,73	38,61	0,05	2,61	100,00
Jambi	70,27	27,71	0,00	2,02	100,00	60,12	38,92	0,15	0,81	100,00	63,23	35,48	0,11	1,18	100,00
Sumatera Selatan	80,41	18,60	0,01	0,97	100,00	53,52	44,56	0,57	1,35	100,00	62,81	35,59	0,38	1,22	100,00
Bengkulu	86,58	9,84	0,26	3,31	100,00	56,53	34,68	0,77	8,03	100,00	65,93	26,91	0,61	6,55	100,00
Lampung	86,93	8,06	0,43	4,57	100,00	74,09	19,45	1,04	5,42	100,00	77,58	16,36	0,87	5,19	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	89,22	10,55	0,00	0,23	100,00	73,24	26,18	0,12	0,46	100,00	81,62	17,98	0,06	0,34	100,00
Kepulauan Riau	84,32	13,67	0,02	1,99	100,00	50,11	47,39	0,00	2,50	100,00	79,60	18,32	0,02	2,06	100,00
DKI Jakarta	93,88	5,60	0,05	0,47	100,00	-	-	-	-	-	93,88	5,60	0,05	0,47	100,00
Jawa Barat	92,10	1,62	0,24	6,04	100,00	71,21	5,13	1,27	22,40	100,00	86,37	2,58	0,53	10,53	100,00
Jawa Tengah	89,66	7,75	0,19	2,40	100,00	71,69	23,39	0,48	4,43	100,00	80,66	15,58	0,34	3,42	100,00
DI Yogyakarta	97,86	1,02	0,06	1,06	100,00	87,05	6,34	0,00	6,61	100,00	94,87	2,49	0,04	2,60	100,00
Jawa Timur	94,95	2,49	0,22	2,33	100,00	81,15	11,82	0,48	6,55	100,00	88,32	6,97	0,35	4,36	100,00
Banten	96,56	1,13	0,07	2,24	100,00	71,22	2,54	1,76	24,48	100,00	89,49	1,52	0,54	8,44	100,00
Bali	97,69	1,54	0,15	0,63	100,00	94,90	2,23	0,52	2,35	100,00	96,75	1,77	0,28	1,20	100,00
Nusa Tenggara Barat	91,65	3,48	1,20	3,67	100,00	75,98	14,02	1,00	9,00	100,00	83,14	9,20	1,09	6,56	100,00
Nusa Tenggara Timur	63,92	5,36	6,18	24,53	100,00	35,36	14,51	18,30	31,82	100,00	42,03	12,38	15,47	30,12	100,00
Kalimantan Barat	71,77	12,39	0,00	15,84	100,00	38,64	30,20	0,10	31,06	100,00	49,20	24,52	0,07	26,21	100,00
Kalimantan Tengah	47,87	49,10	0,00	3,03	100,00	24,97	72,54	0,07	2,42	100,00	33,45	63,86	0,05	2,65	100,00
Kalimantan Selatan	41,76	55,51	0,03	2,71	100,00	20,02	78,09	0,09	1,80	100,00	30,09	67,62	0,06	2,22	100,00
Kalimantan Timur	54,79	45,13	0,00	0,08	100,00	22,84	76,64	0,01	0,50	100,00	44,06	55,71	0,00	0,22	100,00
Kalimantan Utara	55,61	44,06	0,00	0,34	100,00	21,28	77,86	0,00	0,86	100,00	41,34	58,11	0,00	0,56	100,00
Sulawesi Utara	76,31	20,27	0,38	3,05	100,00	63,00	31,85	1,13	4,02	100,00	69,45	26,24	0,77	3,55	100,00
Sulawesi Tengah	71,79	27,59	0,00	0,62	100,00	52,52	45,10	0,59	1,80	100,00	57,68	40,41	0,43	1,48	100,00
Sulawesi Selatan	65,61	20,75	0,74	12,90	100,00	35,71	43,83	1,08	19,38	100,00	47,72	34,56	0,94	16,77	100,00
Sulawesi Tenggara	64,09	34,32	0,00	1,59	100,00	39,37	59,60	0,02	1,01	100,00	48,70	50,06	0,01	1,23	100,00
Gorontalo	86,21	8,70	0,12	4,96	100,00	66,90	25,33	0,25	7,52	100,00	74,12	19,11	0,20	6,56	100,00
Sulawesi Barat	66,59	25,57	0,41	7,43	100,00	42,08	51,05	0,67	6,20	100,00	47,57	45,34	0,61	6,48	100,00
Maluku	83,10	13,60	0,07	3,23	100,00	73,18	24,00	0,31	2,51	100,00	77,29	19,69	0,21	2,81	100,00
Maluku Utara	83,80	14,61	0,00	1,58	100,00	69,05	26,12	0,24	4,59	100,00	73,20	22,89	0,17	3,74	100,00
Papua Barat	82,70	16,21	0,06	1,03	100,00	60,00	37,36	0,03	2,61	100,00	68,93	29,04	0,04	1,99	100,00
Papua	66,62	31,27	0,00	2,11	100,00	11,73	80,13	0,09	8,04	100,00	25,64	67,75	0,07	6,54	100,00
Indonesia	87,47	8,64	0,23	3,65	100,00	61,93	27,75	1,09	9,23	100,00	75,81	17,37	0,62	6,20	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel F.5. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2018

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan dan Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	99,94	99,73	99,03	99,32	99,30	99,45
Sumatera Utara	99,78	99,86	94,83	95,06	97,50	97,57
Sumatera Barat	99,16	99,60	96,61	97,60	97,76	98,48
Riau	99,89	99,62	93,01	96,34	96,21	97,64
Jambi	98,74	99,43	96,53	96,44	97,32	97,35
Sumatera Selatan	100,00	99,94	96,92	98,19	98,31	98,80
Bengkulu	100,00	99,54	96,33	97,43	97,75	98,09
Lampung	100,00	99,91	99,96	99,33	99,97	99,49
Kepulauan Bangka Belitung	100,00	99,95	99,57	99,01	99,83	99,50
Kepulauan Riau	99,95	99,74	95,18	96,25	99,25	99,26
DKI Jakarta	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00
Jawa Barat	100,00	99,99	99,41	99,86	99,84	99,95
Jawa Tengah	99,79	99,97	99,74	99,93	99,77	99,95
DI Yogyakarta	99,84	99,96	100,00	99,86	99,87	99,94
Jawa Timur	99,75	99,89	99,70	99,87	99,73	99,88
Banten	99,63	100,00	99,86	99,20	99,70	99,78
Bali	100,00	99,91	98,47	99,75	99,57	99,85
Nusa Tenggara Barat	99,07	99,94	99,51	99,67	99,30	99,79
Nusa Tenggara Timur	98,95	99,32	75,11	77,52	81,08	82,62
Kalimantan Barat	100,00	99,41	91,01	90,01	94,61	93,01
Kalimantan Tengah	99,44	99,67	91,75	95,81	95,13	97,24
Kalimantan Selatan	99,58	99,74	98,69	99,32	99,11	99,52
Kalimantan Timur	100,00	99,98	98,66	98,61	99,61	99,52
Kalimantan Utara	99,39	99,57	97,11	97,50	98,68	98,71
Sulawesi Utara	100,00	99,87	98,33	99,13	99,35	99,49
Sulawesi Tengah	99,30	99,63	94,35	93,70	96,28	95,29
Sulawesi Selatan	99,72	99,85	98,02	98,33	98,72	98,94
Sulawesi Tenggara	99,97	99,67	97,21	97,71	98,32	98,45
Gorontalo	99,92	99,99	97,16	94,94	98,57	96,83
Sulawesi Barat	99,74	99,33	95,09	95,54	96,46	96,39
Maluku	99,34	98,55	86,54	88,24	93,30	92,51
Maluku Utara	99,48	99,59	94,10	93,33	96,34	95,09
Papua Barat	99,99	99,83	84,18	87,63	91,29	92,44
Papua	98,36	98,63	59,05	54,18	70,51	65,45
Indonesia	99,80	99,89	97,00	96,83	98,59	98,50

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel F.6.

Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Bersih menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2018

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan dan Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	83,29	88,36	57,10	58,88	64,98	68,18
Sumatera Utara	84,33	85,35	54,94	56,99	70,81	71,79
Sumatera Barat	84,00	86,39	59,45	62,51	70,48	73,01
Riau	84,06	85,31	47,20	58,15	64,36	68,92
Jambi	77,20	79,06	49,23	52,61	59,12	60,74
Sumatera Selatan	85,47	84,64	47,02	51,00	64,46	62,62
Bengkulu	72,81	71,63	42,66	42,20	54,35	51,41
Lampung	76,49	75,60	47,47	51,67	57,13	58,18
Kepulauan Bangka Belitung	84,30	88,21	59,32	74,95	74,63	81,91
Kepulauan Riau	94,04	93,05	64,89	68,60	89,75	89,67
DKI Jakarta	91,51	93,80	-	-	91,51	93,80
Jawa Barat	74,36	78,94	56,91	59,06	69,60	73,49
Jawa Tengah	79,88	81,79	71,43	74,01	76,05	77,89
DI Yogyakarta	78,73	77,80	71,13	73,13	77,14	76,51
Jawa Timur	79,13	79,57	67,46	69,69	73,58	74,83
Banten	84,97	83,91	49,13	52,38	73,49	75,11
Bali	94,13	93,38	67,16	76,65	86,60	87,76
Nusa Tenggara Barat	78,77	82,19	61,87	65,87	69,92	73,33
Nusa Tenggara Timur	90,75	89,98	61,25	60,05	68,63	67,04
Kalimantan Barat	43,78	51,86	22,79	27,75	31,19	35,44
Kalimantan Tengah	85,29	87,83	38,14	55,81	58,88	67,67
Kalimantan Selatan	89,83	89,82	47,22	55,46	67,19	71,38
Kalimantan Timur	98,68	97,64	72,16	77,52	90,85	90,89
Kalimantan Utara	86,86	93,00	37,88	59,36	71,57	79,02
Sulawesi Utara	91,76	87,26	64,80	69,91	81,22	78,32
Sulawesi Tengah	89,65	88,06	65,97	65,77	75,22	71,74
Sulawesi Selatan	89,61	91,96	65,62	67,62	75,47	77,40
Sulawesi Tenggara	91,26	92,15	71,90	71,38	79,66	79,22
Gorontalo	92,44	87,84	75,53	72,71	84,18	78,36
Sulawesi Barat	76,82	83,80	46,08	55,65	55,15	61,95
Maluku	85,58	88,40	57,58	60,64	72,37	72,15
Maluku Utara	93,38	88,91	53,10	54,32	69,83	64,05
Papua Barat	86,91	92,52	52,13	50,86	67,78	67,26
Papua	82,00	87,70	18,87	21,71	37,28	38,43
Indonesia	81,19	83,03	60,02	61,42	72,04	73,16

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel F.7.1. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Perempuan, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Jenis Sanitasi, 2018

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Sanitasi Layak	Tidak Layak	Total	Sanitasi Layak	Tidak Layak	Total	Sanitasi Layak	Tidak Layak	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	88,12	11,88	100,00	56,28	43,72	100,00	65,86	34,14	100,00
Sumatera Utara	86,63	13,37	100,00	60,28	39,72	100,00	74,51	25,49	100,00
Sumatera Barat	74,17	25,83	100,00	43,33	56,67	100,00	57,19	42,81	100,00
Riau	89,81	10,19	100,00	57,25	42,75	100,00	72,41	27,59	100,00
Jambi	79,64	20,36	100,00	48,84	51,16	100,00	59,73	40,27	100,00
Sumatera Selatan	82,72	17,28	100,00	56,64	43,36	100,00	68,47	31,53	100,00
Bengkulu	76,01	23,99	100,00	24,16	75,84	100,00	44,27	55,73	100,00
Lampung	78,13	21,87	100,00	40,18	59,82	100,00	52,81	47,19	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	91,58	8,42	100,00	76,30	23,70	100,00	85,67	14,33	100,00
Kepulauan Riau	91,72	8,28	100,00	58,50	41,50	100,00	86,83	13,17	100,00
DKI Jakarta	90,32	9,68	100,00	-	-	-	90,32	9,68	100,00
Jawa Barat	65,96	34,04	100,00	54,31	45,69	100,00	62,78	37,22	100,00
Jawa Tengah	80,62	19,38	100,00	66,92	33,08	100,00	74,40	25,60	100,00
DI Yogyakarta	93,44	6,56	100,00	69,90	30,10	100,00	88,52	11,48	100,00
Jawa Timur	79,91	20,09	100,00	53,53	46,47	100,00	67,37	32,63	100,00
Banten	81,35	18,65	100,00	30,25	69,75	100,00	64,98	35,02	100,00
Bali	97,62	2,38	100,00	73,92	26,08	100,00	91,01	8,99	100,00
Nusa Tenggara Barat	73,66	26,34	100,00	63,73	36,27	100,00	68,46	31,54	100,00
Nusa Tenggara Timur	84,28	15,72	100,00	45,51	54,49	100,00	55,21	44,79	100,00
Kalimantan Barat	87,42	12,58	100,00	41,50	58,50	100,00	59,89	40,11	100,00
Kalimantan Tengah	73,99	26,01	100,00	27,94	72,06	100,00	48,20	51,80	100,00
Kalimantan Selatan	78,31	21,69	100,00	50,13	49,87	100,00	63,33	36,67	100,00
Kalimantan Timur	87,39	12,61	100,00	57,88	42,12	100,00	78,68	21,32	100,00
Kalimantan Utara	86,44	13,56	100,00	39,70	60,30	100,00	71,84	28,16	100,00
Sulawesi Utara	88,50	11,50	100,00	70,55	29,45	100,00	81,49	18,51	100,00
Sulawesi Tengah	86,08	13,92	100,00	58,34	41,66	100,00	69,18	30,82	100,00
Sulawesi Selatan	91,07	8,93	100,00	72,62	27,38	100,00	80,19	19,81	100,00
Sulawesi Tenggara	80,84	19,16	100,00	60,84	39,16	100,00	68,86	31,14	100,00
Gorontalo	80,60	19,40	100,00	62,56	37,44	100,00	71,78	28,22	100,00
Sulawesi Barat	73,55	26,45	100,00	56,42	43,58	100,00	61,48	38,52	100,00
Maluku	82,02	17,98	100,00	63,49	36,51	100,00	73,28	26,72	100,00
Maluku Utara	93,07	6,93	100,00	56,82	43,18	100,00	71,87	28,13	100,00
Papua Barat	88,67	11,33	100,00	62,62	37,38	100,00	74,34	25,66	100,00
Papua	80,21	19,79	100,00	19,59	80,41	100,00	37,27	62,73	100,00
Indonesia	79,64	20,36	100,00	55,74	44,26	100,00	69,31	30,69	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel F.7.2. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Laki-laki, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Jenis Sanitasi, 2018

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Sanitasi Layak	Tidak Layak	Total	Sanitasi Layak	Tidak Layak	Total	Sanitasi Layak	Tidak Layak	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	89,54	10,46	100,00	57,75	42,25	100,00	67,78	32,22	100,00
Sumatera Utara	88,31	11,69	100,00	60,49	39,51	100,00	75,01	24,99	100,00
Sumatera Barat	72,27	27,73	100,00	45,31	54,69	100,00	57,17	42,83	100,00
Riau	91,48	8,52	100,00	58,67	41,33	100,00	71,68	28,32	100,00
Jambi	83,13	16,87	100,00	56,50	43,50	100,00	64,68	35,32	100,00
Sumatera Selatan	88,22	11,78	100,00	58,95	41,05	100,00	69,06	30,94	100,00
Bengkulu	75,54	24,46	100,00	30,23	69,77	100,00	44,41	55,59	100,00
Lampung	76,43	23,57	100,00	43,70	56,30	100,00	52,60	47,40	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	93,22	6,78	100,00	77,32	22,68	100,00	85,66	14,34	100,00
Kepulauan Riau	90,76	9,24	100,00	51,58	48,42	100,00	85,35	14,65	100,00
DKI Jakarta	91,48	8,52	100,00	-	-	-	91,48	8,52	100,00
Jawa Barat	69,94	30,06	100,00	53,88	46,12	100,00	65,53	34,47	100,00
Jawa Tengah	82,27	17,73	100,00	66,05	33,95	100,00	74,15	25,85	100,00
DI Yogyakarta	93,43	6,57	100,00	77,48	22,52	100,00	89,01	10,99	100,00
Jawa Timur	81,02	18,98	100,00	57,15	42,85	100,00	69,55	30,45	100,00
Banten	86,20	13,80	100,00	35,30	64,70	100,00	72,00	28,00	100,00
Bali	96,45	3,55	100,00	82,86	17,14	100,00	91,88	8,12	100,00
Nusa Tenggara Barat	79,92	20,08	100,00	71,55	28,45	100,00	75,38	24,62	100,00
Nusa Tenggara Timur	82,63	17,37	100,00	42,34	57,66	100,00	51,76	48,24	100,00
Kalimantan Barat	84,34	15,66	100,00	39,00	61,00	100,00	53,45	46,55	100,00
Kalimantan Tengah	80,30	19,70	100,00	37,09	62,91	100,00	53,09	46,91	100,00
Kalimantan Selatan	78,27	21,73	100,00	49,19	50,81	100,00	62,67	37,33	100,00
Kalimantan Timur	87,75	12,25	100,00	63,22	36,78	100,00	79,52	20,48	100,00
Kalimantan Utara	84,87	15,13	100,00	55,09	44,91	100,00	72,49	27,51	100,00
Sulawesi Utara	83,52	16,48	100,00	67,35	32,65	100,00	75,19	24,81	100,00
Sulawesi Tengah	85,97	14,03	100,00	55,38	44,62	100,00	63,58	36,42	100,00
Sulawesi Selatan	90,38	9,62	100,00	72,39	27,61	100,00	79,62	20,38	100,00
Sulawesi Tenggara	82,34	17,66	100,00	63,44	36,56	100,00	70,58	29,42	100,00
Gorontalo	76,21	23,79	100,00	55,73	44,27	100,00	63,39	36,61	100,00
Sulawesi Barat	79,48	20,52	100,00	58,99	41,01	100,00	63,58	36,42	100,00
Maluku	83,07	16,93	100,00	58,42	41,58	100,00	68,64	31,36	100,00
Maluku Utara	92,57	7,43	100,00	56,11	43,89	100,00	66,36	33,64	100,00
Papua Barat	86,43	13,57	100,00	67,67	32,33	100,00	75,05	24,95	100,00
Papua	77,15	22,85	100,00	18,77	81,23	100,00	33,56	66,44	100,00
Indonesia	81,07	18,93	100,00	56,07	43,93	100,00	69,65	30,35	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel F.8. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Rumah menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2018


Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan dan Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,79	1,00	0,15	0,28	0,34	0,51
Sumatera Utara	1,40	2,91	0,06	0,13	0,78	1,58
Sumatera Barat	2,51	2,47	0,22	0,22	1,25	1,21
Riau	2,69	2,80	1,05	0,72	1,81	1,54
Jambi	4,32	2,69	0,33	0,33	1,74	1,05
Sumatera Selatan	6,08	5,45	0,00	0,35	2,76	2,11
Bengkulu	6,09	4,03	0,00	0,13	2,36	1,35
Lampung	0,73	0,90	0,00	0,01	0,24	0,25
Kepulauan Bangka Belitung	1,53	2,11	0,00	0,03	0,94	1,12
Kepulauan Riau	4,02	4,06	0,00	0,32	3,43	3,54
DKI Jakarta	15,03	10,92	-	-	15,03	10,92
Jawa Barat	5,32	4,24	0,12	0,24	3,90	3,14
Jawa Tengah	4,02	4,97	0,31	0,37	2,34	2,66
DI Yogyakarta	7,52	6,41	0,00	0,06	5,95	4,65
Jawa Timur	3,76	3,42	0,30	0,32	2,11	1,93
Banten	7,24	5,06	0,00	0,13	4,92	3,68
Bali	6,09	7,96	0,30	1,02	4,48	5,63
Nusa Tenggara Barat	0,66	1,52	0,37	0,22	0,51	0,82
Nusa Tenggara Timur	1,10	1,93	0,21	0,11	0,43	0,54
Kalimantan Barat	4,69	4,40	0,00	0,11	1,88	1,47
Kalimantan Tengah	2,93	2,41	0,00	0,03	1,29	0,91
Kalimantan Selatan	4,63	3,24	0,13	0,20	2,24	1,61
Kalimantan Timur	7,92	4,87	0,00	0,13	5,59	3,28
Kalimantan Utara	2,61	2,39	0,00	0,18	1,79	1,47
Sulawesi Utara	0,76	2,96	0,78	0,35	0,77	1,62
Sulawesi Tengah	1,79	1,95	0,00	0,06	0,70	0,56
Sulawesi Selatan	2,58	3,34	0,24	0,34	1,20	1,54
Sulawesi Tenggara	0,87	2,21	0,00	0,01	0,35	0,84
Gorontalo	0,46	0,74	0,00	0,07	0,24	0,32
Sulawesi Barat	1,49	2,36	0,36	0,22	0,70	0,70
Maluku	1,06	2,73	0,00	0,15	0,56	1,22
Maluku Utara	1,37	0,91	0,00	0,04	0,57	0,28
Papua Barat	0,95	1,87	0,34	0,63	0,62	1,12
Papua	1,65	1,78	0,06	0,18	0,52	0,59
Indonesia	4,99	4,49	0,21	0,26	2,92	2,56

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel F.9. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Seluler/*Handphone* menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2018

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan dan Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	89,69	96,93	76,72	91,85	80,62	93,45
Sumatera Utara	90,64	96,40	77,17	91,29	84,44	93,95
Sumatera Barat	92,21	96,93	77,03	91,54	83,85	93,91
Riau	96,12	98,65	82,53	95,39	88,86	96,69
Jambi	90,44	97,66	73,96	91,29	79,79	93,25
Sumatera Selatan	87,70	96,18	73,05	91,72	79,69	93,26
Bengkulu	93,13	97,23	66,58	90,35	76,88	92,50
Lampung	90,16	96,80	75,69	92,18	80,51	93,44
Kepulauan Bangka Belitung	89,74	95,69	78,62	93,47	85,44	94,63
Kepulauan Riau	94,25	97,51	75,37	91,99	91,47	96,75
DKI Jakarta	91,16	97,39	-	-	91,16	97,39
Jawa Barat	80,73	93,97	57,39	85,72	74,36	91,71
Jawa Tengah	77,58	93,28	67,26	88,48	72,90	90,88
DI Yogyakarta	85,50	94,24	68,05	88,42	81,85	92,63
Jawa Timur	81,21	93,54	67,41	87,58	74,65	90,68
Banten	88,45	96,36	67,65	86,27	81,79	93,54
Bali	87,64	96,98	60,12	90,39	79,96	94,77
Nusa Tenggara Barat	80,99	92,18	73,33	87,09	76,98	89,42
Nusa Tenggara Timur	93,86	96,86	74,30	80,48	79,20	84,31
Kalimantan Barat	94,33	97,67	71,99	86,36	80,93	89,96
Kalimantan Tengah	94,72	96,46	75,56	91,44	83,99	93,30
Kalimantan Selatan	85,33	96,52	68,49	91,36	76,38	93,75
Kalimantan Timur	96,97	98,57	75,07	97,04	90,51	98,06
Kalimantan Utara	97,67	99,40	94,33	96,88	96,62	98,35
Sulawesi Utara	93,12	95,58	81,00	90,03	88,39	92,72
Sulawesi Tengah	89,50	96,43	73,92	85,36	80,01	88,32
Sulawesi Selatan	93,59	97,88	80,36	93,79	85,79	95,43
Sulawesi Tenggara	94,53	97,56	79,98	92,55	85,81	94,44
Gorontalo	90,51	94,09	77,12	88,88	83,97	90,83
Sulawesi Barat	89,92	94,04	76,00	84,63	80,10	86,73
Maluku	94,76	96,54	78,85	84,51	87,25	89,50
Maluku Utara	97,63	98,04	76,74	83,86	85,41	87,85
Papua Barat	93,06	97,95	78,18	86,73	84,87	91,15
Papua	93,40	94,86	35,27	47,35	52,22	59,39
Indonesia	84,80	95,10	69,95	88,10	78,39	91,91

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018



TABEL G - AKSES INTERNET

Tabel G.1. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	76,94	81,37	61,72	71,77	66,48	74,81
Sumatera Utara	81,45	83,38	71,11	75,21	76,62	79,55
Sumatera Barat	82,03	83,72	71,64	76,30	76,25	79,57
Riau	85,81	88,17	73,21	79,78	78,34	83,15
Jambi	81,73	86,95	66,99	77,48	71,77	80,48
Sumatera Selatan	78,81	83,16	65,90	75,66	70,79	78,42
Bengkulu	81,66	85,30	64,76	73,47	70,40	77,27
Lampung	74,87	80,83	71,97	77,83	72,85	78,70
Kepulauan Bangka Belitung	81,56	84,91	65,80	76,84	74,33	81,16
Kepulauan Riau	82,90	87,60	71,66	77,49	81,31	86,11
DKI Jakarta	79,09	84,28	-	-	79,09	84,28
Jawa Barat	72,38	78,86	60,60	69,86	69,32	76,52
Jawa Tengah	72,02	78,85	61,95	70,49	67,12	74,77
DI Yogyakarta	79,05	83,81	66,33	74,90	75,52	81,45
Jawa Timur	72,58	80,24	62,13	72,93	67,58	76,76
Banten	73,61	80,97	53,50	65,25	67,84	76,42
Bali	78,15	85,29	62,64	75,86	72,85	82,13
Nusa Tenggara Barat	73,64	79,05	64,08	71,52	68,54	75,02
Nusa Tenggara Timur	80,73	82,40	57,95	61,50	63,14	66,40
Kalimantan Barat	80,12	84,03	56,45	66,16	64,59	72,12
Kalimantan Tengah	82,24	86,66	67,77	76,66	73,45	80,47
Kalimantan Selatan	80,69	85,14	68,85	78,24	74,35	81,46
Kalimantan Timur	85,88	87,83	75,62	82,30	82,55	85,97
Kalimantan Utara	83,95	85,17	75,28	79,69	80,37	82,83
Sulawesi Utara	81,71	82,24	75,12	74,11	78,47	78,16
Sulawesi Tengah	82,53	83,68	63,85	65,69	69,21	70,61
Sulawesi Selatan	83,21	85,09	75,95	77,70	78,96	80,80
Sulawesi Tenggara	84,40	85,06	73,35	74,72	77,60	78,71
Gorontalo	81,09	81,75	74,59	74,72	77,16	77,41
Sulawesi Barat	78,74	80,73	64,76	66,79	68,13	70,02
Maluku	78,16	78,89	57,04	60,35	66,02	68,17
Maluku Utara	81,00	83,91	56,62	59,21	63,72	66,26
Papua Barat	79,88	83,51	62,25	67,78	69,48	74,17
Papua	77,62	81,36	29,54	37,79	42,55	50,09
Indonesia	75,81	81,39	64,03	71,77	70,49	77,04

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel G.2. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	66,89	73,90	45,64	62,15	52,29	65,87
Sumatera Utara	63,74	70,36	43,84	57,87	54,44	64,50
Sumatera Barat	70,74	74,06	50,06	60,56	59,22	66,50
Riau	73,89	78,65	54,34	69,03	62,30	72,90
Jambi	70,07	78,21	50,49	68,29	56,84	71,43
Sumatera Selatan	66,97	74,98	44,79	65,20	53,19	68,81
Bengkulu	70,76	74,06	44,95	63,28	53,57	66,74
Lampung	63,48	73,78	47,29	64,33	52,17	67,08
Kepulauan Bangka Belitung	72,62	76,62	53,00	68,43	63,61	72,81
Kepulauan Riau	73,32	79,13	56,54	66,05	70,95	77,21
DKI Jakarta	73,04	79,27	-	-	73,04	79,27
Jawa Barat	63,94	72,85	48,78	61,49	60,00	69,90
Jawa Tengah	61,14	69,85	49,16	61,45	55,31	65,75
DI Yogyakarta	69,27	75,45	51,75	63,75	64,41	72,35
Jawa Timur	62,57	72,59	45,07	61,57	54,19	67,35
Banten	65,26	74,85	41,16	57,87	58,34	69,93
Bali	68,90	78,85	46,87	65,97	61,38	74,53
Nusa Tenggara Barat	55,07	64,70	41,67	56,40	47,92	60,26
Nusa Tenggara Timur	64,40	67,31	32,29	42,53	39,60	48,34
Kalimantan Barat	70,58	76,16	42,89	57,73	52,42	63,88
Kalimantan Tengah	73,78	80,18	55,49	69,00	62,66	73,26
Kalimantan Selatan	70,55	78,00	50,68	66,69	59,92	71,97
Kalimantan Timur	77,27	81,18	65,49	74,71	73,44	79,00
Kalimantan Utara	76,21	80,49	64,66	70,55	71,43	76,25
Sulawesi Utara	72,36	72,12	57,43	56,52	65,02	64,28
Sulawesi Tengah	71,65	74,47	46,74	53,65	53,88	59,33
Sulawesi Selatan	70,43	74,05	55,94	59,91	61,96	65,84
Sulawesi Tenggara	69,32	69,99	50,91	58,07	57,99	62,66
Gorontalo	66,97	67,25	53,44	52,64	58,79	58,22
Sulawesi Barat	59,08	63,52	42,60	51,51	46,58	54,29
Maluku	68,72	72,44	42,06	48,88	53,40	58,82
Maluku Utara	72,66	77,54	42,02	47,47	50,95	56,05
Papua Barat	73,28	77,37	53,25	62,13	61,46	68,31
Papua	71,45	75,71	22,05	32,89	35,42	44,98
Indonesia	65,70	73,60	46,85	60,33	57,19	67,59

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel G.3. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet) dalam 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	26,44	29,41	9,53	10,90	14,82	16,75
Sumatera Utara	24,29	26,07	11,62	12,61	18,37	19,76
Sumatera Barat	32,24	31,33	15,01	13,53	22,65	21,37
Riau	29,82	33,43	12,65	12,74	19,64	21,06
Jambi	27,11	30,54	12,17	12,38	17,01	18,13
Sumatera Selatan	24,13	26,03	9,03	9,14	14,75	15,37
Bengkulu	29,27	31,08	10,35	10,88	16,67	17,36
Lampung	23,97	25,83	9,67	9,99	13,98	14,61
Kepulauan Bangka Belitung	23,04	25,02	10,40	9,31	17,24	17,71
Kepulauan Riau	25,64	31,51	10,50	13,37	23,50	28,84
DKI Jakarta	29,42	33,56	-	-	29,42	33,56
Jawa Barat	21,41	25,42	9,03	10,32	18,19	21,51
Jawa Tengah	21,33	23,78	11,47	12,55	16,53	18,29
DI Yogyakarta	32,65	36,61	13,50	14,70	27,34	30,80
Jawa Timur	22,53	24,85	10,51	12,13	16,78	18,80
Banten	26,58	29,93	8,98	10,37	21,53	24,27
Bali	25,36	28,66	11,66	15,29	20,68	24,17
Nusa Tenggara Barat	20,95	23,77	7,83	12,14	13,95	17,54
Nusa Tenggara Timur	29,43	31,18	6,89	7,92	12,02	13,38
Kalimantan Barat	23,40	28,48	6,65	8,80	12,42	15,36
Kalimantan Tengah	26,42	30,45	10,39	10,77	16,68	18,26
Kalimantan Selatan	28,56	34,05	11,54	12,33	19,46	22,47
Kalimantan Timur	26,68	30,87	13,00	14,37	22,24	25,31
Kalimantan Utara	26,32	28,92	20,01	23,32	23,71	26,53
Sulawesi Utara	24,29	24,79	13,28	11,95	18,88	18,33
Sulawesi Tengah	32,48	33,09	10,34	10,61	16,69	16,75
Sulawesi Selatan	30,13	31,65	13,39	12,68	20,34	20,64
Sulawesi Tenggara	27,88	30,78	10,17	10,58	16,98	18,37
Gorontalo	26,71	25,02	13,75	12,16	18,88	17,07
Sulawesi Barat	24,57	27,47	11,12	11,64	14,37	15,30
Maluku	29,29	30,18	8,61	8,24	17,40	17,50
Maluku Utara	28,56	30,42	9,12	9,18	14,78	15,24
Papua Barat	24,56	29,81	15,27	17,27	19,08	22,36
Papua	25,61	27,81	3,91	5,78	9,78	12,00
Indonesia	24,32	27,38	10,45	11,40	18,05	20,15

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel G.4.

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet (Termasuk *Facebook*, *Twitter*, *Whatsapp*) dalam 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	43,59	48,51	20,88	26,45	27,98	33,43
Sumatera Utara	42,62	45,07	21,84	24,97	32,91	35,64
Sumatera Barat	47,96	49,13	25,72	28,20	35,57	37,42
Riau	51,06	56,11	28,48	32,78	37,67	42,16
Jambi	47,35	51,89	26,49	31,96	33,26	38,28
Sumatera Selatan	46,38	49,64	22,58	26,54	31,58	35,06
Bengkulu	49,45	51,65	22,74	25,09	31,66	33,61
Lampung	43,95	46,15	24,76	29,26	30,54	34,18
Kepulauan Bangka Belitung	44,79	46,31	25,47	29,76	35,92	38,61
Kepulauan Riau	55,58	59,78	26,40	33,88	51,45	55,97
DKI Jakarta	62,83	68,95			62,83	68,95
Jawa Barat	48,43	53,72	26,52	31,10	42,74	47,86
Jawa Tengah	43,44	48,75	27,54	33,65	35,70	41,37
DI Yogyakarta	60,44	65,15	33,00	38,80	52,83	58,16
Jawa Timur	45,14	51,23	25,03	32,00	35,51	42,09
Banten	53,38	59,17	23,64	30,38	44,85	50,84
Bali	49,32	58,45	27,08	36,47	41,72	51,07
Nusa Tenggara Barat	33,27	38,68	18,26	25,40	25,26	31,57
Nusa Tenggara Timur	45,61	49,77	11,75	14,50	19,46	22,77
Kalimantan Barat	49,21	52,79	18,60	22,76	29,13	32,78
Kalimantan Tengah	47,66	51,57	25,43	29,69	34,15	38,01
Kalimantan Selatan	50,43	56,38	26,60	33,14	37,69	43,99
Kalimantan Timur	55,37	59,24	33,60	37,76	48,30	52,01
Kalimantan Utara	51,60	56,02	34,76	39,19	44,64	48,84
Sulawesi Utara	51,71	50,25	31,90	28,38	41,97	39,26
Sulawesi Tengah	50,14	50,05	20,35	21,07	28,89	28,98
Sulawesi Selatan	49,60	52,63	26,24	27,97	35,93	38,32
Sulawesi Tenggara	48,08	47,27	23,35	25,14	32,86	33,67
Gorontalo	46,37	44,25	29,20	26,44	35,99	33,24
Sulawesi Barat	41,27	41,80	20,37	22,19	25,41	26,73
Maluku	46,88	48,97	15,16	17,75	28,64	30,92
Maluku Utara	50,10	51,88	14,98	16,19	25,21	26,37
Papua Barat	48,23	51,80	24,80	28,93	34,40	38,22
Papua	44,85	50,17	7,48	10,05	17,60	21,37
Indonesia	48,44	53,39	24,20	28,90	37,49	42,31

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018



TABEL H - SEKTOR PUBLIK

Tabel H.1. Persentase Jumlah Anggota Legislatif, Anggota Eksekutif, dan Pimpinan Yudikatif menurut Jenis Kelamin, 2018

Lembaga Negara	Perempuan	Laki-laki	Perempuan+ Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)
Legislatif			
MPR	18,93	81,07	100,00
DPR	17,32	82,68	100,00
DPD	25,76	74,24	100,00
DPRD Provinsi	14,62	85,38	100,00
DPRD Kota/Kabupaten	16,29	83,71	100,00
Eksekutif			
Menteri Koordinator	25,00	75,00	100,00
Menteri	22,58	77,42	100,00
Yudikatif			
Mahkamah Agung	0,00	100,00	100,00
Mahkamah Konstitusi	10,00	90,00	100,00
Komisi Yudisial	14,29	85,71	100,00
Komisi Pemberantasan Korupsi	20,00	80,00	100,00

Sumber: Statistik Indonesia 2019 (BPS), Puskapol UI, Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014, www.setkab.go.id, www.mahkamahagung.go.id, www.mkri.id, www.komisiyudisial.go.id, www.kpk.go.id

Tabel H.2. Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perempuan		Laki-laki	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	93.530	4,43	70.013	3,39
Sumatera Utara	136.813	6,48	94.144	4,56
Sumatera Barat	79.943	3,78	48.268	2,34
Riau	56.952	2,70	45.415	2,20
Jambi	39.600	1,87	37.039	1,79
Sumatera Selatan	74.325	3,52	57.719	2,79
Bengkulu	30.340	1,44	28.141	1,36
Lampung	61.977	2,93	56.257	2,72
Kepulauan Bangka Belitung	16.238	0,77	14.750	0,71
Kepulauan Riau	17.389	0,82	19.976	0,97
DKI Jakarta	121.425	5,75	147.255	7,13
Jawa Barat	191.945	9,09	209.351	10,13
Jawa Tengah	198.166	9,38	203.117	9,83
DI Yogyakarta	36.727	1,74	38.548	1,87
Jawa Timur	209.646	9,92	230.983	11,18
Banten	45.650	2,16	47.852	2,32
Bali	39.264	1,86	48.968	2,37
Nusa Tenggara Barat	37.626	1,78	51.583	2,50
Nusa Tenggara Timur	57.847	2,74	63.242	3,06
Kalimantan Barat	42.078	1,99	46.466	2,25
Kalimantan Tengah	36.632	1,73	36.464	1,77
Kalimantan Selatan	45.490	2,15	43.558	2,11
Kalimantan Timur	37.254	1,76	41.962	2,03
Kalimantan Utara	9.403	0,45	11.938	0,58
Sulawesi Utara	42.459	2,01	29.903	1,45
Sulawesi Tengah	45.955	2,18	41.951	2,03
Sulawesi Selatan	109.223	5,17	87.839	4,25
Sulawesi Tenggara	40.313	1,91	42.722	2,07
Gorontalo	20.300	0,96	13.921	0,67
Sulawesi Barat	17.963	0,85	18.247	0,88
Maluku	36.234	1,72	29.984	1,45
Maluku Utara	23.499	1,11	22.321	1,08
Papua Barat	19.062	0,90	24.911	1,21
Papua	41.027	1,94	60.888	2,95
Luar Negeri	17	0,00	56	0,00
Total	2.112.312	100,00	2.065.752	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel H.3. Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2018

Kelompok Umur	Perempuan		Laki-laki		Proporsi Perempuan terhadap Laki-laki
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18-20	3.859	0,18	5.398	0,26	71,49
21-25	16.600	0,79	27.497	1,33	60,37
26-30	85.243	4,04	62.468	3,02	136,46
31-35	299.726	14,19	202.117	9,78	148,29
36-40	362.688	17,17	297.876	14,42	121,76
41-45	303.615	14,37	295.796	14,32	102,64
46-50	370.929	17,56	388.294	18,80	95,53
51-55	414.816	19,64	485.798	23,52	85,39
56-60	251.372	11,90	291.140	14,09	86,34
61-65	3.259	0,15	8.517	0,41	38,26
66-70	205	0,01	851	0,04	24,09
Jumlah	2.112.312	100,00	2.065.752	100,00	102,25

Sumber: BPS RI - Statistik Indonesia, 2019

Tabel H.4. Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2018

Kelompok Umur	Perempuan		Laki-laki		Proporsi Perempuan terhadap Laki-laki
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sampai dengan SD	2.226	0,11	27266	1,32	8,16
SLTP/Sederajat	5.957	0,28	46937	2,27	12,69
SMA/Sederajat	309.977	14,67	538089	26,05	57,61
Diploma I,II/Akta I,II	119.024	5,63	90367	4,37	131,71
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	272.271	12,89	116098	5,62	234,52
S1/S2/S3	1.402.857	66,41	1246995	60,37	112,50
Jumlah	2112312	100,00	2065752	100,00	102,25

Sumber: BPS RI - Statistik Indonesia, 2019

Tabel H.5. Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Jabatan dan Jenis Kelamin, 2018

Kelompok Umur	Perempuan		Laki-laki		Proporsi Perempuan terhadap Laki-laki
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktural	156.146	7,39	314.663	15,23	49,62
Eselon I	103	0,00	518	0,03	19,88
Eselon II	2.660	0,13	17.649	0,85	15,07
Eselon III	23.745	1,12	77.536	3,75	30,62
Eselon IV	125.149	5,92	208.670	10,10	59,97
Eselon V	4.489	0,21	10.290	0,50	43,62
Fungsional Tertentu	1.343.627	63,61	839.801	40,65	159,99
Fungsional Umum/Staf	612.539	29,00	911.288	44,11	67,22
Jumlah	2.112.312	100,00	2.065.752	100,00	102,25

Sumber: BPS RI - Statistik Indonesia, 2019



TABEL I -- SOSIAL EKONOMI
LAINNYA

Tabel I.1. Persentase Rumah Tangga yang Pernah Membeli/Menerima Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra) selama Empat Bulan Terakhir menurut Provinsi, Jenis Kelamin KRT, dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	45,25	32,19	78,27	68,69	68,33	57,18
Sumatera Utara	20,32	16,69	50,06	43,33	34,00	29,43
Sumatera Barat	12,50	11,13	33,82	30,15	24,24	21,79
Riau	13,39	9,09	44,00	30,50	29,75	22,01
Jambi	16,39	11,43	48,00	32,87	36,82	26,28
Sumatera Selatan	14,15	14,25	47,49	38,79	32,37	30,31
Bengkulu	26,99	20,70	58,78	39,58	46,45	33,68
Lampung	22,95	19,44	69,94	55,89	54,30	45,97
Kepulauan Bangka Belitung	24,76	8,36	46,84	12,01	33,31	10,09
Kepulauan Riau	6,39	3,93	32,57	27,52	10,24	7,19
DKI Jakarta	0,66	0,31	-	-	0,66	0,31
Jawa Barat	30,46	27,73	67,55	59,05	40,58	36,32
Jawa Tengah	36,50	33,41	68,32	61,26	50,94	47,36
DI Yogyakarta	17,36	19,65	73,68	70,30	29,13	33,68
Jawa Timur	25,73	20,75	62,46	54,50	43,20	36,96
Banten	17,60	14,07	62,51	63,16	31,99	27,76
Bali	7,02	6,86	24,17	22,76	11,80	12,20
Nusa Tenggara Barat	48,91	43,37	76,23	71,13	63,22	58,44
Nusa Tenggara Timur	16,17	18,29	52,86	50,45	43,69	42,93
Kalimantan Barat	14,95	12,95	37,32	37,03	28,36	29,36
Kalimantan Tengah	6,95	6,12	28,38	16,49	18,95	12,65
Kalimantan Selatan	18,07	11,74	41,42	25,39	30,48	19,06
Kalimantan Timur	12,94	8,57	37,56	28,21	20,20	15,16
Kalimantan Utara	32,52	9,20	29,15	22,86	31,47	14,88
Sulawesi Utara	18,29	20,10	44,64	44,51	28,59	32,68
Sulawesi Tengah	19,09	19,11	53,21	45,40	39,88	38,36
Sulawesi Selatan	11,28	10,20	46,76	37,57	32,19	26,57
Sulawesi Tenggara	28,81	25,38	48,94	44,12	40,86	37,05
Gorontalo	22,47	20,46	43,56	46,44	32,78	36,72
Sulawesi Barat	50,64	31,25	54,72	42,80	53,51	40,22
Maluku	22,30	22,27	65,17	71,13	42,53	50,87
Maluku Utara	7,80	11,22	40,59	40,29	26,98	32,11
Papua Barat	15,64	15,30	50,12	45,71	34,61	33,74
Papua	25,83	17,20	60,43	53,33	50,34	44,18
Indonesia	24,03	20,46	59,29	49,96	39,27	33,93

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel 1.2.1. Persentase Rumah Tangga yang Dikepalai Perempuan yang Pernah Menerima/Membeli Beras Miskin selama Empat Bulan Terakhir menurut Provinsi, dan Jumlah Beras yang Dibeli, 2018

Provinsi	Jumlah Beras yang Dibeli			Jumlah
	<10 kg	10-40 kg	>40 kg	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	45,02	49,93	5,04	100,00
Sumatera Utara	31,20	61,98	6,82	100,00
Sumatera Barat	24,69	60,02	15,29	100,00
Riau	33,06	58,01	8,93	100,00
Jambi	36,00	52,10	11,90	100,00
Sumatera Selatan	32,32	59,44	8,25	100,00
Bengkulu	24,81	58,01	17,19	100,00
Lampung	51,22	47,72	1,06	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	10,98	56,08	32,94	100,00
Kepulauan Riau	19,28	47,43	33,29	100,00
DKI Jakarta	31,08	68,92	0,00	100,00
Jawa Barat	70,20	28,77	1,03	100,00
Jawa Tengah	47,69	44,06	8,24	100,00
DI Yogyakarta	20,72	67,03	12,26	100,00
Jawa Timur	55,11	41,08	3,81	100,00
Banten	72,59	27,32	0,09	100,00
Bali	21,16	47,43	31,42	100,00
Nusa Tenggara Barat	69,48	29,96	0,56	100,00
Nusa Tenggara Timur	7,44	48,46	44,10	100,00
Kalimantan Barat	30,21	62,57	7,22	100,00
Kalimantan Tengah	31,70	54,94	13,36	100,00
Kalimantan Selatan	29,48	45,21	25,31	100,00
Kalimantan Timur	15,97	57,41	26,62	100,00
Kalimantan Utara	44,39	41,36	14,24	100,00
Sulawesi Utara	32,57	54,83	12,60	100,00
Sulawesi Tengah	33,22	55,26	11,52	100,00
Sulawesi Selatan	19,47	59,41	21,12	100,00
Sulawesi Tenggara	24,73	71,01	4,25	100,00
Gorontalo	22,48	63,58	13,94	100,00
Sulawesi Barat	36,21	62,72	1,08	100,00
Maluku	4,44	71,52	24,03	100,00
Maluku Utara	14,70	69,85	15,44	100,00
Papua Barat	8,43	59,89	31,67	100,00
Papua	17,80	54,71	27,49	100,00
Indonesia	48,90	43,81	7,29	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel I.2.2. Persentase Rumah Tangga yang Dikepalai Laki-laki yang Pernah Menerima/Membeli Beras Miskin selama Empat Bulan Terakhir menurut Provinsi, dan Jumlah Beras yang Dibeli, 2018

Provinsi	Jumlah Beras yang Dibeli			Jumlah
	<10 kg	10-40 kg	>40 kg	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	48,48	47,60	3,92	100,00
Sumatera Utara	33,96	56,47	9,57	100,00
Sumatera Barat	27,53	59,44	13,03	100,00
Riau	34,76	59,86	5,38	100,00
Jambi	34,29	54,85	10,86	100,00
Sumatera Selatan	35,19	57,81	7,00	100,00
Bengkulu	20,50	64,94	14,55	100,00
Lampung	51,29	46,94	1,76	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	9,05	48,90	42,05	100,00
Kepulauan Riau	22,93	50,86	26,22	100,00
DKI Jakarta	42,15	42,56	15,29	100,00
Jawa Barat	74,31	24,77	0,92	100,00
Jawa Tengah	49,80	43,36	6,84	100,00
DI Yogyakarta	24,56	67,81	7,63	100,00
Jawa Timur	59,05	38,26	2,69	100,00
Banten	69,59	29,73	0,68	100,00
Bali	26,37	51,96	21,67	100,00
Nusa Tenggara Barat	67,06	32,46	0,49	100,00
Nusa Tenggara Timur	5,87	49,60	44,53	100,00
Kalimantan Barat	35,40	58,87	5,73	100,00
Kalimantan Tengah	42,34	47,70	9,96	100,00
Kalimantan Selatan	36,46	43,12	20,42	100,00
Kalimantan Timur	22,92	59,55	17,53	100,00
Kalimantan Utara	25,78	66,24	7,99	100,00
Sulawesi Utara	35,16	54,39	10,45	100,00
Sulawesi Tengah	33,81	55,02	11,17	100,00
Sulawesi Selatan	23,27	60,42	16,31	100,00
Sulawesi Tenggara	31,24	64,65	4,12	100,00
Gorontalo	19,96	65,20	14,83	100,00
Sulawesi Barat	35,63	62,58	1,79	100,00
Maluku	4,17	72,94	22,89	100,00
Maluku Utara	12,93	69,14	17,93	100,00
Papua Barat	8,64	57,45	33,91	100,00
Papua	11,87	64,01	24,12	100,00
Indonesia	51,10	42,47	6,43	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel 1.3.1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin KRT, 2018

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	93,39	97,87	93,33	97,45	93,35	97,58
Sumatera Utara	89,61	94,75	86,39	93,01	88,13	93,92
Sumatera Barat	89,49	94,99	83,31	95,39	86,09	95,21
Riau	94,02	97,49	93,29	97,46	93,63	97,47
Jambi	95,89	97,09	91,48	98,58	93,04	98,12
Sumatera Selatan	88,62	96,27	91,60	96,82	90,25	96,63
Bengkulu	94,05	98,24	93,92	98,39	93,97	98,35
Lampung	94,10	98,12	97,52	98,98	96,38	98,74
Kepulauan Bangka Belitung	97,12	99,32	94,04	99,15	95,93	99,24
Kepulauan Riau	87,54	97,15	94,08	97,18	88,50	97,16
DKI Jakarta	89,77	94,55	-	-	89,77	94,55
Jawa Barat	87,39	93,67	82,58	92,18	86,08	93,26
Jawa Tengah	91,95	97,31	90,64	98,14	91,36	97,73
DI Yogyakarta	95,80	98,60	93,60	99,41	95,34	98,82
Jawa Timur	91,94	97,42	90,52	97,93	91,26	97,66
Banten	95,50	97,85	89,74	93,95	93,65	96,76
Bali	86,22	97,41	68,42	95,83	81,26	96,88
Nusa Tenggara Barat	88,43	95,82	89,11	97,51	88,79	96,74
Nusa Tenggara Timur	84,87	92,54	86,58	91,69	86,15	91,89
Kalimantan Barat	97,26	98,51	93,09	97,49	94,76	97,81
Kalimantan Tengah	94,01	97,71	92,06	97,21	92,92	97,40
Kalimantan Selatan	89,75	95,47	90,84	97,22	90,33	96,41
Kalimantan Timur	95,93	98,43	92,67	98,19	94,97	98,35
Kalimantan Utara	90,06	95,31	93,24	97,45	91,05	96,20
Sulawesi Utara	81,91	91,21	85,80	91,76	83,43	91,50
Sulawesi Tengah	85,74	95,75	91,31	96,76	89,13	96,49
Sulawesi Selatan	93,39	96,22	93,57	97,69	93,50	97,10
Sulawesi Tenggara	83,32	95,05	91,31	97,32	88,10	96,46
Gorontalo	85,70	91,99	86,89	93,12	86,28	92,70
Sulawesi Barat	87,06	95,06	90,64	96,42	89,58	96,12
Maluku	84,56	91,30	77,61	88,24	81,28	89,51
Maluku Utara	85,05	95,67	95,52	97,12	91,17	96,71
Papua Barat	88,46	91,42	85,24	90,57	86,69	90,91
Papua	85,18	91,86	54,73	58,72	63,61	67,12
Indonesia	90,48	95,85	89,13	95,56	89,90	95,72

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel I.3.2. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset Transportasi* menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin KRT, 2018

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	69,13	91,59	58,27	87,63	61,54	88,88
Sumatera Utara	62,12	86,86	44,39	79,35	53,96	83,27
Sumatera Barat	61,71	88,59	51,51	85,85	56,10	87,06
Riau	77,07	93,44	67,69	92,13	72,06	92,65
Jambi	74,68	91,20	63,04	92,11	67,15	91,83
Sumatera Selatan	59,41	85,97	56,92	87,56	58,05	87,01
Bengkulu	67,35	92,31	52,35	86,17	58,16	88,09
Lampung	57,37	88,53	60,35	89,41	59,36	89,17
Kepulauan Bangka Belitung	76,28	94,53	67,19	95,44	72,76	94,96
Kepulauan Riau	71,39	93,80	68,01	89,62	70,89	93,22
DKI Jakarta	59,60	85,84	-	-	59,60	85,84
Jawa Barat	50,57	79,26	30,30	67,23	45,04	75,96
Jawa Tengah	59,24	86,40	50,15	83,04	55,12	84,72
DI Yogyakarta	71,04	92,04	49,08	84,31	66,45	89,89
Jawa Timur	64,39	89,72	52,26	86,44	58,62	88,15
Banten	68,82	89,82	45,40	70,40	61,32	84,40
Bali	72,88	94,61	41,93	87,71	64,25	92,29
Nusa Tenggara Barat	43,32	77,34	36,65	71,03	39,82	73,92
Nusa Tenggara Timur	39,54	75,48	19,88	41,49	24,80	49,44
Kalimantan Barat	79,12	93,28	61,86	87,21	68,77	89,15
Kalimantan Tengah	75,92	93,65	53,53	87,37	63,38	89,70
Kalimantan Selatan	63,86	90,27	55,42	90,78	59,37	90,54
Kalimantan Timur	73,34	93,43	62,84	91,18	70,24	92,68
Kalimantan Utara	63,55	86,59	65,17	88,92	64,05	87,56
Sulawesi Utara	37,26	67,67	30,96	62,28	34,80	64,89
Sulawesi Tengah	65,23	88,86	53,11	80,16	57,85	82,49
Sulawesi Selatan	61,54	86,95	47,62	80,77	53,33	83,25
Sulawesi Tenggara	44,89	84,90	43,92	81,08	44,31	82,52
Gorontalo	42,62	72,15	34,81	66,09	38,80	68,36
Sulawesi Barat	59,53	82,36	45,87	76,31	49,90	77,67
Maluku	30,57	63,92	24,09	51,49	27,51	56,65
Maluku Utara	50,78	80,54	31,80	60,45	39,68	66,10
Papua Barat	52,61	75,33	45,90	71,46	48,92	72,98
Papua	51,15	78,32	20,55	26,92	29,47	39,95
Indonesia	59,54	85,68	47,36	79,51	54,27	82,86

Keterangan: *)Memiliki aset sepeda motor/perahu/perahu motor/mobil

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel 1.3.3. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset Rumah Tangga* menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin KRT, 2018

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	66,87	81,94	45,49	56,40	51,92	64,46
Sumatera Utara	68,82	72,44	28,20	40,17	50,14	57,00
Sumatera Barat	53,69	73,55	41,63	51,03	47,05	60,94
Riau	70,52	80,58	50,53	60,02	59,83	68,17
Jambi	72,56	79,32	43,86	58,08	54,01	64,60
Sumatera Selatan	66,71	79,29	33,33	47,28	48,47	58,33
Bengkulu	69,05	81,34	33,82	53,05	47,48	61,90
Lampung	60,33	73,51	32,80	43,97	41,96	52,01
Kepulauan Bangka Belitung	84,56	88,82	67,47	79,38	77,95	84,33
Kepulauan Riau	70,85	82,61	47,25	47,27	67,38	77,73
DKI Jakarta	76,51	80,68	-	-	76,51	80,68
Jawa Barat	58,95	69,23	30,55	44,08	51,20	62,33
Jawa Tengah	52,99	63,84	32,59	42,10	43,74	52,96
DI Yogyakarta	44,38	65,79	25,52	41,23	40,43	58,99
Jawa Timur	58,83	68,97	30,48	42,89	45,35	56,44
Banten	74,62	84,47	38,19	49,38	62,95	74,68
Bali	56,17	71,32	23,96	42,22	47,18	61,55
Nusa Tenggara Barat	30,97	45,49	21,17	31,19	25,84	37,73
Nusa Tenggara Timur	44,39	51,33	7,08	10,21	16,42	19,82
Kalimantan Barat	77,60	83,46	34,34	41,50	51,66	54,88
Kalimantan Tengah	71,96	77,64	33,41	52,81	50,37	62,01
Kalimantan Selatan	64,18	77,31	40,25	56,35	51,47	66,07
Kalimantan Timur	83,11	88,65	47,82	63,14	72,70	80,09
Kalimantan Utara	73,21	82,40	45,77	66,85	64,64	75,94
Sulawesi Utara	57,47	70,91	43,15	54,17	51,88	62,28
Sulawesi Tengah	56,58	70,49	37,01	39,04	44,66	47,46
Sulawesi Selatan	76,75	81,97	56,62	62,04	64,88	70,04
Sulawesi Tenggara	47,61	71,86	33,40	47,36	39,10	56,60
Gorontalo	53,81	63,16	38,90	43,75	46,52	51,01
Sulawesi Barat	60,16	64,06	29,68	33,65	38,68	40,46
Maluku	58,52	69,14	27,73	29,77	43,99	46,09
Maluku Utara	52,59	68,77	21,42	26,82	34,36	38,61
Papua Barat	67,43	69,06	30,39	39,65	47,05	51,23
Papua	55,92	66,70	9,40	10,54	22,97	24,77
Indonesia	61,09	71,99	33,24	44,31	49,05	59,35

Keterangan: *) Memiliki aset tabung gas/kulkas/AC/water heater

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel I.3.4. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset Rumah Tangga Lainnya* menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin KRT, 2018

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	83,88	83,83	87,52	85,51	86,42	84,98
Sumatera Utara	71,96	67,62	78,14	72,59	74,80	70,00
Sumatera Barat	67,47	67,09	67,10	67,38	67,27	67,25
Riau	74,19	72,41	82,92	78,93	78,86	76,34
Jambi	84,58	77,10	84,65	86,22	84,62	83,42
Sumatera Selatan	71,39	75,08	81,26	83,50	76,78	80,59
Bengkulu	82,01	79,40	89,07	90,94	86,33	87,33
Lampung	85,00	82,46	94,96	93,60	91,64	90,57
Kepulauan Bangka Belitung	81,19	85,22	79,85	89,33	80,67	87,17
Kepulauan Riau	72,07	68,45	67,79	71,08	71,44	68,81
DKI Jakarta	67,68	64,14	-	-	67,68	64,14
Jawa Barat	72,25	71,97	74,90	74,80	72,98	72,74
Jawa Tengah	82,16	83,00	84,83	89,44	83,37	86,22
DI Yogyakarta	85,25	85,86	89,18	92,55	86,07	87,71
Jawa Timur	77,70	79,48	82,52	84,72	79,99	82,00
Banten	79,02	78,94	84,84	83,28	80,88	80,15
Bali	58,52	69,92	56,76	70,36	58,03	70,07
Nusa Tenggara Barat	80,30	84,47	84,46	91,42	82,48	88,24
Nusa Tenggara Timur	76,66	79,22	84,61	86,97	82,62	85,16
Kalimantan Barat	86,79	86,54	85,91	86,53	86,26	86,54
Kalimantan Tengah	80,38	81,22	83,99	81,13	82,40	81,17
Kalimantan Selatan	68,27	74,98	82,03	83,53	75,58	79,56
Kalimantan Timur	81,54	81,60	82,10	83,76	81,70	82,33
Kalimantan Utara	76,01	76,55	86,52	88,43	79,29	81,48
Sulawesi Utara	69,15	74,42	74,17	77,61	71,11	76,06
Sulawesi Tengah	70,52	78,70	86,69	87,18	80,37	84,91
Sulawesi Selatan	79,50	80,46	87,38	89,71	84,15	86,00
Sulawesi Tenggara	75,51	81,24	87,90	89,80	82,93	86,57
Gorontalo	69,08	74,70	77,12	81,69	73,01	79,08
Sulawesi Barat	67,32	76,00	85,89	87,02	80,41	84,55
Maluku	71,53	78,20	68,50	76,25	70,10	77,06
Maluku Utara	78,26	87,37	94,72	94,47	87,89	92,47
Papua Barat	75,97	73,03	76,29	74,28	76,14	73,79
Papua	73,85	68,62	46,69	51,41	54,61	55,77
Indonesia	75,78	75,73	82,05	83,06	78,49	79,08

Keterangan: *) Memiliki aset telepon rumah/komputer/laptop/emas/televisi/tanah

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel I.4. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin KRT, 2018

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	14,43	29,29	11,35	21,00	12,28	23,61
Sumatera Utara	12,22	20,77	12,60	23,62	12,39	22,14
Sumatera Barat	17,70	35,45	18,35	33,32	18,05	34,26
Riau	16,67	22,74	15,92	29,98	16,27	27,11
Jambi	16,61	26,48	13,67	25,85	14,71	26,04
Sumatera Selatan	15,61	23,71	9,13	20,57	12,07	21,65
Bengkulu	25,61	43,18	13,38	33,20	18,12	36,32
Lampung	13,32	28,02	13,99	24,96	13,77	25,79
Kepulauan Bangka Belitung	13,24	22,61	3,99	15,29	9,66	19,13
Kepulauan Riau	16,42	23,34	17,79	17,10	16,62	22,48
DKI Jakarta	10,09	14,40	-	-	10,09	14,40
Jawa Barat	18,74	32,26	16,20	33,43	18,05	32,58
Jawa Tengah	26,12	40,52	25,26	40,68	25,73	40,60
DI Yogyakarta	21,13	37,84	37,27	52,25	24,50	41,83
Jawa Timur	22,81	35,47	17,88	33,17	20,47	34,36
Banten	16,77	24,02	11,05	20,19	14,93	22,95
Bali	29,14	43,88	28,72	54,41	29,02	47,42
Nusa Tenggara Barat	21,49	35,09	26,88	36,56	24,31	35,89
Nusa Tenggara Timur	22,00	33,53	21,20	32,00	21,40	32,36
Kalimantan Barat	15,69	24,20	11,66	22,43	13,27	22,99
Kalimantan Tengah	17,44	28,69	9,93	19,80	13,23	23,09
Kalimantan Selatan	13,02	26,46	7,84	19,84	10,27	22,90
Kalimantan Timur	14,30	29,38	13,64	23,25	14,11	27,32
Kalimantan Utara	18,37	28,17	10,49	24,34	15,91	26,58
Sulawesi Utara	20,91	28,97	23,22	32,85	21,81	30,97
Sulawesi Tengah	21,77	34,29	20,78	26,18	21,16	28,35
Sulawesi Selatan	23,43	34,68	14,79	28,85	18,34	31,19
Sulawesi Tenggara	18,80	39,82	14,23	29,25	16,06	33,24
Gorontalo	24,43	37,96	18,61	36,96	21,59	37,34
Sulawesi Barat	27,11	39,06	14,77	23,90	18,41	27,29
Maluku	14,02	20,88	5,81	12,61	10,14	16,04
Maluku Utara	16,25	25,85	9,42	12,23	12,26	16,06
Papua Barat	17,89	27,08	10,74	18,85	13,96	22,09
Papua	20,39	22,53	5,21	7,22	9,64	11,10
Indonesia	19,43	30,95	17,39	30,07	18,55	30,55

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel 1.5. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin KRT, 2018

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	19,56	24,58	8,22	10,03	11,63	14,62
Sumatera Utara	18,05	14,42	7,89	8,84	13,37	11,75
Sumatera Barat	15,44	20,48	7,33	8,51	10,98	13,77
Riau	10,76	17,77	7,37	8,41	8,95	12,12
Jambi	17,78	11,88	6,20	6,04	10,30	7,83
Sumatera Selatan	18,49	16,87	4,26	5,05	10,71	9,14
Bengkulu	23,18	18,82	5,23	6,69	12,19	10,48
Lampung	11,54	9,09	3,41	4,47	6,12	5,72
Kepulauan Bangka Belitung	14,98	17,99	2,21	6,97	10,04	12,75
Kepulauan Riau	23,69	15,96	5,97	8,76	21,08	14,97
DKI Jakarta	13,63	12,14	-	-	13,63	12,14
Jawa Barat	15,53	15,61	6,24	5,25	12,99	12,77
Jawa Tengah	15,31	15,56	6,44	5,93	11,29	10,74
DI Yogyakarta	16,44	19,08	5,05	10,79	14,06	16,79
Jawa Timur	14,53	13,32	4,20	4,63	9,62	9,15
Banten	16,05	17,16	7,87	5,57	13,43	13,93
Bali	13,61	13,37	3,22	7,29	10,71	11,33
Nusa Tenggara Barat	7,10	13,80	1,99	5,01	4,42	9,03
Nusa Tenggara Timur	23,02	26,13	4,22	5,77	8,93	10,53
Kalimantan Barat	12,16	12,41	4,26	6,24	7,42	8,20
Kalimantan Tengah	21,15	20,70	11,16	16,90	15,55	18,31
Kalimantan Selatan	17,58	21,84	7,00	13,04	11,96	17,12
Kalimantan Timur	12,89	21,07	5,34	9,85	10,66	17,30
Kalimantan Utara	18,72	19,37	5,70	15,38	14,65	17,71
Sulawesi Utara	13,79	12,93	10,49	8,36	12,50	10,57
Sulawesi Tengah	14,69	24,17	11,38	7,17	12,67	11,72
Sulawesi Selatan	20,80	16,27	8,11	7,20	13,32	10,84
Sulawesi Tenggara	16,89	27,38	7,25	7,34	11,12	14,90
Gorontalo	13,28	15,53	4,10	5,63	8,79	9,33
Sulawesi Barat	13,18	16,65	7,63	7,25	9,27	9,36
Maluku	15,81	12,27	13,21	5,50	14,58	8,31
Maluku Utara	27,60	25,69	7,50	6,43	15,85	11,85
Papua Barat	29,92	12,93	14,41	14,02	21,39	13,59
Papua	22,54	20,89	3,82	4,78	9,28	8,86
Indonesia	15,48	15,58	5,95	6,47	11,36	11,42

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018

Tabel 1.6. Persentase Rumah Tangga yang Menjadi Korban Kejahatan Sejak 1 Januari-31 Desember 2017 menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin KRT

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	4,23	4,51	2,18	3,34	2,79	3,71
Sumatera Utara	4,09	4,78	4,03	3,04	4,06	3,95
Sumatera Barat	4,19	4,49	2,74	3,37	3,39	3,86
Riau	8,76	5,62	4,78	3,70	6,63	4,46
Jambi	3,12	4,25	3,40	3,79	3,30	3,93
Sumatera Selatan	10,69	6,49	3,51	4,69	6,77	5,31
Bengkulu	7,93	6,37	3,92	3,55	5,48	4,43
Lampung	9,59	4,35	6,21	4,94	7,34	4,78
Kepulauan Bangka Belitung	2,22	3,64	1,28	2,50	1,85	3,10
Kepulauan Riau	3,89	4,69	0,36	2,22	3,37	4,35
DKI Jakarta	2,71	3,84	-	-	2,71	3,84
Jawa Barat	3,95	4,61	2,38	3,75	3,52	4,38
Jawa Tengah	4,21	3,79	3,37	2,87	3,82	3,33
DI Yogyakarta	6,59	4,81	4,21	1,58	6,09	3,92
Jawa Timur	3,80	3,77	2,33	2,99	3,10	3,39
Banten	4,07	3,92	2,32	2,26	3,51	3,45
Bali	3,10	2,51	0,35	1,28	2,33	2,10
Nusa Tenggara Barat	9,82	6,78	5,70	6,33	7,66	6,53
Nusa Tenggara Timur	5,56	5,62	4,07	4,43	4,44	4,71
Kalimantan Barat	5,71	5,72	1,49	1,73	3,18	3,00
Kalimantan Tengah	2,56	3,25	1,23	2,27	1,81	2,64
Kalimantan Selatan	3,47	2,93	2,09	3,45	2,74	3,21
Kalimantan Timur	3,79	5,85	2,32	3,23	3,36	4,97
Kalimantan Utara	11,26	9,63	4,56	4,79	9,16	7,62
Sulawesi Utara	4,66	4,33	4,17	4,27	4,47	4,30
Sulawesi Tengah	12,52	8,41	4,54	4,97	7,66	5,89
Sulawesi Selatan	7,19	7,62	3,73	3,11	5,15	4,92
Sulawesi Tenggara	8,04	7,07	5,53	5,27	6,54	5,95
Gorontalo	7,39	4,60	4,88	3,32	6,17	3,80
Sulawesi Barat	1,68	4,55	1,80	2,61	1,76	3,04
Maluku	4,85	6,54	3,22	4,48	4,08	5,34
Maluku Utara	9,15	8,86	3,48	4,22	5,84	5,52
Papua Barat	10,36	8,52	6,66	5,59	8,33	6,74
Papua	5,00	7,84	3,93	3,90	4,24	4,90
Indonesia	4,61	4,50	3,22	3,46	4,01	4,03

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018



ISSN 2089-3515



9 772089 351007 >